



PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT



RPJMD 2021 - 2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 - 2026



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

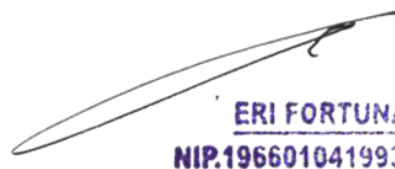
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 24 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

WIDYA PUTRA

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/48/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk jangka waktu lima tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GRAFIK		x
DAFTAR GAMBAR		xii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4	Maksud dan Tujuan	I-5
1.5	Sistematika Penyusunan	I-5
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2	Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.3	Demografi	II-20
2.1.4	Potensi Sumber Daya	II-23
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-39
2.2.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-39
2.2.2	PDRB Per kapita	II-45
2.2.3	Kemiskinan	II-46
2.2.4	Indeks Gini	II-48
2.2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-49
2.2.6	Angka Kriminalitas	II-51
2.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-52
2.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-53
2.2.9	Rasio Penduduk Yang Bekerja	II-54
2.2.10	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	II-54
2.2.11	Penguatan Cadangan Pangan	II-55
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-55
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-55
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-77
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-92
2.3.4	Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan	II-101
2.3.5	Fokus Layanan Penunjang Urusan pemerintahan	II-104
2.3.6	Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-107
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-109
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-109
2.4.2	Fokus Fasilitas wilayah/Infrastruktur	II-111
2.4.3	Fokus Iklim Investasi	II-112
2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia	II-112
2.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II-113
2.6	Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2041	II-115

2.6.1	Hasil Telaahan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2041	II-115
2.6.2	Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2041	II-128
2.7	Standar Pelayanan Minimal	II-134
2.8	Evaluasi capaian target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota	II-140
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Daerah	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2	Analisis Kesehatan Fiskal Daerah	III-21
3.1.3	Neraca Daerah	III-27
3.2	Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu	III-29
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-29
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-32
3.3	Kerangka Pendanaan	III-33
3.3.1	Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah Tahun 2020	III-33
3.3.2	Strategi dan Kebijakan Pendapatan Daerah	III-35
3.3.3	Kebijakan Belanja Daerah	III-35
3.3.4	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-36
3.3.5	Kebijakan Penganggaran	III-36
3.3.6	Kebijakan Barang Milik Daerah	III-36
3.3.7	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-37
3.3.8	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-39
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2	Isu Strategis	IV-6
4.2.1	Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah	IV-6
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-8
4.2.3	Isu Strategis Propinsi	IV-8
4.2.4	Isu Strategis KLHS	IV-8
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-1
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-5
5.4	Agenda Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan Daerah	V-11
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-3
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-16
6.4	Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan	VI-23
6.5	Sinkronisasi Agenda Prioritas Daerah Dengan Agenda Prioritas Nasional	VI-23
6.6	Penyelarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026	VI-25
6.7	Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap IV (2005-2025)	VI-26
6.8	Penelaahan Terhadap RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga	VI-28
6.9	Kebijakan Pembangunan Lintas Pemerintah Daerah	VI-30
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1

	7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VII-3
BAB VIII		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX		PENUTUP	IX- 1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-4
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-4
Tabel 2.3	Nama Sungai, Lokasi dan Panjangnya	II-5
Tabel 2.4	Kategori Curah Hujan Menurut BMKG	II-6
Tabel 2.5	Kualitas Air Hujan Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bulan Maret Tahun 2018	II-8
Tabel 2.6	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-9
Tabel 2.7	Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-10
Tabel 2.8	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-12
Tabel 2.9	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-13
Tabel 2.10	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-14
Tabel 2.11	Sebaran Lahan Sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-15
Tabel 2.12	Program pembangunan diarahkan kepada Penanganan Kesehatan dan prioritas lain, Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial	II-19
Tabel 2.13	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2020	II-21
Tabel 2.14	Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2020	II-21
Tabel 2.15	Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020	II-22
Tabel 2.16	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2.17	Panen, Produksi dan Provitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-24
Tabel 2.18	Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-25
Tabel 2.19	Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020	II-26
Tabel 2.20	Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-26
Tabel 2.21	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2020	II-27
Tabel 2.22	Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-28
Tabel 2.23	Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-28
Tabel 2.24	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-29
Tabel 2.25	Perkembangan Populasi Komoditi Peternakan per Kecamatan Tahun 2016-2020	II-30
Tabel 2.26	Indeks Daya Dukung per Kecamatan	II-32
Tabel 2.27	Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2.28	Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-34
Tabel 2.29	Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-35
Tabel 2.30	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.31	Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 - 2020	II-35
Tabel 2.32	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.33	Tingkat Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-37
Tabel 2.34	Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-38
Tabel 2.35	Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah)	II-39
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (%)	II-40
Tabel 2.37	Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah)	II-40

Tabel 2.38	Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (%)	II-41
Tabel 2.39	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Lima Puluh Kota Periode 2016-2020	II-43
Tabel 2.40	Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19	II-44
Tabel 2.41	PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	II-45
Tabel 2.42	PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)	II-46
Tabel 2.43	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-46
Tabel 2.44	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional (ribu jiwa) Tahun 2016 – 2020	II-47
Tabel 2.45	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-47
Tabel 2.46	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-48
Tabel 2.47	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-48
Tabel 2.48	Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.49	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016–2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-49
Tabel 2.50	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016–2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional	II-49
Tabel 2.51	Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.52	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.53	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.54	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.55	Angka Kriminalitas Per 100.000 penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020	II-52
Tabel 2.56	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.57	Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.58	Penduduk Usia Kerja (PUK) Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.59	Angkatan Kerja (AK) Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.60	Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar, Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.61	Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.62	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 -2020	II-54
Tabel 2.63	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.64	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.65	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.66	Produktivitas kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.67	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.68	Jumlah Sekolah Menurut Jenis nya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2.69	Persentase Penduduk usia 5 tahun ke atas menurut tingkat partisipasi Sekolah dan jenis kelamin Tahun 2019	II-61
Tabel 2.70	Jumlah Penduduk Berusia 25 Tahun ke atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-62

	Tahun 2020	
Tabel 2.71	Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-62
Tabel 2.72	Persentase Balita <i>Wasting</i> (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) dan Balita <i>Underweight</i> (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.73	Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.74	Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020	II-65
Tabel 2.75	Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2016-2020	II-67
Tabel 2.76	Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.77	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota	II-72
Tabel 2.78	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022	II-73
Tabel 2.79	Data Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021	II-74
Tabel 2.80	Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.81	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana	II-75
Tabel 2.82	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	II-75
Tabel 2.83	Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-76
Tabel 2.84	Persentase PMKS Yang Diberdayakan Dan Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.85	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.86	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.87	Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.88	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.89	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompeten Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.90	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.91	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.92	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.93	Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.94	Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2020	II-80
Tabel 2.95	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.96	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.97	Pencapaian Pemenuhan Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-82
Tabel 2.98	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.99	Perkembangan Indikator Rasio Izin Trayek dan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.100	Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-85
Tabel 2.101	Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.102	Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada	II-87

	Di kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	
Tabel 2.103	Jumlah investasi PMDN/ PMA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2019	II-88
Tabel 2.104	Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-89
Tabel 2.105	Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.106	Perkembangan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.107	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.108	Penyelenggaraan Perpustakaan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.109	Penyelenggaraan Kearsipan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.110	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	II-92
Tabel 2.111	Perbandingan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.112	Produktivitas dan Kebutuhan Jagung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.113	Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-94
Tabel 2.114	Pemakaian Benih Unggul Yang Bersertifikat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.115	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020	II-95
Tabel 2.116	Pembangunan Infrastruktur Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020	II-96
Tabel 2.117	Jaringan Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2020	II-96
Tabel 2.118	Rekapitulasi Jumlah Bantuan Alsintan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai Tahun 2020	II-96
Tabel 2.119	Indeks Daya Dukung Lahan Peternakan per Kecamatan	II-97
Tabel 2.120	Data Penyediaan Bibit Sapi (Frozen Semen)	II-97
Tabel 2.121	Kasus Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi Dan Kerbau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.122	Pasar Rakyat Berdasarkan Status Lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-98
Tabel 2.123	Pasar Rakyat Berdasarkan Status Keaktifan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-99
Tabel 2.124	Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-99
Tabel 2.125	Rekapitulasi Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019	II-100
Tabel 2.126	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.127	Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020	II-101
Tabel 2.128	Komponen Penilaian SAKIP	II-101
Tabel 2.129	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.130	Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.131	Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.132	Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.133	APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020	II-104
Tabel 2.134	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020	II-104
Tabel 2.135	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2. 136	Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan) Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020 (%)	II-105
Tabel 2.137	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.138	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-106

Tabel 2.139	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-107
Tabel 2.140	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	II-108
Tabel 2.141	Penilaian Indikator Kinerja pada Inspektorat tahun 2016-2020.	II-108
Tabel 2.142	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016 -2020	II- 109
Tabel 2.143	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.144	Distribusi PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020	II-110
Tabel 2.145	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020	II-111
Tabel 2.146	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.147	Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020	II-113
Tabel 2.148	Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Lima Puluh Kota	II-114
Tabel 2.149	Hasil Telahaan Strukurur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2041	II-115
Tabel 2.150	Hasil Telahaan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2024	II- 128
Tabel 2.151	Target dan Capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020	II-134
Tabel 2.152	Dukungan Personil Untuk Mencapai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020	II-138
Tabel 2.153	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021	II-141
Tabel 3. 1	Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-2
Tabel 3. 2	Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-7
Tabel 3. 3	Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-7
Tabel 3. 4	Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-8
Tabel 3. 5	Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-10
Tabel 3. 6	Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-12
Tabel 3. 7	Realisasi Pendapatan Daerah Sesuai Klasifikasi PP 12/2019 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-13
Tabel 3. 8	Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Sesuai PP 12 Tahun 2019Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-13
Tabel 3. 9	Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-18
Tabel 3. 10	Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3. 11	Realisasi Belanja Daerah Sesuai PP No. 58 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-19
Tabel 3. 12	Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-22
Tabel 3. 13	Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2016-2020 (%)	III-22
Tabel 3. 14	Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-23
Tabel 3. 15	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III-24
Tabel 3. 16	Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%)	III-25
Tabel 3. 17	Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III-25
Tabel 3. 18	Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III-26

Tabel 3. 19	Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-27
Tabel 3. 20	Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-29
Tabel 3. 21	Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-30
Tabel 3. 22	Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)	III-30
Tabel 3. 23	Perbandingan Belanja Pemenuhan Aparatur Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)	III-31
Tabel 3. 24	Realisasi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, serta Earmark Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)	III-31
Tabel 3. 25	Defisit Riil Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)	III-32
Tabel 3. 26	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)	III-33
Tabel 3. 27	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-33
Tabel 3. 28	Penurunan Pendapatan Daerah Tahun 2020 (Rp juta)	III-34
Tabel 3. 29	Penurunan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp juta)	III-35
Tabel 3. 30	Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)	III-38
Tabel 3. 31	Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)	III-38
Tabel 3. 32	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)	III-39
Tabel 3. 33	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 (Rp juta)	III-39
Tabel 4. 1	Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tingkat Capaian TPB	IV-9
Tabel 5.1	Keselaran Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026	V-3
Tabel 5.2	Keselaran Visi dan Misi RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026	V-3
Tabel 5.3	Keselaran Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2021-2026	V-4
Tabel 5.4	Visi,Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	V-7
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan	VI-3
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif	VI-17
Tabel 6.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	VI-25
Tabel 6.5	Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025	VI-26
Tabel 7.1	Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (dalam Rp. Juta)	VII-1
Tabel 7.2	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)	VII-1
Tabel 7.3	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 (Rp juta)	VII-2
Tabel 7.4	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (dalam Jutaan Rupiah)	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Indikator Tujuan Kabupaten Lima Puluh Kota	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Indikator Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota	VIII-2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	VIII-4

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-1
Grafik 2.2	Curah Hujan Rata - Rata Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-6
Grafik 2.3	Curah Hujan Rata - Rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-7
Grafik 2.4	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018	II-7
Grafik 2.5	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-9
Grafik 2.6	Indeks Komposit Jasa Ekosistem Pengaturan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-10
Grafik 2.7	Indeks Jasa Ekosistem Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota	II-11
Grafik 2.8	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Kabupaten Lima Puluh Kota	II-12
Grafik 2.9	Tingkat Kepadatan Penduduk dengan Luas Masing-masing Kecamatan Tahun 2020	II-22
Grafik 2.10	Priramida Penduduk Kaupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-23
Grafik 2.11	Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	II-29
Grafik 2.12	Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-33
Grafik 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lima Puluh Kota dan propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II-42
Grafik 2.14	Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19	II-44
Grafik 2.15	APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-56
Grafik 2.16	Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-56
Grafik 2.17	Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-57
Grafik 2.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-57
Grafik 2.19	Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-58
Grafik 2.20	Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-58
Grafik 2.21	Angka Partisipasi Murni (APM) 16 – 18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-59
Grafik 2.22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-59
Grafik 2.23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-60
Grafik 2.24	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II-60
Grafik 2.25	Persentase Balita <i>Stunting</i> di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007, 2013, 2018	II-64
Grafik 2.26	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-65
Grafik 2.27	Angka Kematian Balita dari Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-66
Grafik 2.28	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-66
Grafik 2.29	Persentase bayi yang diimunisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020	II-68
Grafik 2.30	Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2020	II-69
Grafik 2.31	Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2020	II-69
Grafik 2.32	Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik 2016 – 2020	II-70

Grafi 2.33	Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 – 2020	II-71
Grafik 2.34	Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 – 2020	II-71
Grafik 2.35	Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2019	II-73
Grafik 2.36	Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-86
Grafik 2.37	Perkembangan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Manca Negara Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020	II-93
Grafik 2.38	Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II -107
Grafik 2.39	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020	II-112
Grafik 2.40	Proporsi Capaian TPB Kabupaten Lima Puluh Kota	II-114
Grafik3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-4
Grafik 3.2	Kontribusi Sumber Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-4
Grafik3.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-6
Grafik 3.4	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli DaerahPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-6
Grafik 3.5	Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-9
Grafik 3.6	Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-10
Grafik 3.7	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-11
Grafik 3.8	Kontribusi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-12
Grafik 3.9	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-15
Grafik 3.10	Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-16
Grafik 3.11	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-17
Grafik 3.12	Proporsi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-17
Grafik 3.13	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-18
Grafik 3.14	Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)	III-19
Grafik 3.15	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III-21

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-4
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-3
Gambar 2.3	Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-3
Gambar 2.4	Peta Jaringan Perairan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-5
Gambar 2.5	Peta Sebaran Kasus Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota(sampai dengan pertengahan tahun 2021)	II-18
Gambar 5.1	Hubungan Agenda Prioritas dengan Misi Kepala Daerah	V-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh aturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RTRW, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sehubungan dengan berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021, maka melekat kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun berikutnya sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang untuk kepala daerah terpilih. Hal tersebut merupakan perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun kedepan adalah RPJMD tahun 2021-2026 yang merupakan tahapan ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

Dengan dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, maka Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan Nakasri resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2021-2024. Salah satu target oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah dilantik adalah menyusun RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 meskipun perodesasi masa pemerintahan adalah 2021-2024. Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: 1.) Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana

program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2.) Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. 3.) Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4.) Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Disamping itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 juga dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders*/pemangku kepentingan.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disebut dengan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan pemerintah daerah juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam proses perencanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Untuk pencapaian tujuan pembangunan, maka RPJMD menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program strategis atau *money follow program*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

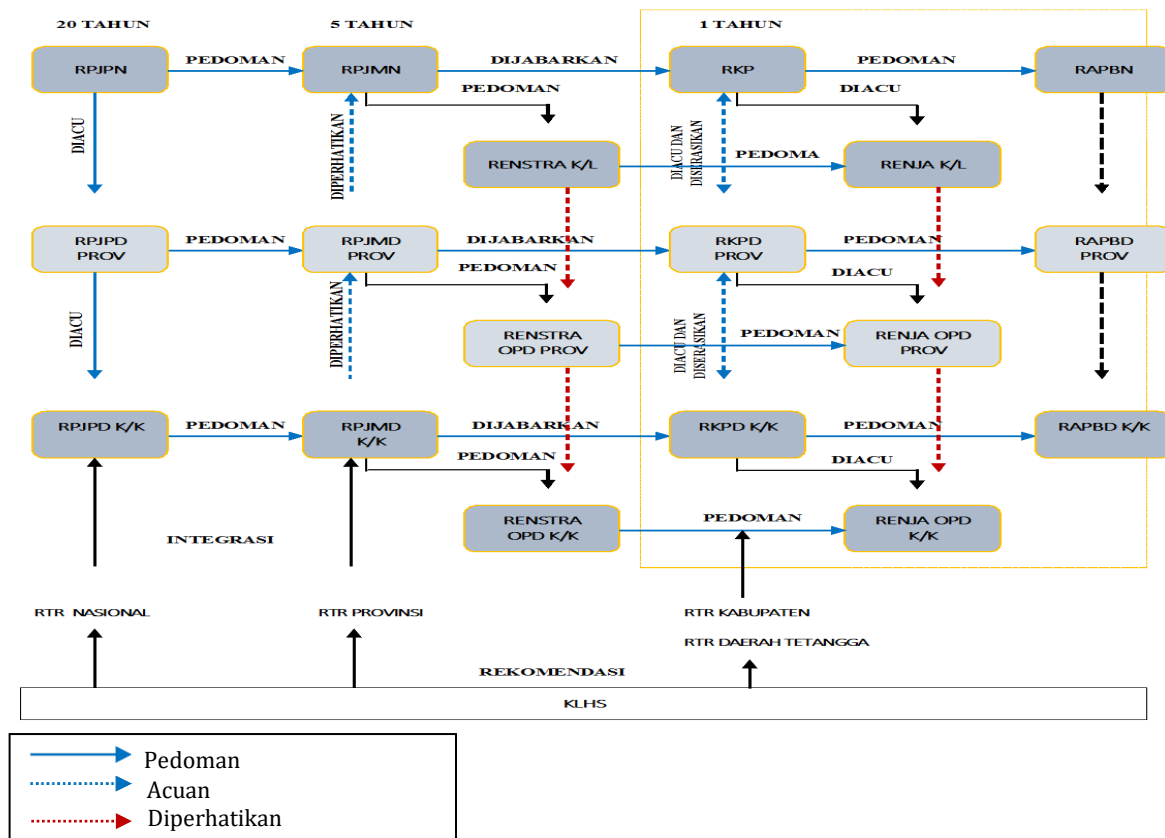
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota dan memperhatikan RPJMD kabupaten/kota berbatasan. RPJMD yang disusun ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk Menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Hubungan dokumen RPJMD kabupaten dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Hubungan antar dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005–2025, keselarasan dengan RPJM Nasional Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, memperhatikan RPJMD kabupaten/kota tetangga (Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh) serta mempertimbangkan asas pembangunan keberlanjutan.
3. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 telah mempedomani tujuan, arah kebijakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
4. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

6. Dokumen perencanaan lain yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD adalah laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan periode 2021-2026 yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang terkoordinasi, sinergis dan partisipatif serta sekaligus sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih.
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan yang terarah dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026.
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, serta penyusunan KUA dan PPAS serta Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan sinergi dengan perencanaan nasional dan provinsi.
5. Sebagai bahan dasar dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan baik 5 tahunan maupun perencanaan tahunan daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, tujuan pembangunan berkelanjutan, standar pelayanan minimal sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 3.354,3 KM². Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu).

Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Agam dan Kab. Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau.
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh

Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik di sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa menjadi *supplier* bagi Provinsi tetangga. Luas areal lahan pertanian sawah dan perkebunan yang mencapai lebih dari 86.000 Ha dan akses yang tidak sulit dijangkau, maka sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi.

Grafik 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (KM²)



Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

Grafik diatas menggambarkan luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara administratif, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi ke dalam 13 Kecamatan, 79 Nagari, dan 429 Jorong. Berdasarkan grafik diatas, kecamatan yang paling luas terdapat di Kecamatan Kapur IX dengan luas 723,36 Km² atau 21,57% dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 61,68 Km² atau 1,84% dari luas kabupaten.

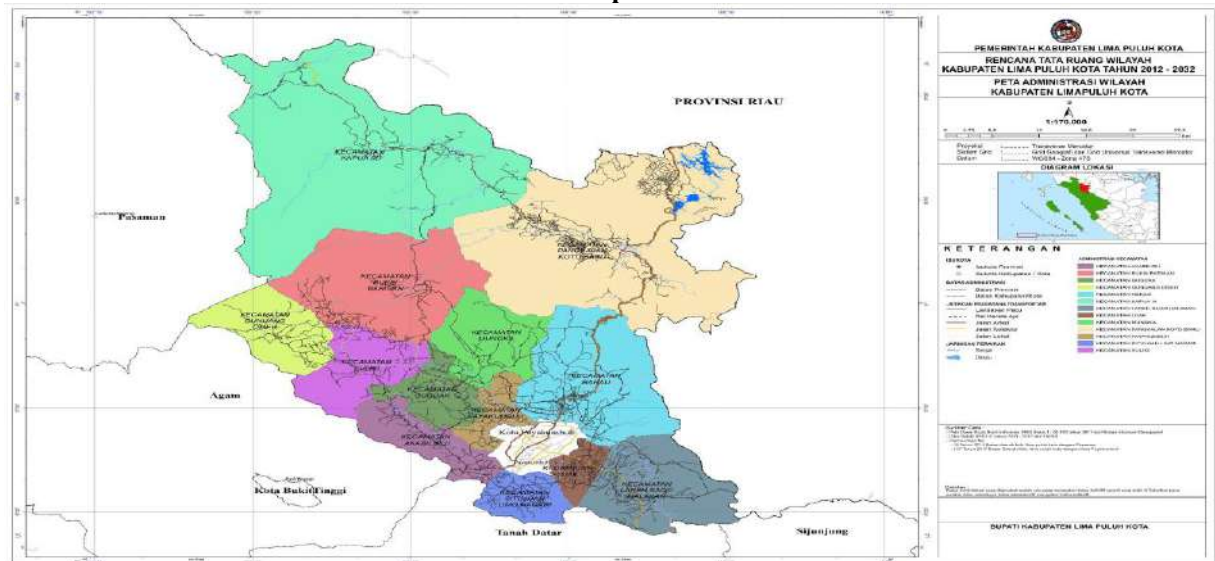
Dari sisi ketinggian dari puncak laut, Kecamatan Gunung Omeh merupakan Kecamatan paling tinggi dari puncak laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl. Letak dan batas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada peta di samping ini.

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara titik koordinat 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS serta antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT, Kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Di daerah ini terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m).

Topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. Representasi grafis tersebut sekurang-kurangnya dapat berupa bentuk kemiringan lereng (kelerengan) dan ketinggian daratan.

11 - 2

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota



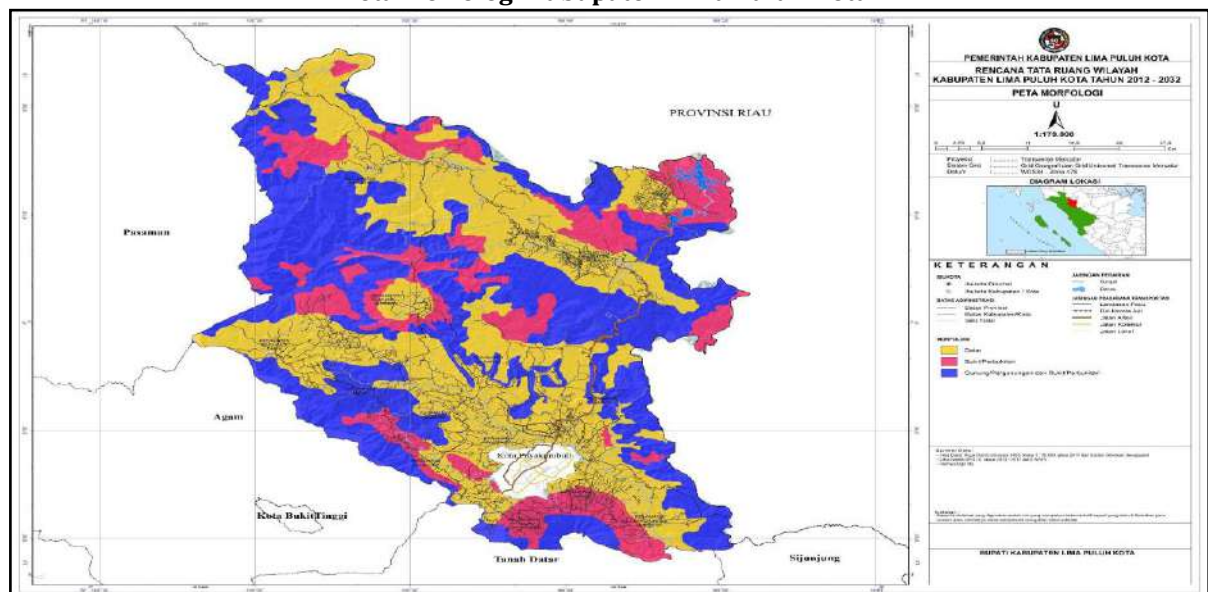
Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota

d. Geologi (Struktur dan Karakteristik serta Potensi Kandungan)

Ditinjau dari segi geomorfologi regional daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “Bukit Barisan” dan merupakan bagian dari “Volcanic Arc” tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk kedalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur Faulting system (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sesar normal Kelok Sembilan – Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batubalang, Sesar Normal Bukik Bulek Banjar Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanansan, Sesar Geser Taratak, dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (joint) yaitu berupa Kekar Silang (Shear Joint) dan kekar Tarik (Tension Joint). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada busur magmatik Sunda–Banda berumur Miosen-Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara pulau Sumatera, terus ke pulau jawa sampai ke sebelah timur Nusa Tenggara. Gambaran geologi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada peta dibawah ini :

Gambar 2.3
Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota

Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukit Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah, Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

Berdasarkan klasifikasi lereng dan luas menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi lereng, yaitu 0-5%, 5-15%, 15-40% dan >40%, Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	Klasifikasi Lereng dan Luas (Ha)				Jumlah
		0-5 %	5-15%	15-40%	> 40%	
1	Gunuang Omeh	2.661,18	3.600,42	3.913,50	5.478,90	15.654,00
2	Suliki	2.327,98	3.149,62	3.423,50	4.792,90	13.694,00
3	Bukik Barisan	5.001,40	6.766,60	7.355,00	10.297,00	29.420,00
4	Guguak	2.442,60	1.805,40	2.655,00	3.717,00	10.620,00
5	Mungka	1.423,92	1.926,48	2.094,00	2.931,60	8.376,00
6	Payakumbuh	3.121,45	2.846,75	2.287,81	1.690,99	9.947,00
7	Akabiluru	1.508,16	2.262,24	2.356,50	3.299,10	9.426,00
8	Luak	1.048,56	1.418,64	1.542,00	2.158,80	6.168,00
9	Situjuh Limo Nagari	1.186,88	1.780,32	1.854,50	2.596,30	7.418,00
10	Lareh Sago Halaban	6.317,60	9.476,40	9.871,25	13.819,75	39.485,00
11	Harau	7.085,60	9.586,40	10.420,00	14.588,00	41.680,00
12	Pangkalan Koto Baru	11.392,96	17.089,44	17.801,50	24.922,10	71.206,00
13	Kapur IX	11.573,76	17.360,64	18.084,00	25.317,60	72.336,00
Jumlah		57.092,05	79.069,35	83.658,56	115.610,04	335.430,00

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

e. Hidrologi

Hidrologi berasal dari kata hydro (air) dan logia (ilmu), yang bermakna cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal /permukaan (freatik). Salah 1 (satu) air tanah dangkal/ permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini dilihat dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai yang berada di kabupaten Lima Puluh Kota adalah termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Wilayah sungai lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi.

Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, Indragiri, Rokan, dan Masang Kiri. Luas ke-empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kampar Kanan	194.604,7
2	Indragiri	127.282,97
3	Rokan	366,75
4	Masang Kiri	5.002,55

Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahat yang bermuara ke DAS Kampar dan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat dan Sub DAS

Sinamar terdiri atas: a.) Sub DAS Mahat antara lain Batang Mahat, Batang Kampar, Batang Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenang; b.) Sub DAS Sinamar antara lain Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang.

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2021 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai dengan lokasi dan panjang yang berbeda. Nama sungai, lokasi dan Panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Nama Sungai, Lokasi, dan Panjangnya

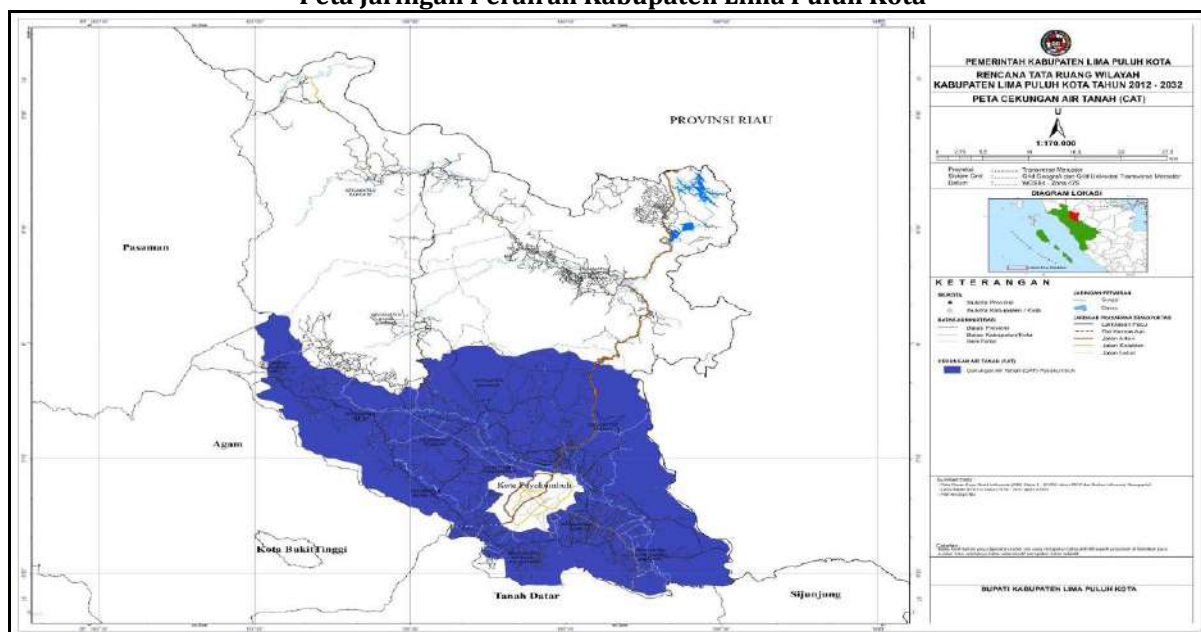
No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batang Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuh Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Mangilang	Pangkalan Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenang	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar*	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

*) Sumber Kepres Nomor 12 Tahun 2012

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

Terhadap jaringan perairan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota secara peta dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.4
Peta Jaringan Perairan Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota

f. Klimatologi (tipe, curah hujan, suhu, kelembaban)

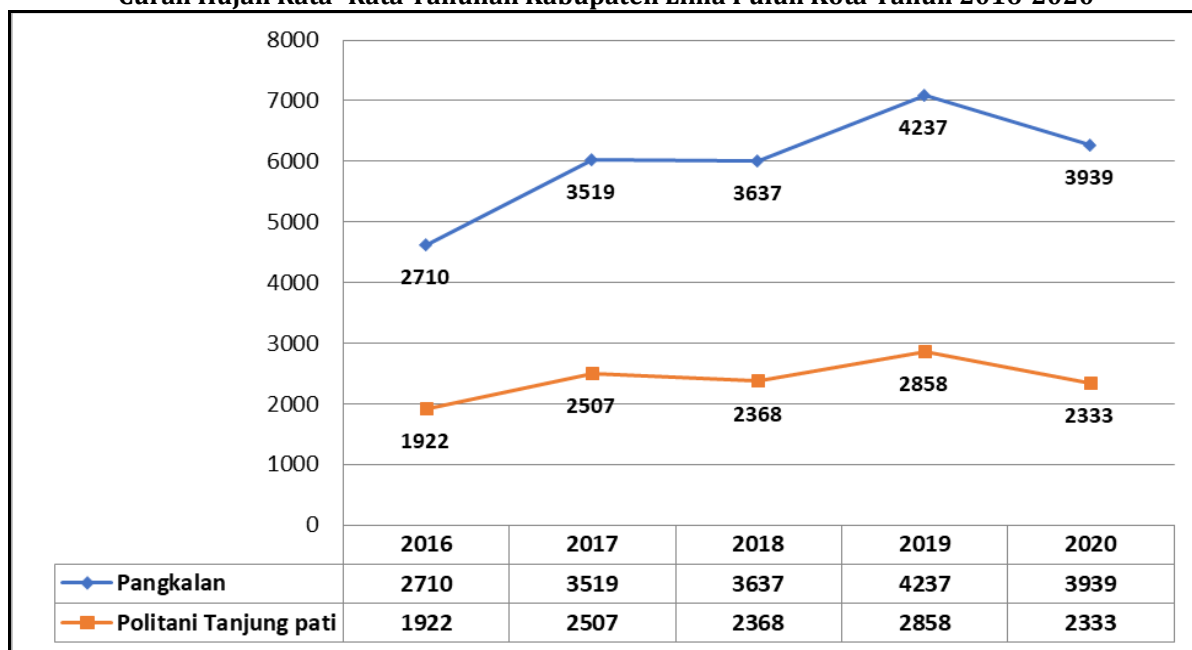
Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Kategori curah hujan menurut BMKG adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kategori Curah Hujan Menurut BMKG

No	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	0 – 100	Rendah
2	100-300	Menengah
3	300-500	Tinggi
4	> 500	Sangat Tinggi

Data curah hujan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman di Pangkalan dan Politani Tanjung Pati, berkisar antara 1.922 mm sampai 4237 mm. Karena wilayahnya yang luas, curah hujan di setiap daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sama. Untuk daerah pangkalan sekitarnya, curah hujan tahunan paling banyak terjadi di tahun 2019 dengan rata-rata curah 4.237 mm. Untuk daerah Tanjung Pati dan sekitarnya curah hujan tahunan paling banyak juga terjadi pada tahun 2019 dengan rata-rata curah 2.858 mm. Hal ini tergambar dari grafik berikut ini.

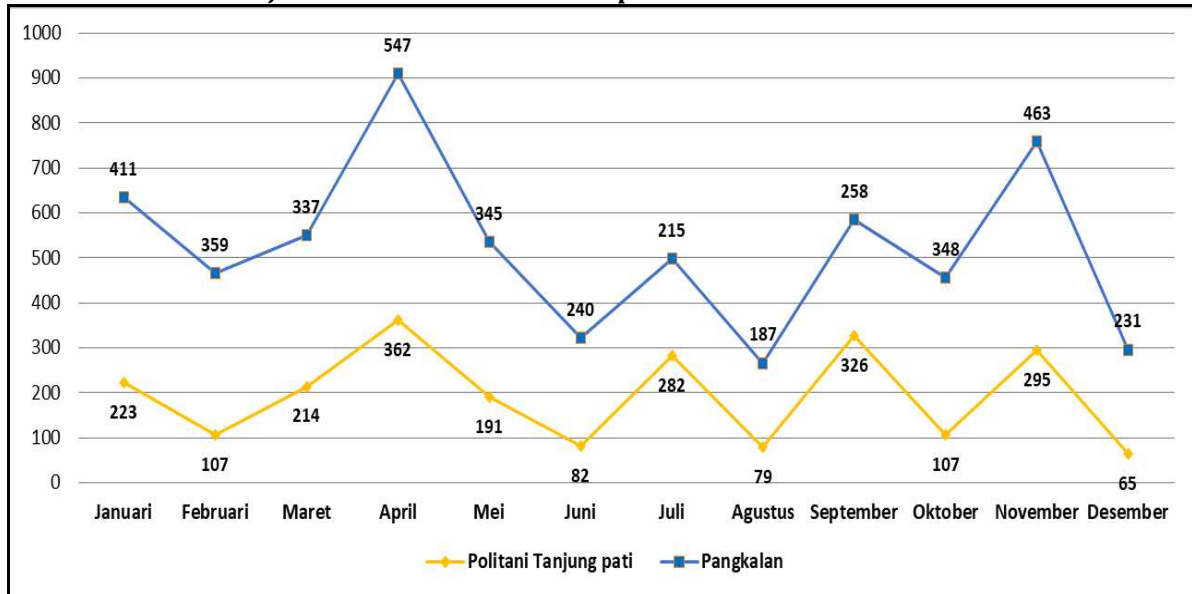
Grafik 2.2
Curah Hujan Rata- Rata Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020



Sumber BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2021

Data curah hujan bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman di Pangkalan dan Politani Tanjung Pati, dapat dilihat bahwa termasuk dalam kategori rendah sampai sangat tinggi. Puncak tertinggi curah hujan rata-rata bulanan terjadi pada bulan April (547 mm di Pangkalan dan 362 mm di Politani Tanjung Pati) dan terendah pada bulan Juli (187 mm di Pangkalan dan 79 mm di Politani Tanjung Pati) dan bulan Desember (65 mm di Politani Tanjung Pati). Hal ini tergambar dari grafik berikut ini.

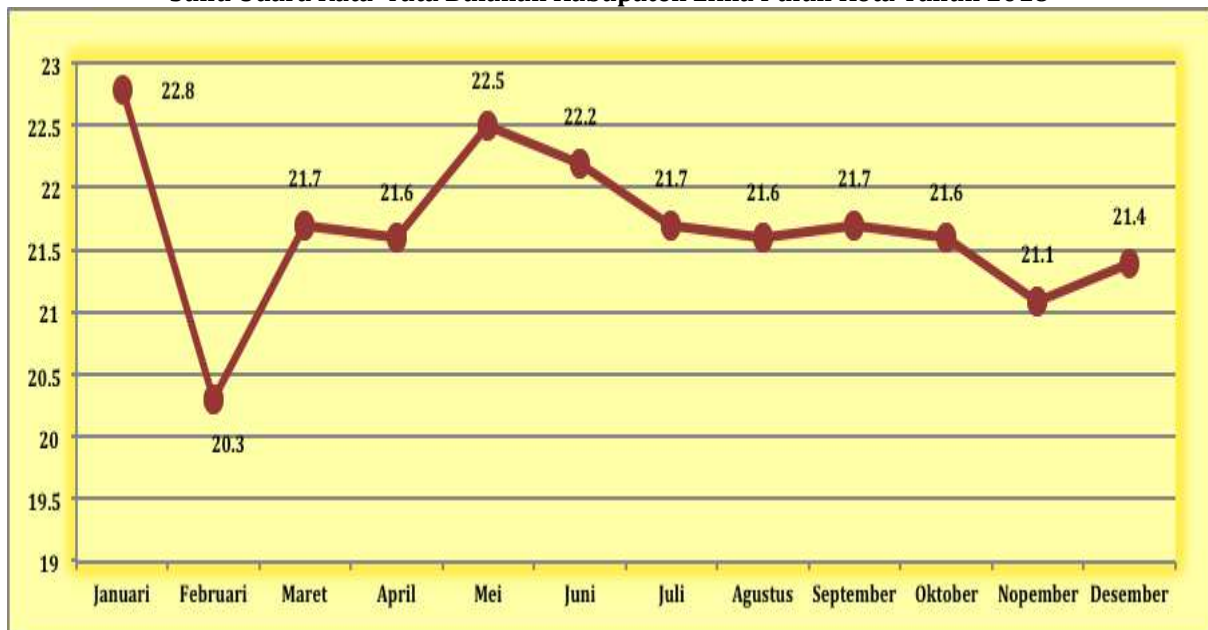
Grafik 2.3
Curah Hujan Rata- Rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020



Sumber BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2021

Suhu udara rata-rata bulanan di Kamus besar bahasa Indonesia adalah rata- rata suhu yang diamati selama perbulan secara terus menerus. Suhu udara di Kabupaten Lima Puluh Kota terakhir dapat dilihat pada tahun 2018. Suhu udara berkisar antara 20,3 sampai 22,8 °C. Hal tersebut terjadi pada bulan Januari (22,8 °C) dan Bulan Februari (20,3 °C), sebagaimana yang terlihat dari grafik berikut :

Grafik 2.4
Suhu Udara Rata- rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018



Sumber BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2018

Hujan merupakan masukan dalam sistem hidrologi. Ditinjau dari kualitasnya dibandingkan dengan air alami lainnya. Air hujan merupakan air paling murni dalam arti komposisinya hampir mendekati H₂O. Namun demikian, pada hakekatnya tidak pernah dijumpai air hujan yang betul-betul hanya tersusun atas H₂O saja, berbagai faktor lingkungan telah mempengaruhi kualitas air hujan tersebut. Pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar, baik yang berupa buangan gas maupun emisi dari kendaraan bermotor. Serta buangan gas dari pabrik telah mempengaruhi kualitas air hujan yang jatuh di daerah kota. Air hujan di daerah pantai juga terpengaruh oleh laut dengan segala aktifitas dan komposisi airnya. Di daerah gunung api yang masih aktif air hujan juga dipengaruhi oleh aktifitas gunung api tersebut. Masing-masing lingkungan tersebut di atas mempengaruhi komposisi air hujan.

Tabel 2.5
Kualitas Air Hujan Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bulan Maret Tahun 2018

Waktu Pemantauan (Bulan)	PH	DHL	SO ₄	NO ₃	Cr	NH ₄	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
Maret	6,62	6,2	1,63	1,8	<0,020	<0,294	<0,020	<0,020	<0,020

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota, 2018

Kualitas air hujan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Maret Tahun 2018, sebagaimana tabel di atas dapat dilihat dari segi PH (6,62), masih sangat baik dan cenderung netral seperti air permukaan (6,1-7). Dilihat dari Daya Hantar Listriknya (DHL) sebesar 6,2 mengindikasikan bahwa air hujan tersebut tidak hanya terdiri dari H₂O saja, tetapi juga terdapat garam- garam yang terlarut yang dapat terionisasi. Komposisi garam- garam tersebut dapat dilihat dari tabel di atas.

g. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Konsep jasa ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga secara total terdapat 23 klasifikasi jasa ekosistem sebagai berikut.

- a) Jasa penyediaan : (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
- b) Jasa Pengaturan : (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah
- c) Budaya : (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keragaman, (21) Pendidikan
- d) Pendukung : (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah.

Berdasarkan definisi dan pengelompokan di atas, terdapat kesamaan pengertian antara jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengertian jasa penyediaan, budaya mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan yang memiliki kesamaan dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Namun untuk kepentingan operasional, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem, menganut asumsi berikut :

- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).
- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan)

Teknik operasional dari konsep diatas dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Dari peta yang dihasilkan tersebut dapat diketahui luasan, distribusi, dan indek daya dukung jasa lingkungan.

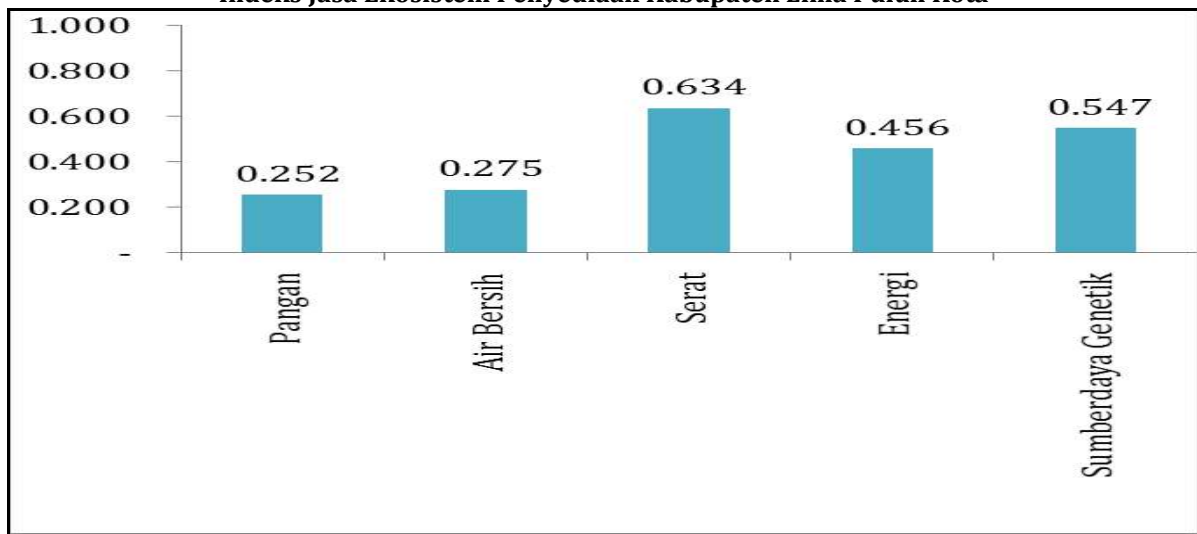
a) Jasa Ekosistem Penyediaan

Indek komposit dihitung dari rata-rata indeks jasa ekosistem. Nilai indeks jasa ekosistem berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati satu berarti semakin tinggi indeks komposit yang berarti semakin besar pula daya dukung ekosistem dalam menyediakan jasa ekosistem tersebut.

Ada dua jenis jasa ekosistem yang indeks kompositnya diatas 0,5, yaitu jasa penyediaan serat dan sumberdaya genetik, yang merupakan indeks tertinggi diantara jenis jasa penyediaan lainnya. Sementara indeks komposit terendah adalah jasa penyediaan pangan. Secara keseluruhan, indeks komposit jasa

ekosistem penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 0.433 yang mengindikasikan bahwa daya dukung wilayah dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan jasa penyediaan adalah lebih mendekati nol, dibanding mendekati angka 1. Indeks jasa ekosistem penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.5
Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

Jika diamati sebaran menurut kecamatan, seperti dalam tabel indeks jasa ekosistem penyediaan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar hampir merata. Semua kecamatan memiliki daya dukung dalam menyediakan setiap jasa ekosistem penyediaan, namun kemampuannya berbeda. Indeks jasa ekosistem penyediaan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	KECAMATAN	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan				
		Pangan	Air Bersih	Serat	Energi	Sumberdaya Genetik
1	Akabiluru	0.379	0.357	0.592	0.532	0.547
2	Bukit Barisan	0.204	0.236	0.609	0.439	0.532
3	Guguak	0.466	0.415	0.529	0.521	0.491
4	Gunuang Omeh	0.212	0.247	0.645	0.432	0.544
5	Harau	0.307	0.315	0.618	0.468	0.549
6	Kapur IX	0.201	0.255	0.683	0.473	0.592
7	Lareh Sago Halaban	0.298	0.273	0.651	0.439	0.525
8	Luak	0.416	0.250	0.569	0.328	0.390
9	Mungka	0.295	0.291	0.540	0.396	0.462
10	Pangkalan Koto Baru	0.203	0.256	0.643	0.443	0.555
11	Payakumbuh	0.547	0.484	0.531	0.541	0.496
12	Situjuah Limo Nagari	0.347	0.245	0.629	0.385	0.456
13	Suliki	0.267	0.285	0.632	0.502	0.553
	Kabupaten Limapuluh Kota	0.252	0.275	0.634	0.456	0.547

Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

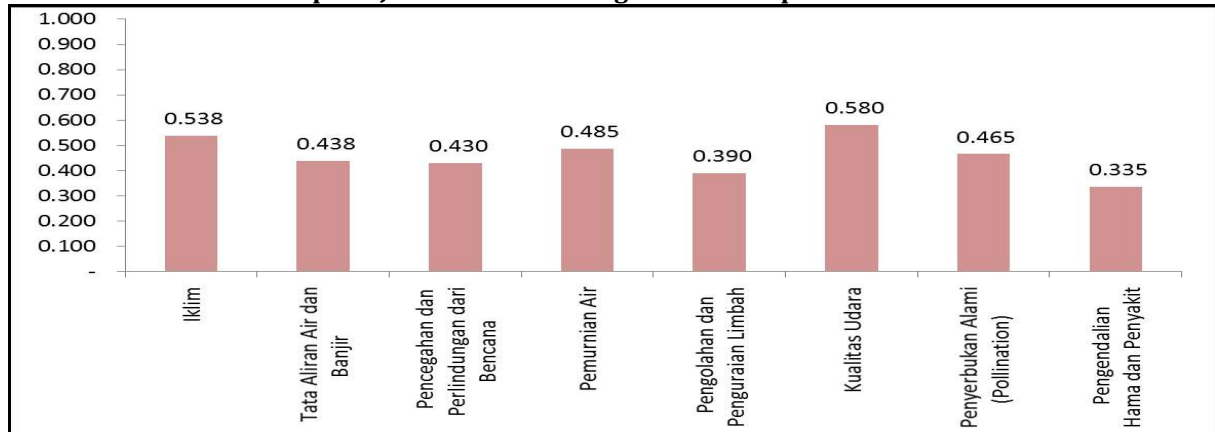
Sementara itu, indeks jasa penyediaan energi tertinggi berada di kecamatan Kapur IX, diikuti oleh kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Suliki. Wilayah ketiga kecamatan ini memiliki ekoregion dominan pergunungan lipatan dan perbukitan dengan tutupan lahan dominan berupa hutan lahan kering sekunder dan perkebunan campuran. Sebagaimana diuraikan diatas, jenis ekoregion dan tutupan lahan yang sedemikian memberikan jasa ekosistem yang tinggi pada penyediaan energi.

Terakhir, Indeks jasa penyediaan sumberdaya genetik secara umum adalah 0.547 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagaimana terlihat dalam tabel dan gambar diatas, indeks tersebut berbeda menurut kecamatan. Indeks tertinggi berada di kecamatan Kapur IX, 0.592, dan terendah di kecamatan Luak, 0.390.

b) Jasa Ekosistem Pengaturan

Indeks komposit jasa ekosistem pengaturan Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat pada grafik dibawah ini. Ada 2 jenis jasa ekosistem yang indeks kompositnya diatas 0,5. Pertama adalah jasa pengaturan kualitas udara yang indeks kompositnya adalah tertinggi yaitu sebesar 0,580. Kedua adalah indeks komposit dari jasa pengaturan iklim sebesar 0,538. Sementara itu, indeks komposit terendah adalah pada jasa pengendalian hama dan penyakit sebesar 0,335.

Grafik 2.6
Indeks Komposit Jasa Ekosistem Pengaturan Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

Bila diamati menurut kecamatan, indeks jasa ekosistem pengaturan hampir homogen untuk semua kecamatan dan semua jenis jasa ekosistem berkisar antara 0,299-0,597. Indeks jasa ekosistem pengaturan iklim tertinggi berada di kecamatan Kapur IX dan terendah di kecamatan Mungka. Tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder berkontribusi besar atas tingginya indeks komposit di kecamatan Kapur IX atas jasa pengaturan iklim. Sementara di kecamatan Mungka, sebagian besar tutupan lahan sudah berupa pertanian intensif seperti ladang dan sawah irigasi, sehingga indeks komposit atas jasa pengaturan iklim menjadi rendah. Indeks jasa ekosistem pengaturan menurut kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	KECAMATAN	Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan								Indeks Komposit
		Iklim	Tata Aliran Air dan Banjir	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	Pemurnian Air	Pengolahan dan Penguraian Limbah	Kualitas Udara	Penyerbukan Alami (Pollination)	Pengendalian Hama dan Penyakit	
1	Akabiluru	0.520	0.494	0.491	0.522	0.463	0.559	0.517	0.368	0.492
2	Bukit Barisan	0.549	0.387	0.377	0.465	0.349	0.579	0.447	0.289	0.430
3	Guguak	0.446	0.462	0.463	0.451	0.455	0.446	0.467	0.379	0.446
4	Gunuang Omeh	0.532	0.419	0.396	0.496	0.367	0.587	0.447	0.325	0.446
5	Harau	0.509	0.451	0.435	0.478	0.427	0.547	0.455	0.349	0.456
6	Kapur IX	0.591	0.432	0.424	0.505	0.382	0.643	0.491	0.342	0.476
7	Lareh Sago Halaban	0.558	0.503	0.502	0.472	0.405	0.588	0.469	0.326	0.478
8	Luak	0.487	0.577	0.579	0.405	0.396	0.486	0.395	0.258	0.448
9	Mungka	0.417	0.372	0.381	0.423	0.365	0.447	0.407	0.310	0.390
10	Pangkalan Koto Baru	0.527	0.419	0.407	0.499	0.374	0.587	0.454	0.339	0.451
11	Payakumbuh	0.386	0.513	0.508	0.472	0.523	0.403	0.461	0.444	0.464
12	Situjuah Limo Nagari	0.560	0.619	0.628	0.446	0.413	0.572	0.467	0.299	0.500
13	Suliki	0.572	0.426	0.419	0.480	0.381	0.597	0.488	0.323	0.461
	Kabupaten Limapuluh Kota	0.538	0.438	0.430	0.485	0.390	0.580	0.465	0.335	0.458

Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

Indeks jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkisar antara 0,372 di kecamatan Mungka hingga 0,619 di kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan kecamatan yang sebagian besar wilayahnya memiliki ekoregion kerucut dan lereng gunungapi serta kaki gunungapi dan tutupan lahan hutan lahan kering sekunder, sawah irigasi dan ladang, tentunya menyediakan daya dukung yang tinggi pada jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir. Mata air

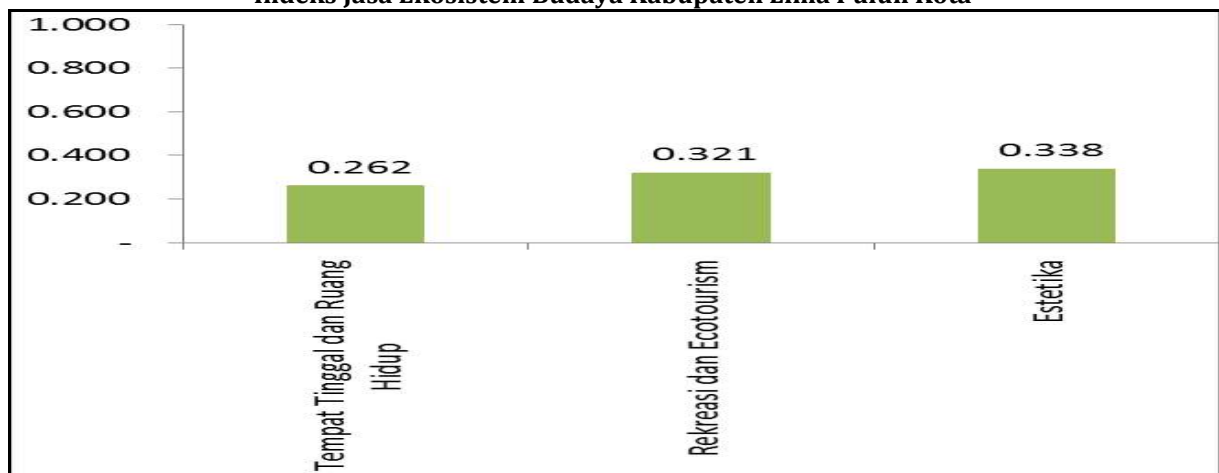
dan anak-anak sungai terbetuk dan tersusun sedemikian rupa dari kerucut dan lereng gunungapi yang mengalirkan air ke wilayah dibawahnya dan menjadi sumber air bagi kegiatan pertanian dan domestik.

Indeks jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana juga memperlihatkan kecenderungan yang sama, yakni tersebar hampir merata pada semua kecamatan. Namun indeks tertinggi berada di kecamatan Situjuh Limo nagari, 0,628, dan terendah di kecamatan Bukit Barisan, 0,377. Indeks jasa pemurnian air tertinggi ditemui di kecamatan Akabiluru yang mencapai 0,522.

c) Jasa Ekosistem Budaya

Indeks komposit jasa ekosistem budaya Kabupaten Lima Puluh Kota adalah relatif rendah. Indeks komposit untuk jenis jasa ekosistem budaya tidak ada yang lebih besar dari 0,5. Indeks komposit terendah adalah pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup, yakni 0,273. Ekoregion yang dominan adalah kerucut dan lereng gunungapi, kaki gunung api, pergunungan lipatan dan perbukitan lipatan adalah ekoregion yang memberikan daya dukung yang relatif rendah pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup. Keadaan ini semakin tertekan saat mana tutupan lahannya diubah oleh kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Grafik 2.7
Indeks Jasa Ekosistem Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

Indeks jasa ekosistem Estetika adalah yang tertinggi yaitu 0.338 dari jasa ekosistem budaya kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ekoregion dominan pegunungan lipatan, perbukitan lipatan dan lembah antar perbukitan dan pegunungan lipatan memberikan kontur alam yang indah dan menarik untuk estetika.

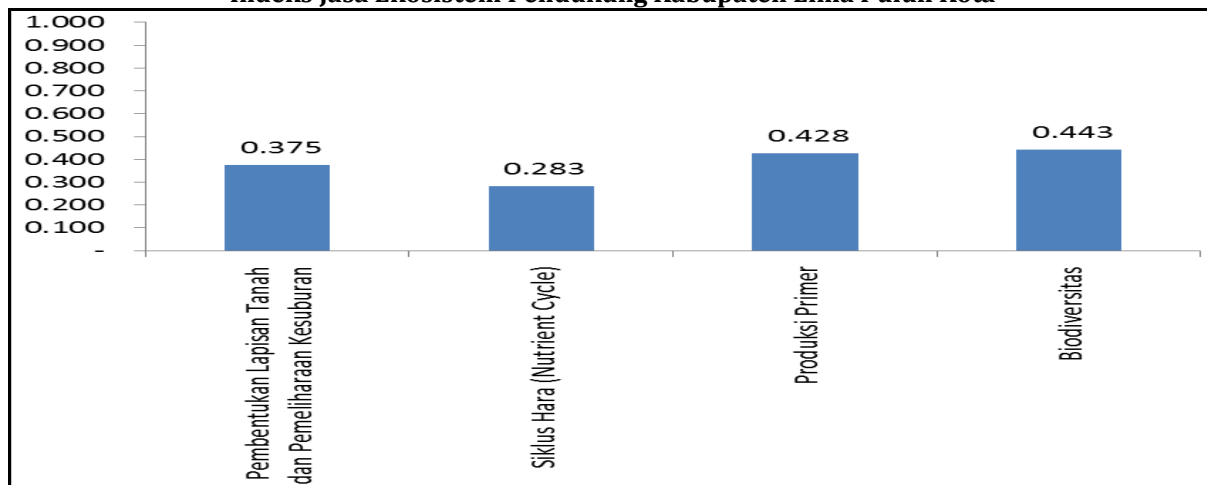
Sesuai dengan sebaran ekoregion dan tutupan lahan diatas, maka sebaran indeks jasa ekosistem menurut kecamatan juga pada prinsipnya mengikuti sebaran ekoregion dan tutupan lahan dimaksud. Kecamatan-kecamatan yang indeks jasa ekosistem budaya yang tinggi adalah kecamatan yang memiliki ekoregion dan tutupan lahan yang tinggi pula indeks jasa eksosistemnya. Kecamatan Situjuh limo Nagari, Bukit Barisan, Gunung Omeh, Kapur IX, Luak, dan Pangkalan Koto Baru adalah kecamatan terendah indeks tempat tinggal dan ruang hidup. Pada kecamatan kecamatan tersebut, ekoregionnya sebagian besar adalah lipatan pegunungan, lipatan perbukitan dengan tutupan lahan dominan adalah hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder. Ekoregion dan tutupan lahan yang demikian memberikan daya dukung dan daya tampung yang masuk kategori sangat rendah dan rendah pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup. Kenyataan demikian menyebabkan indeks jasa tempat tinggal dan ruang hidup yang rendah pada ketiga kecamatan tersebut.

Sementara itu, kecamatan yang memiliki indeks jasa tempat tinggal dan ruang hidup yang tinggi adalah di kecamatan Guguak, Harau, Mungka dan Payakumbuh. Ke empat kecamatan ini memiliki ekoregion dataran Aluvial, dataran fluvio Gunung Api. Sementara tutupan lahan dominan adalah lahan pertanian dan perkebunan seperti sawah irigasi, ladang, dan perkebunan campuran. Ekoregion dan tutupan lahan yang demikian tentunya memberikan daya dukung dan daya tampung yang tinggi pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup, sehingga tinggi pula indeks jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup.

d) Komposit Jasa Ekosistem Pendukung

Diantara empat jasa ekosistem pendukung di kabupaten Lima Puluh Kota, jasa biodiversitas memiliki indeks komposit tertinggi, yakni 0,443, dibanding dengan tiga jenis jasa ekosistem lainnya. Jasa ekosistem produksi primer berada di urutan kedua, 0,428, dan yang terendah adalah indeks komposit jasa siklus hara, 0,283 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.8
Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

Indeks jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, indeksinya relatif homogen menurut kecamatan, indeks terendah berada pada kecamatan Luak, 0,239, dan tertinggi pada kecamatan Payakumbuh, 0,383. Indeks jasa ekosistem siklus hara memiliki range yang lebih rendah dibanding indeks jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Indeks terendah untuk jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pembentukan kesuburan tanah ini adalah 0,312 di kecamatan Luak dan tertinggi 0,461 di kecamatan Payakumbuh.

Indeks jasa ekosistem produksi primer juga bervariasi menurut kecamatan. Indeks tertinggi adalah di kecamatan Payakumbuh, 0,471 dan terendah di kecamatan Mungka, 0,356. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa daya tampung jasa produksi primer sangat ditentukan oleh tutupan lahan, hutan lahan kering primer memberikan daya tampung yang sangat tinggi karena kemampuannya dalam proses fotosintesa yang menghasilkan oksigen. Tingginya indeks jasa ekosistem produksi pada kecamatan Payakumbuh disebabkan tutupan lahan sebagian besar kecamatan ini adalah hutan lahan kering primer dan sekunder yang menghasilkan banyak oksigen dari proses fotosintesisnya. Indeks jasa ekosistem pendukung menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	KECAMATAN	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung				Indeks Komposit
		Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	Siklus Hara (Nutrient Cycle)	Produksi Primer	Biodiversitas	
1	Akabiluru	0.413	0.327	0.463	0.454	0.414
2	Bukit Barisan	0.328	0.247	0.394	0.401	0.342
3	Guguak	0.399	0.340	0.436	0.371	0.387
4	Gunuang Omeh	0.359	0.267	0.418	0.433	0.369
5	Harau	0.402	0.297	0.444	0.429	0.393
6	Kapur IX	0.390	0.286	0.450	0.471	0.399
7	Lareh Sago Halaban	0.384	0.279	0.432	0.480	0.394
8	Luak	0.312	0.239	0.363	0.443	0.339
9	Mungka	0.323	0.275	0.356	0.354	0.327
10	Pangkalan Koto Baru	0.369	0.279	0.421	0.449	0.379
11	Payakumbuh	0.461	0.383	0.471	0.396	0.428
12	Situjuah Limo Nagari	0.358	0.257	0.413	0.538	0.392
71	Suliki	0.368	0.285	0.435	0.424	0.378
	Kabupaten Limapuluh Kota	0.375	0.283	0.428	0.443	0.382

Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

Indeks jasa siklus hara adalah terendah pada semua kecamatan pada jasa ekosistem pendukung. Namun bila dicermati besaran indeks pada setiap kecamatan didapati range yang tinggi antara indeks terendah dan tertinggi. Indeks terendah adalah di kecamatan Mungka dan tertinggi di kecamatan Payakumbuh. Jasa ekosistem biodiversitas adalah jasa lingkungan hidup dalam menopang kehidupan hayati yang beragam. Keragaman hayati ini merupakan jasa pendukung bagi terciptanya jasa ekosistem yang lain. Pada ekosistem yang keragaman hayati yang tinggi akan tinggi pula jasa penyediaan air bersih, jasa rekreasi dan ekoturisme dan jasa penyerbukan alami misalnya. Indeks jasa ekosistem biodiversitas yang tinggi di kecamatan Situjuh Limo Nagari disebabkan oleh ekoregionnya yang bervariasi dan tutupan lahannya yang dominan hutan lahan kering primer dan sekunder. Indeks jasa ekosistem yang tinggi juga memperlihatkan daya tampung yang tinggi pula dalam jasa biodiversitas ini.

Evaluasi dari 20 jasa ekosistem Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya 5 jasa ekosistem dengan kategori mencukupi, sedangkan 15 jasa ekosistem mempeunyai kategori tidak mencukupi, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020						
No	Nama Jasa Ekosistem	Persentase Luas DDDTLH			Ukuran DDDTLH	Status DDDTLH
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah		
JASA PENYEDIAAN						
1	Pangan	16,40	3,67	79,93	Buruk	Tidak Mencukupi
2	Air Bersih	6,47	9,46	84,07	Buruk	Tidak Mencukupi
3	Serat	80,04	14,00	5,96	Baik	Mencukupi
4	Bahan Bakar	53,34	21,43	25,23	Sedang	Tidak Mencukupi
5	SD Genetik	56,66	19,69	23,65	Sedang	Tidak Mencukupi
JASA PENGATURAN						
6	Iklim	69,73	10,34	19,94	Baik	Mencukupi
7	Tata Aliran Air dan Banjir	11,92	59,26	28,82	Buruk	Tidak Mencukupi
8	Perlindungan Bencana	18,36	61,70	19,94	Buruk	Tidak Mencukupi
9	Pemurnian Air	5,41	68,06	26,53	Buruk	Tidak Mencukupi
10	Penguraian Limbah	8,55	15,14	76,31	Buruk	Tidak Mencukupi
11	Kualitas Udara	62,20	20,46	17,34	Baik	Mencukupi
12	Penyerbukan Alami	53,89	30,45	15,66	Sedang	Tidak Mencukupi
13	Pengendalian Hama	13,62	63,81	22,58	Buruk	Tidak Mencukupi
JASA BUDAYA						
14	Tempat Tinggal	7,16	8,21	84,63	Buruk	Tidak Mencukupi
15	Rekreasi	9,29	60,32	30,40	Buruk	Tidak Mencukupi
16	Estetika (Alam)	7,89	48,14	43,98	Buruk	Tidak Mencukupi
JASA PENDUKUNG						
17	Pembentukan Tanah	65,11	13,15	21,74	Baik	Mencukupi
18	Siklus Hara	12,68	20,72	66,59	Buruk	Tidak Mencukupi
19	Produksi Primer	62,37	12,99	24,63	Baik	Mencukupi
20	Biodiversitas	58,96	20,99	20,05	Sedang	Tidak Mencukupi

Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

h. Penggunaan Lahan (kawasan budidaya dan kawasan lindung)

Penggunaan lahan secara garis besar dibedakan atas 4 jenis yaitu:

- hutan lindung
- hutan suaka alam dan wisata
- hutan produksi
- areal penggunaan lain

Sesuai rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana dan kawasan cagar budaya.

Areal penggunaan lain juga dibedakan atas lahan basah dan lahan kering. Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 adalah hutan lindung dengan luas 114.667 Ha (34,19%) dan

penggunaan lahan yang terkecil adalah lahan kering industri dengan luas 171 Ha (0,05%) diikuti oleh lahan basah rawa dengan luas 221 Ha (0,07%). Guna lahan untuk kegiatan perkebunan seluas 38.150 Ha merupakan luas lahan terbesar kedua. Dengan demikian dapat terlihat bahwa sebagian besar guna lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota masih merupakan guna lahan tidak terbangun. Luas lahan terlantar/ semak belukar di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tinggi yaitu 54.525 Ha atau 16,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.10
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan Lahan	2020	
		Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	114.667	34,19
2	Hutan Suaka Alam & Wisata	20.673	6,16
3	Hutan Produksi	36.465	10,87
	a. Hutan Produksi Tetap	4.962	1,48
	b. Hutan Produksi Terbatas	20.127	6,00
	c. Hutan Dapat dikonversi	11.376	3,39
4	Areal Penggunaan Lain	163.625	48,78
	I. Lahan Basah	25.641	7,64
	a. Sawah Irigasi Produktif	14.090	4,20
	b. Sawah Irigasi tak Produktif	6.641	1,98
	c. Sawah Non Irigasi	1.555	0,46
	d. Rawa	221	0,07
	e. Kolam/Tebat/Embung	1.320	0,39
	f. Waduk/Danau	1.814	0,54
	II. Lahan Kering	137.984	41,14
	a. Perkebunan	38.150	11,37
	b. Permukiman/Pekarangan	7.790	2,32
	c. Industri	171	0,05
	d. Pertambangan	395	0,12
	e. Lahan Terlantar/Semak Belukar	54.525	16,26
	f. Penggunaan Lain	36.953	11,02
	Jumlah	335.430	100

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

Penggunaan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di kabupaten. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Akalbiru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Guguak, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Mungka, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Suluki. Luas hutan lindung Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berdasarkan data Lima Puluh Kota Dalam Angka seluas 114.667 Ha.

Luas kawasan permukiman tahun 2020 dari tabel diatas adalah seluas 7.790 Ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota, perwujudan kawasan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman perdesaan, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

Kawasan pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan dan Kawasan peternakan menyebar di 13 kecamatan.

Terkait dengan tanaman pangan yang terdiri dari tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering dan tanaman Hortikultura. Komoditi yang termasuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Fokus tanaman pangan untuk lahan basah adalah pada komoditi padi.

Terkait dengan lahan sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Sebaran Lahan Sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	Sawah (Ha)				Lahan Potensi (Ha)	Total (Ha)
		LP2B	LCP2B	Rawan Konversi	Total Sawah		
1	Suliki	694,24	165,96	110,27	970,47	407,88	1378,35
2	Harau	2.142,96	1.161,41	198,68	3.503,05	467,19	2970,254
3	Pangkalan	166,12	78,39	61,35	305,86	161,28	467,14
4	Kapur IX	343,95	46,21	76,96	467,12	119,78	586,90
5	Situjuh Limo Nagari	1.337,53	348,89	49,83	1.736,25	0	1.736,25
6	Lareh Sago Halaban	1.356,51	1.018,80	248,78	2.624,09	0	2.624,09
7	Luak	983,43	291,22	131,44	1.406,09	0	1.406,09
8	Akabiluru	1.382,00	54,85	103,43	1.540,28	0,49	1.540,77
9	Guguak	1.192,92	409,40	114,59	1.716,91	19,34	1.736,25
10	Payakumbuh	1.033,46	608,28	90,73	1.732,49	2,96	1.735,45
11	Mungka	546,51	170,69	44,03	761,23	1,63	762,86
12	Bukit Barisan	1.026,65	470,77	87,86	1.585,28	97,05	1.682,33
13	Gunuang Omeh	604,15	55,46	116,73	776,34	45,17	821,51
		12.810,42	4.880,33	1.434,70	19.125,46	1.322,78	20.448,23

Sumber : Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

Kawasan perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar di seluruh Kecamatan. Komoditas perkebunan terdiri dari tanaman gambir, kakao, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau dan lain- lain. Komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah gambir. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi pada tahun 2020 adalah 7.826,69 ton dengan luas perkebunan mencapai 17.547,5 Ha (Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021).

Kawasan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil dan unggas. Perkembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, baik untuk peternakan jenis unggas maupun ternak besar. Hal ini ditandai dengan sudah adanya beberapa kecamatan yang merupakan daerah atau sentra peternakan, seperti Kecamatan Mungka sebagai sentra perternakan ayam. Hal ini juga didukung dengan adanya Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mangatas yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. BPTUHPT Padang Mengatas memiliki luas areal mencapai 280Ha dengan populasi mencapai 1300 ekor, yang terdiri dari wilayah padang penggembalaan, kebun rumput dan lokasi perkandangan serta perkantoran.

Kawasan perikanan dibagi dalam dua kelompok utama yaitu kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap yakni kawasan perikanan di kawasan umum seperti sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat di seluruh kecamatan, namun yang terluas terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas kolam air tenang, kolam air deras dan keramba jaring apung. Produk unggulan dari perikanan adalah ikan gurami sago, kerana ikan ini sudah di dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah keluar negeri.

Terhadap Kawasan Kawasan industri pertambangan dan energi berdasarkan rencana tata ruang wilayah, bahwa perwujudan kawasan pertambangan dn energi meliputi penetapan lokasi Kawasan pertambangan, peningkatan dan pengembangan system pengawasan dan pengendalian geologi dan

pertambangan, penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, rehabilitasi lahan pasca tambang, pengembangan usaha pertambangan yang lestari, dan pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang merusak lingkungan. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertambangan dan energi meliputi kegiatan pertambangan, pengolahan dan energi tersebar disetiap kecamatan yang memiliki potensi, kegiatan yang diarahkan/diizinkan yaitu kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan, dan kegiatan yang dibatasi/bersyarat meliputi kawasan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan serta kegiatan usaha pertambangan dengan syarat yang telah sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. WPN di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar di Kecamatan Harau, Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuh Limo Nagari, Gunuang Omeh, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru.

Kawasan peruntukan lainnya, yaitu **kawasan pertahanan keamanan negara dan kawasan keamanan dan ketertiban masyarakat**. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan pertahanan keamanan negara di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Kodim 0306/ Lima Puluh Kota, Kompi Senapan C. Yonif 131/ Braja Sakti, Den Zipur 2/Prada Sakti dan Koramil yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Suliki, Lareh Sago Halaban, Harau, Guguak, Kapur IX dan Akabiluru, selanjutnya komando Rayon Militer (Koramil) beradad diseluruh kecamatan dan kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di seluruh kecamatan.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik iklim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah :

a. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah "*The Sumatra fault system, Indonesia*" Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain : 1,) Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2,) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan, Untuk tahun 2020, di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terjadi bencana alam gempa bumi.

b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsoran, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuhnya batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Longsor ini disebut juga longsor translasi blok batu. Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan pengundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat.

Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

c. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Peristiwa bencana alam banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 terjadi di 4 nagri di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari dan Bukik Barisan.

d. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin putting beliung disebut juga dengan "angina Limbubu". Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliru), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.

Jumlah kejadian bencana alam angina putting beliung pada tahun 2019 adalah sebanyak 6 kejadian. Bencana angin puting beliung ini tidak memakan korban jiwa ataupun luka-luka. Sedangkan untuk kerusakan rumah diakibatkan bencana alam angin puting beliung ini adalah 16 buah rumah rusak berat, 5 buah rumah rusak sedang dan 3 rumah rusak ringan.

e. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (ground fire) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2019 telah terjadi peristiwa kebakaran sebanyak 54 kejadian yang terjadi di rumah, kantor, lahan dan Kandang, Gudang serta kedai masyarakat, Jumlah kebakaran rumah ada 36 unit rumah yang terkena. Sedangkan kebakaran lahan ada sebanyak 13 lahan, Kebakaran juga terjadi di kantor KPHL yang berada di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau, Untuk kebakaran Kandang, gudang dan kedai ada sebanyak 8 unit.

f. Pandemi Covid 19

Terkait dengan pandemi Covid-19, sampai tanggal 31 Juli 2021, penambahan kasus positif di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terjadi. Pertambahan kasus ini menyebabkan ada 3 Jorong dalam Zona Merah dan 10 Jorong dalam zona orange. Total kasus positif Covid-19 2.136 kasus, total sembuh 1.810 kasus, dan total meninggal 69 kasus. Kasus Aktif Covid-19 ada 257 kasus, Dirawat 1 kasus dan Isolasi Mandiri 18 kasus. Penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Juli 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.5
Peta Sebaran Kasus Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota
(sampai dengan 31 Juli 2021)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

Perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota sejalan dengan perkembangan penanganan Covid di Indonesia, dimana program pembangunan diarahkan kepada Penanganan Kesehatan dan prioritas lain, Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.12

Program pembangunan diarahkan kepada Penanganan Kesehatan dan prioritas lain, Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial

No	Kegiatan
Kesehatan dan Prioritas Lainnya	
I	Penanganan Covid
II	Dukungan Vaksinasi
1	Dukungan Operasional Vaksin
2	Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi
3	Distribusi pengamanan penyediaan tempat penyimpanan vaksin
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi
III	Dukungan pada Nagari dalam rangka penanganan Covid-19
IV	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan covid-19 (Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Bidan dan Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya
Perlindungan Sosial	
I	Bantuan Sosial
II	Pemberian Makanan Tambahan
III	Perlindungan Sosial Lainnya
Pemulihan Ekonomi	
I	Pemberdayaan UMKM
II	Subsidi Pertanian
III	Dukungan Ekonomi Lainnya

Disamping itu, penanganan Covid-19 yang mendukung fokus pembangunan nasional dalam penanganan pandemi Covid-19, diarahkan pada 4 (empat) fokus yaitu:

- Pemulihan industri, pariwisata dan investasi,
- Reformasi sistem kesehatan nasional,
- Reformasi sistem perlindungan sosial, dan
- Reformasi sistem ketahanan bencana

Dalam mendukung pemulihan industri, pariwisata dan investasi, program-program dari beberapa Dinas di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah selaras dengan fokus ini yaitu dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Disamping itu, beberapa Dinas lain juga mempunyai program yang mendukung pemulihan ekonomi yaitu Dinas Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Perikanan.

Selanjutnya, menyikapi fokus Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, maka Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun kebijakan dengan memperhatikan dua sisi yaitu sisi ketersediaan dan dari sisi kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan di tingkat paling dasar dalam hal ini puskesmas baik dari sisi peralatan medis maupun tenaga kerja. Semakin banyak puskesmas dengan fasilitas yang memadai maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan penanganan kesehatan.
- b) Penguatan keamanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah penyakit-penyakit berbahaya caranya dengan respons cepat.
- c) Menggalakkan dan meningkatkan Gerakan Hidup Sehat (Germas) dan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- d) Pemenuhan cakupan air bersih dan sanitasi.
- e) Melanjutkan vaksinasi.

Program pendukung kebijakan diatas terdapat pada Dinas Kesehatan, RSUD Achmad Darwis, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam mendukung fokus Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Dinas Sosial sudah menyusun beberapa program diantaranya pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin, pemberian beasiswa warga kurang mampu, penyelenggaraan pelatihan peningkatan ekonomi, dan program lainnya dalam rangka membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang menjadi fokus pembangunan dalam percepatan

pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19, juga mendukung Prioritas Nasional yang ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Terkait dengan fokus Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dalam perkembangan kondisi terkini dan kebijakan penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Umum menghadapi Covid-19 dari Kementerian Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bupati lima Puluh Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi Publik, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol Area Institusi Pendidikan, serta Protokol Area Publik dan Transportasi. Sebagai payung hukum dan dasar pelaksanaan kegiatan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dikeluarkan beberapa Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Pernyataan, Edaran, dan Surat-surat terkait percepatan penanganan Covid-19. Kedepan, sistem ketahanan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota akan semakin disempurnakan dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tidak hanya berfokus kepada bencana alam, tetapi juga bencana non-alam seperti pandemic Covid-19 ini.

2.1.3 Demografi

Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut BPS, Penduduk adalah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk yang begitu pesat telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berjumlah 383.525 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, yaitu 191.789 jiwa dan laki-laki sebanyak 191.736 jiwa. Selama lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,996%, dimana laju tertinggi terjadi tahun 2019 sebesar 1,13% dan terendah tahun 2017 sebesar 0,93%. Dengan laju seperti ini maka selama lima tahun terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 10.957 jiwa dengan rata-rata penambahan 2.191 jiwa pertahun.

Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk yang begitu pesat telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berjumlah 383.525 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, yaitu 191.789 jiwa dan laki-laki sebanyak 191.736 jiwa. Selama lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,996%, dimana laju tertinggi terjadi tahun 2019 sebesar 1,13% dan terendah tahun 2017 sebesar 0,93%. Dengan laju seperti ini maka selama lima tahun terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 10.957 jiwa dengan rata-rata

penambahan 2.191 jiwa pertahun. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
2016	184.995	187.573	372.568	0,97
2017	186.821	189.251	376.072	0,93
2018	188.472	191.042	379.514	1,02
2019	190.298	192.519	382.817	1,13
2020*	191.736	191.789	383.525	0,93

2020* merupakan hasil SP 2020

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2019-2021

Secara tabel, jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	37.297	18.685	18.612	5.328
2	Akabiluru	7	28.558	14.291	14.267	4.080
3	Luak	4	28.133	13.864	14.269	7.033
4	Lareh Sago Halaban	8	38.524	19.307	19.217	4.816
5	Situjuah Limo Nagari	5	23.274	11.594	11.680	4.655
6	Harau	11	55.451	27.949	27.502	5.041
7	Guguak	5	35.878	17.739	18.139	7.176
8	Mungka	5	27.024	13.365	13.659	5.405
9	Suliki	6	14.895	7.328	7.567	2.483
10	Bukik Barisan	5	22.867	11.284	11.583	4.573
11	Gunuang Omeh	3	14.019	7.006	7.013	4.673
12	Kapur IX	7	28.191	14.284	13.907	4.027
13	Pangkalan Koto Baru	6	29.414	15.040	14.374	4.902
	Jumlah	79	383.525	191.736	191.789	4.855

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

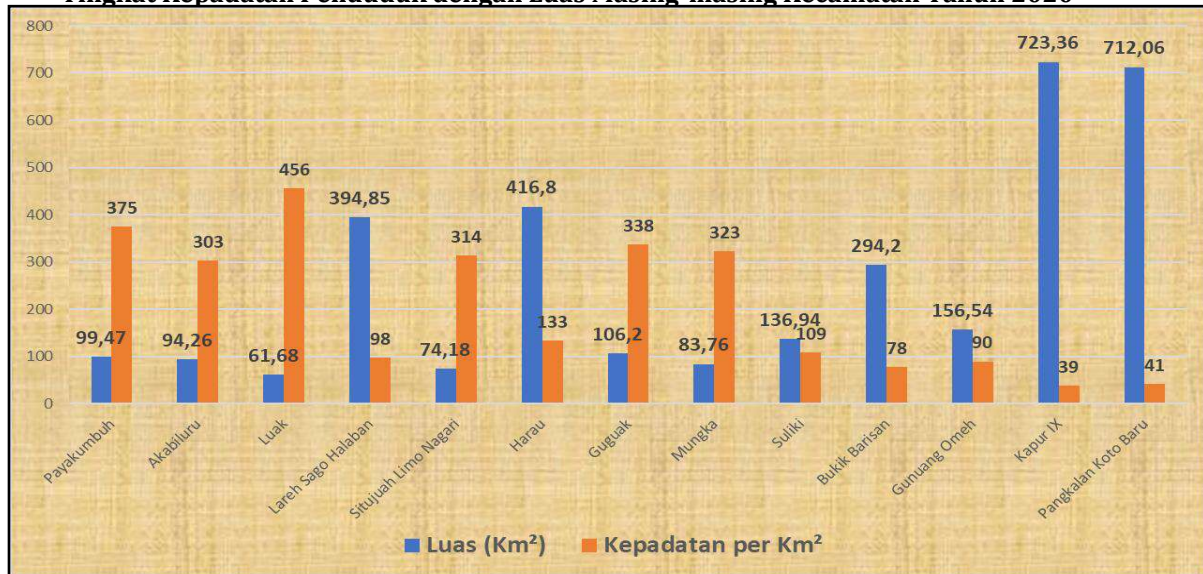
Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2020 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (55.451 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.019 jiwa). Sedangkan untuk tingkat nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.176 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.483 jiwa).

Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.

Selanjutnya hal yang cukup penting dibahas dalam bidang kependudukan adalah tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 yang bersumber dari BPS adalah 114 jiwa per km². Hal itu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.9

Tingkat Kepadatan Penduduk dengan Luas Masing-masing Kecamatan Tahun 2020



Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu : Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Bukik Barisan dan Kecamatan Harau. Hal ini bisa saja dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah.

Untuk tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 114 orang per KM. Kecamatan merupakan Kecamatan yang terpadat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Payakumbuh. Sedangkan Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru memiliki tingkat kepadatan terendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15

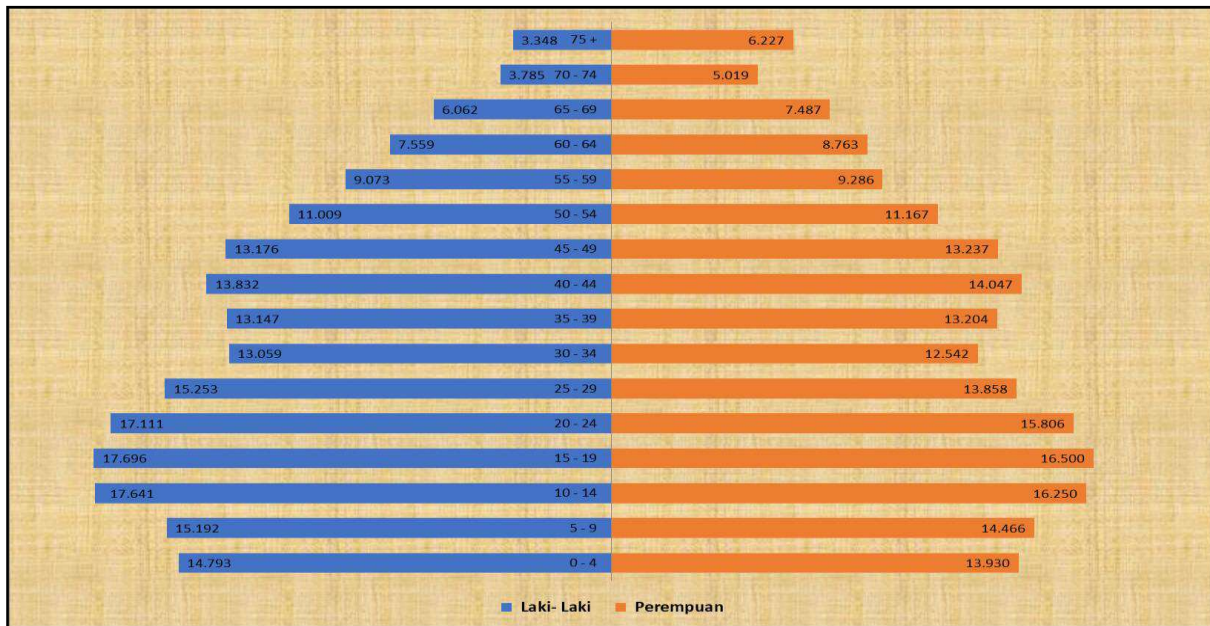
Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan per (Km ²)
1	Payakumbuh	37.297	99,47	375
2	Akabiluru	28.558	94,26	303
3	Luak	28.133	61,68	456
4	Lareh Sago Halaban	38.524	394,85	98
5	Situjuah Limo Nagari	23.274	74,18	314
6	Harau	55.451	416,8	133
7	Guguak	35.878	106,2	338
8	Mungka	27.024	83,76	323
9	Suliki	14.895	136,94	109
10	Bukik Barisan	22.867	294,2	78
11	Gunuang Omeh	14.019	156,54	90
12	Kapur IX	28.191	723,36	39
13	Pangkalan Koto Baru	29.414	712,06	41
Jumlah / Rata-rata		383.525	3.354	114

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

Karakteristik penduduk yang paling dan berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur, atau sering juga disebut komposisi penduduk menurut umur. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih.

Grafik 2.10
Priramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020



Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

Dari piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang bersumber dari BPS, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk umur 15-19 tahun paling banyak di Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun.

Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah. Sementara itu jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Selain itu distribusi penduduk serta kepadatannya tidak merata antar kecamatan disebabkan akibat konsentrasi pemukiman, aktivitas sosial ekonomi serta aktivitas sosial budaya masyarakat.

2.1.4 POTENSI SUMBER DAYA

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, beberapa kawasan peruntukan budidaya antara lain kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan kawasan pariwisata. Kawasan pertanian ini meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang kesemuanya itu menyebar di kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan industri berupa sentra industri kecil dan menengah terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan pariwisata meliputi kawasan wisata alam dan kawasan wisata budaya. Kawasan pariwisata ini tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, ketimun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk. Jumlah produksi komoditi tertinggi pada tahun 2020 adalah padi dengan produksi sebesar 267.971,50 ton. Selanjutnya diikuti oleh ubi kayu sebanyak 66.897,70 ton, jeruk sebesar 58.193,05 ton dan jagung sebanyak 45.511,98 ton.

Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditi yang dipengaruhi oleh Kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditi petani, tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu komoditi yang dijadikan sebagai produk unggulan Daerah dengan Nama Jesigo (Jeruk Siam Gunung Omeh) yang terdapat di Kecamatan Gunung Omeh dan sekitarnya. Bila kaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang digarap oleh masyarakat petani. Komoditi ini dinilai punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi. Komoditi ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi, jagung, dan ubi kayu. Untuk sub sektor hortikultura komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis. Sedangkan untuk sub sektor perkebunan komoditi utamanya adalah gambir, kakao, dan kopi robusta.

Selain komoditi utama juga berkembang komoditi pendukung yang dapat diartikan sebagai komoditi yang nilai ekonomi serta luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif tidak sebesar komoditi utama. Komoditi ini diantaranya adalah kacang tanah, jagung manis, jengkol, kelapa, karet, pinang, aneka sayuran dan buah-buahan seperti buncis, bawang merah, tomat, terung, semangka, durian, pepaya, pisang, dan lain-lain. Selanjutnya komoditi yang terkategori komoditi rintisan yang dapat diterjemahkan sebagai komoditi yang bernilai ekonomi namun belum dikembangkan secara luas seperti buah naga, sereh wangi, jahe, dan lemon.

Khusus untuk komoditi rintisan karena pengembangannya masih bersifat sporadis secara statistik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terdata secara lengkap. Sedangkan perkembangan produksi komoditi utama, pendukung dan rintisan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Jenis data	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	47.482,00	226.249,00	43.820,00	210.452,00	60.267,00	260.109,00	56.920,00	237.028,00	62.043,00	267.971,50
2	Jagung	4.538,10	25.298,21	5.447,00	30.252,00	6.601,00	39.627,90	6.836,00	41.353,90	6.683,00	45.511,98
3	Ubi kayu	1.383,00	71.893,00	1.785,00	91.603,00	1.123,00	49.062,34	1.095,00	56.484,80	1.203,00	66.897,70
4	Ubi jalar	231,00	6.224,00	176,00	4.762,00	136,00	3.416,10	128,00	3.367,00	101,00	2.415,60
5	Kacang Tanah	211,00	330,05	178,80	337,00	189,00	300,66	189,80	376,00	182,20	269,05
6	Cabe	1.007,00	7.260,80	1.048,00	24.817,10	668,00	10.870,10	1072,00	23.757,20	1.109,00	26.140,46
7	Bawang Merah	90,00	577,00	84,00	531,50	138,00	998,70	138,00	934,30	104,00	1.009,60
8	Tomat	128,00	1.336,00	129,00	3.099,90	104,00	2.515,00	133,00	3.172,10	146,00	2.864,21
9	Kacang Panjang	236,00	1.390,00	265,00	2.485,00	247,00	1.701,80	331,00	4.486,00	330,00	5.225,40
10	Terung	344,00	3.757,00	434,00	18.626,00	352,00	7.760,30	483,00	16.374,00	504,00	17.678,60
11	Ketimun	276,00	3.017,00	312,00	9.884,00	303,00	5.868,40	397,00	11.932,10	422,00	12.687,80
12	Buncis	255,00	1.639,30	322,00	2.163,00	268,00	2.488,10	291,00	4.974,90	278,00	5.755,80
13	Bayam	6,00	39,00	5,00	90,00	23,00	160,00	46,00	228,80	53,00	349,90
14	Manggis	540,56	5.454,00	411,26	5.906,00	478,32	3.948,70	825,00	10.412,00	950,80	20.980,88
15	Jeruk	451,79	12.416,00	965,94	26.413,20	953,58	45.076,70	959,15	39.593,10	963,64	58.193,05
16	Gambir	16.199,00	9.181,95	17.357,13	9.444,00	16.778,63	6.794,00	17.521,50	7.137,98	17.547,50	7.826,69
17	Kakao	4.860,25	2.393,82	4.964,00	2.244,74	4.169,00	2.241,67	7.652,00	2.238,98	6.697,00	1.728,42
18	Kopi Robusta	1.055,50	806,60	1.033,30	643,33	861,80	518,39	816,50	574,07	703,00	332,57

Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2017-2021

Terhadap komoditi padi, sebaran luas panen per-kecamatan pada tahun 2020 di Kecamatan Harau dengan luas panen 9.649 Ha, Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan luas panen 7.589 Ha, Kecamatan Guguak dengan luas panen 6.336 Ha dan Kecamatan Akabiluru dengan luas panen 6.061 Ha. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan lainnya seperti Payakumbuh (5.308 Ha), Bukik Barisan (5.287 Ha), Luak (5.109 Ha), Situjuah Limo Nagari (4.696 Ha), Suliki (3.153 Ha), Gunuang Omeh (3.082 Ha), Mungka (2.990 Ha), Kapur IX (1.773 Ha) dan Pangkalan Koto Baru (1.010 Ha). Komoditi utama padi per-kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17
Panen, Produksi dan Provitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No.	Kecamatan	Panen (Ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/Ha)
1	Payakumbuh	5.308,00	23.175,00	4,37
2	Akabiluru	6.061,00	30.522,00	5,04
3	Luak	5.109,00	23.704,00	4,64
4	Lareh Sago Halaban	7.589,00	30.440,00	4,01
5	Situjuah Limo Nagari	4.696,00	21.670,00	4,61
6	Harau	9.649,00	42.202,00	4,37
7	Guguak	6.336,00	28.507,00	4,50

No.	Kecamatan	Panen (Ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/Ha)
8	Mungka	2.990,00	13.948,00	4,66
9	Suliki	3.153,00	16.014,00	5,08
10	Bukik Barisan	5.287,00	21.050,00	3,98
11	Gunuang Omeh	3.082,00	11.310,00	3,67
12	Kapur IX	1.773,00	2.644,00	1,49
13	Pangkalan Koto Baru	1.010,00	2.785,00	2,76
Kab. Lima Puluh Kota		62.043,00	267.971,00	7,34

Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2020, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,31 ton/hektar. Produktivitas ini masih rendah dibandingkan produktivitas Provinsi Sumatera Barat (4,69 ton/hektar) dan nasional (5,13 ton/hektar). Masih rendahnya produktivitas padi ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, akses petani terhadap pupuk, serta permodalan terhadap petani.

Untuk sebaran komoditi jagung terdapat pada kecamatan Lareh Sago Halaban, Luak, Harau, Payakumbuh, Guguak, dan Mungka. Untuk Komoditi ubi kayu terdapat pada kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau, Lareh Sago Halaban, dan Luak. Dilihat dari sebaran lahan dan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Luas tanam paling luas serta produksi terbanyak terdapat pada Kecamatan Lareh Sago Halaban. Produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 7,34 ton/Ha, dengan produktivitas tertinggi di Kecamatan Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban yaitu sebesar 7,51 ton/Ha. Sebaran lahan dan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18
Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tanam (Ha)	Panen Tua (Ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/Ha)	Panen Muda
1	Payakumbuh	824,00	649,00	4.875,10	7,51	103,00
2	Akabiluru	242,00	265,00	1.909,40	7,21	38,00
3	Luak	694,00	729,00	5.094,80	6,99	0,00
4	Lareh Sago Halaban	1.526,00	1.491,00	11.198,00	7,51	3,00
5	Situjuah Limo Nagari	676,00	688,00	4.999,00	7,27	0,00
6	Harau	993,50	777,50	5.761,20	7,41	173,00
7	Guguak	532,00	643,00	4.814,20	7,49	0,00
8	Mungka	671,00	597,00	4.398,00	7,37	19,00
9	Suliki	290,50	284,50	1.981,60	6,97	0,00
10	Bukik Barisan	52,00	46,00	302,88	6,58	0,00
11	Gunuang Omeh	5,00	28,00	165,60	5,91	0,00
12	Kapur IX	92,50	2,00	5,00	2,50	143,00
13	Pangkalan Koto Baru	4,00	2,00	7,00	3,50	2,00
Kab. Lima Puluh Kota		6.602,50	6.202,00	45.511,98	7,34	481,00

Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Terhadap produktivitas jagung ini masih belum optimal. Pemenuhan kebutuhan jagung terhadap peternak ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum terpenuhi. Hal ini penyebabnya tidak jauh berbeda dengan penyebab tingkat produktivitas padi dan disamping itu juga penggunaan lahan terlantar yang belum optimal yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk penanaman jagung ini.

Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian. Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya Kerjasama dengan Lembaga pendidikan tinggi dan Lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian.

b. Sektor Perkebunan

Penyumbang utama kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Produksi komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Produksi Komiditi Perkebunan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kakao	2.393,82	2.244,74	2.241,67	2.238,98	1.728,42
2	Pinang	1.026,01	587,57	275,61	556,9	442,87
3	Tembakau	0,85	1,29	0,83	92,68	178,96
4	Kelapa	5.448,49	1.324,77	1.705,47	4.057,17	4.223,50
5	Karet	10.702,05	6.548,29	6.767,22	6.557,62	6.648,10
6	Kulit manis	394,13	397,83	268,8	557,49	341,87
7	Cengkeh	57,1	85,57	19,48	90,34	63,28
8	Gambir	9.181,95	9.444	6.794	7.137,98	7.826,69
9	Kopi Robusta	806,6	643,33	518,39	574,07	332,57
10	Enau	976,86	505,97	133,32	491,5	495,01

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Dari tabel diatas, secara rata-rata produksi perkebunan selama kurun waktu lima tahun belum menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ada terjadi penurunan produksi dalam kurun waktu tersebut seperti kopi robusta, kakao, pinang, karet, gambir, dan enau.

Pada tahun 2020, perkembangan produksi beberapa jenis komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup bervariasi. Produksi tertinggi dari perkebunan tersebut adalah perkebunan gambir dengan produksi sebesar 7.826,69 ton dan selanjutnya diikuti oleh perkebunan karet dengan produksi sebesar 6.648,10 ton. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia (Uncaria Gambir). Luas perkebunan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 17.547,50 hektar dengan kondisi belum produktif seluas 645,50 Ha, produktif seluas 16.605 Ha serta rusak seluas 297 Ha pada tahun 2020 menurut Buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2021.

Kandungan yang terdapat di dalam tanaman gambir antara lain zat katechine dan tanin, yang mana kandungan ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Gambir bersama dengan karet, semen, dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat, Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang diekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta.

Terkait dengan permasalahan gambir ini, dalam hal lemahnya posisi tawar petani gambir terhadap pasar disebabkan oleh beberapa hal :

- Rendahnya kemampuan petani dalam mengakses pasar.
- Adanya keterikatan petani dengan tengkulak (sistem ijon).
- Kurangnya akses permodalan bagi petani Gambir.

Luas dan produksi gambir perkebunan rakyat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.20
Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0,00	375,00	5,00	380,00	210,00
2	Akabiluru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Luak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lareh Sago Halaban	8,00	119,00	15,00	142,00	73,78
5	Situjuah Limo Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Harau	175,00	721,00	199,00	1.095,00	235,41
7	Guguak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Mungka	280,00	645,00	0,00	925,00	60,00

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
9	Suliki	28,00	132,00	0,00	160,00	52,80
10	Bukik Barisan	42,50	2.625,00	0,00	2.667,50	1.312,50
11	Gunuang Omeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kapur IX	108,00	7.643,00	0,00	7.751,00	3.439,35
13	Pangkalan Koto Baru	4,00	4.345,00	78,00	4.427,00	2.442,85
Kab. Lima Puluh Kota		645,50	16.605,00	297,00	17.547,50	7.826,69

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Komoditi perkebunan yang lain adalah kelapa sawit. Perkebunan rakyat terhadap kelapa sawit terdapat di Kecamatan Bukik Barisan, Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX. Luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2019 seluas 2.958 Ha bertambah menjadi 2.968 Ha di tahun 2020. Dari segi produksi, terjadi pula peningkatan dari 51.037,09 ton di tahun 2019 menjadi 53.450,78 ton. Sedangkan wujud produksi kelapa sawit masih berupa Tandan Buah Segar (tbs). Luas areal dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat selama dua tahun dapat dilihat pada tabel disamping ini :

Tabel 2.21
Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2020

No	Kecamatan	2019			2020		
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Wujud Produksi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Wujud Produksi
1	Gunung Omeh	0	0	-	0	0,00	-
2	Suliki	0	0	-	0	0,00	-
3	Bukik Barisan	6	2	tbs	6	2,00	tbs
4	Guguak	0	0	-	0	0,00	-
5	Mungka	0	0	-	0	0,00	-
6	Payakumbuh	0	0	-	0	0,00	-
7	Akabiluru	7	140	tbs	7	90,00	tbs
8	Luak	0	0	-	0	0,00	-
9	Situjuah Limo Nagari	0	0	-	0	0,00	-
10	Lareh Sago Halaban	23	3,09	tbs	20	3,08	tbs
11	Harau	67	67,5	tbs	67	80,89	tbs
12	Pangkalan Koto Baru	2670	50697	tbs	2.673	52.997,50	tbs
13	Kapur IX	185	127,5	tbs	195	277,31	tbs
Jumlah		2.958,00	51.037,09		2.968,00	53.450,78	

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Lima Puluh Kota

c. Sektor Peternakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian yang mana Kawasan Peternakan adalah kawasan usaha peternakan eksisting atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai didukung ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak- perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura, jadi dapat di simpulkan Kawasan Peternakan adalah kawasan usaha peternakan eksisting atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai

kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai didukung ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Perternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Klaster Tri Arga	Kec. Luak Kec. Guguak Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Gunung Omeh
2.	Sapi Potong / Sapi Simenthal	Kec. Luak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh
3.	Kambing	Kec. Harau Kec. Situjuah Limo Nagari
4.	Ayam Buras	Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuah Limo Nagari
5.	Ternak – Kakao	Kec. Guguak Kec. Suliki Kec. Harau

Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Kab.Lima Puluh Kota

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Jumlah produksi daging, telur dan susu di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah produksi Daging, Telur dan susu di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

NO	KOMODITI	JUMLAH PRODUKSI (Kg)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	DAGING SAPI POTONG	1.025.354	1.120.944	1.053.184	1.091.904	1.180.290,58
2	DAGING KERBAU	197.252,75	161.548,75	176.467,50	151.318,75	143.152,35
3	DAGING KAMBING	29.919,78	73.319,40	90.962,99	75.599,56	70.154,28
4	DAGING AYAM BURAS	513.605,50	384.393,87	397.514	422.327	475.293
5	DAGING AYAM RAS PETELUR	3.629.025,40	4.627.269,92	5.433.233	5.442.618	5.671.975,20
6	DAGING AYAM RAS PEDAGING	8.578.292,70	16.003.879,68	16.176.855	17.549.234	12.604.133
7	DAGING ITIK	112.134,50	71.481,98	77.668	82.176	85.396,42
8	DAGING BURUNG PUYUH	96.294,80	62.008,65	60.134	82.176	67.323,76
9	TELUR AYAM BURAS	270.121,90	203.785,68	210.454,48	223.342,74	247.098,50
10	TELUR AYAM RAS PETELUR	38.223.751,40	48.830.567,97	57.319.609,50	57.418.459,41	59.741.706,00
11	TELUR ITIK	1.046.970,50	667.408,32	725.163,12	767.259,34	797.323,68
12	TELUR BURUNG PUYUH	992.128,50	728.356,86	723.724,48	754.015,62	693.638,76
13	SUSU SAPI PERAH	42.840	71.910	71.910	53.550	64.260
14	SUSU KERBAU	134.480	114.768	123.265	123.285	99.920

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Terhadap produksi ternak, pada tahun 2020 populasi ternak menunjukkan terjadinya penambahan populasi dari tahun 2019. Populasi ayam pedaging mengalami penambahan yang cukup banyak dari 15.116,500 ekor menjadi 16.468,529 ekor. Selanjutnya populasi ayam petelur dari 7.450,450 ekor tahun 2019, menjadi 7.474,471 ekor. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya pergeseran produksi ayam petelur dengan ayam pedaging. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

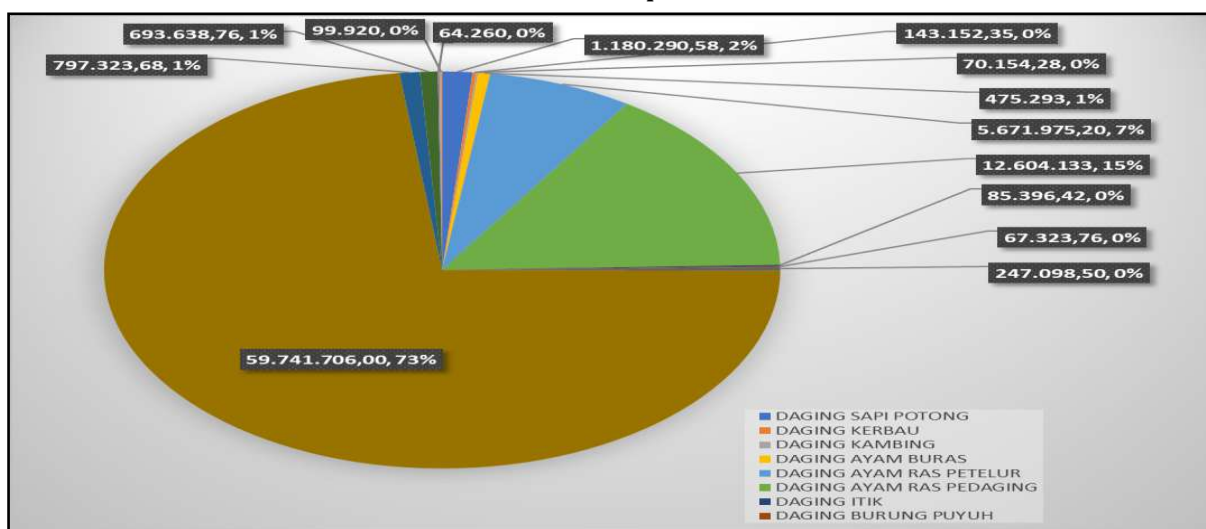
Tabel 2.24
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

NO	KOMODITI	JUMLAH POPULASI (EKOR) PADA TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SAPI PERAH	28	47	47	39	42
2	SAPI POTONG	35.494	36.043	39.589	42.708	45.071
3	KERBAU	13.448	11.477	12.327	12.329	9.992
4	KUDA	82	75	82	95	98
5	KAMBING	25.042	26.335	27.939	30.313	29.379
6	RUSA	36	28	36	36	NA
7	AYAM BURAS	421.736	318.167	328.578	348.700	385.790
8	AYAM RAS PETELUR	4.978.625	6.349.407	7.450.450	7.474.471	7.748.600
9	AYAM RAS PEDAGING	7.911.655	14.947.100	15.116.500	16.468.528	12.848.250
10	ITIK	190.705	121.568	132.088	139.756	145.232
11	BURUNG PUYUH	972.675	642.290	623.819	656.316	680.038
12	KELINCI	2.830	2.153	2.153	3.140	2.590

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Produksi komoditas peternakan pada tahun 2020 didominasi oleh peternakan ayam. Produksi komoditas tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.11
Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020



Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021

Dari grafik diatas, dari populasi ternak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, produksi telur ayam ras adalah yang terbanyak pada tahun 2020 yaitu 59.741.706 kg (72,91%), diikuti dengan produksi daging ayam ras pedaging sebanyak 12.604.133,25 kg (15,38%) dan daging ayam ras petelur sebanyak 5.671.975,2 kg (6,92%).

Dari sisi perkembangan kawasan dan komoditi peternakan 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.25
Perkembangan Populasi Komoditi Peternakan per Kecamatan Tahun 2016-2020

No.	Komoditi	Kecamatan	Populasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi Potong	Payakumbuh	1.950	1.754	2.148	2,350	2.409
		Akabiluru	1.958	2.040	2.248	1,954	1.868
		Luak	6.007	6.528	8.216	8,697	8.847
		Lareh Sago Halaban	8.388	8.851	9.639	10,190	11.189
		Situjuah Limo Nagari	2.336	3.091	3.801	4,013	4.697
		Harau	5.776	5.001	5.299	5,842	5.982
		Guguak	3.078	2.905	3.054	4,035	4.194
		Mungka	683	851	1.045	1,162	1.210
		Suliki	802	1.040	827	645	674
		Bukik Barisan	1.792	2.313	2.239	2,606	3.058
		Gunuang Omeh	1.837	785	310	327	325
		Kapur IX	388	237	247	287	243
		Pangkalan	499	647	616	602	375
		Jumlah	35.494	36.043	39.689	42,710	45.071
2.	Kerbau	Payakumbuh	1.102	876	963	921	499
		Akabiluru	1.892	1.351	1.754	1,862	1.198
		Luak	831	778	866	925	702
		Lareh Sago Halaban	1.950	1.764	1.647	1,776	1.472
		Situjuah Limo Nagari	1.435	1.042	1.348	1,322	1.105
		Harau	1.158	942	880	859	750
		Guguak	589	392	428	329	268
		Mungka	250	188	201	261	276
		Suliki	843	793	765	786	764
		Bukik Barisan	1.079	995	986	1,106	1.149
		Gunuang Omeh	862	898	976	650	584
		Kapur IX	768	762	831	833	667
		Pangkalan	689	697	682	699	558
		Jumlah	13.448	11.478	12.327	12,329	9.992
3.	Kambing	Payakumbuh	2.258	1.726	2.293	2,601	2.224
		Akabiluru	3.137	2.398	2.294	2,015	1.538
		Luak	1.666	2.193	2.453	2,872	1.962
		Lareh Sago Halaban	2.641	3.575	3.934	4,550	1.399
		Situjuah Limo Nagari	2.272	1.925	2.059	2,217	2.656
		Harau	3.150	3.576	3.404	3,578	2.908
		Guguak	803	628	914	1,024	1.219
		Mungka	2.164	2.274	2.496	2,814	3.003
		Suliki	257	728	851	1,108	1.161
		Bukik Barisan	3.285	3.886	3.859	4,406	4.928
		Gunuang Omeh	1.025	1.357	1.286	981	1.015
		Kapur IX	1.369	1.055	1.065	1,110	867
		Pangkalan	1.015	1.013	1.031	1,037	1.499
		Jumlah	25.042	26.334	27.939	30,313	29.379
4.	Broiler	Payakumbuh	955.020	3.811.500	3.884.200	4,223,700	1.941.950
		Akabiluru	955.600	997.500	999.000	1,493,000	1.277.500
		Luak	928.860	2.671.000	2.671.000	2,492,800	2.080.500
		Lareh Sago Halaban	658.635	1.093.500	1.093.500	1,293,100	792.500
		Situjuah Limo Nagari	763.500	393.000	452.000	534,500	383.250
		Harau	1.816.800	3.629.000	3.668.000	4,382,500	3.070.500
		Guguak	559.000	1.800.000	1.800.000	1,433,500	1.120.750
		Mungka	1.124.400	238.800	242.000	259,999	185.750

No.	Komoditi	Kecamatan	Populasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Suliki	69.990	200.000	194.000	263,429	255.000
		Bukik Barisan	64.850	112.000	112.000	92,000	75.000
		Pangkalan	15.000	-	-	-	30.000
		Jumlah	7.338.229	14.242.005	14.358.458	16,468,528	12.848.250
5.	Layar	Payakumbuh	1.503.000	2.156.540	2.325.000	1,977,000	1.941.950
		Akabiluru	178.580	9.6050	148.750	180,700	176.400
		Luak	349.600	368.821	711.500	553,771	534.500
		Lareh Sago Halaban	536.525	538.900	403.700	402,600	468.000
		Situjuah Limo Nagari	271.440	234.000	237.000	237,500	204.000
		Harau	560.500	921.046	1.341.000	1,605,000	1.914.000
		Guguak	677.000	1.186.000	1.182.500	1,326,800	1.319.800
		Mungka	772.515	777.100	1.036.000	1,114,000	1.115.500
		Suliki	128.755	70.350	59.000	63,400	58.800
		Bukik Barisan	4556	600	6.000	13,700	15.950
		Jumlah	4.982.471	6.349.407	7.444.456	7,474,471	7.748.600
6.	Itik	Payakumbuh	82.805	29.1741	28.178	24,745	20.995
		Akabiluru	22.092	9.053	8.622	8,072	7.889
		Luak	12.842	19.415	19.771	27,075	27.710
		Lareh Sago Halaban	9.075	5.985	5.915	8,345	8.175
		Situjuah Limo Nagari	7.711	4.457	4.457	4,907	5.867
		Harau	24.995	15.923	24.838	27,232	37.250
		Guguak	8.426	4.995	5.504	5,799	5.691
		Mungka	8.479	19.356	20.553	18,364	18.364
		Suliki	3.786	3.258	3.136	4,319	3.969
		Bukik Barisan	5.958	5.837	6.191	5,989	4.749
		Gunuang Omeh	1.927	2.409	2.459	2,445	2.224
		Kapur IX	1.139	669	669	669	928
		Pangkalan	1.470	1.039	1.795	1,795	1.421
		Jumlah	190.705	384.137	132.088	39,756	145.232
7.	Buras	Payakumbuh	9,964	33,437	35,026	43,037	45.814
		Akabiluru	17,274	18,645	17,721	19,223	19.042
		Luak	26,887	35,175	34,692	37,134	39.398
		Lareh Sago Halaban	37,855	39,642	37,687	25,597	23.205
		Situjuah Limo Nagari	45,713	21,340	21,174	20,648	28.921
		Harau	25,443	26,836	35,458	38,415	49.407
		Guguak	42,745	19,635	19,986	25,517	22.443
		Mungka	73,606	70,371	69,914	68,094	69.077
		Suliki	17,641	17,173	18,455	35,008	35.315
		Bukik Barisan	29,307	23,286	22,879	23,400	25.925
		Gunuang Omeh	3,443	3,215	6,397	6,314	6.567
		Kapur IX	10,667	910	925	1,777	10.437
		Pangkalan	11,191	8,502	8,265	8,536	10.239
		Jumlah	421,736	318,167	328,579	352,700	385.790
8.	Puyuh	Payakumbuh	441,265	277,600	267,811	302,061	272.200
		Akabiluru	5,200	2,000	2,000	2,000	-
		Luak	12,725	18,500	18,961	23,203	43.554
		Lareh Sago Halaban	19,900	6,200	6,200	-	40.000
		Situjuah Limo Nagari	25,405	1,000	1,000	-	-
		Harau	19,380	33,500	32,500	33,525	19.500
		Guguak	185,960	166,100	157,795	157,475	154.270
		Mungka	262,840	127,450	127,450	122,450	123.950
		Suliki	-	7,940	7,702	14,402	26.555
		Bukik Barisan	-	800	-	-	-
		Pangkalan		1,200	2,400	1,200	-

No.	Komoditi	Kecamatan	Populasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
		Jumlah	972,675	642,290	623,819	656,316	680.038

Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota

Perkembangan peternakan dan produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota terutama peternakan ayam semakin meningkat. Permasalahan yang terjadi adalah terhadap pakan ternak itu sendiri yang mana bahan pakan ternak terutama jagung masih belum mencukupi terhadap kebutuhan peternakan ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, bahan pakan lainnya masih tergantung kepada pakan yang diproduksi oleh perusahaan swasta yang berada di luar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan harga pakan tersebut dikendalikan oleh pihak swasta itu sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius kedepannya bagi pemerintah bagaimana mengatasi permasalahan ini.

Terhadap ternak yang membutuhkan kawasan padang penggembala, kawasan peternakan ini harus didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung diantara aspek ketersediaan hijauan pakan ternak, limbah dari hasil industri pertanian yang melimpah. Adapun daya dukung wilayah terhadap ternak tersebut adalah kemampuan wilayah untuk menampung sejumlah ternak secara optimal yang sifatnya sangat spesifik antar agroekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi kebutuhan sejumlah ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. Untuk mengetahui keseimbangan ketersediaan potensi hijauan lahan dan kebutuhan daya tampung ternak diperlukan indek daya dukung (IDD). IDD adalah angka yang menunjukkan status nilai daya dukung hijauan pakan pada satu wilayah (Thahardkk, 1991) sedangkan daya dukung potensia adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang peluang pengembangan budidaya dan pengolahannya. Berdasarkan data Master Plan Pembangunan Peternakan tahun 2005-2025 telah dilakukan penghitungan terhadap IDD per kecamatan. Indeks Daya Dukung per kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.26
Indeks Daya Dukung per Kecamatan

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
1	Payakumbuh	2,6	7.988,0	3.088,7	3.503,5	2616,8	886,7
2	Akabiluru	2,7	9.837,6	3.581,6	4.314,7	2862	1452,7
3	Luak	0,4	7.051,3	16.481,9	3.092,7	7216,5	4123,8
4	Lareh Sago Halaban	1,1	13.734,5	12.356,5	6.023,9	8974,5	2950,6
6	Harau	2,4	17.250,0	7.159,3	7.568,8	5025,8	2543
5	Situjuh Limo Nagari	2,2	6.310,2	2.876,6	2.767,6	4.001,3	1.233,7
7	Guguak	1,9	13.792,4	7.353,6	6.049,3	3273	2776,3
8	Mungka	3,0	6.244,3	2.079,4	2.738,7	1067,3	1665,4
9	Suliki	2,6	8.961,4	3.431,2	3.930,5	1073,3	2857,2
10	Bukik Barisan	2,2	13.806,9	6.328,3	6055,7	2784	3271,7
11	Gunuang Omeh	5,2	8.472,4	1.635,3	3.716,0	732,8	2983,2
12	Kapur IX	9,4	15.927,4	1.701,6	6.985,7	840	6145,7
13	Pangkalan Koto Baru	7,5	11.305,7	1.502,0	4.958,7	975,8	3982,9
	Total	2,7	140.682,10	69.576,00	53.654,40	41.443,10	17.173,40

Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota

Pada data diatas memeperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung populasi sebesar 53.654,40 ST, dengan status aman dengan IDD nya mencapai nilai 2. Secara keseluruhan kabupaten masih mampu menambah kapasitas sebesar 17.173,40 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu pada kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago halaban (1.1) dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan status wilayah tidak aman. Hal ini harus dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pakan antara lain dengan melakukan budidaya hijauan pakan ternak dan penerapan teknologi pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan terhadap ternak tersebut.

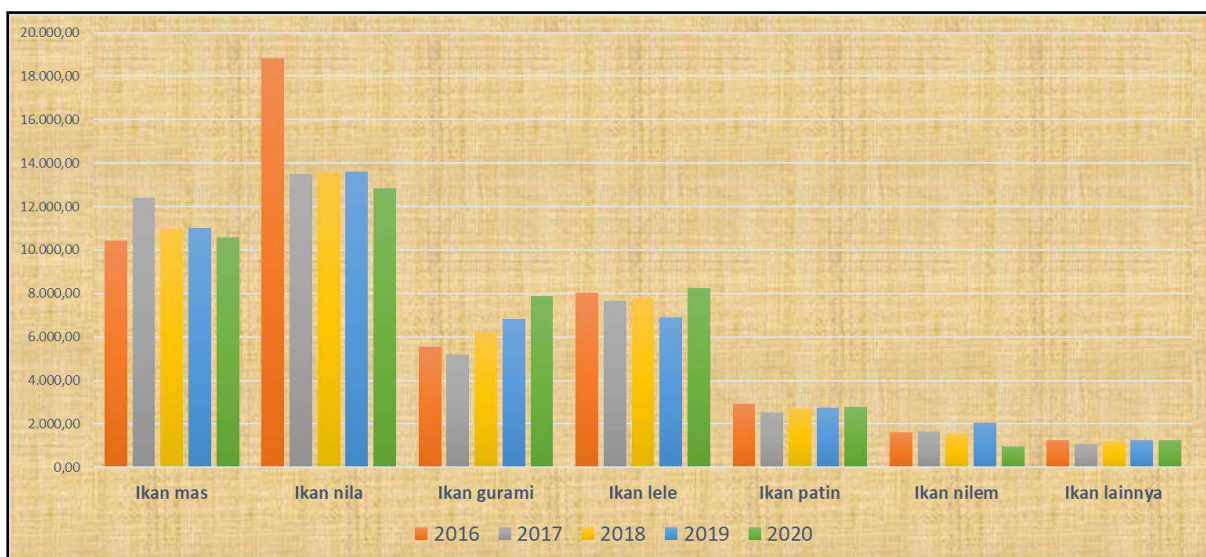
d. Sektor Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen. Penjelasan untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 491 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN).
 1. Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2020 tercatat produksi budidaya pembesaran sebesar 43.992,50 ton yang terdiri dari :
 - Budidaya ikan di Kolam tahun 2020 tercatat sebesar 43.996,27 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 43.381,38 ton maka terjadi peningkatan sebesar 614,89 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Harau yaitu 6.432,76 ton selama tahun 2020, sementara produksi yang paling kecil terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh yang hanya sebesar 524,73 ton, dengan rata-rata produksi 28,35 ton/ha.
 - Budidaya Sawah/ minapadi produksi tahun 2020 adalah sebesar 187 ton dengan produksi rata-rata adalah 3,67 ton/ha. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Akabiluru yaitu 40,55 ton selama tahun 2020. Sementara untuk Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Suliki, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru tidak ada menghasilkan ikan Budidaya Sawah/ minapadi.
 2. Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Luak, Lareh Sago Halaban, Mungka, Akabiluru, Suliki, Guguak, Harau, Bukik Barisan, Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari dan Kapur IX. Kegiatan pengembangan pada kondisi saat ini dilakukan oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pada tahun 2020 tercatat 445.695.800 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas, Gurami, Nila, dan ikan Lele.
- b. Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2020 tercatat sebesar 3.412,02 ton dimana produksi terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu sebesar 2.000,56 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 3.801,69 ton, terjadi penurunan sebesar 389,67 ton dengan Produksi rata-rata 0,90 ton/ha pada tahun 2020.

Perkembangan produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.12
Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Untuk produk unggulan dibidang perikanan adalah ikan gurami, hal ini dikarenakan komoditi ini sudah dipasarkan tidak hanya didalam negeri tapi sudah keluar negeri. Produksi ikan gurami selama

kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ikan gurami sehingga produk unggulan dapat menjadi produk unggulan daerah yang bernilai jual tinggi dan dapat bersaing di pasar perikanan. Disamping ikan gurami, 6 (enam) jenis ikan lainnya yang merupakan produksi daerah selama kurun waktu tahun 2016-2020 secara rata-rata mengalami fluktuatif, yang artinya kenaikan produksi setiap tahunnya tidak stabil seperti produksi ikan gurami dikarenakan permintaan pasar dan persaingan pasar yang banyak. Produksi komoditas perikanan untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di samping.

Secara nilai angka, perkembangan produksi ikan budidaya di Kab. Lima Puluh Kota tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27
Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Jenis Produksi Komiditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ikan mas	10.451,21	12.403,30	10.972,66	11.017,95	10.582,59
2	Ikan nila	18.824,13	13.492,59	13.561,82	13.594,77	12.847,67
3	Ikan gurami	5.567,04	5.175,01	6.219,82	6.831,05	7.880,60
4	Ikan lele	8.043,92	7.671,21	7.787,07	6.907,40	8.239,31
5	Ikan patin	2.940,86	2.528,70	2.692,24	2.759,14	2.765,41
6	Ikan nilem	1.602,52	1.660,05	1.528,55	2.064,10	953,39
7	Ikan lainnya	1.252,34	1.060,89	1.230,34	1.238,50	1.238,56
Jumlah		43.560,15	43.991,75	43.992,50	44.412,91	44.507,53

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Untuk tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah produksi perikanan Budidaya Kolam masih didominasi oleh Perikanan budidaya kolam sebesar 43.381,38 ton yang naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 42.939,70 ton. Tetapi untuk produksi perikanan budidaya sawah mengalami penurunan sebesar 26,92 ton dari tahun 2019 sebanyak 740,39 ton menjadi 713,47 ton di tahun 2020. Untuk Benih ikan secara series tetap bertambah setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 benih ikan yang diproduksi sebanyak 445.695.800 ekor benih. Peningkatan benih ikan ini merupakan keseriusan daerah dalam meningkatkan produksi perikanan, namun untuk terus meningkatkan produksi benih ikan ini, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sarana dan parasaran pengembangan benih ikan. Terhadap produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.28
Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Produksi Perikanan	Jumlah Produksi pada tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perikanan Budi daya sawah (ton)	2.747,48	1.781,72	740,39	713,47	187
2	Perikanan Budidaya kolam (ton)	40.282,90	41.785,90	42.939,70	43.381,38	43.996,27
3	Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton)	18.012,68	3.677,03	3.702,25	3.801,69	3.412,02
4	Benih Ikan (ekor)	257.628.000	406.944.570	428.268.450	440.990.000	445.695.800

Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Potensi Perikanan yang tersebar di 13 Kecamatan terdiri dari Kegiatan Budidaya, Penangkapan, Pengolahan Hasil Perikanan/Pasca Panen. Potensi perikanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan baik untuk usaha budidaya Pembesaran, pembenihan, penangkapan di Perairan umum dan Pengolahan/Pasca Panen dan Pemasaran. Pada saat ini kegiatan perikanan ini sudah didukung oleh 640 kelompok perikanan yang terdiri dari 539 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 63 Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas), 22 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) dan 16 Kelompok Usaha Bersama (KUB). Jumlah kelembagaan perikanan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.29
Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	KELEMBAGAAN				Jumlah Total
		Pokdakan	Poklahsar	KUB	Pokmaswas	
1	Harau	75	7	-	11	93
2	Akabiluru	47	1	-	5	53
3	Luak	46	2	-	-	48
4	Lareh Sago Halaban	65	-	-	4	69
5	Payakumbuh	46	4	-	3	53
6	Pangkalan Koto Baru	36	4	12	4	56
7	Kapur IX	41	-	4	13	58
8	Situjuah Limo Nagari	20	-	-	2	22
9	Bukik Barisan	25	-	-	6	31
10	Guguak	57	2	-	2	61
11	Suliki	26	1	-	8	35
12	Gn Omeh	16	-	-	2	18
13	Mungka	39	1	-	3	43
	Jumlah	539	22	16	63	640

Sumber Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota

e. Sektor Perindustrian

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2016-2020, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat pada dibawah ini. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 8,21 % menurun menjadi 7,19 % tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah. Perkembangan kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	8,21	7,85	7,61	7,25	7,19

2019* Angka sementara

2020** Angka sangat sementara

Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Hal ini sesuai dengan data jumlah industri formal, unit usaha, nilai produksi dan tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 yang cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di
Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Industri	Unit Usaha			Produksi (Rp,000)			Tenaga Kerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Industri Pangan	2.514	2.533	937	710.298.606	3.750.330.299	62.968.161,107	5.689	5.769	NA
2	Industri Sandang dan Kulit	139	414	100	24.917.195	75.677.364.500	11.375.978,380	1.192	5.431	NA
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	4.133	4.383	5.892	119.081.750	73.990.184.000	295.391.998,511	12.833	13.891	NA

No	Jenis Industri	Unit Usaha			Produksi (Rp,000)			Tenaga Kerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
4	Industri Logam dan Elektronika	9	9	48	1.113.400.000	113.400.000	7.485,515	25	25	NA
5	Industri Kerajinan	277	277	203	166.375.951	166.375.951	1.378.206,307	4.498	4.498	NA
Jumlah		7.072	7.616	7.180	2.134.073.502	153.697.654.750	371.121.829,820	24.237	29.614	NA
2017*		8.193			780.518.815			24.314		
2016*		8.193			780.518.815			24.314		

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui :

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha - usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti : mesin jahit, mesin spinner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain : produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffe dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

f. Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan asing maupun domestik yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda.

Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang – Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan Geo Park, Destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini merupakan anugerah dari Alloh Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang terdapat di 7 kecamatan Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki Bukik Barisan dan Akabiluru. Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi terdapat di kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX , Gunuang omeh dan Situjuh Limo Nagari. Terdapat 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, Budaya dan

Hasil Buatan Manusia. Selanjutnya terdapat 104 daya tarik wisata alam, 84 daya tarik wisata Budaya dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 4 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik dan Rumah Godang Sungai Beringin. Jumlah kunjungan wisata Kapalo Bandar Taram tahun 2020 sebanyak 130.904 orang dengan jumlah Wisnu sebanyak 130.894 orang dan Wisman sebanyak 10 orang. Pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2019 sebanyak 9.322 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Juni sebanyak 29.808 orang. Jumlah kunjungan wisata Lembah Harau Kecamatan Harau tahun 2020 sebanyak 379.927 orang dengan jumlah Wisnu sebanyak 379.325 orang dan Wisman sebanyak 602 orang. Pada tahun 2020 ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lembah Harau mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 4.110 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 71.053 orang dan tidak ada wisatawan yang berkunjung pada bulan April dan Mei yang disebabkan oleh adanya kebijakan PSBB guna memutus penyebaran Virus Corona. Jumlah kunjungan wisata Pusako Rumah Gadang yang terletak di Sungai Beringin sebanyak 8.485 orang pada tahun 2020, dan mengalami penurunan dari tahun 2019 yang tercatat sebanyak 2.947 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Juli dan Januari sebanyak 1.458 orang dan 1.449 orang. Terhadap wisata alam yang ada di Batang Tabit memiliki kenaikan kunjungan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 135.659 orang yang terdiri dari 135.634 orang wisnu dan 25 orang wisman. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 26.888 orang. Data kunjungan wisata selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.32
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Destinasi Wisata	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu
1.	Lembah Harau	2.219	202.420	2.631	259.560	5.188	398.642	6.833	377.204	379.325	602
2.	Kapalo Banda	47	44.908	80	49.643	129	92.428	162	121.420	130.894	10
3.	Batang Tabik	268	90.372	41	94.812	99	104.402	135	126.913	135.634	25
4.	Rumah Gadang S.Beringin	72	2.993	95	8.041	142	9.489	186	11.246	8.443	42
	Jumlah	2.607	340.693	2.847	412.056	5.558	604.961	7.316	636.783	654.296	679

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019- 2021

Peningkatan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu 2016-2020 masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan Negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini masih kurangnya Kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan parasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang rendah.

Terhadap perkembangan destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33
Tingkat Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Destinasi Wisata	Lokasi	Status	Capaian
1	Lembah Harau	Nagari Harau	Berkembang	60%
2	Kapalo Banda	Nagari Taram	Berkembang	40%
3	Batang Tabik	Nagari Sungai Kamuyang	Berkembang	60%
4	Kampung Sarugo	Nagari Koto Tinggi	Rintisan	50%
5	Aia Baba	Nagari Halaban	Rintisan	60%
6	Kubua Jawi Camp	Nagari Sungai Kamuyang	Rintisan	20%
7	Air Terjun Lubuak Batang	Nagari Koto Bangun	Rintisan	40%
8	Air Terjun Lubuak Bulan	Nagari Simpang Kapuak	Rintisan	40%
9	Air Terjun Sarasah Tanggo	Nagari Sarilamak	Rintisan	60%
10	Ikan Banyak	Pangam Gadang	Rintisan	40%
11	Bumi Perkemahan Guak Lago	Nagari Limbanang	Rintisan	40%
12	Embung Baboy	Nagari Situjuh Batua	Rintisan	40%
13	Boncah godang	Nagari Tanjuang Bungo	Rintisan	60%

No	Destinasi Wisata	Lokasi	Status	Capaian
14	Air Terjun Burai	Nagari Gurun	Berpotensi	60%
15	Embung Aia Limpato	Nagari Gurun	Berpotensi	60%
16	Aia Malanca	Nagari Harau	Berpotensi	60%
17	Air Terjun Sarasah Barasok	Nagari Maek	Berpotensi	80%
18	Kawasan Wisata Talang Maua	Nagari Talang Maua	Berpotensi	80%
19	Bukik Pao Ruso	Nagari Maek	Berpotensi	100%
20	Gunuang Sago	Nagari Tj Aro Sikabu-kabu	Berpotensi	100%

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota

Dari 20 Destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, baru 3 destinasi yang statusnya berkembang, sedangkan 10 destinasi berstatus rintisan dan 7 destinasi dengan status berpotensi. Ciri- ciri destinasi wisata dengan status berpotensi adalah Destinasi berpotensi dikembangkan menjadi objek wisata; Sarana dan prasarana wisata belum ada; Wisatawan yang berkunjung belum ada /masih sedikit; dan Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh / masih rendah.

Destinasi wisata dengan status rintisan mempunyai ciri- ciri sebagai berikut : Destinasi sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan lokal; Fasilitas sarana dan prasarana wisata sudah berkembang tapi masih terbatas; Sudah mulai ada aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat; Sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata; dan Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait. Ciri- ciri destinasi wisata berkembang adalah Destinasi sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan; Fasilitas sarana prasarana pariwisata mulai berkembang; Sudah mulai ada aktivitas ekonomi dan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat; Sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata; dan Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait.

Dari Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten LimaPuluh Kota Tahun 2016-2032, 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun daya tarik tersebut tersebar dalam 13 Kecamatan dan terdiri dari daya tarik wisata alam, Budaya dan Hasil Buatan Manusia. Dalam perda tersebut terdapat 104 daya tarik wisata alam, 84 daya tarik wisata Budaya dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuh Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Berdasarkan data-data di atas, kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk dibanahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut, antara lain adalah : (1) menjadikan kawasan Lembah Harau sebagai kawasan Geopark, (2) menumbuhkan objek-objek wisata baru melalui potensi nagari, (3) meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, (4) mengoptimalkan promosi pariwisata, (5) meningkatkan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-

betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta (6) mengembangkan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan (7) melakukan inovasi untuk pengembangan pariwisata daerah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 10,192 triliun rupiah tahun 2019 menjadi 11,062 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami pertumbuhan negatif sekitar -1,16 persen, tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif PDRB ini disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha akibat dari pandemi Covid 19.

Sampai tahun 2020, struktur ekonomi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (32,86 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (15,80 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (9,88 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan (7,57 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (7,19 persen), Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. Secara lengkap nilai dan kontribusi sektor PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.35
Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.338.542,35	3.448.743,55	3.549.375,97	3.627.500,32	3.635.364,98
B Pertambangan dan Penggalan	780.648,03	804.766,28	829.436,82	855.610,00	837.299,80
C Industri Pengolahan	789.187,00	795.029,18	811.045,71	811.718,30	795.494,80
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.586,63	1.684,21	1.787,82	1.853,11	1.727,58
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.915,74	3.162,75	3.314,18	3.448,65	3.573,62
F Konstruksi	456.127,93	498.295,99	534.556,71	576.507,07	545.559,45
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.427.029,25	1.523.011,49	1.633.580,72	1.754.972,44	1.747.641,03
H Transportasi dan Pergudangan	921.377,47	1.011.854,34	1.104.620,62	1.207.400,99	1.093.136,56
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.412,22	61.835,92	66.427,97	70.685,02	63.130,22
J Informasi dan Komunikasi	523.619,30	580.604,42	633.511,48	693.219,28	746.881,02
K Jasa Keuangan dan Asuransi	165.676,85	169.332,15	169.886,88	174.527,09	175.242,95
L Real Estat	111.954,91	116.656,54	122.075,07	128.414,00	128.472,23
M,N Jasa Perusahaan	2.872,34	3.030,10	3.205,10	3.415,68	3.221,18
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	529.812,23	558.206,06	596.839,32	637.024,58	631.755,80
P Jasa Pendidikan	258.550,64	280.754,71	303.199,61	328.613,00	344.062,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.543,94	143.762,19	156.121,44	169.892,46	181.746,75
R,S,T,U Jasa lainnya	112.407,70	122.917,73	134.276,05	147.624,00	128.000,62
Produk Domestik Regional Bruto	9.611.264,54	10.123.647,61	10.653.261,47	11.192.425,99	11.062.311,08

2019* Angka sementara

2020** Angka sangat sementara

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap nilai kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,74	34,07	33,32	32,41	32,86
B Pertambangan dan Penggalian	8,12	7,95	7,79	7,64	7,57
C Industri Pengolahan	8,21	7,85	7,61	7,25	7,19
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F Konstruksi	4,75	4,92	5,02	5,15	4,93
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,85	15,04	15,33	15,68	15,80
H Transportasi dan Pergudangan	9,59	9,99	10,37	10,79	9,88
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,59	0,61	0,62	0,63	0,57
J Informasi dan Komunikasi	5,45	5,74	5,95	6,19	6,75
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,67	1,59	1,56	1,58
L Real Estat	1,16	1,15	1,15	1,15	1,16
M,N Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,51	5,51	5,60	5,69	5,71
P Jasa Pendidikan	2,69	2,77	2,85	2,94	3,11
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,42	1,47	1,52	1,64
R,S,T,U Jasa lainnya	1,17	1,21	1,26	1,32	1,16
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2019* Angka sementara

2020** Angka sangat sementara

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota 2021

Untuk meningkatkan perekonomian disuatu daerah yang mesti diperhatikan adalah lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah tersebut karena jika melakukan investasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar maka akan lebih besar pengaruhnya terhadap nilai PDRB jika dibandingkan berinvestasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi kecil.

Nilai PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp. 15,533 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 80,438 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 15,613 triliun rupiah, turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya produksi di beberapa lapangan usaha.

Sampai tahun 2020, struktur ekonomi menurut lapangan usaha Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (33,18 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (14,84 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (9,92 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (8,1 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (6,36 persen), Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. Nilai sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.37
Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.613.995,74	4.836.292,66	5.045.159,06	5.220.422,38	5.153.821,90
B Pertambangan dan Penggalian	1.100.446,39	1.148.315,68	1.212.854,15	1.277.022,22	1.258.458,83
C Industri Pengolahan	970.538,10	973.393,24	1.002.780,57	973.286,14	987.902,39
D Pengadaan Listrik dan	2.064,19	2.227,79	2.389,39	2.730,00	2.578,30

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
Gas					
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.519,92	3.830,92	4.073,31	4.379,79	4.543,26
F Konstruksi	619.201,78	676.796,93	740.789,89	828.385,36	821.960,68
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.785.852,03	1.929.240,21	2.120.260,83	2.337.507,12	2.305.423,69
H Transportasi dan Pergudangan	1.187.563,31	1.321.730,73	1.482.839,53	1.671.298,40	1.541.444,55
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.361,59	97.097,51	107.078,61	121.650,02	110.362,39
J Informasi dan Komunikasi	574.324,39	646.531,01	742.403,20	840.567,94	904.092,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi	222.304,60	230.431,16	238.446,46	257.628,00	263.315,24
L Real Estat	145.263,07	153.477,60	164.508,64	178.677,00	180.974,62
M,N Jasa Perusahaan	3.798,01	4.064,32	4.500,21	4.948,39	4.710,44
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666.710,73	741.549,91	799.916,63	910.648,45	982.826,57
P Jasa Pendidikan	368.737,60	406.135,25	451.124,85	516.705,00	543.521,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167.549,02	184.422,71	207.655,42	236.112,23	259.993,88
R,S,T,U Jasa lainnya	158.314,03	175.657,10	198.702,47	231.527,00	207.126,54
Produk Domestik Regional Bruto	12.677.544,50	13.531.194,73	14.525.483,21	15.613.495,46	15.533.057,40

2019* Angka sementara

2020** Angka sangat sementara

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap nilai kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,4	35,74	34,73	33,44	33,18
B Pertambangan dan Penggalan	8,68	8,49	8,35	8,18	8,1
C Industri Pengolahan	7,66	7,19	6,9	6,23	6,36
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F Konstruksi	4,88	5	5,1	5,31	5,29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,09	14,26	14,6	14,97	14,84
H Transportasi dan Pergudangan	9,37	9,77	10,21	10,7	9,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	0,72	0,74	0,78	0,71
J Informasi dan Komunikasi	4,53	4,78	5,11	5,38	5,82
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,75	1,7	1,64	1,65	1,7
L Real Estat	1,15	1,13	1,13	1,14	1,17
M,N Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,48	5,51	5,83	6,33
P Jasa Pendidikan	2,91	3	3,11	3,31	3,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,36	1,43	1,51	1,67
R,S,T,U Jasa lainnya	1,25	1,3	1,37	1,48	1,33
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

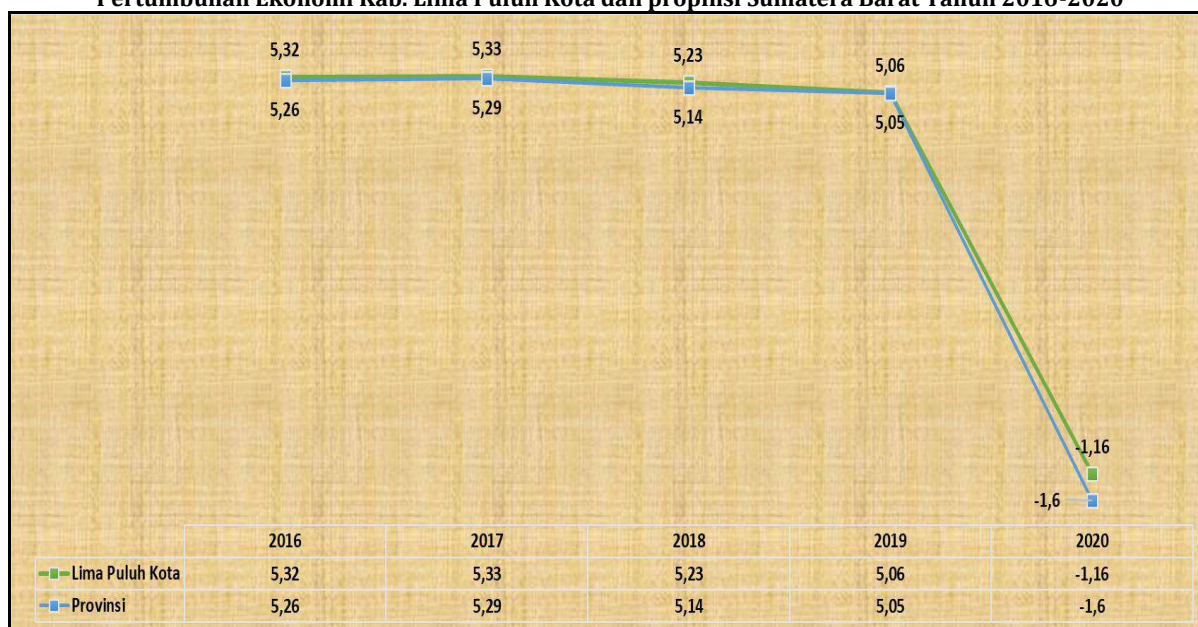
2019* Angka sementara

2020** Angka sangat sementara

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota

Secara kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Dari data dan informasi diatas dapat dilihat bahwa persentase kontribusi lapangan usaha ini menurun diikuti dengan pertumbuhan lapangan usaha ini juga menurun. Hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkan pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang terkait dengan pertanian, peternakan dan perikanan yang berkontribusi terhadap lapangan usaha ini. Disamping itu, terhadap penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi masih rendah.

Grafik 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lima Puluh Kota dan provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Lima Puluh Kota dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami tren melambat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,32 persen turun menjadi -1,16 persen di tahun 2020. Disini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -1,16 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di atas Sumatera Barat, sebagaimana yang terlihat dari grafik dibawah ini.

Pada tahun 2020, sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar -13,29 persen, dan diikuti oleh Penyediaan akomodasi dan makan minum (-10,69 persen) dan Transportasi dan pergudangan (-9,46 persen). Hal ini disebabkan oleh diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah secara Nasional untuk mencegah penyebaran virus Covid 19. Hal ini berdampak akses masyarakat untuk beraktifitas di luar rumah dibatasi sehingga berpengaruh terhadap sektor-sektor tersebut. Walaupun pertumbuhan

negatif, tetap ada sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan, yakni sektor informasi dan komunikasi (7,74 persen), Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (6,98 persen) serta jasa pendidikan (4,7 persen). Ketiga sektor tersebut tetap tumbuh karena meningkatnya penggunaan akses internet di semua lini masyarakat, sehingga akses internet menjadi suatu kebutuhan pokok selama masa pandemi Covid 19 ini. Pertumbuhan PDRB ADHK selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.39
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kab. Lima Puluh Kota Periode 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,95	3,3	2,92	2,2	0,22
B Pertambangan dan Penggalan	5,59	3,09	3,07	3,16	-2,14
C Industri Pengolahan	5,77	0,74	2,01	0,08	-2
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,01	6,15	6,15	3,65	-6,77
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,78	8,47	4,79	4,06	3,62
F Konstruksi	6,91	9,24	7,28	7,85	-5,37
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	6,73	7,26	7,43	-0,42
H Transportasi dan Pergudangan	9	9,82	9,17	9,3	-9,46
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,77	9,61	7,43	6,41	-10,69
J Informasi dan Komunikasi	9,83	10,88	9,11	9,42	7,74
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,51	2,21	0,33	2,73	0,41
L Real Estat	5,11	4,2	4,64	5,19	0,05
M,N Jasa Perusahaan	4,66	5,49	5,78	6,57	-5,69
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,22	5,36	6,92	6,73	-0,83
P Jasa Pendidikan	9,03	8,59	7,99	8,38	4,7
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,87	8,46	8,6	8,82	6,98
R,S,T,U Jasa lainnya	8,13	9,35	9,24	9,94	-13,29
Produk Domestik Regional Bruto	5,32	5,33	5,23	5,06	-1,16

2019* Angka sementara,

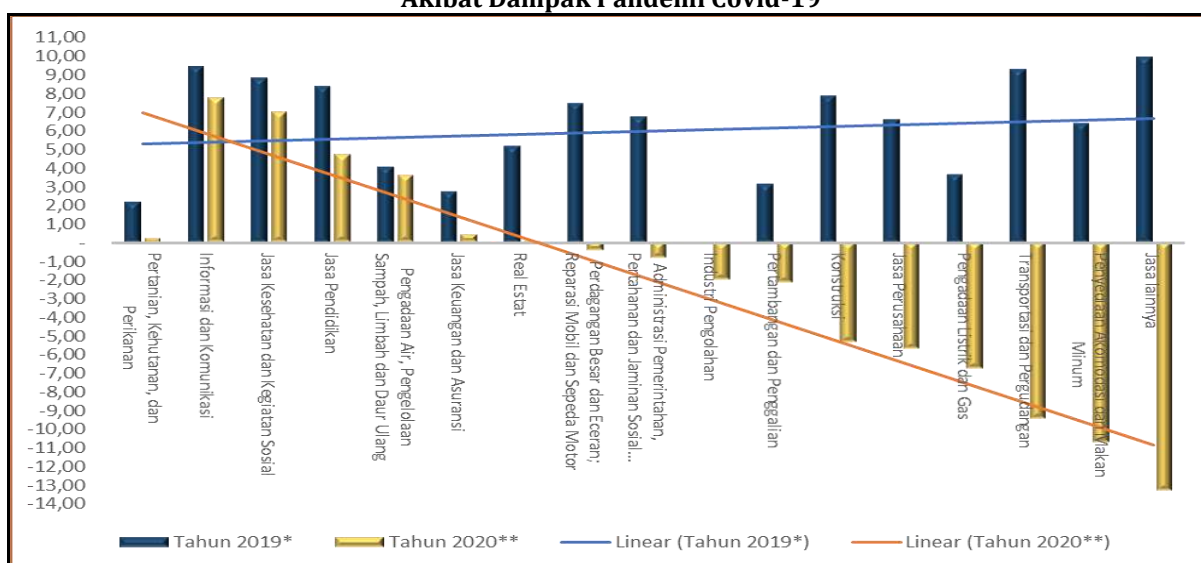
2020** Angka sangat sementara;

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota

Jika dibandingkan pertumbuhan PDRB ADHK kondisi sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) dengan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 (tahun 2020) terlihat dari 17 lapangan usaha, sebanyak 10 lapangan usaha mengalami kontraksi dan sebanyak 7 lapangan usaha tidak mengalami kontraksi. Ketujuh lapangan usaha yang tidak mengalami kontraksi adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa pendidikan; dan lapangan usaha Kesehatan dan kegiatan sosial. Walaupun ketujuh lapangan usaha tersebut tidak mengalami kontraksi, tetapi pertumbuhannya dari tahun 2019 mengalami penurunan. Dari ketujuh lapangan usaha tersebut yang paling besar penurunan pertumbuhannya adalah real estate (turun sebesar 5,14 persen), selanjutnya diikuti oleh jasa Pendidikan (turun sebesar 3,68 persen), jasa keuangan dan asuransi (turun sebesar 2,32 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (turun sebesar 1,98 persen), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (turun sebesar 1,84 persen), informasi dan komunikasi (turun sebesar 1,68 persen), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (turun sebesar 0,44 persen).

Kebijakan pemerintah terhadap penanganan bencana Covid-19 mengakibatkan 10 lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Lapangan usaha yang sangat besar terdampak adalah lapangan jasa lainnya diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, konstruksi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perbandingan pertumbuhan 17 lapangan usaha dalam PDRB ADHK tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.14
Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020
Akibat Dampak Pandemi Covid-19



2019* Angka sementara,

2020** Angka sangat sementara;

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota (data diolah)

Jika dibandingkan kontribusi terbesar dan urutan kontribusi terbesar sampai terkecil terhadap PDRB ADHK tahun 2019 dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan artinya 17 lapangan usaha PDRB tersebut secara persentase besaran kontribusi tahun 2019 dengan 2020 sama. Akibat pandemi covid-19, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan kontribusi terbesar pada tahun 2019 masih tetap berkontribusi terbesar pada tahun 2020 bahkan mengalami kenaikan dari 32,41 persen (tahun 2019) menjadi 32,86 persen (tahun 2020) atau naik sebesar 0,45 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi sebesar 15,68 persen (tahun 2019) menjadi 15,8 persen (tahun 2020) atau naik sebesar 0,12 persen dan diikuti oleh 6 (enam) lapangan usaha lainnya yang mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB ADHK antara lain informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan real estate. Tiga lapangan usaha mengalami kontribusi tetap antara lain pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa perusahaan, pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 6 (enam) lapangan usaha lainnya mengalami secara kontribusi mengalami penurunan antara lain transportasi dan perdagangan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, konstruksi, jasa lainnya dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 2.40
Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019-2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19

Lapangan Usaha	Tahun 2019*				Tahun 2020**			
	Kontribusi		Pertumbuhan		Kontribusi		Pertumbuhan	
	Urutan	Nilai	Urutan	Nilai	Urutan	Nilai	Urutan	Nilai
J Informasi dan Komunikasi	6	6,19	2	9,42	6	6,75	1	7,74
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11	1,52	4	8,82	10	1,64	2	6,98
P Jasa Pendidikan	9	2,94	5	8,38	9	3,11	3	4,70
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15	0,03	12	4,06	16	0,03	4	3,62
K Jasa Keuangan dan Asuransi	10	1,56	15	2,73	11	1,58	5	0,41
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1	32,41	16	2,20	1	32,86	6	0,22
L Real Estat	13	1,15	11	5,19	13	1,16	7	0,05
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2	15,68	7	7,43	2	15,8	8	-0,42

Lapangan Usaha	Tahun 2019*				Tahun 2020**			
	Kontribusi		Pertumbuhan		Kontribusi		Pertumbuhan	
	Urutan	Nilai	Urutan	Nilai	Urutan	Nilai	Urutan	Nilai
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	5,69	8	6,73	7	5,71	9	-0,83
C Industri Pengolahan	5	7,25	17	0,08	5	7,19	10	-2,00
B Pertambangan dan Penggalian	4	7,64	14	3,16	4	7,57	11	-2,14
F Konstruksi	8	5,15	6	7,85	8	4,93	12	-5,37
M,N Jasa Perusahaan	16	0,03	9	6,57	15	0,03	13	-5,69
D Pengadaan Listrik dan Gas	17	0,02	13	3,65	17	0,02	14	-6,77
H Transportasi dan Pergudangan	3	10,79	3	9,30	3	9,88	15	-9,46
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14	0,63	10	6,41	14	0,57	16	-10,69
R,S,T,U Jasa lainnya	12	1,32	1	9,94	12	1,16	17	-13,29
Produk Domestik Regional Bruto		100		5,06		100		-1,16

2019* Angka sementara;

2020** Angka sangat sementara;

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota (data diolah)

Terhadap nilai sektor ekonomi terhadap pembentuk PDRB ADHK, akibat dampak pandemi covid-19 sebanyak 7 (tujuh) lapangan usaha mengalami kenaikan pada tahun 2020. Kenaikan terbesar adalah jasa informasi dan komunikasi naik sebesar 53.661,74 juta rupiah dan diikuti oleh jasa Pendidikan naik sebesar 15.449,49 juta rupiah, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial naik sebesar 11.854,29 juta rupiah, pertanian, kehutanan, perikanan naik sebesar 7.864,66 juta rupiah, jasa keuangan dan asuransi naik sebesar 715,86 juta rupiah, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang naik sebesar 124,97 juta rupiah dan real estate naik sebesar 58,23 juta rupiah. Sepuluh lapangan usaha lainnya mengalami penurunan dengan penurunan terbesar terdapat pada transportasi dan pergudangan (turun sebesar 114.264,43 juta rupiah) dan terkecil pada lapangan pengadaan listrik dan gas (turun sebesar 125,53 juta rupiah). Secara rata-rata nilai ekonomi terhadap pembentuk PDRB ADHK pada tahun 2020 turun sebesar 130.114,91 juta rupiah. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi covid-19 serta kebijakan pemerintah terhadap penanganan pandemi covid seperti pembatasan/social distancing, refocussing anggaran dan lainnya yang berakibat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan yang drastis dari angka 5,06 persen (tahun 2019) menjadi -1,16 persen (tahun 2020).

2.2.2 PDRB Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita ini digunakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.41
PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi
Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	34,03	35,98	38,27	40,79	40,53
SUMATERA BARAT (Provinsi)	37,28	40,19	42,80	45,21	43,75

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Tren Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita (ADHB) tercatat sebesar 34,03 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 40,79 juta rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 260 ribu rupiah. Namun jika di bandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat, PDRB per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya terhadap PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.42
PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi
Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	25.797,34	26.920,49	28.077,73	29.254,02	28.843,78
SUMATERA BARAT (Provinsi)	28.164,93	29.310,69	30.477,76	31.669,59	30.618,67

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita (ADHK) tercatat sebesar 25,797 juta rupiah dan naik pada tahun 2019 sebesar 29,25 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 410 ribu rupiah. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun masih dibawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat.

2.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dapat di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.43
Perbandingan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

Daerah	Garis Kemiskinan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	357.824,00	370.506,00	388.689,00	403.030,00	451.295,00
Provinsi	425.141,00	453.612,00	476.554,00	503.652,00	544.315,00
Nasional	354.386,00	374.478,00	401.220,00	425.250,00	454.652,00

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Semenjak tahun 2016-2020, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Dengan meningkatnya garis kemiskinan, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin

Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.44
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional (ribu jiwa) Tahun 2016 – 2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	28,57	26,93	26,47	26,64	26,43
Sumatera Barat	371,55	364,51	357,13	348,22	344,23
Nasional	28.005,39	27.771,22	25.949,80	25.144,72	26.424,02

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi cenderung turun sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin naik kembali sebanyak 170 jiwa menjadi 26.640 jiwa. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan garis kemiskinan serta perubahan mekanisme penetapan data kemiskinan dari kementerian sosial.

Terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.45
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	7,59	7,15	6,99	6,97	6,86
Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Secara persentase, penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 terus turun sampai tahun 2020 menjadi 6,86 persen. Bila dihubungkan dengan target penurunan kemiskinan pada RPJMD periode 2016-2021, persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 6,99 telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 7,01 persen namun persentase penduduk miskin

Tahun 2020 merupakan tahun pandemi covid, secara umum kondisi ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat namun hal ini ternyata tidak berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, bahkan penduduk miskin dari tahun 2019 turun jumlahnya sebanyak 120 jiwa menjadi 26.430 jiwa. Hal ini salah satunya dipengaruhi karena adanya program pemerintah untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat seperti melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar serta pemberian Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai kepada masyarakat yang miskin dan masyarakat yang terdampak pandemic Covid. Untuk memastikan bahwa dalam 5 tahun kedepan, jumlah penduduk miskin tidak bertambah, maka pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mempertahankan program-program yang pro masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Disamping itu, tidak saja jumlah atau persentase penduduk miskin yang harus dikendalikan, tetapi Indeks Kedalaman dan Keperahan Kemiskinan juga harus diperhatikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 0,78, lebih rendah dari Provinsi yang P1 nya 0,92 dan Nasional yang P1 nya adalah 1,61. Disini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan lebih pendek dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Daerah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	1,06	1,09	1,09	0,51	0,78
Provinsi	1,10	1,00	1,04	0,94	0,92
Nasional	1,94	1,83	1,71	1,55	1,61

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Indeks Keparahen Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2020, Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) adalah 0,14 lebih rendah dari P2 Provinsi sebesar 0,2 dan Nasional sebesar 0,38. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dari pada Provinsi dan Nasional.

Namun demikian, indeks kedalaman maupun indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, yaitu sebesar 0,07 untuk P1 dan 0,27 untuk P2. Hal ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya pandemic Covid 19 yang memukul perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Indeks Keparahen Kemiskinan (P2)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Daerah	Indeks Keparahen Kemiskinan (P2)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	0,21	0,31	0,24	0,07	0,14
Provinsi	0,24	0,23	0,24	0,21	0,2
Nasional	0,53	0,48	0,44	0,38	0,38

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

2.2.4 Indeks Gini

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarnya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita).

Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat pemerataan menurut Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung
- 40 % Menengah : kelompok menengah
- 20 % Teratas : kelompok kaya

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- ✓ 2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 % dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 adalah sebesar 0,270 kemudian turun menjadi 0,222 persen di tahun 2020. Dengan nilai 0,222 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu lebih kecil dari nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.48
Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Barat	0,330	0,318	0,321	0,306	0,305
Kab.Lima Puluh Kota	0,270	0,262	0,283	0,238	0,222

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016–2020 masih berada pada posisi sedang yaitu berada pada angka 68,37 sampai dengan 69,47, dan tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebesar 69,47 turun 0,2 jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2019. Penurunan IPM ini salah satunya disebabkan oleh turunnya nilai pengeluaran per kapita disesuaikan yang turun sebesar 246 ribu rupiah per tahun. Perkembangan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2016–2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,27	69,41	69,47	69,7	69,79
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99
Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rp/org /th)	8.936,-	9.151,-	9.500,-	9.842,-	9.596,-

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas, IPM di pengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan begitu juga dengan dimensi kesehatan (angka harapan hidup) dan dimensi ekonomi (pengeluaran perkapita disesuaikan). Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, maka Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat ke 13. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan IPM ini. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.50
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2016–2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
LIMA PULUH KOTA	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
SUMATERA BARAT	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
NASIONAL	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2021, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang dituangkan di dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah 70,82 dan untuk pencapaian target IPM pada RPJPD sampai tahun 2025 adalah sebesar 78,5. Bila dibandingkan dengan realisasi pencapaian IPM di tahun 2020, maka target

tersebut belum tercapai baik terhadap target RPJMD tahun 2016-2021 maupun terhadap target RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata Rata Lama Sekolah dan bahkan pengeluaran perkapita disesuaikan justru mengalami penurunan.

Untuk perbandingan dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (pengeluaran perkapita yang disesuaikan) yang membangun terhadap IPM antara Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live births) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (still living children) per wanita usia (15 – 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi.

Pada komponen angka angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar 69,79 tahun lebih rendah bila dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 71,47 tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.51
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2016-2020

Wilayah	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
LIMA PULUH KOTA	69,27	69,31	69,47	69,7	69,79
SUMATERA BARAT	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
NASIONAL	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas, tidak adanya peningkatan terhadap angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sebesar 7,99 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 7,99 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Secara umum rata- rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 masih berada di bawah provinsi dan Nasional dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2016-2020

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
LIMA PULUH KOTA	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99
SUMATERA BARAT	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
NASIONAL	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

c. Harapan Lama sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah di asumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,29 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun atau hanya sampai pada strata diploma 2. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Dilihat perbandingan angka harapan sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi, maka angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2016-2020

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
LIMA PULUH KOTA	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29
SUMATERA BARAT	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
NASIONAL	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Bila dibandingkan antara rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih ada selisih sebesar 5,3 tahun, artinya masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

d. Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin baiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Untuk tahun 2020, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 9.596 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 9.596.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2016-2020

Wilayah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
LIMA PULUH KOTA	8.936	9.151	9.500	9.842	9.596
SUMATERA BARAT	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
INDONESIA	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

2.2.6 Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin tidak amannya kehidupan masyarakat, sehingga berdampak kepada semua aktivitas sosial dan ekonomi. Disamping itu tingginya angka kriminalitas juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan lingkungan tidak sesuai dengan nilai dan norma social yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016- 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.55
Angka Kriminalitas Per 100.000 penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020

Tahun	Gangguan Kamtibmas			Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
	Lapor	Selesai	Tunggakan			
2016	719	410	309	372.568	193	57
2017	588	254	334	376.072	156	43
2018	1.397	594	776	379.514	368	43
2019	1.061	548	513	382.817	277	52
2020	968	798	229	383.525	252	82

Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2019-2021 (diolah)

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat di mana pada tahun 2020 angka kriminalitas sebesar 252 mengindikasikan bahwa setiap 252 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Dari sisi tingkat penyelesaian gangguan Kamtibmas sampai tahun 2020 belum maksimal.

2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tren yang menurun sampai tahun 2019 dan naik di tahun 2020. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah sebesar 2,60 persen dan turun menjadi 2,30 persen di tahun 2019 dan naik menjadi 3,03 persen di tahun 2020. Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini lebih disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid 19 yang telah melanda Dunia dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi.

Tabel 2.56
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2016-2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh Kota	-	2,60	2,73	2,30	3,03
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (org)	4.591	3.927	2.815	2.922	2.956
Perempuan (org)	2.507	1.118	2.492	1.616	3.292
Jumlah	7.098	5.045	5.307	4.538	6.248

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Disamping pengangguran terbuka, juga dapat digambarkan Penduduk Usia Kerja (PUK) yang berusia 15 tahun ke atas. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 PUK perempuan lebih besar dari PUK laki-laki. Data tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.58
Penduduk Usia Kerja (PUK) Berusia 15 Tahun Keatas
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (org)	127.078	130.741	132.268	134.104	139.290
Perempuan (org)	132.985	136.368	137.792	139.319	144.524
Jumlah	260.063	267.109	270.060	273.423	283.814

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021

Angkatan kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, AK Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh laki-laki dan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.59
Angkatan Kerja (AK) Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (org)	104.516	109.639	110.606	115.869	118.093
Perempuan (org)	83.230	84.363	86.154	83.557	88.277
Jumlah	191.309	194.002	196.760	199.426	206.370

Sumber BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2017-2021

2.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, TPAK Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.60
Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar, Pencari Kerja Yang Ditempatkan
di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pencari kerja terdaftar	-	1.908	2.529	1.901	1.475
Pencari kerja ditempatkan	-	183	222	534	369
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	0,095	0,088	0,281	0,250

Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2016-2020 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara data dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.61
Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah mediator	-	-	-	-	-
Jumlah peraturan perusahaan	5	8	6	3	8
Jumlah perjanjian kerja bersama	1	1	1	1	1
Jumlah SP/SB	1	1	1	1	1
Jumlah lembaga kerjasama bipartite	1	0	0	0	-

Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami kenaikan tetapi kenaikan yang belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Persentase Angkatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 -2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Laki- Laki	57,68	58,69	58,69	60,89	61,59
Perempuan	45,19	44,58	45,10	43,40	46,03
Jumlah	51,38	51,59	51,85	52,09	53,81

Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021

Tabel 2.63
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan kerja	187.746	194.002	196.760	199.426	206.370
Jumlah penduduk usia 15 th keatas	260.063	267.109	270.060	273.423	283.814
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	72,19	72,63	72,86	72,94	72,71

Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga mengalami peningkatan namun belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.64
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (%)	82,25	83,86	83,62	86,40	84,78
Perempuan (%)	62,59	61,86	62,52	59,98	61,08
Jumlah	72,19	72,63	72,86	72,94	72,71

Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021

2.2.9 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Terhadap rasio penduduk yang bekerja, selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata 97,12 persen, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.65
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk yang bekerja	180.648	188.957	191.453	194.888	200.122
Angkatan kerja	187.746	194.002	196.760	199.426	206.370
Rasio Penduduk yang Bekerja	96,22	97,40	97,30	97,72	96,97

Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021

2.2.10 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Selama kurun waktu 2016-2020, produktivitas kerja dan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Produktivitas kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB ADHK (Rp. Juta)	9.611.264,54	10.123.647,61	10.653.261,47	11.192.425,99	11.062.311,08
2	Jumlah pekerja (penduduk umur>15 tahun) yang bekerja	180.648	188.957	191.453	194.888	200.122
3	Produktivitas kerja (Rp.juta)	53,20	53,58	55,64	57,43	55,28
4	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%)	5,32	0,70	3,86	3,21	-3,75

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2017-2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) dari tahun 2016-2019 selalu tumbuh walaupun melambat, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi, dimana laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja minus 3,75%. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia.

2.2.11 Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2016-2020 ketersediaan pangan utama beras selalu melebihi jumlah kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Tahun	Produksi Beras (ton/Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton)
2016	133.830,000	372.568	40.870,710	92.959,290
2017	134.775,000	376.072	41.255,098	93.519,902
2018	149.182,000	379.514	41.632,686	107.549,314
2019	154.232,000	382.817	41.995,025	112.236,975
2020	148.711,000	383.525	42.072,693	106.638,307

Catt : Konsumsi = 109,7 Kg/Kap/Tahun

Sumber : Dinas pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Terhadap pangan ini, walaupun cadangan pangan masih terkendali namun yang menjadi permasalahan adalah pemanfaatan pangan itu sendiri. Pemanfaatan dan konsumsi pangan masih belum betul-betul diperhatikan oleh masyarakat dan hal ini berakibat kepada Kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat terjadinya berbagai penyakit di masyarakat dengan pola konsumsi yang tidak tepat dan juga terjadinya gangguan gizi pada balita dan anak sperti terjadinya gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini tidak terlepas dari masih belum optimalnya pemerintah dalam pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pola konsumsi dan pengawasan terhadap pangan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan focus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum masih ada yang belum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemrintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

2.3.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

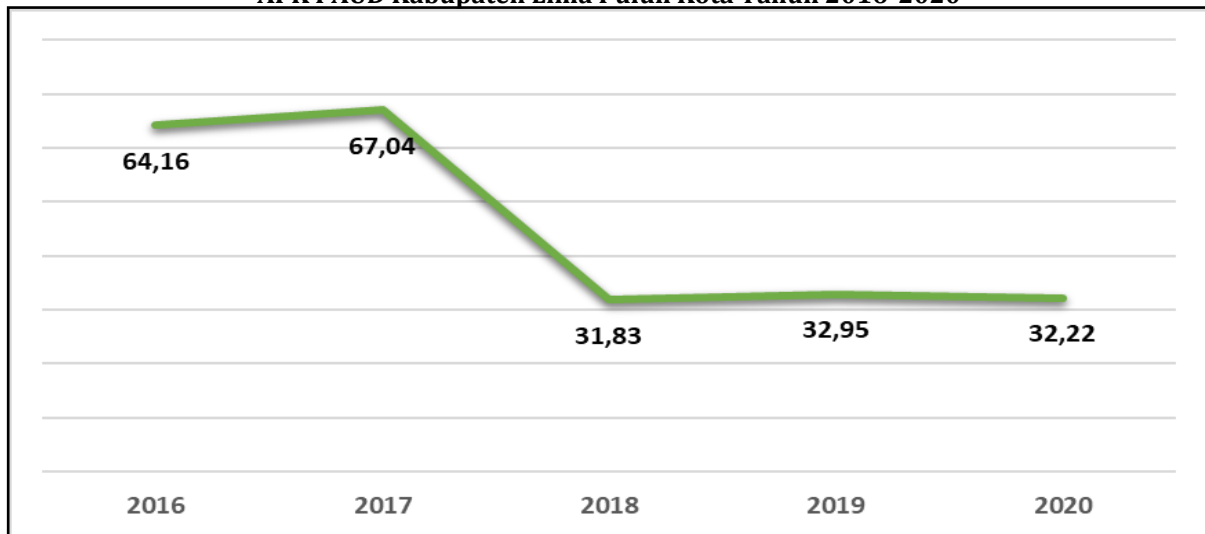
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa

memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. Berikut ditampilkan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020.

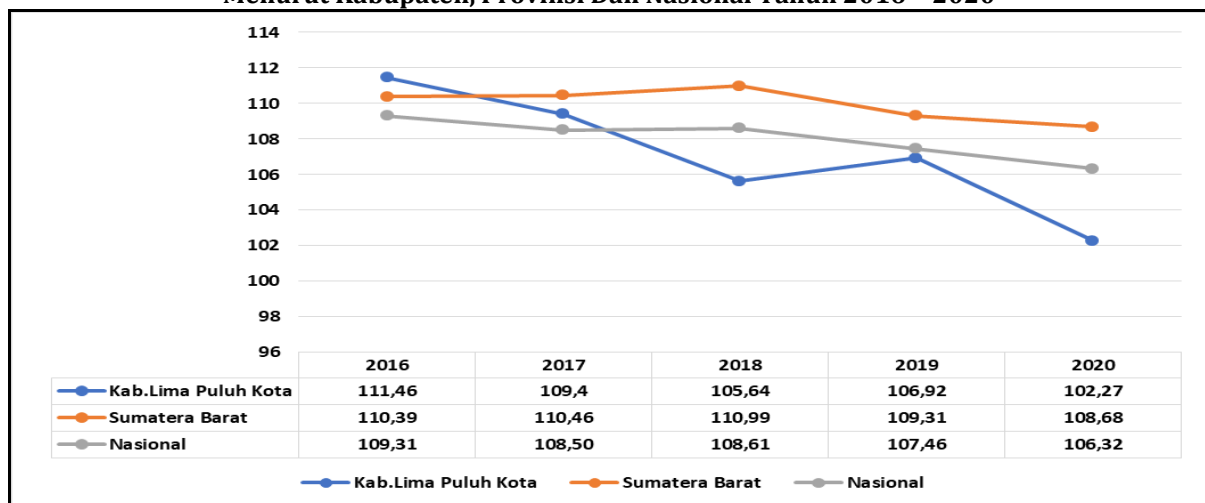
Grafik 2.15
APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bila dilihat dari nilai persentasenya, maka angka 32,22 di tahun 2020 masih cukup rendah, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kualitas, aksesibilitas, sarana dan prasarana PAUD yang belum memadai serta tingkat perekonomian penduduk.

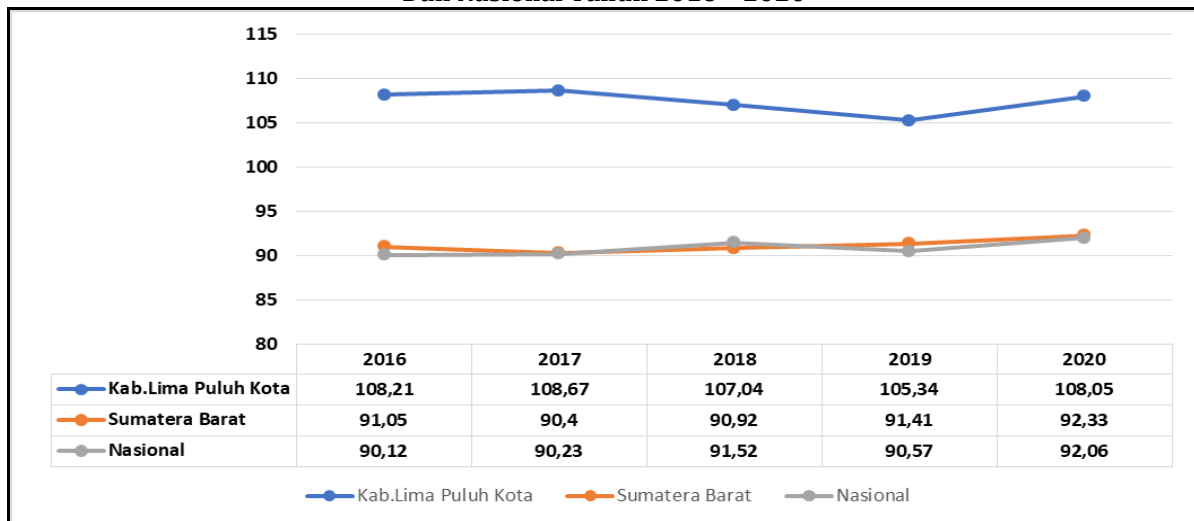
Grafik 2.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th
Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami tren menurun, dari 111,46 persen di tahun 2016 menjadi 102,27 persen di tahun 2020. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah di usia 7-12 sudah tinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu menampung penduduk usia sekolah tersebut lebih dari target yang sesungguhnya. Disamping itu, bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, sampai dengan tahun 2017 APK 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota berada diatas nasional, akan tetapi sejak tahun 2018 APK 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah pencapaian provinsi dan nasional.

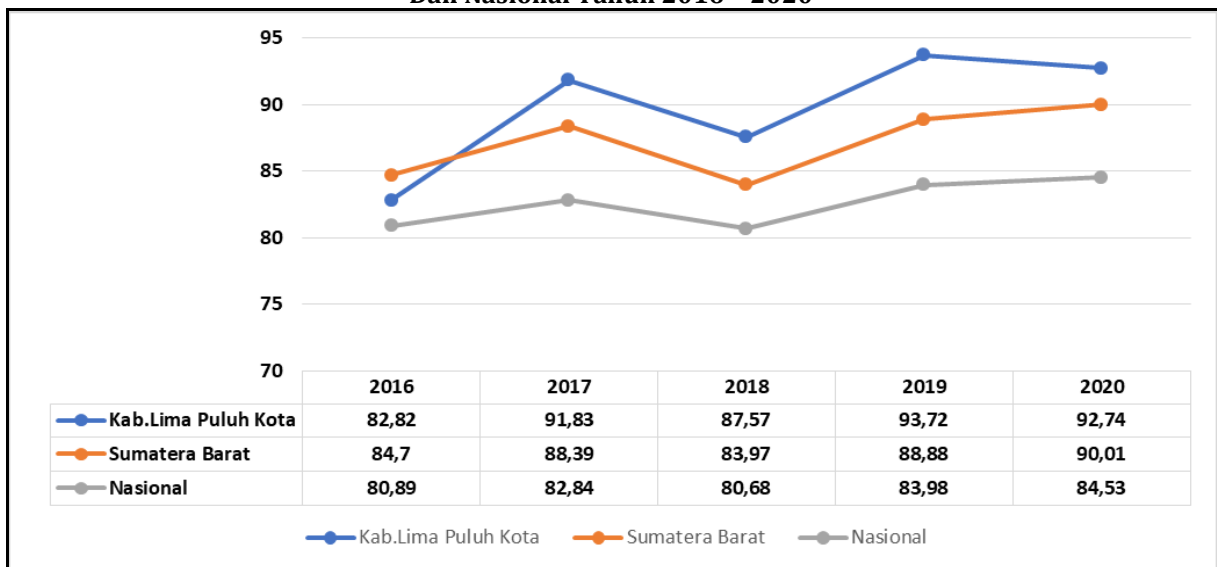
Grafik 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi
Dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sangat tinggi berada di atas Provinsi dan Nasional, artinya semua penduduk berusia 13-15 tahun tertampung semuanya di sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menandakan bahwa tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik.

Grafik 2.18
Angka Partisipasi Kasar (APK) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi
Dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

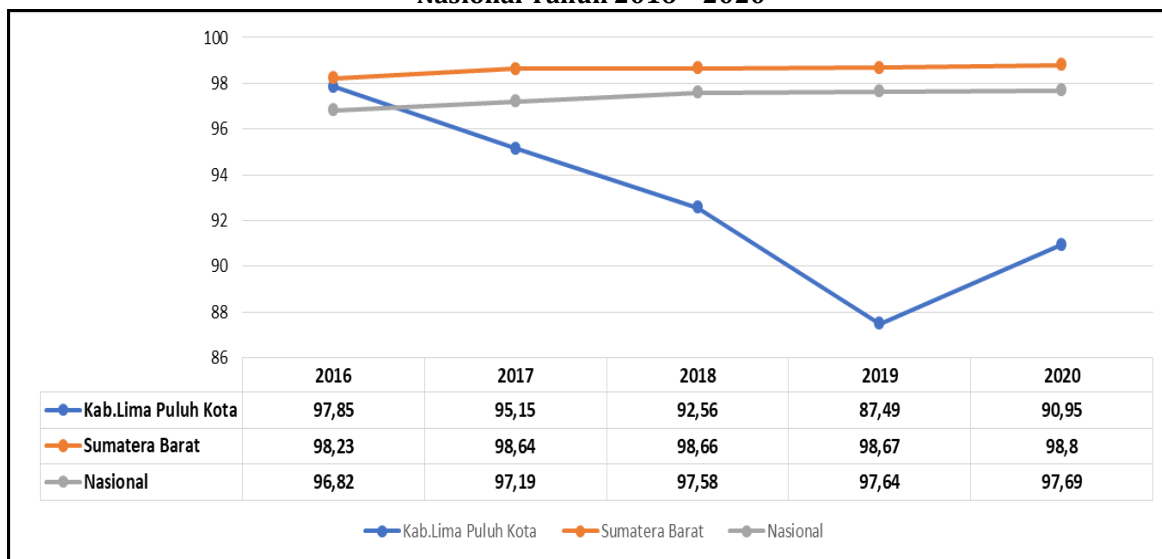
Angka Partisipasi Kasar (APK) 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2017 sampai tahun 2020 cukup positif berada di atas Provinsi dan Nasional, dimana pada tahun 2020 nilai APK 16-18

tahun Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 92,74, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia SMA di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Secara sederhana indikator ini juga merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

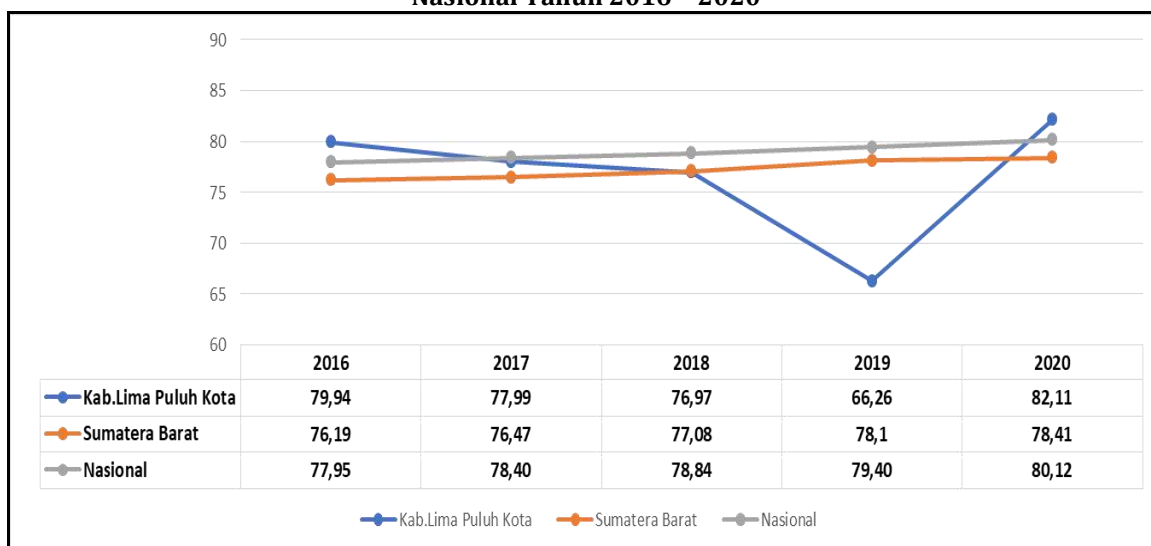
Grafik 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada grafik diatas, APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 90,95 persen, artinya sekitar 90,95 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/ sederajat.

Grafik 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 – 2020

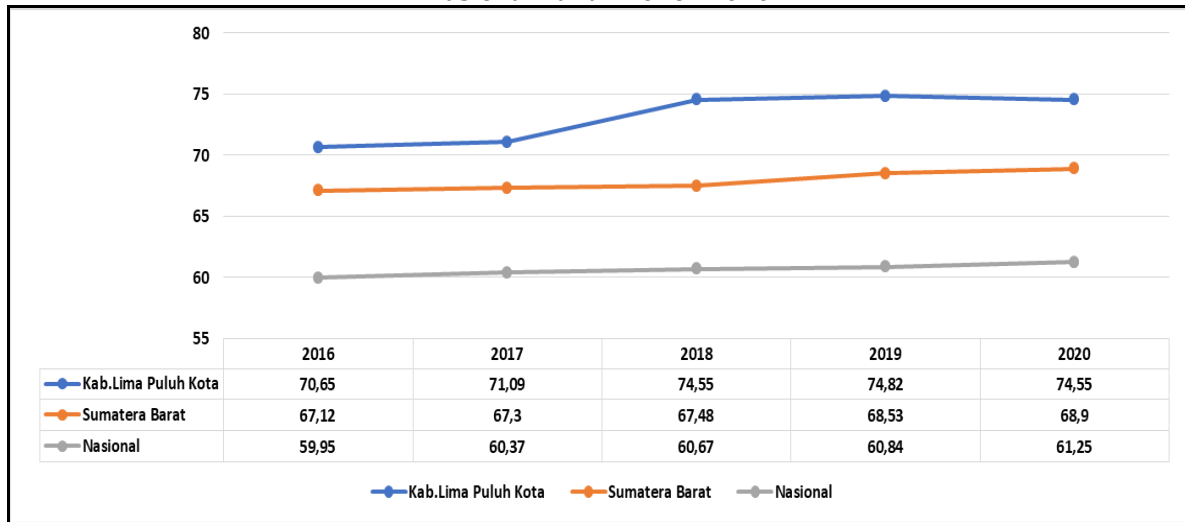


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuatif. Terjadi lonjakan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. APM 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.25

menjadi 80.25 artinya hanya sekitar 80.25 penduduk kabupaten lima puluh kota 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/ sederajat.

Grafik 2.21
Angka Partisipasi Murni (APM) 16 – 18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020



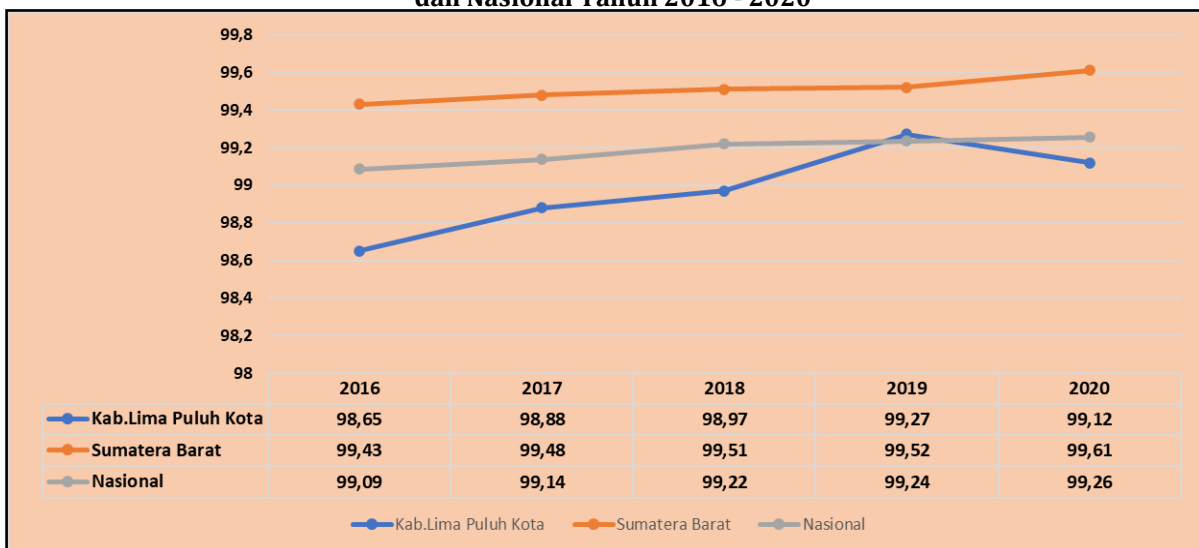
Sumber BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami tren yang positif. APM 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,27 menjadi 74,55, artinya hanya sekitar 74,55 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA/ sederajat.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat tingkat perkembangan pendidikan kabupaten Lima Puluh kota dapat digambarkan dengan Persentase Angka partisipasi Sekolah (APS), Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka partisipasi Sekolah (APS) dibagi dalam tiga kelompok umur yaitu 7-12 tahun untuk mewakili sekolah SD, 13-15 tahun mewakili SLTP dan 16-18 tahun mewakili SLTA

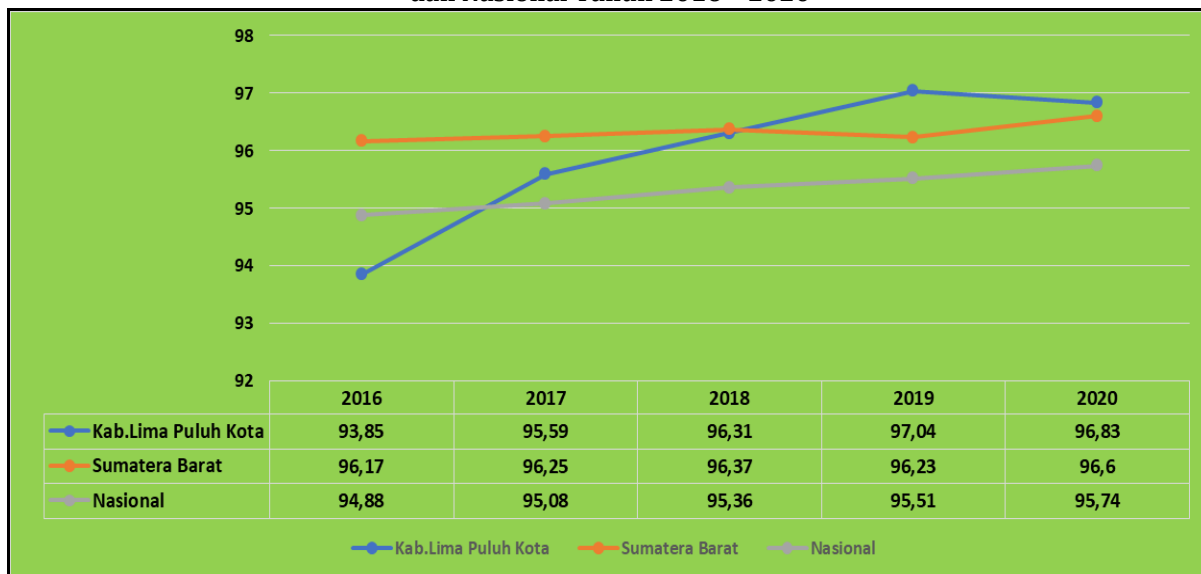
Grafik 2.22
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan grafik diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami tren positif, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun sebesar 99,12, hal ini menunjukkan bahwa hanya 1 orang dari 100 orang penduduk usia 7-12 tahun yang tidak tertampung pada pendidikan dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota.

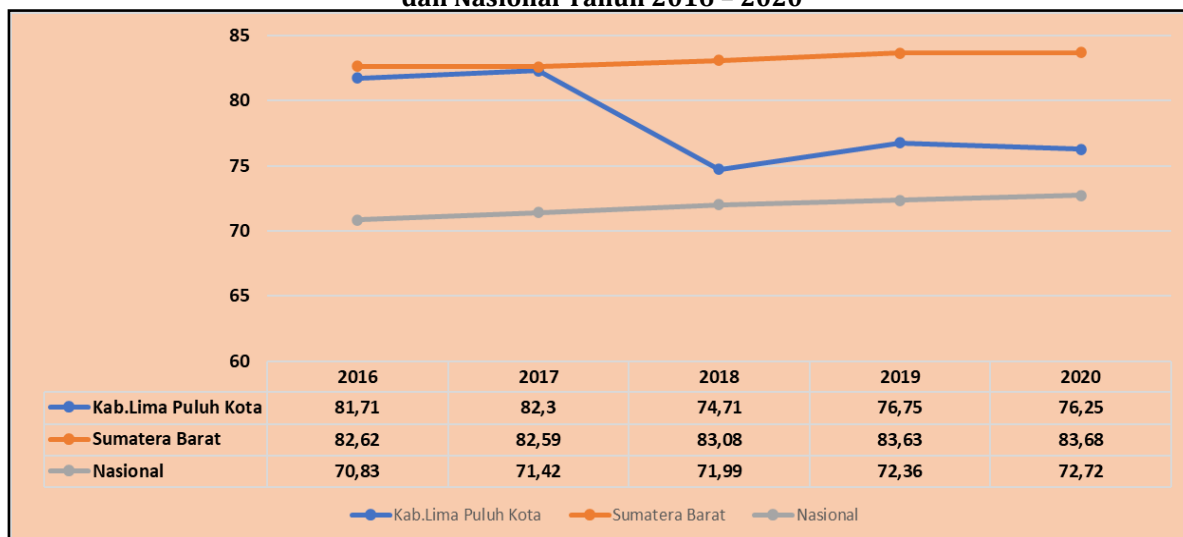
Grafik 2.23
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan grafik diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami tren positif, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 sebesar 96,83, hal ini menunjukkan bahwa hanya 4 orang dari 100 orang penduduk usia 13-15 tahun yang tidak tertampung pada pendidikan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 2.24
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan grafik diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif cenderung mengalami peningkatan, Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun sebesar 76,25, hal ini menunjukkan bahwa hanya 76 orang dari 100

orang penduduk usia 16-18 tahun yang sudah tertampung pada pendidikan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

d. Ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah

Dengan mengetahui rasio ketersediaan sekolah baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah, maka akan diketahui tingkat kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk baik diusia pendidikan dasar maupun menengah. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah dengan jumlah penduduk pada usia pendidikan dasar maupun menengah dalam sepuluh 10.000 penduduk.

Jumlah sekolah di kabupaten lima puluh kota dari tahun 2016-2020 cenderung terus bertambah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Jumlah Sekolah Menurut Jenis nya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Jenis Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
TK	215	231	225	224	223
SD/ Sederajat	374	375	378	378	378
SMP/ Sederajat	78	79	82	83	84
SMA/ Sederajat	30	30	34	34	34
D1 s/d Universitas	1	1	1	1	1

Sumber BPS, Inkesra Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015-2019, Lima Puluh Kota dalam Angka 2021

Berdasarkan data jumlah sekolah diatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia 7-15 tahun dan 16-19 tahun, maka diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 72,49. Hal ini mengindikasikan bahwa tersedia 72 sekolah pendidikan dasar untuk 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah pada tahun 2020 adalah sebesar 37,92. Hal ini mengindikasikan bahwa tersedia 38 sekolah pendidikan menengah untuk 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah. Dapat disimpulkan juga bahwa jumlah sekolah sudah cukup memadai, tinggal meningkatkan pemerataan dan kualitas dari sekolah itu sendiri.

e. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan, berikut dapat digambarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan atau Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 15 tahun keatas.

Dari data yang disajikan pada tabel dibawah ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada tahun, sekitar 15,35 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan dasar, 4,70 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan 6,55 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang tidak/ belum sekolah baik laki-laki maupun perempuan mencapai 2,20 persen dan penduduk yang tidak lagi sekolah sebesar 71,20 persen.

Tabel 2.69
Persentase Penduduk usia 5 tahun ke atas
menurut tingkat partisipasi Sekolah dan jenis kelamin Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
1	Tidak/ Belum pernah sekolah	2,30	2,10	2,20
2	Masih sekolah SD	17,04	13,66	15,35
3	Masih sekolah SMP	4,30	5,11	4,70

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
4	Masih sekolah $\geq$ SMA	6,19	6,91	6,55
5	Tidak sekolah lagi	70,17	72,22	71,20
Jumlah		100	100	100

Sumber BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Apabila dikelompokkan lebih focus kepada penduduk berusia 25 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan, maka pada tahun 2020 sebanyak 76.720 jiwa belum menamatkan pendidikan dasar / sederajat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.70
Jumlah Penduduk Berusia 25 Tahun ke atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan	Jenis kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Pria	Wanita	
Tidak/Belum sekolah	1.521	1.636	3.157
Belum tamat SD/sederajat	37.691	39.029	76.720
Tamat SD/sederajat	22.978	22.626	45.604
SLTP/sederajat	14.446	13.915	28.361
SLTA/sederajat	24.092	23.503	47.595
Diploma I/II	398	1.346	1.744
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.669	2.944	4.613
Diploma IV/Strata I	5.135	9.140	14.275
Strata II	258	277	535
Strata III	8	4	12
Jumlah	108.196	114.420	222.616

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

f. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan non formal sendiri menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Tabel 2.71
Jumlah Sasaran Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah PKBM	24
2.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.226
3.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah di layani/ diintervensi	1.068
4.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 25 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata	725

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas, baru 48 persen penduduk sasaran pendidikan kesetaraan berumur 7-21 tahun yang sudah terlayani untuk menamatkan pendidikan dasar dan menengah ditambah dengan 725 yang berumur 25 tahun yang sudah terdata, jumlah ini dapat saja makin bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih baik. Disamping itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan belum dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Nagari, masih ada penduduk sasaran yang belum terlayani karena jarak PKBM dari tempat tinggalnya tidak mudah dijangkau, disamping tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang masih cukup rendah.

2.3.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

a. Persentase Balita *Wasting* (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) dan Prevalensi Balita Berat Badan Kurang / *Underweight* (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang)

Wasting adalah suatu keadaan kekurangan gizi akut yang banyak terdapat di daerah dengan sosial-ekonomi rendah yang dapat disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai dan adanya penyakit. *Wasting* diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan menurut umur (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD.

Sedangkan *Underweight* (berat badan kurang) adalah keadaan dimana seseorang memiliki berat badan yang indeks massa tubuhnya berada di bawah normal yaitu dibawah 18. Faktor yang berhubungan dengan *underweight* pada balita yaitu pola asuh pemberian makan balita, tingkat konsumsi energi, dan protein balita. *Underweight* merupakan gabungan berat badan kurang dan sangat kurang yang diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD

Perkembangan persentase balita *wasting* dan *underweight* di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Persentase Balita *Wasting* (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) dan Balita *Underweight* (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Balita Ditimbang	Persentase Balita <i>Wasting</i> (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	Prevalensi Balita <i>Underweight</i> (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang)
1.	2016	25.774	2,7	8,6
2.	2017	27.455	3,2	7,7
3.	2018	26.000	2,9	7,3
4.	2019	24.242	4,1	7,8
5.	2020	23.674	4,9	7,8

Sumber Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota

Perkembangan persentase Balita *Wasting* dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus meningkat lebih 80 %. Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Jumlah balita *Wasting* dapat diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan.

Perkembangan balita *underweight* dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Jumlah balita *underweight* dapat diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan.

b. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek)

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. *Stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan balita *Stunting*, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia produktif.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018, angka balita *Stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan dari 29,8 % menjadi 40,1 %. Dengan ambang batas prevalensi nasional adalah 14 %, maka Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan menjadi lokus penanganan *Stunting* tahun 2020-2024, secara lengkap dapat dilihat pada grafik di samping ini :

Grafik 2.25
Persentase Balita *Stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007, 2013, 2018



Sumber : Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 yang merupakan hasil integrasi data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka angka prevalensi *Stunting* sebesar 28,94 %. Sementara itu, angka prevalensi *Stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya ditentukan melalui data hasil penimbangan massal yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan dituangkan ke dalam e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik). Perkembangan angka balita *Stunting* sejak tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.73
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Balita Ditimbang	Prevalensi <i>Stunting</i>
1.	2016	25.774	15,5
2.	2017	27.455	14
3.	2018	26.000	12,3
4.	2019	24.242	10,9
5.	2020	23.674	8,29

Sumber e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota

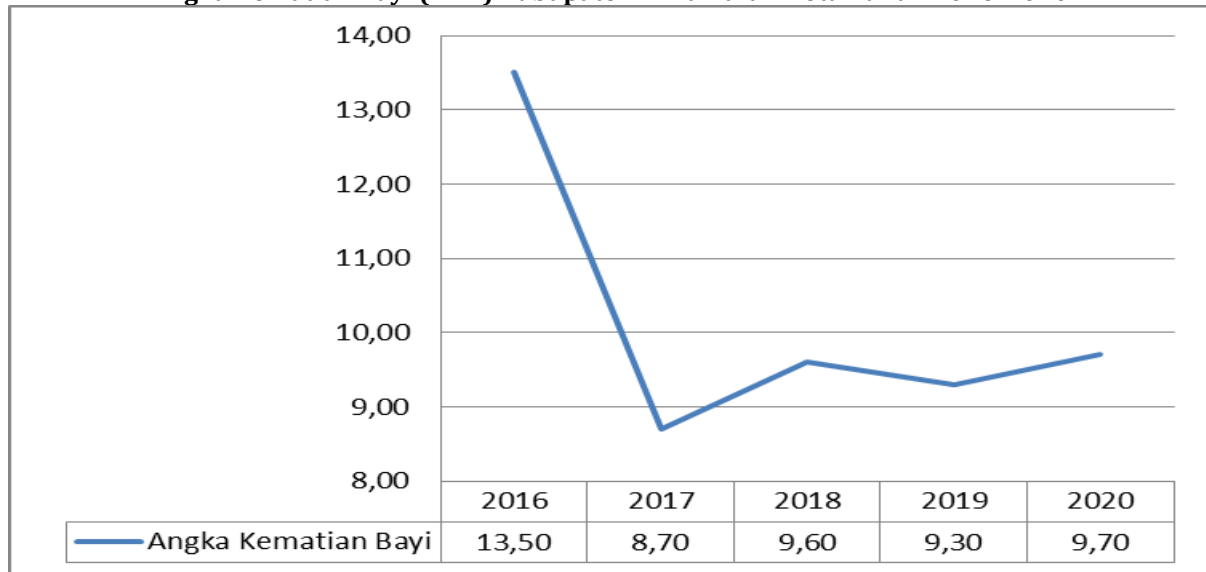
Berdasarkan data diatas, sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, prevalensi *Stunting* di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan dari 15,25% menjadi 8,29%, artinya rata-rata penurunan per tahun sebesar 1,16%.

Penggunaan 3 (tiga) sumber data diatas perlu dilakukan mengingat fungsi dari masing-masing data yang dihasilkan bagi pembangunan daerah. Terkait dengan digunakannya data e-PPGBM sebagai acuan dalam penanganan *stunting*, sudah sesuai dengan batasan kewenangan Kabupaten dan tidak tersedianya data tahunan Riskesdas maupun SSGBI oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dikarenakan *Stunting* tidak terjadi dalam waktu yang singkat sehingga pengaruh pandemi covid 19 terhadap angka prevalensi *Stunting* belum dapat dilihat pada tahun 2020, baru dapat dilihat minimal 2 (dua) tahun kemudian di tahun 2022.

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.26
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020



Sumber BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka 2020-2021

Penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun 2016 ke 2020 menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin meningkat. Bila dibandingkan secara nasional, Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 sebesar 9,58, sudah jauh di bawah target nasional tahun 2024 sebesar 16 per 1000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare dan beberapa penyebab lainnya.

Jumlah kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020

Penyebab Kematian Bayi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Berat Badan Lahir Rendah	5	18	16	7	16
Asfiksia	12	7	21	15	11
Kelainan Bawaan	2	3	5	6	3
Pneumonia	5	6	5	3	2
Diare	1	1	0	0	1
Lain-lain	52	21	14	26	27
Total	83	55	61	60	60

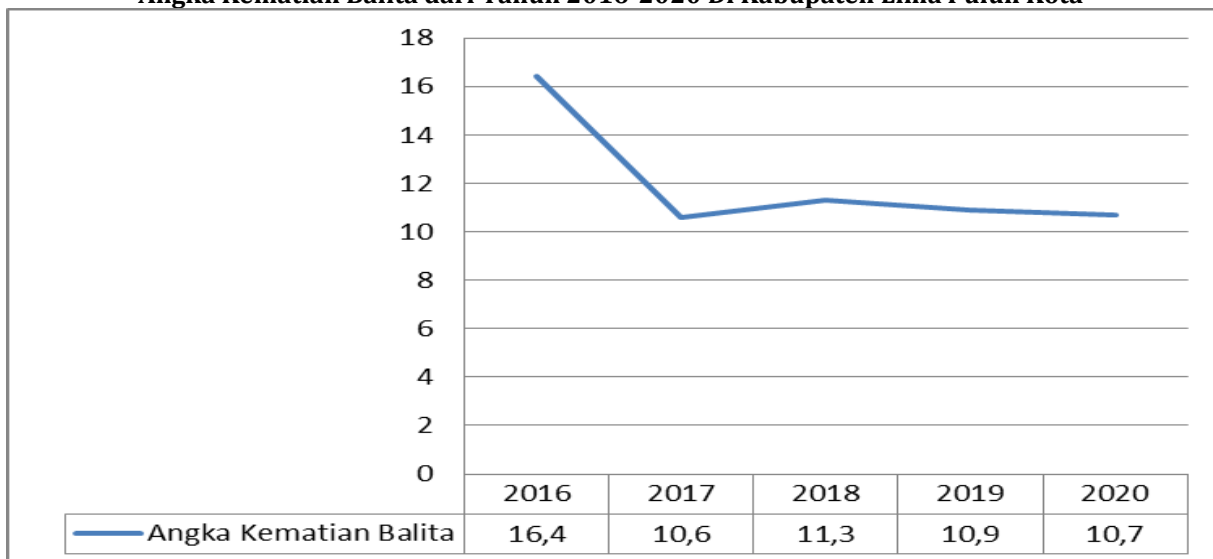
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan oleh berbagai faktor **diantaranya** status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor keterampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu intervensi yang tepat untuk 5 tahun yang akan datang.

d. Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.27
Angka Kematian Balita dari Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

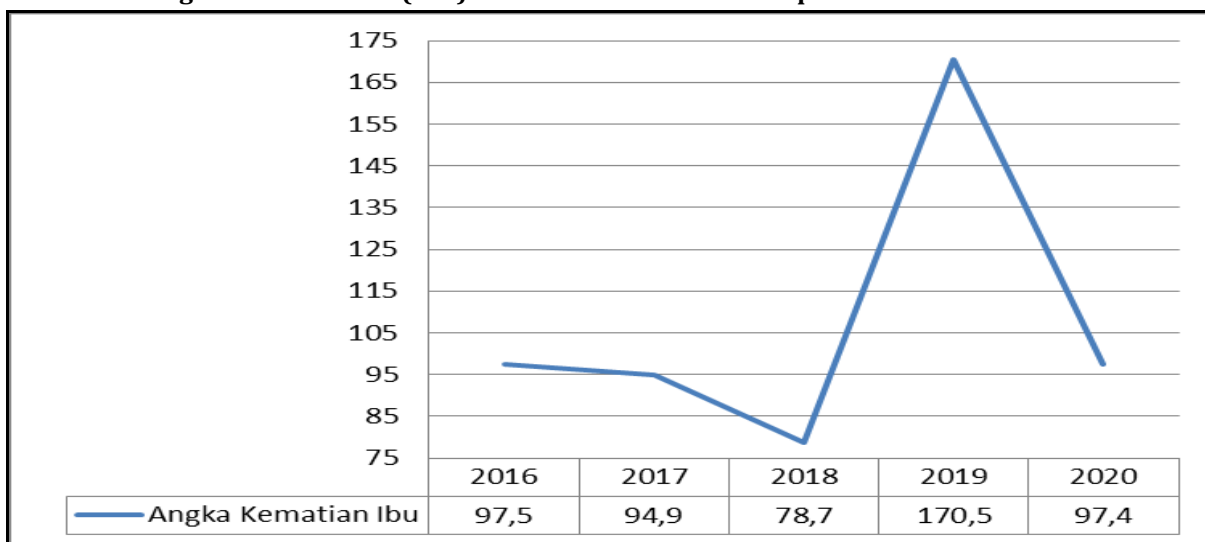
Dari grafik diatas, terlihat bahwa Angka Kematian Balita sejak tahun 2016 sampai 2020 sangat terjadi penurunan, dimana terjadi penurunan yang tajam dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 5,40. Tahun 2018 terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,7, namun selanjutnya terjadi penurunan yang kecil. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk peningkatan pemeliharaan kesehatan terhadap balita walau belum terlalu signifikan. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada balita perlu menjadi prioritas terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 agar Angka Kematian Balita tidak terus mengalami peningkatan.

e. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.28
Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan grafik diatas, dalam 5 tahun terakhir terjadi lonjakan jumlah kematian ibu dari tahun 2018 ke 2019 sebanyak 11 kasus (170,5) dan tahun 2020 terjadi penurunan AKI menjadi 97,4. Semua kejadian kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) baik

tingkat puskesmas maupun oleh Tim AMP tingkat kabupaten. Namun tahun 2020 tidak dilaksanakan pengkajian kematian ibu oleh Tim AMP tingkat kabupaten, karena adanya refocusing anggaran dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Tidak adanya peningkatan kapasitas petugas kesehatan baik di puskesmas serta ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mampu pertolongan persalinan sesuai standar (puskesmas PONED) di tahun 2020 juga berpengaruh terhadap penurunan AKI di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K bertujuan meningkatkan peran aktif suami (suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/ obat kontrasepsi pasca persalinan.

Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan kelas ibu hamil di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi, dimana pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Tabel 2.75
Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2016-2020

Kecamatan	Nama Puskesmas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	42,81	63,97	70,40	82,40	44,10
Akabiluru	Batuhampar	82,00	94,09	91,30	86,80	60,50
	Piladang	53,09	70,25	84,20	84,40	52,30
Luak	Mungo	55,45	62,48	54,50	77,70	35,20
Lareh Sago Halaban	Halaban	37,90	61,07	83,90	84,60	46,70
	Pakan Raba'a	61,01	72,44	56,80	74,40	24,30
Situjuah Limo Nagari	Situjuah	57,76	58,73	45,50	73,60	17,80
Harau	Taram	65,83	82,16	87,70	91,60	56,80
	Tanjung Pati	71,74	76,69	81,10	87,00	51,60
Guguak	Dangung-Dangung	80,20	83,17	68,80	81,40	42,30
	Padang Kandis	59,46	92,11	96,80	88,70	21,70
Mungka	Mungka	59,03	59,05	62,90	80,80	31,20
Suliki	Suliki	68,69	53,36	83,10	83,30	20,70
Bukik Barisan	Maek	71,72	109,66	129,60	84,40	34,60
	Baruah Gunuang	91,49	87,96	62,60	83,70	33,60
Gunuang Omeh	Banja Laweh	82,35	118,49	81,40	75,20	59,50
	Koto Tinggi	59,69	89,69	81,20	84,00	5,90
Kapur IX	Muaro Paiti	88,24	65,24	83,40	88,20	50,30
	Sialang	132,51	81,53	79,80	87,30	32,90
Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	55,04	57,33	69,50	83,70	39,60
	Rimbo Data	87,65	120,73	84,10	83,80	70,90

Kecamatan	Nama Puskesmas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Gunuang Malintang	122,06	94,20	87,00	90,40	75,20

Sumber Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Secara grafik terhadap persentase bayi yang diimunisasi selamaa kurun waktu 5 (lim) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, persentase bayi yang diimunisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dimana hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan imunisasi akibat adanya pandemi Covid-19. Bila dikaitkan dengan target pencapaian RPJMN 2024 sebesar 90%, maka perlu upaya keras dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan imunisasi kembali, karena diperkirakan beberapa waktu ke depan pandemi Covid-19 masih tetap berlangsung.

g. Cakupan kepesertaan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.76
Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah penduduk sasaran	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Cakupan Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	2016	372.949	220.428	59,10
2	2017	375.478	229.620	61,15
3	2018	380.173	250.987	66,02
4	2019	382.932	281.094	73,41
5	2020	385.986	297.826	77,16

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sampai tahun 2020, cakupan penduduk peserta JKN Kabupaten Lima Puluh Kota baru mencapai 77,16 persen, masih jauh dari capaian nasional yaitu sebesar 84,1 persen. Disamping itu, target yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2024 yaitu sebesar 98 persen perlu didukung oleh daerah dengan meningkatkan jumlah cakupannya.

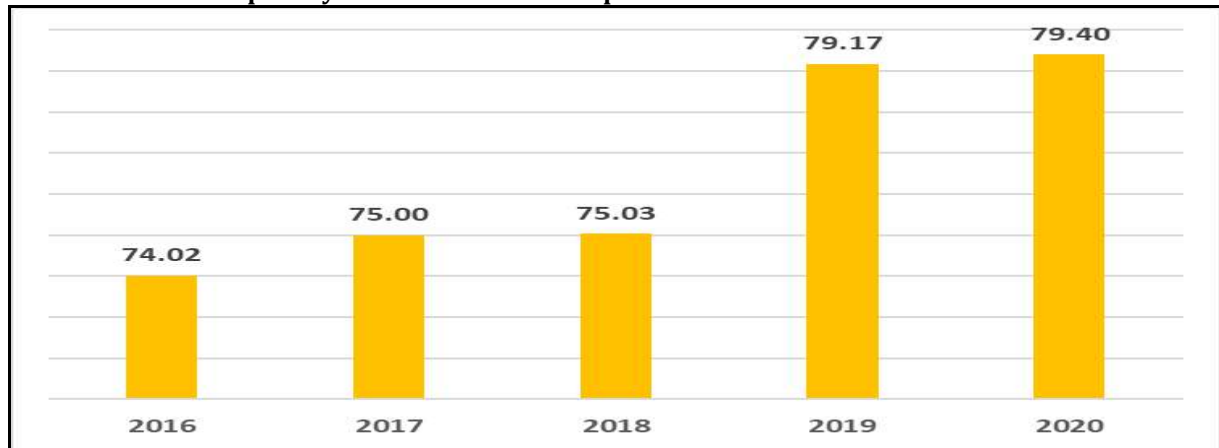
2.3.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM.

Untuk gambaran cakupan layanan air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.30
Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2020



Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

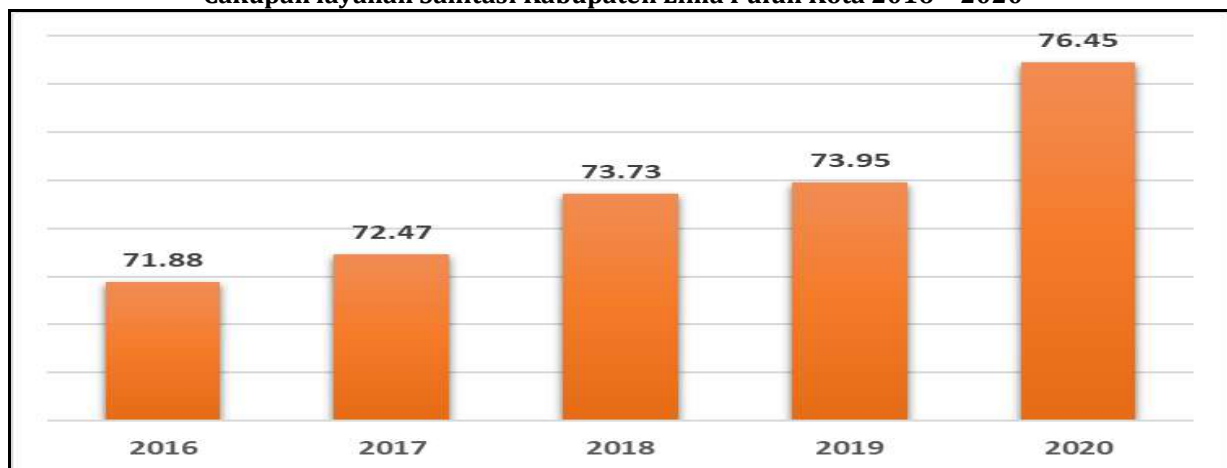
Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan provinsi sumatera barat.

Disamping itu, grafik di atas juga menunjukkan bahwa setiap tahun peningkatan akses masyarakat terhadap air minum sangat rendah, yaitu rata-rata $\pm 1\%$, sementara target pemerintah dalam RPJMN untuk tahun 2024, adalah 100%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 21,6% sampai tahun 2024.

b. Persentase Penduduk/Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Terhadap cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.31
Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2020



Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Sama dengan Air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Secara nasional proporsi rumah tangga yang sudah mendapatkan akses sanitasi tahun 2019 adalah 77,4%, untuk Provinsi Sumatera Barat capaiannya pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%, dan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 73,95% dan tahun 2020 adalah 76,45% diatas target RPJMD sebelumnya yaitu 74,25%. Dan dari data tersebut, capaian layan sanitasi Kabupaten juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Setiap tahun peningkatan aksesnya rata-rata juga sangat rendah yaitu $\pm 1\%$, kecuali di tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,5%.

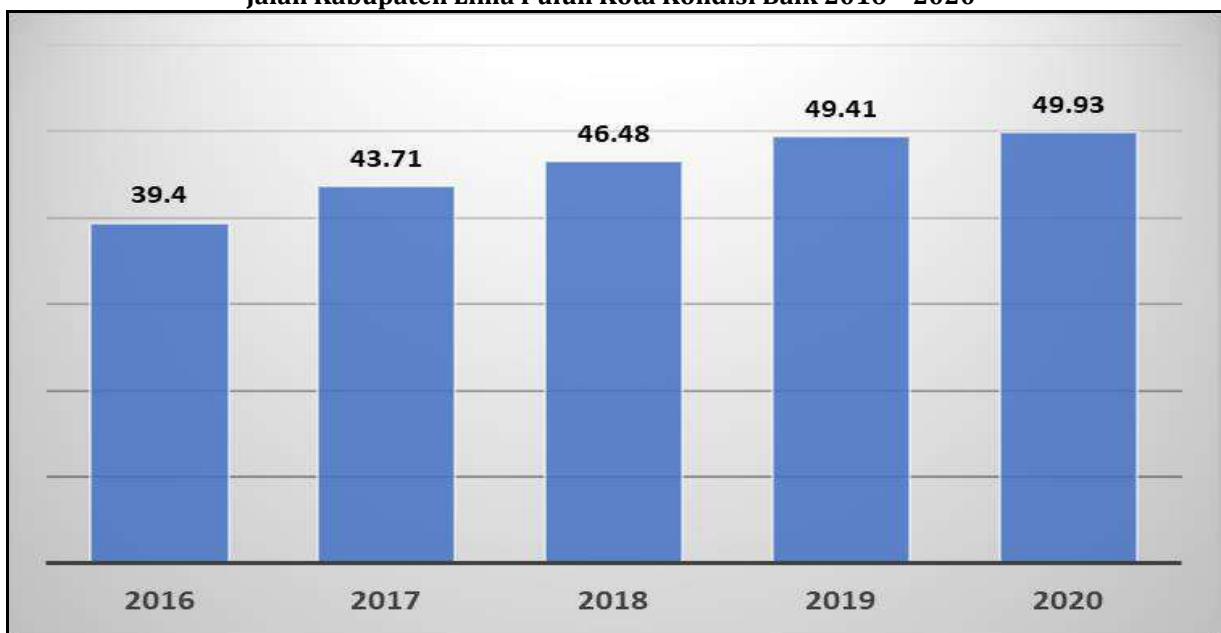
Dalam RPJMN untuk tahun 2024 target rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi adalah sebesar 90%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 13,55% sampai tahun 2024. Untuk mengurangi gap tersebut, maka perlu diupayakan agar peningkatan akses terhadap sanitasi lebih besar dari 2,5% pada setiap tahun.

c. Kondisi Jalan Kabupaten

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh pemerintah daerah, khususnya pada bidang jalan, dapat dilihat dari perkembangan pembangunan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Ada 2 indikator yang dapat dijadikan sebagai instrument untuk mengukur kinerja pembangunan jalan, yaitu persentase Jalan Kabupaten dan kondisi baik dan tingkat kemantapan Jalan Kabupaten.

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.32
Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik 2016 – 2020



Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

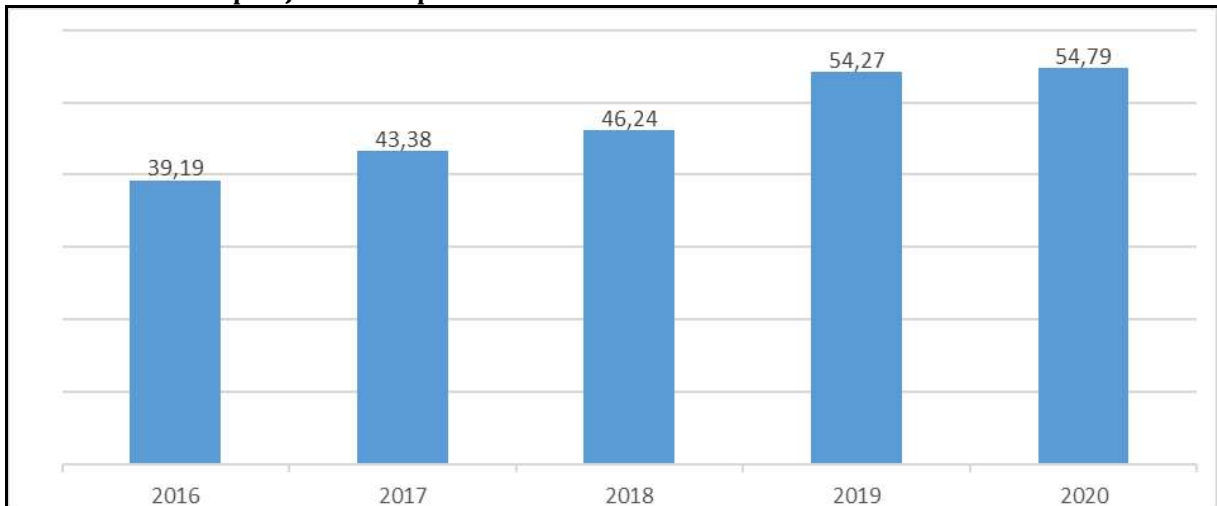
Jalan dengan kondisi baik baru mencapai 49,93 % dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.102 km dibawah dari target RPJMD yakni 50,67%. Kondisi jalan ini masih jauh dari yang diharapkan, dan kondisi baik ini pun pada umumnya baru terdapat pada daerah perkotaan dan pusat-pusat kecamatan, sementara didaerah pinggiran dan daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, kondisi jalan masih sangat buruk.

Disamping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sangat perlu melakukan pembenahan jaringan dan kondisi jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK), walaupun pada umumnya kondisi jalan IKK sudah baik, namun belum memadai untuk mengoptimalkan fungsi jalan untuk kelancaran arus orang/barang di sebuah kota, karena pada beberapa titik masih terjadi kemacetan. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh karena status jalan yang berada di tengah – tengah Kota Sarilamak saat ini masih merupakan jalan kewenangan Nasional.

Pemerintah daerah juga perlu menyikapi proyek strategis nasional “Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”, dimana dalam perencanaanya menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh trase jalan tersebut. Sinkronisasi program merupakan hal penting yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk penambahan ruas jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan tol Trans Sumatera tersebut.

Sedangkan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang. Perkembangan pembangunan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.33
Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 – 2020



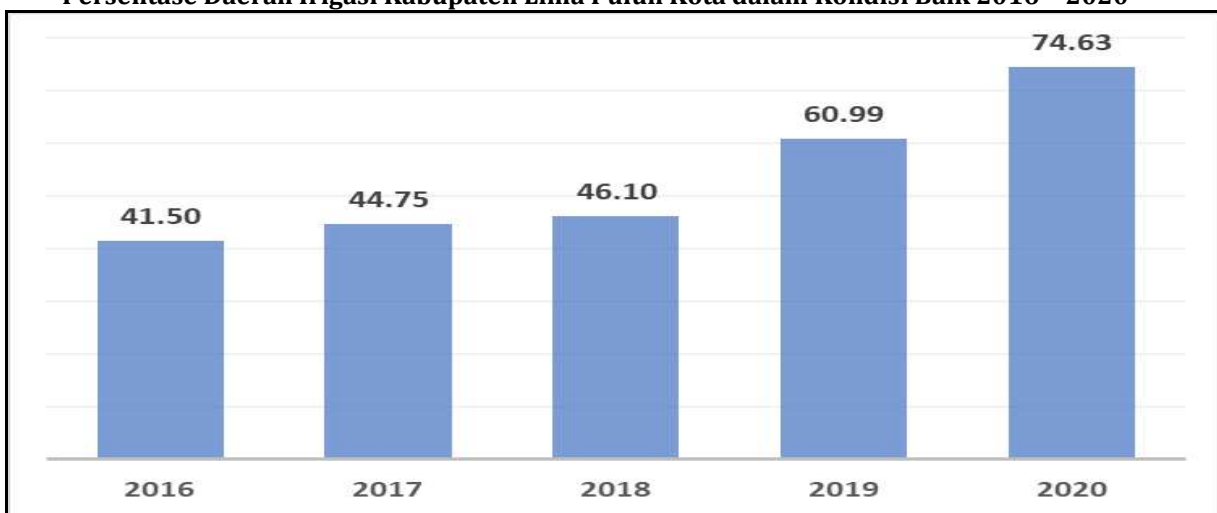
Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 berdasarkan data capaian terus mengalami peningkatan dari 39,19% pada tahun 2016 meningkat menjadi 54,79% pada tahun 2020. Capaian kemantapan jalan kabupaten ini jauh dibawah kemantapan jalan Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2020 capaian kemantapan jalan Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,00%.

d. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal. Kondisi irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlihat dari grafik dibawah ini.

Grafik 2.34
Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 – 2020



Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Grafik di samping menunjukkan bahwa Persentase irigasi kondisi baik tahun 2020 sebesar 74,63% berada jauh di atas target RPJMD periode sebelumnya yang hanya 50,21%, dimana ada peningkatan luasan daerah irigasi yang mampu dilayani oleh sistem irigasi yang ada. Namun kondisi ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

e. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah

Bangunan strategis adalah bangunan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, Islamic centre, terminal dan pasar.

Aktivitas perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah seluruhnya berada di Kawasan IKK Sarilamak. Sampai pada tahun 2020, baru 71,74% bangunan strategis yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping kantor pelayanan pemerintahan, rumah dinas kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal, seperti Islamic Centre, pasar, dan terminal.

2.3.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana struktur ruang salah satunya adalah rencana sistem pusat permukiman. Rencana sistem pusat permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas PKL, PPK, dan PPL. PKL merupakan perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan. PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPL meliputi PPL Pakan Sabtu di Kecamatan Luak dan PPL Maek di Kecamatan Bukik Barisan.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya perumahan dan permukiman menjadi salah satu sektor dari pembangunan infrastruktur dasar yang diprioritaskan pada RPJMN 2020-2024. Salah satu cakupan pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN tersebut.

Salah satu indikator penyediaan hunian layak adalah rasio rumah layak huni. Perkembangan penyediaan hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari nilai rasio rumah layak huni pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota

Indikator	2017	2018	2019	2020
Rasio Rumah Layak Huni	0,142	0,143	0,150	0,153

Sumber DLHPP Kab. Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,011 dari tahun 2017. Semakin tinggi rasio rumah layak huni akan menggambarkan semakin tinggi rumah yang layak dihuni oleh penduduk. Secara rasio, masih belum optimalnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah kedepannya agar rumah yang layak dihuni oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota semakin baik.

Pada saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi permasalahan dengan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan terjadinya imigrasi penduduk sehingga membutuhkan penyediaan perumahan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan permukiman. Minimnya alokasi anggaran APBD mempengaruhi pencapaian akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Proyeksi kebutuhan rumah didasarkan pada pertumbuhan KK dan backlog. Analisis backlog dilakukan dengan menghitung jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga (KK) menempati satu rumah. Dengan kata lain jumlah rumah tangga (KK) yang belum memiliki rumah dapat dikatakan sebagai kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan

backlog eksisting dengan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah total merupakan kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel berikut :

Tabel 2.78
Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2022

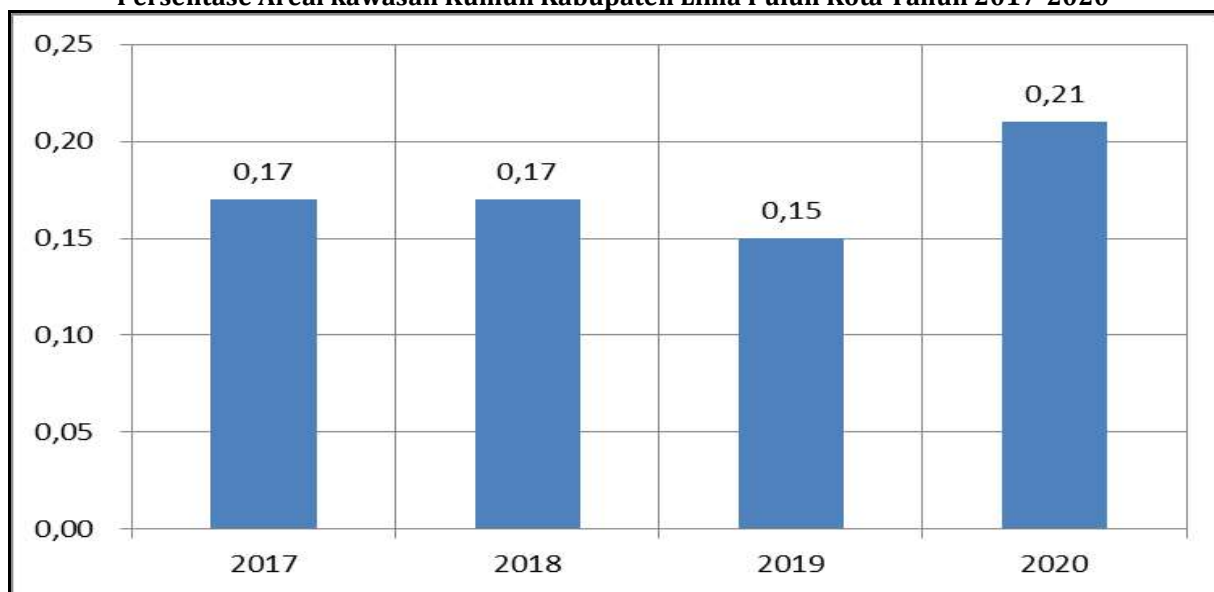
Jumlah KK (2017)	Jumlah Rumah (2017)	Backlog Rumah (2017)	Proyeksi KK (2022)	Demand akibat pertumbuhan KK	Demand rumah (2022)
(a)	(b)	(c = a-b)	(d)	(e = d-a)	(f = e + c)
115.110	83.783	31.327	121.935	6.825	38.152

Sumber : Dokumen RP3KP (data diolah)

Hasil proyeksi jumlah rumah tangga diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah rumah tangga (KK) di Kab Lima Puluh Kota akan terus mengalami peningkatan sehingga proyeksi kebutuhan akan rumah juga akan meningkat. Sedangkan yang menjadi faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman adalah adanya dukungan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Disamping ketersediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan dan permukiman juga memperhatikan kondisi lingkungannya yang ditangani melalui pengurangan kawasan kumuh. Perkembangan penanganan kawasan kumuh seperti dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.35
Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2020



Sumber Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota

Data diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan areal kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun jika dibandingkan dengan total luasan kawasan kumuh sebesar 574,87 ha maka capaian tersebut masih sangat rendah karena baru dapat menangani 6,7 ha pertahun. Dan pada tahun 2020 telah dilakukan penghitungan kembali terhadap luasan kawasan kumuh, dan teridentifikasi luas kawasan kumuh sebesar 700,86 ha. Penambahan luasan ini terjadi bukan karena tumbuhnya kawasan kumuh baru, tetapi karena adanya penambahan batasan deliniasi kawasan kumuh di seluruh kecamatan.

2.3.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.79
Data Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio PSK (kasus)	20	5	15	15	15
2	Rasio kasus Lem (kasus)	5	10	15	10	15
3	Rasio Miras (kasus)	17	10	5	10	8
4	Rasio Warkel (kasus)	0	5	4	7	7
5	Gangguan Trantib dan Perda (kasus)	11	35	27	40	45
6	Kegiatan masyarakat yang berindikasi mengganggu Trantibum (kasus)	25	28	20	50	55
7	Jumlah data dan informasi Trantib dan Perda (kasus)	40	56	56	65	70
8	Karaoke (kasus)	10	10	12	15	15
9	Balap liar (kasus)	7	10	10	15	17

Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota

Terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang melapor dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembunuhan	1	1	1	-	4
2	Curas	1	3	25	11	17
3	Pemeriksaan dan pembunuhan	112	-	-	-	-
4	Curat	78	113	340	299	194
5	Pencurian biasa	1	80	171	63	62
6	Penganiayaan berat	120	35	42	50	58
7	Penganiayaan	19	79	160	34	128
8	Pengrusakan	43	33	52	31	32
9	Penghinaan ringan	15	18	6	15	10
10	Penipuan	31	21	85	60	53
11	Curanmor	40	52	173	142	81
12	Setubuhan-perbuatan cabul	19	8	13	11	43
13	Perjudian	18	7	26	16	9
14	Asusila-Bersetubuh dengan perempuan di bawah umur	3	-	36	-	4
15	Penggelapan	47	41	92	45	59
16	Pengancaman	17	5	13	1	12
17	Perbuatan tidak menyenangkan	9	5	2	2	1
18	Pemeriksaan	3	4	1	2	1
19	Kawin liar	3	12	8	-	-

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor				
		2016	2017	2018	2019	2020
20	Pengeroyokan	52	30	53	35	35
21	Narkotika	2	-	1	87	30
22	Pemalsuan	8	24	10	1	2
23	Perampasan tanah	4	-	13	-	4
24	Pencemaran nama baik	3	1	11	-	8
25	Bunuh diri	4	-	-	-	5
Jumlah		658	573	1336	905	855

Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2017-2021

a. Sub Bidang Kebencanaan

Pada sub bidang Kebencanaan, pencapaian indikator persentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 55,00% yang kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 58,00%, tahun 2018 sebesar 40,00%, tahun 2019 83,33% dan tahun 2020 sebesar 75,00%. Capaian yang meningkat ini salah satunya diakibatkan karena adanya gladi lapangan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan apel siaga penanggulangan bencana, selain itu juga telah terbentuk kelompok Siaga Bencana (KSB) di Nagari-Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 62 KSB dengan jumlah anggota masing-masing KSB sebanyak 30 orang. Meskipun capaiannya meningkat, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, kinerja masih sangat rendah. Sedangkan untuk capaian penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) belum ada pencapaian, baru target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) dan regulasi/ kebijakan tentang penanggulangan bencana, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.81
Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

No	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana (%)	55	55,00	58	58,00	60	40,00	85	83,33	90	75,00
2	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB)	-	-	-	-	-	-	-	-	119,2	-

Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Sub Bidang Urusan kebakaran

Pada Sub Bidang Kebakaran pencapaian indikator mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.82
Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran

NO	Indikator	Capaian Kinerja						Ket
		Realisasi					Target	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

NO	Indikator	Capaian Kinerja						Ket
		Realisasi					Target	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prsentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran yang sesuai kebutuhan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)		38	38	46	54	77	
2	Persentase Capaian Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)-(%)		44	47	50	56	67	

Sumber Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan Respon Time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Dengan adanya respon time, maka penanganan kebakaran dapat ditangani dengan baik, di Kabupaten Lima Puluh Kota capaian respon time mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 44% dan 67%, Meskipun capaiannya meningkat, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, kinerja masih sangat rendah. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Wilayah Manajemen kebakaran (WMK) sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Idealnya di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 1(satu) kecamatan memiliki 1 (satu) WMK dan 1 (satu) WMK mempunyai minimal 1 (satu) pos. Sementara saat ini Kabupaten Lima Puluh kota baru memiliki 7 (tujuh) Pos WMK. Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.83
Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Posko	Wilayah Kerja
1.	Induk	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Akabiluru
2.	Harau	Kecamatan Harau
3.	Lareh Sago Halaban	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak
4.	Mungka	Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka
5.	Suliki	Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan
6.	Pangkalan	Kecamatan Pangkalan
7.	Kapur IX	Kecamatan Kapur IX

Sumber Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota

Disamping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas

2.3.1.6 Urusan Wajib Sosial

Pembangunan pada urusan wajib sosial difokuskan kepada pencapaian peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi

sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Dalam 5 tahun terakhir, persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.84
Persentase PMKS Yang Diberdayakan Dan Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan	66,58	62,33	71,13	79,96	83,66
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	95%	95%	95%	95%	95%

Sumber Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan urusan wajib. Beberapa informasi terkait dengan ketenaga kerajaan disajikan antara lain angka sengketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian Bersama, keselamatan dan perlindungan, kepersetaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis berkompeten, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan.

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Selama kurun waktu lima tahun, angka sengketa ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.85
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sengketa pengusaha	10	10	10	11	12
Jumlah perusahaan	72	155	215	277	605
Angka sengketa	0,1389	0,0645	0,465	0,0397	0,0033

Sumber : Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat diselesaikan semuanya dari kasus yang ada. Gambaran besaran kasus tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.86
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB	10	10	10	11	12
Jumlah kasus yang dicatatkan	10	10	10	11	12
Besaran kasus Yang diselsaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap keselamatan dan perlindungan kerja selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota secara rata-rata telah optimal, dimana dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dan

jumlah perubahan di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap keselamatan dan perlindungan kerjanya telah mencapai optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.87
Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	72	155	215	277	605
Jumlah perusahaan di Kab. Lima Puluh Kota	72	155	215	277	605
Keselamatan dan perlindungan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap kepesertaan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2020 kepesertaan pekerja menjadi anggota BPJS mencapai 100%. Artinya jumlah pekerja peserta BPJS sama dengan jumlah pekerja. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS
Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pekerja peserta BPJS	1205	3041	4576	5343	5343
Jumlah pekerja	1465	3751	4896	5665	5343
Besaran pekerja yang menjadi anggota BPJS	82,25%	81,07%	93,46%	94,32%	100%

Sumber : Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Dari sisi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi selama kurun waktu 2016-2019 dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan, kesemuanya ditampung dan memperoleh pelatihan yang berbasis kompeten. Sedangkan di Tahun 2020, tidak dilaksanakan pelatihan akibat dari refocusing anggaran di Tahun 2020.

Tabel 2.89
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompeten
Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja yang dilatih	162	102	179	176	0
Jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan	162	102	179	176	0
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Terhadap besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebanyak 100%. Untuk tahun 2019, tidak ada tenaga kerja yang dilatih sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan adalah 0% dan pada tahun 2020 kembali dilaksanakan pelatihan dengan tingkat capaian 100%. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.90
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja yang dilatih	150	390	60	0	70
Jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan	150	390	60	0	70

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	100%	100%	100%	0%	100%

Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

Dari sisi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan selama kurun waktu tahun 2016-2019, persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah 100%, sedangkan di Tahun 2020 tidak dilaksanakan pelatihan kewirausahaan akibat dari refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.91
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja yang dilatih	90	90	60	60	0
Jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan	90	90	60	60	0
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota

2.3.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.92
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,64	95,5	94,62	94,33	94,93
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	N/A	46,89	50,18	51,09
3	Data kekerasan terhadap perempuan	7	7	11	10	10
4	Data kekerasan terhadap anak	43	78	78	66	69
5	Tingkat pencapaian Kabupaten Layak Anak	Inisiasi	Pratama	Pratama	Madya	N/A
6	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	86,45	86,53	86,62	86,71	86,79
7	Ratio KDRT	6,66	6,53	6,4	6,27	6,15

Sumber Dinas PPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki. Berdasarkan tabel diatas, mengindikasikan bahwa pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah semakin setara. Hal ini bertolak belakang dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang pencapaiannya masih cukup rendah sampai tahun 2020, yaitu sebesar 51,09. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, dengan demikian menjelaskan bahwa peranan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal kehidupan ekonomi dan politik masih cukup rendah.

Terkait dengan Kabupaten Layak Anak yaitu kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berada pada level Madya. Dan hal ini dibuktikan juga dengan adanya penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan ratio KDRT di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020. Hal ini berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga dalam 5 tahun ke depan perlu menjadi perhatian.

2.3.2.3 Urusan Wajib Pangan

Urusan wajib pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator pada urusan ini adalah ketersediaan pangan utama yang sudah dijelaskan pada Sub bab 2.2.11 Penguatan Cadangan Pangan pada halaman II-55.

2.3.2.4 Urusan Wajib Pertanahan

Ada dua indikator kinerja program pada urusan pertanahan, yaitu :

a. Jumlah Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan (kasus).
Untuk tahun 2020, target terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan adalah 2 kasus. Untuk realisasinya, jumlah kasus yang terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahannya ada 2 kasus. Capaian kinerja untuk indikator terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan sudah mencapai target.

b. Luas terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (hibah tanah, tanah objek reformasi agraris dan pengadaan tanah).

Tahun 2020, dilihat dari capaian Dilihat dari capaian kinerja terhadap indikator ini belum terealisasi dengan baik dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga perlu perhatian terhadap indikator ini. Selain itu, dilihat dari kebutuhan akan tanah untuk peningkatan berbagai aspek di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perumahan, lingkungan hidup dan sebagainya maka perlu ada nya penataan dan pemanfaatan yang baik dalam pertanahan.

2.3.2.5 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Selanjutnya Lingkungan Hidup merupakan salah satu sub urusan wajib pelayanan non dasar. Kinerja penyelenggaraan sub urusan ini selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.93
Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

NO	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,211	68,169	69,119	68,348	69,13
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,50	51,72	54,17	52,51	50,00
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,87	91,67	92,88	91,97	90,87
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,75	92,88	62,51	62,51	61,75

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota

Pada urusan lingkungan hidup didapatkan target akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 sebesar 69,13 dengan kondisi pada tahun 2016 sebesar 66,211. Komponen utama IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan lahan (IKTL).

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, capaian pengurangan dan penanganan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Sedangkan tahun 2016 dan 2017, Kabupaten Lima Puluh Kota belum menghitung timbulan sampah, pengurangan dan penanganan sampah.

Tabel 2.94
Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2020

No	Indikator	2018	2019	2020
1	Timbulan Sampah	55.455	55.993	56.536,00

2	Pengurangan	4.920	9,709	9.709,00
3	Penanganan	3.832	5.731	6.591,90

Sumber Dokumen Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota

2.3.2.6 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.95
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perekaman KTP Elektronik	93,38	92,90	96,16	98,44	98,48
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	-	-	2,79	8,97	24,99
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	31,56	36,53	40,05	42,30	44,52
4	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	74,26	81,97	86,99	90,08	91,09

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Perkembangan pencapaian indikator Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 98,48. Beberapa faktor pendorong capaian tersebut dipengaruhi salah satunya oleh Inovasi daerah dalam memberikan pelayanan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal diatas berbanding terbalik dengan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA dan Kepemilikan akta kelahiran , dimana persentasenya masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya jangkauan layanan kepada anak usia 0-17 tahun dalam hal kepemilikan KIA serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran. Untuk Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun sudah cukup tinggi.

2.3.2.7 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
- 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- 5) Desa Mandiri (> 0,815).

Tabel 2.96
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2016	4	29	41	5	0	79
2017	0	9	51	19	0	79

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2018	0	3	41	31	4	79
2019	0	2	28	45	4	79
2020	0	2	19	54	4	79

Sumber Kemendes RI

Berdasarkan tabel diatas, masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX. Dengan demikian, Nagari Galugua dan Koto Lamo perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 2 nagari tertinggal dan masih cukup banyaknya nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat di artikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada.

IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sebesar 0,7398 dengan Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8063, Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,7017 dan Indeks Ketahanan Lingkungannya sebesar 0,7114. Rincian pencapaian komponen masing- masing indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.97
Pencapaian Pemenuhan Komponen Indeks Desa Membangun
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

INDEKS KETAHANAN	DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PERITEM	Jumlah Nagari Yang Telah Terpenuhi Indikatornya
SOSIAL (IKS)	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	79
			Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain)	33
		Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	63
			Tingkat Aktivitas Posyandu	78
		Jaminan Kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS	18
	PENDIDIKAN	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	79
			Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	77
		Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD	61
			Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	29
		Akses Pengetahuan Masyarakat	Kegiatan Kursus	30
			Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	41
	MODAL SOSIAL	Solidaritas Sosial	Keterbukaan Ruang Publik	54
			Terdapat Kelompok Olahraga	23
			Terdapat Kegiatan Olahraga	57
		Rasa Aman Warga Desa	Kejadian Perkelahian Massal di desa	72
		Kesejahteraan Sosial	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	79
			Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)	71
	PERMUKIMAN	Akses Air Bersih dan Layak Minum	Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	78
			Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci	79

INDEKS KETAHANAN	DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PERITEM	Jumlah Nagari Yang Telah Terpenuhi Indikatornya
EKONOMI (IKE)		Akses ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas Warga Memiliki Jamban	77
			Terdapat Tempat Pembuangan Sampah	75
		Akses Ke Fasilitas Listrik	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik	79
		Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	Akses Internet di Kantor Desa	66
	KERAGAMAN PRODUKSI	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk	53
	PERDAGANGAN	Tersedianya Pusat Perdagangan	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)	45
			Terdapat Pasar Desa	53
			Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)	76
	AKSES DISTRIBUSI	Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	15
	AKSES KREDIT	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR	15
			Akses Penduduk ke Kredit	20
	LEMBAGA EKONOMI	Lembaga Ekonomi	Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	11
	KETERBUKAAN WILAYAH	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)	40
			Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	64
			Kualitas Jalan Desa	79
LINGKUNGAN (IKL)	KUALITAS LINGKUNGAN	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	78
	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	64
		Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	18

Sumber Kemendes RI

Disamping itu, IDM juga dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana potensi desa telah dioptimalkan oleh Nagari dalam pembangunan. Akan tetapi, potensi desa belum dapat dikembangkan secara optimal karena nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki profil nagari yang disebabkan juga oleh belum adanya batas nagari yang jelas.

2.3.2.8 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi diperoleh perbandingan dari peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur, atau PA/PUS x 100 persen. Bila dibandingkan dengan data nasional tahun 2019, maka CPR Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berada diatas nasional yaitu sebesar 73,24%, bahkan bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2024, CPR Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sudah melampaui target. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ber-KB sudah cukup baik.

Tabel 2.98
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Contraceptive prevalence rate</i> (Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi)/CPR	73,93%	72,88%	73,95%	73,24%	73,14%
2	<i>Unmet need</i> (Kebutuhan ber-KB)	12,12%	14,62%	13,86%	12,87%	13,64%
3	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	0,97	0,93	1,02	1,13	0,93

Sumber BPS dan DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota

Unmet Need KB adalah wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat sebesar 8%, maka capaian Kabupaten Lima Puluh Kota belum mencapai target.

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terkendali.

2.3.2.9 Urusan Wajib Perhubungan

Penyediaan fasilitas angkutan umum merupakan indikator yang penting di dalam urusan perhubungan. Salah satu fasilitas umum tersebut adalah terminal. Kabupaten memiliki 3 buah terminal yaitu terminal Angkutan Penumpang Pangkalan, Terminal Angkutan Penumpang Limbanang dan Terminal Angkutan Barang Rimbo Data. Dari 33 fasilitas sebagai standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, baru bisa dipenuhi sebanyak 7 fasilitas (21%). Fasilitas tersebut antara lain, Fasilitas Keselamatan Jalan; Pos, Fasilitas dan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum; Petugas Operasional Terminal; Toilet; Rumah Makan; Tempat Naik Turun Penumpang dan Tempat Parkir Kendaraan Umum dan Kendaraan Pribadi. Namun, kondisi tempat naik turun penumpang dan tempat parkir kendaraan umum yang tersedia belum memadai.

Moda angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu mulai dari mini bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dan Angkutan perdesaan (Angdes). Disamping itu juga terdapat juga moda angkutan Becak Motor (Bentor) dan Bendi yang mendukung pelayanan di pasar- pasar tradisional dan kawasan pariwisata. Pada tahun 2020, Jumlah moda AKDP ada 114 unit dan moda AKAP ada 4 unit dengan jumlah penumpang AKDP sebanyak 2.154.960 orang penumpang dan AKAP sebanyak 1.118.550 orang penumpang sehingga total jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 3.273.510 orang penumpang. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rasio jumlah izin trayek per 100.000 penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yang berarti, hanya naik 0,06 selama 5 tahun. Dilihat dari Jumlah uji KIR kendaraan umum terlihat bertambah setiap tahunnya. Adapun penambahan nya selama 5 tahun adalah sebanyak 300 unit. Apabila dicermati selama beberapa tahun terakhir ini, jumlah penumpang angkutan umum khususnya angkutan desa mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dengan tidak banyaknya jumlah moda angkutan desa dan kondisi angkutan desa tersebut yang tidak pernah ada pembaharuan. Disamping itu juga dimungkinkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan adanya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Perkembangan rasio izin trayek dan jumlah KIR angkutan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99
Perkembangan Indikator Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio izin trayek per 100.000 penduduk	2,74	2,76	2,77	2,78	2,8

2.	Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)	7.401	7.475	7.550	7.625	7.701
3.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	2.700.488	2.371.352	2.786.520	4.004.601	3.273.510

Sumber Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

2.3.2.10 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Dalam memenuhi Reformasi Birokrasi perlu diupayakan untuk peningkatan pelayanan publik, salah satunya ditunjang oleh sistem informasi pada pemerintahan daerah. Sistem informasi ini melingkupi keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun sampai saat ini sistem informasi tersebut belum mencakup keseluruhan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena adanya beberapa daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi atau yang biasa dikenal dengan *blank spot* di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni :

Tabel 2.100

Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Daerah/jorong	Nagari	Kecamatan
1.	Aia Angek disamping monumen Bela Negara	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
2.	Bukik Tuak-Tuak	Tanjung Bungo	Suliki
3.	Jorong Bio bio	Solok Bio-bio	Harau
4.	Jorong Harau	Harau	Harau
5.	Jorong Kanpuang Tengah	Andaleh	Luak
6.	Jorong Koto Mesjid	Gunuang Malintang	Pangkalan Koto Baru
7.	Jorong Landai	Harau	Harau
8.	Jorong Padang Panjang	Tanjung Haro Sikabu-kabu	Luak
9.	Jorong Padang Tarok	Harau	Harau
10.	Jorong Baliak	Simpang Sugiran	Guguak
11.	Jorong Batu Balabuah 1	Sungai Naniang	Bukit Barisan
12.	Jorong Botuang	Kurai	Suliki
13.	Jorong Kp Gaduang	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
14.	Jorong Kaludan	Sungai Talang	Guguak
15.	Jorong Kuranji	Guguak VIII Koto	Guguak
16.	Jorong Labuah Tunggang	Simpang Kapuak	Mungka
17.	Jorong Lokuang	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
18.	Jorong Mudiak Liki	Kurai	Suliki
19.	Jorong Nenang	Maek	Bukit Barisan
20.	Jorong Tb. Gadang	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
21.	Jorong Belubus	Sungai Talang	Guguak
22.	Jorong Koto Tinggi	Simpang Kapuak	Mungka
23.	Jorong Simpang Goduang	Simpang Kapuak	Mungka
24.	Kantor Wali Nagari Gelugur	Gelugur	Kapur IX
25.	Jorong Padang Kandi	Guguak VIII Koto	Guguak
26.	Dekat Kantor Nagari Tanjung Bungo	Tanjung Bungo	Suliki
27.	Padang Longang Jorong Korek Hilia	Tanjung Bungo	Suliki
28.	Pasar Koto Tengah arah Barah Jorong Koto Tengah	Koto Lamo	Kapur IX
29.	Tebing Tinggi Jorong Aie Putih	Sarilamak	Harau

Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengatasi daerah *blank spot* adalah :

1. Telah mengupayakan permintaan menara Telekomunikasi ke instansi pusat dalam hal ini adalah BAKTI Kemenkominfo.
2. Dengan adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan seluruh OPD, bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi, sehingga disepanjang jalur Jaringan intra Pemerintah yang disediakan oleh provider juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk telekomunikasi.

2.3.2.11 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan urat nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro,

kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan.

Dari data jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2020 terjadi penurunan jumlah koperasi. Jika di tahun 2016 jumlah koperasi adalah sebanyak 217 maka pada akhir tahun 2020 jumlah koperasi yang ada hanya sebanyak 212 koperasi. Dengan kata lain terjadi penurunan jumlah koperasi sebanyak 5 koperasi atau sekitar 3% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan jumlah koperasi di tahun 2017 terjadi karena adanya program revitalisasi koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Sehingga koperasi-koperasi yang tidak aktif dilakukan pembubaran lebih kurang sebanyak 30 koperasi. Jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.101
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	217	188	196	212	212
2	Koperasi Aktif	137	138	120	123	125
3	Koperasi Tidak Aktif	80	50	76	89	87

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota

Grafik 2.36
Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020



Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Lima Puluh Kota

Jika dilihat dari sisi jumlah koperasi aktif per tahunnya dalam rentang waktu yang sama maka terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2016 persentase koperasi aktif mencapai 63,13 persen maka diakhir tahun 2020 persentase yang aktif tinggal 58,96 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya setengah dari jumlah koperasi yang aktif pada akhir tahun 2020. Penyebab dari rendahnya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut tidak memiliki *bussiness plan* yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang tersebut tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Untuk itu peran aktif dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mutlak diperlukan. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik disamping.

Indikator lain yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur kinerja pengembangan koperasi di daerah adalah seberapa banyak dari koperasi yang aktif tersebut dalam kategori sehat. Indikator ini baru muncul pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018. Jadi data yang bisa dikumpulkan baru mulai dari tahun 2018. Berdasarkan tabel dibawah dapat

dilihat pada tahun 2018 target koperasi sehat sebanyak 2% dari jumlah koperasi aktif (120 koperasi) atau sekitar 3 koperasi dimana realisasi hanya 1.71% atau sekitar 2 koperasi. Sementara di tahun 2019 target koperasi yang akan disehatkan sebanyak 33% atau sekitar 41 koperasi. Namun realisasinya hanya sebesar 27.90% atau sekitar 33 koperasi. Tantangan dalam penyehatan koperasi ini bersumber dari tidak adanya anggaran yang disediakan untuk melakukan audit keuangan terhadap koperasi tersebut. Banyak koperasi-koperasi aktif tersebut tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehingga karakteristik laporan keuangan dari koperasi-koperasi tersebut tidak bisa diukur secara profesional. Sementara untuk saat sekarang, koperasi-koperasi tersebut menanggung sendiri biaya fee konsultan untuk menilai laporan keuangan masing-masingnya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan di masa depan bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan audit laporan keuangan bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga data koperasi yang sehat dapat lebih kredibel.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka dalam kurun waktu empat tahun terakhir tingkat pertumbuhan usaha mikro kecil menengah cenderung lambat. Dari tabel dibawah, terlihat bahwa pada akhir tahun 2016 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2.622 unit. Sementara pada akhir tahun 2019 tercatat jumlah UMKM yang ada sebanyak 2.760 unit. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut jumlah UMKM tumbuh sebesar 5% dengan memakai tahun dasar di tahun 2016. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.102
Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada
Di kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Tahun	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2016	1899	687	36	2622
2	2017	1903	683	36	2622
3	2018	1941	683	36	2660
4	2019	2041	680	39	2760
5	2020	7308	763	40	8111

Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota

Skala usaha UMKM yang ada tersebut didominasi oleh usaha mikro dimana pada tahun 2016 sebanyak 1.899 unit, sementara pada akhir tahun 2020 menjadi 7.308 unit. Usaha kecil pun bertambah dari 687 di tahun 2016 menjadi 763 pada tahun 2020, begitu pun dengan usaha menengah juga bertambah. Pertumbuhan usaha kecil ini didominasi oleh jenis usaha barang harian dan makanan.

Dari tabel terlihat bahwa upaya dalam mengembangkan skala usaha UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh dari harapan. Persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil tidak mencapai

target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena program yang ada di APBD belum bisa menjadikan ukm potensial menjadi Kecil, baru bisa mendorong UKM potensial ke arah Kecil. Covid-19 sangat berdampak pada pelaku UKM, rata-rata omset mereka turun mencapai 75%, ini disebabkan adanya PSBB sehingga pengiriman barang agak terhalang akibatnya adanya penumpukan barang, sementara biaya operasional masih tetap dikeluarkan.

Rendahnya Ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Lima Puluh kota. Ditambah dengan adanya ketakutan dari masyarakat tentang transparansi skala usahanya. Karena ukuran untuk melihat skala usaha tersebut adalah dari aset yang dimiliki dan atau omzet usaha secara tahunan, membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sulit untuk melakukan klasifikasi usaha mana saja yang sudah mengalami perkembangan dan mana yang tidak. Ketakutan dari masyarakat untuk transparan tentang omzet dan aset dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan dirjen Perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria usaha yang dikenakan pajak dan mana yang tidak sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan data yang akurat terhadap perkembangan usahanya. Dan pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat mengetahui dan memberikan bantuan baik dalam pengembangan usaha maupun penyelamatan usahanya.

Disamping permasalahan diatas, permasalahan lainnya terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha, mutu dan harga barang yang belum terjaga, dan daya promosi produk yang masih rendah serta pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah, dan belum optimalnya pertumbuhan wirausahawan baru.

Pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor pada tatanan ekonomi lokal juga memberikan dampak terhadap keberadaan UMKM. Pada aspek UMKM adanya pandemic ini menyebabkan turunnya daya beli, terjadinya pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Dalam situasi pandemic ini UMKM yang terdampak sangat serius ditandai dengan penurunan penjualan, permasalahan pada aspek pembiayaan, masalah pada distribusi barang dan kesulitan mendapatkan bahan baku.

2.3.2.12 Urusan Wajib Penanaman Modal

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Salah satu motor penggerak pembangunan perekonomian daerah adalah modal dalam negeri maupun modal asing yang ditanamkan investor di daerah untuk investasi, Kondisi internal daerah seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum akan mempengaruhi keinginan investor dalam menanamkan modalnya. Kehadiran investor akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi investor maupun pemerintah daerah.

Jumlah unit usaha PMDN dari tahun 2016–2019 cukup beragam dan berfluktuasi. Pada Tahun 2016 jumlah unit usaha ada 238 unit dengan nilai investasi 6.540,00 juta rupiah. Pada tahun 2019 jumlah unit usaha ada 653 unit dengan jumlah investasi 490.093,52 juta rupiah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Dari sisi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu enam tahun terakhir ini cukup berfluktuasi. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp,694.706,66 juta rupiah dengan jumlah unit usaha 3 unit, sedangkan PMA pada tahun 2019 tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.103
Jumlah investasi PMDN/ PMA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2019

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp. Juta)
2016	238	6.540,00	3	694.706,66
2017	400	96.875,00	2	200.082,82
2018	499	179.590,59	2	1.130,63
2019	653	490.093,52	0	0

Sumber Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realisasi investasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.104
Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Realisasi Investasi (Rp)			Tahun
	< 500 jt	> 500 jt	Total	
1.	94.872.222.301	25.450.500.000	120.322.722.301	2016
2.	154.514.300.000	30.000.540.000	184.514.840.000	2017
3.	72.559.920.481	43.105.582.534	115.665.503.015	2018
4.	65.417.494.805	42.416.915.362	107.834.410.167	2019
5.	104.160.000.000	253.224.911.179	357.384.911.179	2020

Sumber Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi investasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp. 249.550.501.111 (231%). Kenaikan ini dipacu oleh naiknya investasi yang lebih dari 500 juta. Walaupun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan oleh aparaturnya terhadap pelaku usaha. Kemudian masih lemahnya sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.

Tabel dibawah ini terlihat bahwa pada tahun 2020, tidak pernah diadakan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020. Hal ini menunjukkan disebabkan karena adanya wabah pandemi Covid 19, sehingga terjadi pembatasan kegiatan dan refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.105
Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Pemantauan	Pembinaan	Pengawasan	Total	Tahun
1.	25	10	15	50	2016
2.	30	15	20	65	2017
3.	35	20	25	80	2018
4.	40	25	30	95	2019
5.	nihil	nihil	nihil	nihil	2020

Sumber Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.2.13 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian pembangunan olahraga dapat dilihat dari indikator jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Indikator ini dapat menggambarkan kepedulian dan keaktifan pemuda dalam bidang keolahragaan. Perkembangan Klub olah raga dan Gedung olah raga dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.106
Perkembangan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

NO	Capaian pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	11,61	13,68	11,39	11,31	11,22
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39

Sumber Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, perkembangan capaian pembangunan bidang olahraga cenderung menurun, dan juga tidak ada penambahan terhadap fasilitas olahraga seperti gedung olahraga.

2.3.2.14 Urusan Wajib Statistik

Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya dari tahun 2016-2020.

Perkembangan Buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota masih dilaksanakan oleh BPS bekerjasama dengan Dinas Kominfo, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, pada dua peraturan tersebut dinyatakan jika OPD yang menangani statistik sektoral adalah sebagai wali data.

Terhadap ketersediaan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA) dan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersedia dan hal ini merupakan sumber informasi terhadap kondisi-kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Lembaga resmi yang menerbitkan informasi terhadap statistik daerah ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

2.3.2.15 Urusan Wajib Persandian

Pada tahun 2020 target dari pengaman informasi berupa Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk 43 Kepala OPD. Instruksi Gubernur tentang Izin Perjalanan Dinas bagi Pimpinan Tinggi Pratama melalui e-Sign, maka kepala Perangkat Daerah termasuk Rumah Sakit sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Sertifikat Elektronik).

2.3.2.16 Urusan Wajib Kebudayaan

Pencapaian pembangunan seni dan budaya dapat dilihat berdasarkan jumlah group kesenian, jumlah gedung kesenian. Perkembangan Jumlah grup kesenian, Gedung kesenian dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.107
Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

NO	Capaian pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	1,88	1,87	3,21	3,19	7,12
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Sumber Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota

Perkembangan capaian pembangunan di bidang kesenian dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian pemenuhan terhadap prasarana kesenian seperti gedung kesenian belum memadai.

Arahan pengembangan kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Bangunan PDRI yang merupakan kawasan bersejarah berupa bangunan museum yang berlokasi di Kecamatan Gunuang Omeh.

2.3.2.17 Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut maka perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumberdaya manusia. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari jumlah perpustakaan, kunjungan pemustaka, koleksi buku dan kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Penyelenggaraan Perpustakaan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan :						
	a. Perpustakaan daerah	Buah	1	1	1	1	1
	b. Perpustakaan nagari	Buah	51	51	51	51	51

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	c. Perpustakaan masyarakat (TBM)	Buah	-	-	-	13	13
	d. Rumah Baca	Buah	-	-	-	2	2
	e. Perpustakaan keliling	Unit	2	2	2	2	2
	f. Perpustakaan Sekolah:						
	• SD/ sederajat	Buah	197	197	197	197	197
	• SLTP/ sederajat	Buah	50	50	50	50	50
	• SLTA/ sederajat	Buah	26	30	30	30	30
	g. Perpustakaan Perguruan Tinggi	Buah	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung per tahun:						
	a. perpustakaan umum daerah	Orang	6.124	6.500	5.278	4.536	1.043
	b. perpustakaan keliling	Orang	63.360	68.533	11.947	25.888	0
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul buku/ Jumlah buku	10.373/ 16.430	11.310/ 18.214	12.350/ 20.215	12.694/ 20.898	13.142/ 21.840

Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel di atas, terhadap jumlah perpustakaan sekolah bila dibandingkan dengan jumlah sekolah maka untuk tingkat SD/ sederajat baru mencapai 52%, lalu untuk tingkat SMP/ sederajat mencapai 59% dan terakhir untuk tingkatan SMA/ sederajat mencapai 88%. Disamping itu sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak ada penambahan perpustakaan sekolah di SD/ sederajat, hanya 5 perpustakaan bertambah di tingkat SMP/ sederajat pada tahun 2016 dan di tingkat SMA/ sederajat pada tahun 2017 sudah semua SMA/ sederajat memiliki perpustakaan, namun karena ada penambahan jumlah SMA/ sederajat pada tahun 2018 sebanyak 4 unit, maka terdapat 4 SMA/ sederajat yang tidak memiliki perpustakaan.

Kunjungan ke perpustakaan umum daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana yang paling signifikan adalah dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain karena kondisi gedung perpustakaan yang kurang representatif bagi pemustaka, jumlah judul dan jumlah koleksi buku yang sangat minim penambahannya dari tahun ke tahun hanya sebesar 6,14% dan 7,43%, makin mudahnya akses internet juga dapat menjadi penyebab berkurangnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan daerah pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Jika dilihat rasio jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah dengan jumlah penduduk yang dilayani (usia 5-59 tahun) sebanyak 311.570 jiwa pada tahun 2020, berada pada angka 0,003 perkapita yang artinya belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional yaitu minimal 0,01 perkapita pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ditingkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Melihat kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat luas, untuk mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan perlu ditambah jumlah perpustakaan nagari, taman bacaan masyarakat dan perpustakaan keliling, dimana dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pertumbuhan perpustakaan nagari hanya 0%, kemudian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) baru muncul pada tahun 2019 sebanyak 13 TBM dan hanya ada 2 unit perpustakaan keliling.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 sebanyak 10.373 judul buku/16.430 buku, tahun 2017 sebanyak 11.310 judul buku/ 18.214 buku, tahun 2018 sebanyak 12.350 judul buku/20.215 buku dan tahun 2019 sebanyak 12.694 judul buku/20.898 buku serta tahun 2020 sebanyak 13.142 judul buku/21.840 buku.

2.3.2.18 Urusan Wajib Kearsipan

Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD serta arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten, BUMD, organisasi kemasyarakatan/politik, pemerintah nagari dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten.

Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan jumlah kegiatan peningkatan SDM kearsipan. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Penyelenggaraan Kearsipan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku :						
	a. OPD	Unit	3	3	4	7	7
	b. Nagari	Unit	7	11	21	27	27

Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perangkat daerah dan nagari, maka hanya 16% Perangkat Daerah dan 35% Nagari yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Urusan Perikanan

Urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh. Indikator pada urusan ini sudah dijelaskan pada sub bab 2.1.4 Potensi Sumber Daya point (d) Sektor Perikanan pada halaman II-33 sampai II-35.

2.3.3.2 Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pariwisata lebih dititikberatkan perkembangannya kepada dua (2) indikator, yaitu (a) kunjungan wisatawan mancanegara dan (b) kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 654.975 orang dengan kunjungan terbanyak adalah wisnus sebanyak 654.296 orang, sedangkan wisman sebanyak 679 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 97.777 orang dan pada bulan April dan Mei tidak ada kunjungan wisatawan karena adanya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah terkait dengan terjadinya wabah pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pada tahun 2020 kunjungan wisata sebanyak 379.927 orang, dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 264.172 orang. Data kunjungan wisatawan ini terus mengalami peningkatan dan ini merupakan dampak positif ditengah lesunya aktifitas dunia pariwisata. Untuk dapat melihat perkembangan jumlah kunjungan wisata per bulan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.110
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca Negara	Jumlah Total
1	Januari	85.505	169	85.674
2	Februari	36.682	179	36.861
3	Maret	26.575	331	26.906
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	71.637	0	71.637
7	Juli	77.307	0	77.307
8	Agustus	92.279	0	92.279
9	September	49.572	0	49.572
10	Oktober	47.927	0	47.927
11	November	69.035	0	69.035
12	Desember	97.777	0	97.777
2020		654.296	679	654.975
2019		636.783	7.316	644.099
2018		609.782	5.518	615.300
2017		419.691	3.382	423.073
2016		301.990	3.144	305.134

Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019- 2021

Perkembangan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara selama kurun waktu tahun 2016-2020, dimana wisatawan nusantara masih mendominasi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan terutama tahun 2018 sangat signifikan kenaikan kunjungannya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan manca negara yang sangat signifikan yakni dari 7.316 orang pada tahun 2019 menjadi 679 orang pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan PSBB yang berlaku secara nasional. Secara perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.37
Perkembangan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Manca Negara
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020



Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019- 2021

2.3.3.3 Urusan Pilihan Pertanian

a. Pertanian

Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020, produksi padi mengalami fluktuasi setiap tahunnya (dapat dilihat pada tabel produksi komoditas pertanian). Produksi jagung menunjukkan tren meningkat tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya untuk sektor peternakan. Produksi padi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dan 2019, bila dibandingkan produksi Kabupaten Solok sebagai lumbung padi di Propinsi Sumatera Barat masih rendah terlihat dari data produksi padi tahun 2018 yaitu 260.109 ton dan Kabupaten Solok Tahun 2018 produksi padinya 374.210,5 ton. Tahun 2019 produksi padi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 237.028 ton dan Kabupaten Solok produksinya sebesar 369.153,3 ton.

Produksi jagung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 sampai 2018, bila dibandingkan produksi Kabupaten Pasaman Barat sebagai lumbung jagung di Propinsi Sumatera Barat masih rendah, terlihat dari data yang ada produksi jagung Tahun 2016 yaitu 25.298,21 ton, Tahun 2017 yaitu 30.252 ton dan Tahun 2018 yaitu 39.627,90 ton sedangkan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 produksi jagung 201.540 ton, tahun 2017 yaitu 340.916 ton dan tahun 2018 yaitu 367.865 ton.

Jika dilihat dari perbandingan produktifitas tanaman padi antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat, Produktifitas tanaman padi di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah produktifitas Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111
Perbandingan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produktivitas Sumatera Barat (ton/ha)
1	2016	42,644	47,452	226,170.00	4.77	5.11
2	2017	51,106	43,820	210,452.00	4.80	5.27
3	2018	54,363	47,264	223,075.28	4.72	4,73
4	2019	59,257	56,920	237,028.00	4.16	4.76
5	2020*	61,181	62,043	267,971.50	4.32	4.69

**) Angka sementara*

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 produksi jagung adalah 25.298,21 ton meningkat menjadi 45.511,78 ton pada tahun 2020 dengan produktifitas sebanyak 7,34 ton per Ha. Jika dilihat dari tingkat kebutuhan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya selalu mengalami kekurangan dari jumlah produksi. Hal ini mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan lokal. Apabila dilihat dari data, produksi jagung lokal belum memenuhi kebutuhan lokal dimana rata-rata kekurangan jagung per tahun 138.086 ton/tahun terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Produktifitas dan Kebutuhan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112
Produktivitas dan Kebutuhan Jagung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

NO	Tahun	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Kebutuhan Jagung
1	2016	4.791	3.867	25.298,21	6,54	203.812,191
2	2017	5.547	4.776	30.252,00	6,33	198.858,401
3	2018	7.087	6.129	38.839,80	6,33	190.270,601
4	2019	6.619	6.523	41.353,90	6,34	187.756,501
5	2020*	6.603	6.202	45.511,78	7,34	183.598,621

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk peningkatan produksi pertanian, didukung dengan penambahan lahan pertanian, ketersediaan benih unggul, ketersediaan pupuk, dan sarana dan prasarana pendukung pertanian. Dari data luas lahan di atas pemanfaatannya atau sebaran penggunaan lahan di seluruh kecamatan dapat terlihat bahwa lahan bukan sawah yang belum diusahakan seluas 5.190 ha. Dari data tersebut juga terlihat potensi luas lahan pertanian yang masih bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian seluas 54.029 ha.

Tabel 2.113
Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Luas Lahan Pertanian (Lahan Bukan Sawah)(dalam Hektar)								Total (Ha)
		Tegal/ Kebun	Ladang- Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Pdg Pengembala an/Pdg Rumput	Hutan Negara	Sement ara tidak diusahakan	Lainnya (tambak,kolam,empang dll)	
1	Gunuang Omeh	2,733	529	500	3,625	85	7,075	54	49	14,650
2	Suliki	3,827	502	620	2,373	155	3,677	120	103	11,377
3	Bukik Barisan	3,621	1,620	5,174	1,750	-	14,350	500	331	27,346
4	Guguak	2,340	121	1,071	801	83	2,130	397	65	7,008
5	Mungka	700	5	759	-	25	3,167	-	366	5,022
6	Payakumbuh	828	710	1,477	581	230	1,271	163	33	5,293
7	Akabiluru	983	1,012	2,022	1,464	-	1,083	-	61	6,625
8	Luak	1,431	243	926	605	186	-	73	95	3,559
9	Situjuh Limo Nagari	1,118	-	1,097	1,140	-	1,018	212	110	4,695
10	Lareh Sago Halaban	4,768	60	1,910	3,476	20	25,300	62	147	35,743
11	Harau	2,821	-	1,683	392	964	21,468	417	174	27,919
12	Pangkalan	838	-	11,329	-	-	55,920	150	145	68,382
13	Kapur IX	5,346	-	20,518	29,413	-	7,322	3,042	75	65,716
Jumlah		31,353	4,802	49,086	45,620	1,748	143,781	5,190	1,754	283,333

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Disamping penambahan lahan, peningkatan produksi pertanian juga di dukung dengan tersedianya bibit unggul yang berkualitas. Dari data diatas tergambar masih rendahnya ketersediaan benih padi yang bermutu dan bersertifikat dibanding dengan kebutuhan benih padi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan disamping masih terbatasnya jumlah penangkar dan luas penangkaran benih padi juga disebabkan karena tidak ada lagi keberadaan UPT Balai Benih Tanaman Pangan Situjuh sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam urusan pengelolaan, penyediaan, penyaluran dan pengawasan benih dan bibit tanaman pangan.

Tabel 2.114
Pemakaian Benih Unggul Yang Bersertifikat di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020

NO.	TAHUN	REALISASI TANAM (Ha)	KEBUTUHAN BENIH (Ton)	BANTUAN BENIH APBN (Ton)	PRODUKSI BENIH BERSERTIFIKAT (Ton)	LUAS PENANGKARAN (Ha)	PERSENTASE KETERSEDIAAN BENIH BERSERTIFIKAT (%)
1	2016	42,644	1,066.10	7.00	128.97	50	12.75
2	2017	51,106	1,277.65	25.00	115.87	47	11.03
3	2018	54,363	1,359.08	0	73.54	27	5.41
4	2019	59,257	1,481.43	0	98.93	42	6.68
5	2020	61,181	1,529.53	28.30	92.56	43	7.90

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Disamping benih unggul, peningkatan produksi pertanian juga dapat dilakukan dengan pemberian pupuk secara rutin. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani belum lah mencukupi sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.115
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Pupuk	2016			2017			2018		
		Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton)	Realisasi (Ton)	%	Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton)	Realisasi (Ton)	%	Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton)	Realisasi (Ton)	%
1	Urea	7.920,27	5.133,74	64,82	7.920,27	5.085,06	64,20	10.020,53	5.270,95	52,60
2	SP-36	2.888,09	2.191,19	75,87	2.888,09	1.806,45	62,55	5.730,09	2.391,40	41,73
3	NPK	8.201,82	4.340,31	52,92	8.201,82	4.738,05	57,77	11.158,82	4.653,10	41,70
4	ZA	1.113,24	568,75	51,09	1.113,24	629,00	56,50	3.814,78	705,80	18,50
5	Organik	7.991,83	63.490,00	7,94	7.991,83	852,14	10,66	10.904,61	786,50	7,21
No.	Jenis Pupuk	2019			2020					
		Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton)	Realisasi (Ton)	%	Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton)	Realisasi (Ton)	%			
1	Urea	8.507,21	4.140,25	48,67	8.160,94	4.701,13	57,61			
2	SP-36	4.830,57	2.163,30	44,78	4.985,93	1.577,90	31,65			
3	NPK	9.736,38	3.895,60	40,01	10.024,78	4.419,28	44,08			
4	ZA	2.954,80	524,16	17,74	2.525,12	716,25	28,36			
5	Organik	10.810,43	781,68	7,23	10.282,54	857,20	8,34			

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sarana dan prasana untuk penunjang peningkatan produksi pertanian sangat lah penting. Sarana dan prasana tersebut dapat berupa Jaringan irigasi, Dam Parit, Embung dan Long Storage. Pembangunan

infrastruktur pertanian berupa dam parit selama lima tahun baru terbangun sebanyak 48 unit, terlihat bahwasanya dari tahun ke tahun pembangunan dam parit mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan embung terbangun 28 unit selama lima tahun sementara long storage terbangun 1 unit. Perkembangan pembangunan infrastruktur pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.116
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	DAM PARIT	15 Unit	13 Unit	11 Unit	7 Unit	2 Unit
2	EMBUNG	1 Unit	8 Unit	8 Unit	7 Unit	4 Unit
3	LONG STORAGE	-	-	1 Unit	-	-

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sarana dan prasarana pertanian lainnya adalah irigasi. Jaringan irigasi tersebut dapat berupa jaringan irigasi teknis dan setengah teknis. Untuk tahun 2020, Jaringan irigasi teknis dan setengah teknis baru tercapai 3.109 ha dari kebutuhan luas areal seluas 20.731 ha. Apabila dilihat persentase capaian luas areal sawah yang dialiri irigasi baru mencapai 14,99 %. Jaringan irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Jaringan Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2020

NO	Klasifikasi Jaringan Irigasi	Luas (Ha)	Luas Lahan Sawah Irigasi (Ha)
1	Teknis	1.667	20.731
2	Setengah Teknis	1.442	
	Jumlah	3.109	20.731

Sumber Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota

Kepemilikan alat mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Lima Puluh Kota ada 226 unit, Hal tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada, yakni sebanyak 1.477 kelompok tani. Jika dirata-ratakan alsintan pada kelompok tani masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, rata-rata capaiannya baru 15,30 %. Kepemilikan alsintan dan jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Rekapitulasi Jumlah Bantuan Alsintan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai Tahun 2020

No.	Jenis Alsintan	Jumlah (Unit)	Kecamatan	Jumlah Poktan
1	Traktor Roda Dua	112	Akabiluru	132
2	Cultivator	67	Bukik Barisan	179
3	Power Tresher	19	Guguak	120
4	Corn Planter	19	Gunuang Omeh	99
5	Corn Sheller	9	Harau	170
			Kapur IX	141
			Lareh Sago Halaban	139
			Luak	83
			Mungka	78
			Pangkalan Koto Baru	53
			Payakumbuh	113
			Situjuah Limo Nagari	81
			Suliki	89
	Jumlah	226		1.477

Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Peternakan

Populasi sapi potong dan kambing tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, rata-rata kenaikan populasi sapi sebesar 1.915 ekor/tahun dan kambing 867 ekor/tahun. Jumlah populasi Sapi potong dan Kambing di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45.071 ekor dan 29.379 ekor. Bila dibandingkan populasi sapi potong Kabupaten Lima Puluh Kota dengan populasi sapi potong Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra produksi daging di Sumatera Barat masih rendah, berdasarkan data populasi sapi potong Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebanyak 83.687 ekor.

Tabel 2.119
Indeks Daya Dukung Lahan Peternakan per Kecamatan

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
1	Payakumbuh	2,6	7.988,0	3.088,7	3.503,5	2616,8	886,7
2	Akabilru	2,7	9.837,6	3.581,6	4.314,7	2862	1452,7
3	Luak	0,4	7.051,3	16.481,9	3.092,7	7216,5	(4123,8)
4	Lareh Sago Halaban	1,1	13.734,5	12.356,5	6.023,9	8974,5	(2950,6)
6	Harau	2,4	17.250,0	7.159,3	7.568,8	5025,8	2543
7	Guguak	1,9	13.792,4	7.353,6	6.049,3	3273	2776,3
8	Mungka	3,0	6.244,3	2.079,4	2.738,7	1067,3	1665,4
9	Suliki	2,6	8.961,4	3.431,2	3.930,5	1073,3	2857,2
10	Bukik Barisan	2,2	13.806,9	6.328,3	6055,7	2784	3271,7
11	Gunuang Omeh	5,2	8.472,4	1.635,3	3.716,0	732,8	2983,2
12	Kapur IX	9,4	15.927,4	1.701,6	6.985,7	840	6145,7
13	Pangkalan Koto Baru	7,5	11.305,7	1.502,0	4.958,7	975,8	3982,9
	Total	2,7	140.682,1	69.576,0	61.702,7	41.443,1	20.259,6

Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota

Tabel diatas memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mendukung populasi sebesar 61.702,7 ST, dengan status aman dimana IDDnya mencapai nilai 2. Secara keseluruhan Kabupaten ini masih mampu menambah kapasitas sebesar 20.259 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu masing-masing di kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago Halaban (1.1) dan Kecamatan Guguak (1,9) dengan status wilayah tidak aman, maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pakan antara lain dengan melakukan budidaya hijauan pakan ternak.

Tabel 2.120
Data Penyediaan Bibit Sapi (Frozen Semen)

No.	Tahun	Jumlah Pengadaan Frozen Semen (Dosis)	Kebutuhan Frozen Semen (Dosis)	% Kebutuhan Frozen Semen yang terpenuhi
1.	2016	3.000	15.497	19,36
2.	2017	2.000	17.178	11,64
3.	2018	1.000	17.172	5,82
4.	2019	1.828	17.066	10,71
5.	2020	8.000	15.898	50,32
	Jumlah	15.828	82.811	19,11

Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota

Dari tabel di atas tergambar bahwa rata-rata pemenuhan kebutuhan frozen semen untuk ternak sapi adalah 19,11 %.

Tabel 2.121
Kasus Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi Dan Kerbau
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

NO	Penyakit Gangguan Reproduksi	JUMLAH KASUS				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	HipoFungsi	148	786	145	144	49
2	Hypoplasia	-	-	2	-	2
3	CLP	15	95	11	18	5
4	Endometritis	46	156	27	38	9
5	Silent Heat	-	500	65	147	11
6	Atropi	-	-	-	-	-
7	Cystic Ovari	2	86	4	2	-
8	Normal	3	1	-	-	-
9	Pyometra	-	1	-	-	-
Jumlah		214	1625	254	349	76

Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota

Gangguan reproduksi merupakan suatu hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh peternak dalam reproduksi ternak, sehingga kelahiran atau kebuntingan pada ternak tidak terjadi. Terjadinya gangguan reproduksi pada hewan ternak sapi dan kerbau disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah manajemen pemeliharaan, pakan yang diberikan, bibit ternak dan SDM dari Peternak. Drai jenis beberapa gangguan reproduksi yang paling banyak ditemukan adalah *Hipofungsi* dan *Silent Heat*. Yang dimaksud dengan Hipofungsi adalah tidak ada sel telur yang dihasilkan oleh ovarium atau kesuburan pada ternak mengalami gangguan. Dan Silent Heat adalah birahi yang tenang atau Birahi pada ternak tidak teramati oleh Peternak. Hipofungsi dan Silent Heat disebabkan karena jeleknya manajemen pemberian pakan yang berkualitas oleh peternak serta pengetahuan peternak dalam sistem reproduksi ternak.

2.3.3.4 Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2019, sektor perdagangan berkontribusi sekitar 14,98% atau sekitar 2,3 trilyun terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya berdasarkan harga konstan maka sektor perdagangan berkontribusi sekitar 15,68%. Sebagai daerah penghubung antara bagian barat dan timur sumatera, seharusnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB tersebut harus lebih besar. Ditambah dengan dikenalnya daerah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Sehingga kontribusi 15,68% tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan. Cara dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan ini salah satunya dengan menyediakan pasar yang representatif sebagai lokasi transaksi antara penjual dan pembeli.

Tabel 2.122
Pasar Rakyat Berdasarkan Status Lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Status Lahan	Jumlah
1	Pasar Serikat	6
2	Pasar Nagari	54
3	Pasar Kabupaten	1
Jumlah		61

Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan data jumlah pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tahun 2019 terdapat 61 pasar rakyat dimana 54 unitnya merupakan pasar nagari, 6 unit pasar serikat dan 1 unit pasar kabupaten. dari 61 pasar rakyat tersebut hanya 1 pasar yang tidak aktif yaitu Pasar Puah Data yang berada di Nagari Koto Tinggi kecamatan Gunuang Omeh.

Tabel 2.123
Pasar Rakyat Berdasarkan Status Keaktifan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Status Keaktifan	Jumlah
1	Pasar Aktif	60
2	Pasar Tidak Aktif	1
	Jumlah	61

Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota

Berdasarkan Permendag Nomor 37/M.DAG/PER/5/2007 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pasal 5, ada 4 tipe pasar dengan criteria sebagai yaitu :

1. Pasar Rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
2. Pasar Rakyat tipe B merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
3. Pasar Rakyat tipe C merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).
4. Pasar Rakyat tipe D merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 61 pasar rakyat/ nagari yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak ada yang bertipe A atau B. Tipe D merupakan tipe pasar yang mayoritas ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 46 pasar, sementara 15 pasar lainnya bertipe C. Ditambah belum adanya pasar yang tersertifikasi secara SNI oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengakibatkan volume dagang di pasar rakyat tersebut cenderung stagnan. Sementara sampai saat sekarang data tentang ragam jenis komoditas yang diperdagangkan dipasar belum tersedia sehingga sangat menyulitkan untuk melihat sejauhmana proporsi transaksi dagang masyarakat dipasar-pasar rakyat tersebut dari sisi jenis komoditas.

Tabel 2.124
Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Tipe Pasar	Jumlah
1	Tipe A	0
2	Tipe B	0
3	Tipe C	15
4	Tipe D	46
	Jumlah	61

Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota

Berbicara tentang pasar tentu tidak lepas dari berbicara tentang perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan dari daerah tingkat II adalah perlindungan dari sisi ukuran timbangan atau Metrologi. Ketepatan dan akurasi hasil timbangan dalam setiap transaksi barang merupakan hak mutlak dari konsumen atau si pembeli. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual harus memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Salah satu standar ekspektasi dari si pembeli adalah ketepatan hasil pengukuran dari barang yang mereka beli. Dalam terminologi metrologi, timbangan tersebut di sebut Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Pada tabel dibawah terlihat bahwa potensi UTTP yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2019 adalah sebanyak 4.452 UTTP. Dari data UTTP tersebut lebih dari 99% merupakan UTTP yang berjenis timbangan pasar. Dengan kata lain timbangan pasar merupakan target utama yang harus dilakukan tera atau tera ulang sehingga bisa menjadi ukuran dan

berat barang yang dibeli oleh konsumen sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan amanat UU No. 8 Tahun 1999 tersebut. Karena sampai saat ini dari 61 pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota belum satu pun ada pasar tertib ukur. Pasar tertib ukur merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi konsumen agar mendapatkan hasil pengukuran yang benar dan jujur dalam transaksi perdagangan. Sehingga dengan sendirinya, Kabupaten Lima Puluh Kota belum bisa masuk ke dalam kategori Daerah Tertib Ukur (DTU) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ketersediaan SDM dan anggaran memadai merupakan faktor utama dalam pencapaian pasar tertib ukur ini. Sehingga kedepannya Kabupaten Lima Puluh Kota bisa ditetapkan sebagai salah satu daerah tertib ukur yang mampu dalam menjalankan salah satu amanat dari UU No. 8 tersebut.

Tabel 2.125
Rekapitulasi Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

No	Jenis UTTP	Jumlah
1	Timbangan Pasar	4.424
2	SPBU	7
3	Timbangan Jembatan	18
4	Timbangan AMP Elektronik	2
5	SPBE	1
Total		4.452

Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota

2.3.3.5 Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2016-2020, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat pada tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 7,66 % menurun menjadi 6,36 % tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah.

Tabel 2.126
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	7,66	7,19	6,9	6,23	6,36

2019 Angka sementara*

*2020** Angka sangat sementara*

Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota

Hal ini sesuai dengan data jumlah industry formal, unit usaha, nilai produksi dan tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 yang cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada tabel di bawah ini. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui :

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha - usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan

bantuan peralatan produksi seperti : mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.

2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain : produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffe dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2.127
Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Industri	Unit Usaha			Nilai Produksi (Rp,000)			Tenaga Kerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Industri Pangan	2.514	2.533	937	710.298.606	3.750.330.299	62.968.161,107	5.689	5.769	NA
2	Industri Sandang dan Kulit	139	414	100	24.917.195	75.677.364.500	11.375.978,380	1.192	5.431	NA
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	4.133	4.383	5.892	119.081.750	73.990.184.000	295.391.998,511	12.833	13.891	NA
4	Industri Logam dan Elektronika	9	9	48	1.113.400.000	113.400.000	7.485,515	25	25	NA
5	Industri Kerajinan	277	277	203	166.375.951	166.375.951	1.378.206,307	4.498	4.498	NA
Jumlah		7.072	7.616	7.180	2.134.073.502	153.697.654.750	371.121.829,820	24.237	29.614	NA
2017*		8.193			780.518.815			24.314		
2016*		8.193			780.518.815			24.314		

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021

2.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komponen dalam penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.128
Komponen Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a) Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), Meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a) Pemenuhan pengukuran (5%) b) Kualitas pengukuran (12,5%) c) Implementasi pengukuran (7,5%)

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a) Pemenuhan pelaporan (3%) b) Kualitas pelaporan (7,5%) c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a) Pemenuhan evaluasi (2%) b) Kualitas evaluasi (5%) c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20%	a) Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b) Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (10%) c) Kinerja tahun berjalan (Benchmark) (5%)
Total		100%	

Sumber Inspektorat, Bapelitbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perencanaan memiliki bobot nilai yang relatif besar, diikuti oleh komponen pengukuran kinerja. Urusan yang terkait dengan penilaian SAKIP ini adalah perencanaan, keuangan dan pengawasan. Sedangkan untuk nilai Sakip terdiri atas 7 kategori mulai dari yang tertinggi yaitu AA sampai ke yang terendah D. Perkembangan hasil penilaian peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat Akuntabilitas Kinerja	C	C	CC	CC	B

Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 peringkat nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah "C" atau "Cukup" yang berarti masih kurang sistem dan tatanan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja daerah. Hal ini sistem untuk manajemen kinerja perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

Pada tahun 2020, peringkat SAKIP daerah Kabupaten Lima Puluh Kota naik menjadi peringkat "B" atau "Baik", yang berarti akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan.

Walaupun peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah Baik, namun masih sangat perlu perbaikan agar bisa menjadi lebih baik lagi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja daerah.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 yang dilaksanakan pada 42 Perangkat Daerah dan Puskesmas, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara umum sudah menunjukkan hasil yang baik, antara lain :

- 5 (lima) Perangkat Daerah dan Puskesmas dengan mutu pelayanan A (sangat Baik)
- 37 (Tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan B (baik)

Dari survey tersebut didapatkan Nilai Rata-rata Interval 3,39 dengan IKM 83,99 dengan dengan mutu pelayanan B dengan kinerja unit pelayanan Baik. Perkembangan nilai IKM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel disamping.

Tabel 2.130
Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,67	76,86	80,11	82,76	83,99

Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Namun demikian unsur-unsur pelayanan yang masih perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana dan sarana prasarana.

c. Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Walaupun sudah ada peningkatan, namun Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum optimal dalam pelaksanaan birokrasi reformasi. Perkembangan Indeks Reformasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	57,14	58,78	69,87

Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

d. Potensi Zakat

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun fluktuatif. Memang pada umumnya setiap tahun terjadi peningkatan pengumpulan zakat, namun peningkatan tersebut tidak bersifat signifikan mengingat potensi zakat di Lima Puluh Kota yang begitu besar, yaitu Rp. 66.723.320.400,-. Persentase penerimaan terhadap potensi zakat hanya sebesar 5,96%. Potensi penerimaan zakat yang tertera pada tabel diatas tersebut baru untuk PNS. *Muzzaki-muzzaki* yang berasal dari pengusaha, kontraktor, petani dan *muzzaki* lainnya belum terjangkau oleh BAZNAS, sehingga dalam hal ini *maqashid al-Syariah* zakat untuk *muzzaki* di Lima Puluh Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Pengumpulan yang dilakukan juga baru sebatas dana zakat, sedangkan untuk dana lain seperti infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya yang juga memiliki potensi luar biasa belum terkumpulkan oleh BAZNAS. Target dan penerimaan Zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.132
Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan		Jumlah Dana yang Disalurkan		Potensi Penerimaan Zakat	
		Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.
1	2016	3.315	2.500.000.000	1.465	2.073.737.110	3.197	2.198.812.000	6.000	6.982.875.000
2	2017	3.500	2.690.000.000	1.389	2.085.176.046	5.524	1.828.713.948	6.000	7.448.400.000
3	2018	4.000	3.505.000.000	1.144	2.964.881.746	8.101	2.797.168.721	6.000	8.379.450.000
4	2019	3.000	3.250.000.000	1.627	4.212.380.837	9.561	4.357.811.105	6.207	9.310.500.000
5	2020	4.500	4.640.000.000	1.692	3.978.733.270	8.048	3.924.103.900	6.241	10.241.550.000

Sumber Baznaz Kabupaten Lima Puuh Kota

Berkaitan dengan *mustahiq* yaitu pada penyaluran zakat. Program-program yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih bersifat konsumtif saja. Dari persentase dana yang terhimpun hanya 10% yang disalurkan untuk zakat produktif. Sehingga hal ini tidak akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, jika dilihat dari dana yang berhasil terkumpul oleh BAZNAS masih sedikit hanya Rp. 2.000.000.000,- per tahunnya.

Selain pengumpulan zakat yang belum optimal, BAZNAS juga belum mampu sepenuhnya memberikan kenyamanan terhadap *muzzaki* selama ini. Hal ini terbukti berdasarkan data dari beberapa *muzzaki*. Kepercayaan para sedangkan yang baru dikelola oleh BAZNAS adalah Rp. 3.978.733.270,- di tahun 2020.

e. Angka Partisipasi Kasar Surau/MDA/TPQ

Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ diperoleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDA dan Surau. Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.133
APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun	59,64	66,15	62,66	64,59	65,67

Sumber Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ sebesar 65,67, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7-15 tahun untuk belajar agama masih cukup rendah, masih ada sekitar 34 dari 100 penduduk usia 7-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan agama di Surau/MDA/TPQ.

Tabel 2.134
Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020

No.	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid	2016	2017	2018	2019	2020
1.	TPQ	762	769	791	805	805
2.	MDTA	132	135	136	136	136
3.	Surau	21	23	27	24	24
4.	Masjid	456	417	415	419	419

Sumber Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Capaian target indikator kinerja penunjang urusan sekretariat dewan 100% setiap tahunnya baik dilihat dari tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD, tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Indikator terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Renstra, Renja serta DPA setwan DPRD juga tersedia.

Indikator tambahan lain adalah adanya Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan selama lima tahun selalu mengalami tren yang meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa Pimpinan dan anggota Dewan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD selama lima tahun terakhir. Perkembangan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.135
Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan	88,57	91,43	85,71	88,57	91,42

Sumber Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

2.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1 Perencanaan

Capaian target indikator kinerja penunjang urusan perencanaan 100% setiap tahunnya baik dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu maupun indikator evaluasi dokumen perencanaan daerah. Namun demikian bukan berarti urusan penunjang pemerintahan ini tidak mengalami permasalahan.

Beberapa permasalahan antara lain, yaitu : sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan.

Permasalahan lainnya terdapat pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal, antara lain : belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah; peran Bapelitbang dalam perencanaan belum optimal dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.136
Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan)
Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020 (%)

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Evaluasi dokumen perencanaan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota

2.3.5.2 Keuangan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah Pusat. Perkembangan PAD dan Persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.137
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	68.060.267.475,94	119.771.917.448,64	73.440.842.296,03	85.168.153.332,25	77.429.483.703,61
Pendapatan	1.178.893.526.250,94	1.275.862.309.267,64	1.257.168.413.662,03	1.336.485.510.303,25	1.209.471.396.990,61
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	5,77	9,39	5,84	6,37	6,40

Sumber Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2019-2021

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- Tidak wajar (*adversed opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun berturut- turut dari tahun 2016 – 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 138

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	N/A	81,67	21,5	-	53,95

Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota

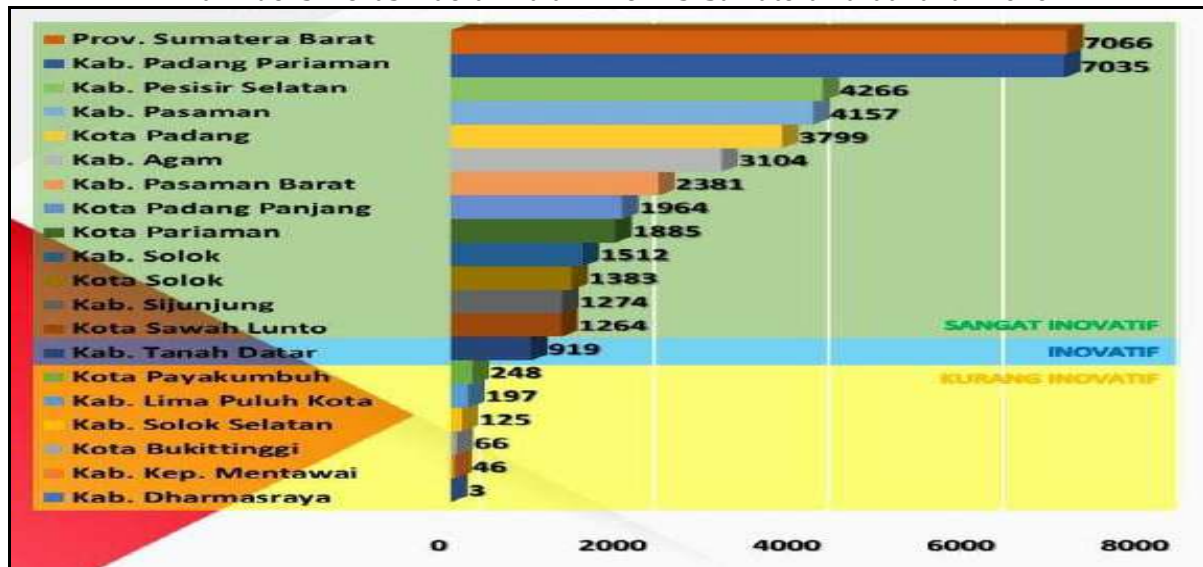
Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 5 Tahun terakhir terjadi fluktuasi nilai akibat penilaian mandiri yang dilakukan pada tahun 2017 dengan nilai 81,67. Penurunan Indeks Profesionalitas ASN yang cukup signifikan pada tahun 2018 ini menjadi nilai 21,5 disebabkan karena adanya transisi dari penilaian mandiri menjadi penilaian terpusat melalui aplikasi Badan Kepagawaian Negara (BKN) sehingga terdapat perbedaan metode dan indikator penilaian. Tahun 2019 nilai tidak dikeluarkan oleh BKN karena adanya perbaikan sistem. Secara rata-rata, Indeks Profesionalitas ASN ini mengalami kenaikan karena adanya penilaian harian yang dilakukan oleh BKN.

2.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penunjang Pemerintahan untuk Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih berada dalam satu subbidang (setingkat eselon IV) dibawah Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) selama ini belum optimal karena terkendala dengan kedudukan organisasi Litbang yang masih eselon IV serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama belum adanya fungsional peneliti untuk urusan kelitbangan ini. Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan antara lain adalah inventarisasi pelaksanaan penelitian/ kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kegiatan inventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh OPD, Nagari dan individu. Selain itu, sejak tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah/ IGA (*Innovation Government Award*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017.

Grafik 2.38
Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020



Sumber Kementerian Dalam Negeri

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 12 Kabupaten/ Kota mendapatkan predikat Provinsi/ Kabupaten/ Kota sangat Inovatif. Selanjutnya Kabupaten Tanah Datar dengan predikat Kabupaten Inovatif. Kemudian 6 Kabupaten/ Kota Lainnya termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat predikat Kurang Inovatif. Dilihat secara peringkat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di peringkat 15 dari 19 Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat, di atas Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dhamasraya.

Tabel 2.139
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Ket.
1.	2017	N/A	-
2.	2018	1.870	Sangat Inovatif
3.	2019	3.010	Sangat Inovatif
4.	2020	197	Kurang Inovatif

Sumber Kementerian Dalam Negeri

Tabel di samping menunjukkan bahwa perlu peningkatan kinerja dan jumlah SDM dari urusan kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan dan pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka urusan kelitbangan ini perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan aspek daya saing daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka menilai pencapaian sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan saran perbaikan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan pencapaian sasaran reformasi birokrasi sehingga berdampak terhadap perbaikan reformasi birokrasi yang hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat.

PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen, yaitu : Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Tabel 2.140
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

A	Pengungkit			
	I	Pemenuhan		32,82
		Manajemen Perubahan		17,36
		Deregulasi Kebijakan		2,00
		Penataan dan Penguatan Organisasi		3,00
		Penataan Tatalaksana		1,37
		Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya		2,85
		Penguatan Akuntabilitas		2,45
		Penguatan Pengawasan		1,68
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		2,11
	II	Hasil Antara Area Perubahan		2,70
	III	Reform		17,50
		Manajemen Perubahan		1,92
		Deregulasi Kebijakan		1,40
		Penataan dan Penguatan Organisasi		1,55
		Penataan Tatalaksana		1,84
		Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur		3,30
		Penguatan Akuntabilitas		2,09
		Penguatan Pengawasan		2,18
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		3,24
B	Hasil			
		Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		6,95
		Kualitas Pelayanan Publik		0,00
		Pemerintah yang bersih dan bebas KKN		0,00
		Kinerja Organisasi		0,00

Sumber Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Program-program yang dicanangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Tabel 2.141
Penilaian Indikator Kinerja pada Inspektorat tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1,3	1,3	3,06	3,06	3,06
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 plus	2	2 Plus	3	3
3	Persentase tindak lanjut temuan					
	Ekstern	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50
	Intern	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
4	Persentase laporan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus pelanggaran disiplin pegawai	100	100	100	100	100

Sumber Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berada pada indeks 3,06, artinya pada tingkatan ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi

yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kapabilitas APIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berada pada level 3, artinya APIP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas, dan kehematan (dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (governance, risk management, and control), dan hasil yang dicapai serta APIP telah melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, review pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016- 2020 dapat tetap tumbuh di 3,95 persen. PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran meningkat cukup signifikan, yakni 12.677.544,49 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 15.533.057,18 juta rupiah di tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi PDRB ADHB sebesar -1,16 persen. Hal ini terjadi karena turunnya semua komponen pengeluaran dalam PDRB Menurut Pengeluaran. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sejak tahun 2020. Perkembangan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016–2020 dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

Tabel 2.142
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016 -2020

Jenis pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.847.554,13	7.343.897,47	7.964.755,93	8.742.878,66	8.480.857,54
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136.050,61	139.460,95	151.619,31	177.542,00	173.484,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.272.101,97	1.299.059,97	1.411.319,16	1.520.627,29	1.404.583,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.921.136,19	4.175.014,75	4.507.317,79	4.877.584,50	4.789.336,14
Perubahan Inventori	26.540,06	633,71	1.068,88	398,23	1.462,63
Net Ekspor Barang dan Jasa	474.161,55	573.127,89	489.402,15	294.464,78	683.332,69
PDRB	12.677.544,49	13.531.194,73	14.525.483,21	15.613.495,46	15.533.057,18

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Seperti halnya PDRB Menurut Pengeluaran ADHB, PDRB ADHK Menurut Pengeluaran juga mengalami kontraksi. Perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016–2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.143
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

Jenis pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.990.154,79	5.262.692,29	5.542.364,68	5.794.061,35	5.524.120,12
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	101.183,93	105.317,45	111.765,87	126.884,42	123.245,38
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	863.149,08	852.812,59	890.009,21	936.802,26	853.207,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.892.416,94	3.018.723,92	3.139.285,32	3.302.538,24	3.210.661,34
Perubahan Inventori	21.188,70	459,10	731,06	266,89	948,46
Net Ekspor Barang dan Jasa	743.171,09	883.642,26	969.105,34	1.031.872,82	1.350.127,96
PDRB	9.611.264,54	10.123.647,61	10.653.261,47	11.192.425,99	11.062.311,08

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak lepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor neto atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel dibawah terlihat bahwa selama tahun 2016–2020, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, 54,01 persen – 54,6 persen. Pembentukan modal tetap bruto juga mempunyai kontribusi relative besar dari tahun 2016–2020 yakni 30,93–30,83 persen. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah berada dalam rentang 10,03 persen (2016) dan 9,04 persen (2020). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Untuk net ekspor barang dan jasa berada pada rentang 3,74 persen (2016) dan 4,4 persen (2020), menunjukkan bahwa komponen ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor.

Tabel 2.144
Distribusi PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

Jenis pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,01	54,27	54,83	56	54,6
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,07	1,03	1,04	1,14	1,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,03	9,6	9,72	9,74	9,04
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,93	30,85	31,03	31,24	30,83
Perubahan Inventori	0,21	0	0,01	0	0,01
Net Ekspor Barang dan Jasa	3,74	4,24	3,37	1,89	4,4
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dari tabel disamping, selama tahun 2016–2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh

Kota mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,32 persen (2016); 5,33 persen (2017); 5,23 persen (2018) dan 5,06 persen (2019) dan -1,16 persen (2020).

Tabel 2.145
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Jenis pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,61	5,46	5,31	4,54	-4,66
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,58	4,09	6,12	13,53	-2,87
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,68	-1,2	4,36	5,26	-8,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,55	4,37	3,99	5,2	-2,78
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,32	5,33	5,23	5,06	-1,16

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.4.2.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Semakin besar rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, akan menggambarkan kepadatan pemakaian pengguna jalan. Tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 64,67 artinya dalam 1 km panjang jalan menampung 64,67 kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.146
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	1.332,75	1.306,65	1.306,65	1.306,65	1.315,48
2	Jumlah kendaraan	91.610	91.610	94.969	101.193	85.070
3	Rasio	68,74	70,11	72,68	77,44	64,67

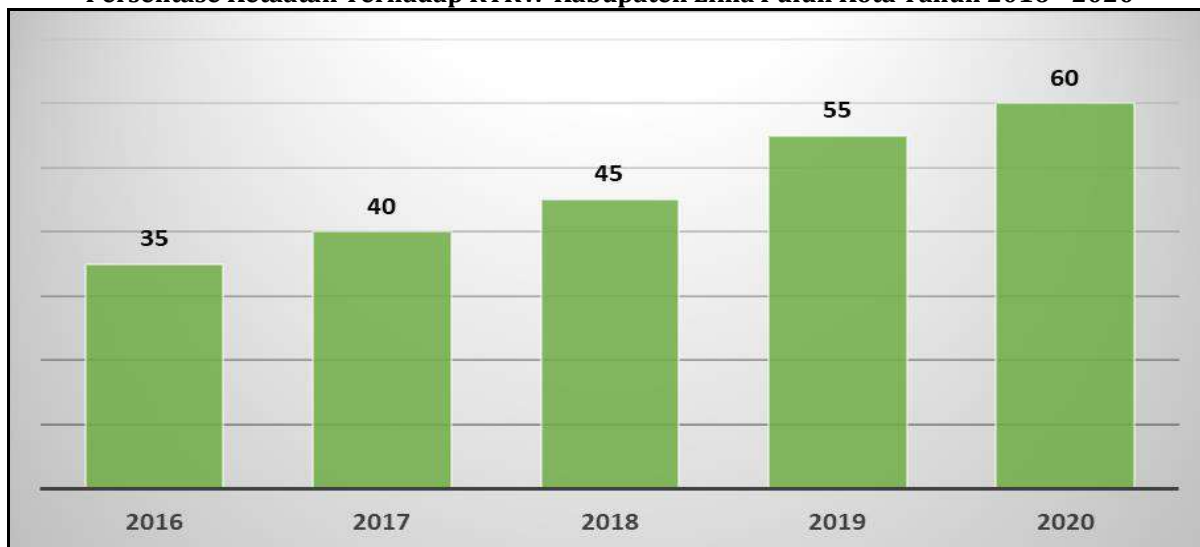
Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2019-2021

2.4.2.2 Ketaatan terhadap RTRW

Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak.

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat sepeerti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari : i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW seperti yang ditampilkan pada Grafik 2.2 dibawah :

Grafik 2.39
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020



Sumber DPUPR Kab. Lima Puluh Kota

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 60%, artinya masih ada 40% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi kendala utama adalah belum selesainya proses revisi RTRW yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, serta belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

2.4.2.3 Jenis dan jumlah Bank dan cabang

Facilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021, pada tahun 2020 jumlah BPR/ LPN tercatat sebanyak 11 buah yang tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Harau, Suliki, dan Kapur IX dengan jumlah masing-masing 1 bank kecuali Kecamatan Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Harau masing-masing sebanyak 2 bank. Total modal dasar BPR/ LPN tersebut pada tahun 2020 tercatat sebesar 72 milyar rupiah dengan total asset sebesar 296 milyar rupiah. Asset terbesar terdapat di Kecamatan Harau, yaitu 88 Milyar rupiah dan asset terkecil di Kecamatan Kapur IX sebesar 9,9 milyar rupiah.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah sebesar 252 yang berarti bahwa setiap 252 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Terkait penjelasan Angka Kriminalitas sudah dijelaskan pada subbab 2.2.6 Angka Kriminalitas halaman II-51.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Tingkat Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non produktif. BPS merepresentasikan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) dengan memunculkan Angka Beban Tanggungan (ABT). Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Semakin besar ABT, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Angka Beban Tanggungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada

tahun 2015 sebesar 63 atau dapat dikatakan bahwa setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) akan menanggung 63 orang non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk tahun 2020, Angka Beban Tanggungan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada besaran 47-48. Perkembangan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.147
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020

No.	Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	109.803	109.939	110.038	110.014	92.272
2	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	235.200	237.718	240.046	242.219	259.325
3	Jumlah Penduduk Usia 65+ Tahun	27.565	28.415	29.430	30.584	31.928
4	% ABT	58,40	58,20	58,10	58,05	47,89

Sumber : BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2019-2021

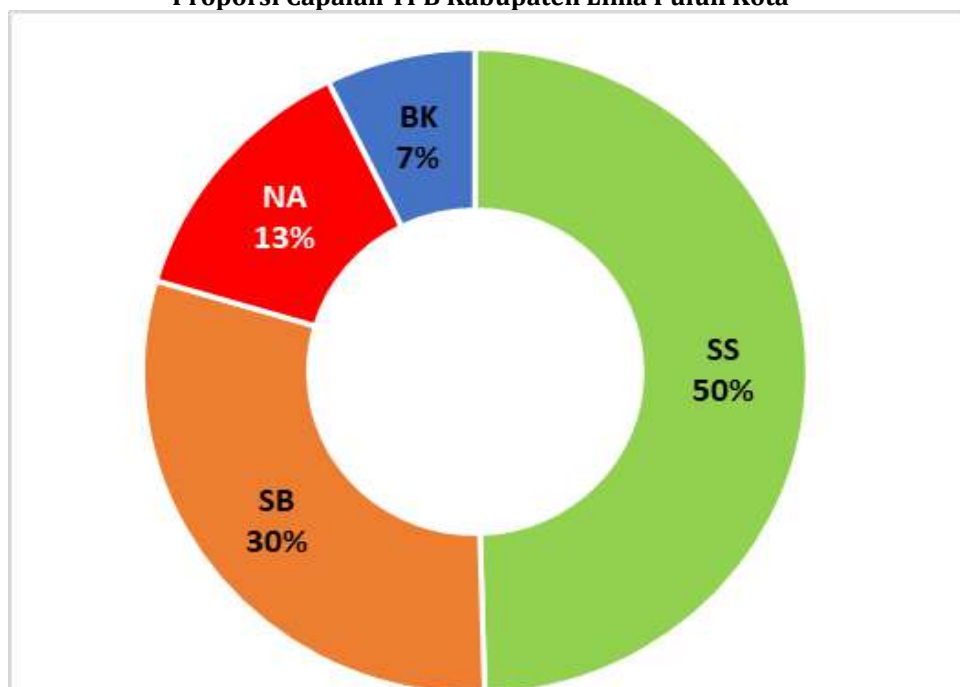
2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat mengoreksi, menyempurnakan dan menambahkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: 1.) Tanpa Kemiskinan, 2.) Tanpa Kelaparan, 3.) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4.) Pendidikan Berkualitas, 5.) Kesetaraan Gender, 6.) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7.) Energi Bersih dan Terjangkau, 8.) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9.) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10.) Berkurangnya Kesenjangan, 11.) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12.) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13.) Penanganan Perubahan iklim, 14.) Ekosistem Lautan, 15.) Ekosistem Daratan, 16.) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, 17.) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan Perpres No.59 Tahun 2017 di atas, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 *goals* dan jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator. Adapun untuk evaluasi capaian TPB terdapat 4 (empat) kategori tingkat pencapaian antara lain 1.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 2.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 3.) Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA), Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.40
Proporsi Capaian TPB Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

Tingkat ketercapaian pelaksanaan TPB Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan 17 TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.148
Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	24	9	11	3	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	1	3	
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	25	4	5	
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	6	5	2	
TPB 5	Kesetaraan gender	14	7	4	3	
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	9	8		1
TPB 7	Menjamin akses energi	2	1		1	
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	8	7	4	
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	4	4	1	4
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	11	5		2	4
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	13	2	5	1	5
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	2	3		
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2		2		
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	2	1	
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	13	6	2	
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	10	4	1	1
Total		220	109	66	29	16
Persentase		100%	50%	30%	13%	7%

Sumber KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

Dari gambar dan tabel diatas sebanyak 109 indikator (50%) sudah mencapai target dan tidak ada data/belum terlaksana (NA) dari capaian TPB tersebut sebanyak 29 indikator (13%). Pemerintah dan

masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mungkin sudah melaksanakan kegiatan pembangunan terkait dengan indikator TPB tersebut, namun tidak tersedia data, sehingga tidak bisa dianalisis. Terhadap indikator TPB yang bukan kewenangan sebanyak 16 indikator (7%).

2.6 Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2041

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman dalam menentukan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pedoman dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten, pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten dan pedoman lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten.

2.6.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2041

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang terdiri dari pusat – pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya yang digunakan untuk mengintegrasikan wilayah yang ada di kabupaten. Untuk melihat rencana struktur ruang yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.149
Hasil Telaahan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2041

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaataan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
I	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan										
I.1	Pemantapan Fungsi PKL Sarilamak	Penyusunan RDTR Sarilamak	IKK Sarilamak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Penyusunan RTBL Pusat Pemerintahan	IKK Sarilamak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Penyusunan RTBL Kawasan Wisata Lembah Harau	Kawasan wisata Lembah Harau							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung PKL	Kec. Harau							APBD Kabupaten , Investasi Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta
		Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	Kec. Harau							APBD Kabupaten , Investasi Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta
		Pengembangan RTH Publik	IKK Sarilamak							APBD Kabupaten , Dana CSR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
I.2	Pemantapan Fungsi PPK	Penyusunan RDTR Perkotaan PPK	Perkotaan Suliki, Pangkalan Koto Baru, Sariak Laweh, Banda Dalam, Koto Baru, Dangung-dangung, Pakan Rabaa, Koto Tinggi, dan Maek,							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pengembangan Fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung PPK	Kec.Suluki, Kec.Pangkalan Koto Baru, Kec. Akabiluru, Kec. Situjuah Limo Nagari.							APBD Kabupaten , Investasi Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, Swasta

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Kec. Payakumbuh, Kec. Guguak, Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Gunung Omeh, dan Kec. Bukik Barisan								
		Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	Kec.Suluki, Kec.Pangkalan Koto Baru, Kec. Akabiluru, Kec. Situjuah Limo Nagari, Kec. Payakumbuh, Kec. Guguak, Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Gunung Omeh, dan Kec. Bukik Barisan							APBD Kabupaten , Investasi Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta
		Pengembangan RTH Publik	Perkotaan Suliki, Pangkalan Koto Baru, Sariak Laweh, Banda Dalam, Koto Baru, Dangung-dangung, Pakan Rabaa, Koto Tinggi, dan Maek,							APBD Kabupaten , Dana CSR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Rencana Pembangunan IPAL	Perkotaan Suliki, Pangkalan Koto Baru, Sariak Laweh, Banda Dalam, Koto Baru, Dangung-dangung, Pakan Rabaa, Koto Tinggi, dan Maek,							APBD Kabupaten , Dana CSR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
I.3	Pemantapan Fungsi PPL	Penyusunan Perdes Rencana Tata Ruang Desa (Nagari)	Pakan Sabtu, Muro Paiti, dan Padang Loweh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
Pengembangan Fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung PPL		Kec. Luak, Kec. Kapur IX, Kec. Mungka							APBD Kabupaten , Investasi Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, Swasta	
Pengembangan sarana dan prasarana permukiman		Kec. Luak, Kec. Kapur IX, Kec. Mungka							APBD Kabupaten , Investasi Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta	
Pengembangan RTH Publik		Kec. Luak, Kec. Kapur IX, Kec. Mungka							APBD Kabupaten , Dana CSR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP	
II	Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Transportasi)										
II.1	Sistem Jaringan Jalan Nasional	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Nasional Non Tol	ruas jaan batas utara Kabupaten Lima Puluh Kota (arah ke Pekan Baru) – Kota Payakumbuh – Batas Selatan							APBN	Kementerian PUPR

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Kabupaten Lima Puluh Kota (arah ke Tanah Datar)								
		Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Padang	Menyesuaikan rencana							APBN dan/atau Investor	Kementerian PUPR, Swasta
II.2	Sistem Jaringan Jalan Provinsi	Rencana Pengembangan Ruas Jalan Pangkalan - Sialang - Gelugur - Batas Provinsi Riau	Pangkalan, Gelugur							APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi
		Rencana pengembangan ruas jalan Koto Tinggi - Bonjol	Koto Tinggi - Bonjol							APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi
		Rencana pengembangan Jalan Buluh Kasok Riau	Buluh Kasok							APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi
II.3	Sistem Jaringan Jalan Kabupaten	Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Sarilamak - Luak	Simpul ini melewati Bukik Limbuku - Tanjung Pati (ruas 47) - Taram - Bukik Limbuku (ruas 45) - Andaleh Taram (ruas 44) - Andaleh Mungko (ruas 120)							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Luak - Akabiluru	Andaleh - Mungko (ruas 120) - Tarok - Andaleh (ruas 43) - Simpang Yanita - Saibaladuang (ruas 82) - Pinang Baririk - Rogeh (ruas 64)							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Sarilamak - Akabiluru	Simpul jalan ini melewati Kota Payakumbuh, lurus sepanjang jalan negara hingga ke kecamatan Akabiluru							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Sarilamak - Suliki	Simpul ini berkembang mengikuti jalan negara dan jalan provinsi yang dari sarilamak Kecamatan Harau melewati kecamatan guguk hingga ke kecamatan suliki							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Sarilamak - Guguak	Simpul ini berkembang mengikuti jalan negara dan jalan provinsi yang dari sarilamak Kecamatan Harau Hingga Kecamatan Guguak							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Akabiluru -Suliki	Simpul ini melewati Sp.Batu Hampar - Suayan (ruas15) - Suayan - Siamang Bunyi (ruas 107) - Sp.Kubang - Siamang Bunyi (ruas 74) Suliki Selatan - Mudiak Liki (ruas 24)							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Suliki - Kapur IX	Simpul ini melewati Koto Tengah - Guntuang (ruas 29) - Maek - Tanjung Bungo (ruas 80) - Koto Lamo - Tanjung Bungo (ruas 90) - Lubuk Alai - Koto Lamo (ruas 72) - Jalan Provinsi di Kecamatan Kapur IX							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Kapur IX - Pangkalan Koto Baru	Simpul ini dihubungkan oleh jalan provinsi							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Guguak - Pangkalan Koto Baru	Simpul ini dihubungkan oleh jalan provinsi dan jalan negara melewati kecamatan suliki							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Sarilamak - Pangkalan Koto Baru	Simpul ini dihubungkan oleh jalan negara							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Simpul guguak - Luak	Simpul ini dihubungkan oleh jalan - jalan provinsi - Pakan Sabtu - Mungo (ruas 41)							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Rencana pengembangan ruas jalan Jalan Lingkar luas kota	IKK Sarilamak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		sarilamak									
II.4	Jaringan Jalan Strategis IKK Sarilamak	Pengajuan usulan izin perencanaan dan pembuatan median pada jalan Arteri Primer (Jalan Negara)	IKK Sarilamak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pengusulan nama - nama ruas jalan ke DPRD								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan Arteri Sekunder (AS)								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder (KS)								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perenc & Pembangunan Jalan Lokal LGP & LGS								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Terminal Tipe B								APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi
		Perencanaan & Pemb, Jalan Tempat Parkir (off Street Parking)								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan & Pembangunan Penerangan Jalan								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan & Pembangunan Trotoar								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan & Pembangunan Halte /Shelter/Laybay								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Perlengkapan Jalan								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
II.5	Jaringan Jalan Strategis Kawasan Buluh Kasok	Perencanaan dan Pembangunan Jalan Talago - Aia Putihah - Buluah Kasok	Kawasan Buluh Kasok							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan jalan Ketinggian - Buluh Kasok								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan Tanjung Pati - Batu Balang								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan Bukik Limbuku - Pilubang - Buluh Kasok								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan pembangunan perlengkapan jalan								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
II.6	Jaringan Jalan Sentra Produksi dan Agropolitan	Perencanaan dan pembangunan Jalan Tanjung Pati - Lb Batingkok - Simalanggang - Taeh Baruah - Mungka	Mungka							APBD Kabupaten	Dinas PUPR

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Tarantang - Solok Bio Bio -Simpang Balai - Padang Laweh - Mungka								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pembukaan jalan di Jorong Mungka Tengah ke Nagari Jopang								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pembukaan jalan di Jorong Mungka Tengah ke Nagari Jopang								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pembukaan jalan di Jorong Lubuak Lintang ke dekat Kantor Camat (Simpang Tiga)								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pembukaan jalan dari Batu Bulan ke Sungai Antuan								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pembukaan jalan dari Rempuah Gadang ke Jorong Balai Koto Tinggi Kubang Balambak								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pengembangan jaringan jalan lingkaran dari Jopang ke Padang Mungka								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Peningkatan ruas jalan Simun (Jopang Manganti)								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan Tanjung Pati - Bukik Limbuku - Taram - Andaleh	Padang Mangateh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan Pakan Sabtu - Padang Mangateh								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Jalan Negara - Situjuah Batua - Situjuah Gadang - Sikabu kabu - Madang Kodok - Rogeh - Sibaladuang - Padang Mangateh								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Ketinggian - Tarantang - Solok Bio Bio - Simp. Balai - Lb. Simato - Sei. Antuan - Padang Batang - Kampuang Tengah - Kubang Balambak - Maek - Tanjuang Bungo - Lolo - Sialang.	Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Tanjung Pati - Lubuk Batingkok - Gurun -Talago - Aie Sonsang - Simpang Kapuak - Padang Laweh - Talang Maua - Kubang Balambak - Maek - Ronah - Tanjuang Bungo - Lolo - Sialang.	Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Perencanaan dan Pembangunan jalan simp. Batu Hampa - Sariak Laweh - Bukik Apik - Kuranji - Tiaka - Buka - Tungkek - Simpang Andiang - Maek	Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Perlengkapan Jalan	Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Jalan Simpang Kapuak - Kubang Balambak	Kecamatan Mungka								
II.7	Jaringan Jalan Setra Tambang	Perencanaan dan Peningkatan jalan Pangkalan - Batu Kajang (Jalan Provinsi)	Pangkalan Koto Baru							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Peningkatan jalan Tanjuang Bungo - Koto Lamo - Lb. Alai								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Simp. Batu Hampa - Sariak Laweh - Bukik Apik - Kuranji - Tiaka - Kubang Tungkek - Simpang Andiang - Maek - Tanjuang Bungo - Sialang	Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan peningkatan jalan ketinggian - Lb. Alai	Manggani Gunuang Omeh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Peningkatan Jalan Simalanggang - Koto Baru								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Peningkatan Ruas Jalan Koto Baru - Limbanang - Suliki - Koto Tinggi - Pua Data								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perenc & Pemb. Jalan Pua Data - Manggani								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		5. Perencanaan dan Pembangunan Perlengkapan Jalan								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
II.8	Jaringan Jalan Kawasan Tujuan Wisata	Perencanaan dan Peningkatan Jalan Sarilamak - Harau	Lembah Harau							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan & Peningkatan Jalan Ketinggian - Lubuak Limpato								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan & Peningkatan Jalan Ketinggian - Tarantang								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Area Parkir di Kawasan Wisata								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Pembangunan Shelter / Halte/Laybay								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan & Pembangunan								APBD Kabupaten	Dinas PUPR

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Perlengkapan Jalan									
		Andaleh - Batang Tabik	Batang Tabik							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Taeh Bukik - Air Terjun Sarasah Murai - Labuah Lintang	Kecamatan Mungka							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Peningkatan Jalan Taram - Kapalo Banda	Kecamatan Harau								
		Perencanaan dan Peningkatan Jalan Taram - Bukik Limbuku									
		Perencanaan dan Peningkatan Jalan Solok Bio-Bio - Taeh Bukik									
		Perencanaan dan Peningkatan Jalan Batuang Badarah - Lambeh									
		Perencanaan dan Peningkatan Jalan Simpang Sungai Dadok - Pua Data	Kecamatan Gunung Omeh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Perencanaan dan Peningkatan Jalan Simpang Simpang Anding - Maek	Kecamatan Bukik Barisan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
II.9	Jaringan Jalan Bandar Udara Piobang	Koto Baru - Parumpuang - Piobang	Kecamatan Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Simpang Cubadak - Sungai Beringin - Gando - Piobang								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	Jaringan Jalan Kawasan Terisolir	Sialang - Galugua (Kapur IX)	Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Baliak Bukik - Sei Pimpiang - Lokasi Transmigrasi (Pangkalan Koto Baru)	Pangkalan Koto Baru							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Maek - Tanjung Bungo	Kecamatan Bukik Barisan								
		Suayan - Siamang Bunyi	Kecamatan Akabiluru								
		Simpang Sungai Ipuh - Ampalu	Kecamatan Lareh Sago Halaban								
II.10	Pembangunan dan Penegmbangan Rencana Terminal	Pembangunan Terminal Tipe B Sarilamak	Sarilamak							APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi
		Pembangunan Terminal Tipe C Suliki	Suliki							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
		Pembangunan Terminal Tipe C Pangkalan Koto Baru	Pangkalan Koto Baru							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Jaringan Rel Kereta Api	Jalur Kereta Api Payakumbuh - Limbanang - Gunung Omeh								APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan
	Jaringan Trasnportasi Sungai Danau dan Penyebrangan	Pembangunan Dermaga Angkutan Pariwisata di Danau Buatan Koto Panjang	pangkalan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
	Jaringan Sistem Transportasi Udara	Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan udara piobang	Kecamatan Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
III	Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Energi)										
III.1	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Energi	Optimalisasi PLTA Koto Panjang	Pangkalan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN
		PLTMH di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	Seluruh Kecamatan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN
		Pembebasan Tanah untuk Perluasan jaringan tenaga listrik	Seluruh Kecamatan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN
		Perluasan Jaringan Listrik dan Pembangunan Gardu listrik	Seluruh kecamatan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN
IV	Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Telekomunikasi)										
IV.1	Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi	Optimalisasi Sentral Telepon Otomatis (STO) yang telah dibangun di Lubuk Basung, Maninjau dan Baso dengan memanfaatkan kabel optis	Seluruh Kecamatan							APBN, APBD Kabupaten	PT. Telkom, Dinas Kominfo
		Pembangunan Tower Bersama	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten , Investasi Swasata	PT. Telkom, Dinas Kominfo, Provider Telekomunikasi
V	Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Sumber Daya Air)										
		Peningkatan Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana irigasi	Seluruh Kecamatan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Pembangunan irigasi pada daerah irigasi yang potensial	Seluruh Kecamatan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	Seluruh Kecamatan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
IV	Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Prasarana Lingkungan Permukiman)										
IV.1	Rencana Pengembangan Sistem Air Bersih	Menurunkan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Pelestarian sumber air permukaan dan air tanah	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Membangun prasarana air bersih kran umum dan hidran umum	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Pembangunan Reservoir	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Mengoptimalkan sumber air bersih yang ada saat ini	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi yaitu dengan meningkatkan diameter pipa, penambahan jaringan pipa transmisi, distribusi dan tersier	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Memperbaiki jaringan distribusi yang rusak serta memelihara dengan baik jaringan tesebut guna meminimalisasi kebocoran yang terjadi selama distribusi	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Menyediakan pompa - pompa cadangan pada tiap - tiap unit PDAM sehingga apabila terjadi kerusakan, produksi dan distribusi air bersih oleh PDAM tidak terganggu	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Pembebasan tanah untuk perluasan jaringan air minum	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
		Perluasan jaringan air bersih dan pembangunan distribusi air bersih	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, PDAM
IV.2	Rencana Pengembangan Sistem Persampahan	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Pengelolaan sampah domestik dengan metoda 3 R	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Pengadaan TPS untuk masing - masing kecamatan	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Penertiban pemisahan sampah non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan komersil, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya.	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Pembangunan lokasi TPA Regional	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
IV.3	Rencana Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisai sistem penanganan limbah kakus dengan menggunakan tangki sepruk tank	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Program pengembangan kinerja pengelolaan limbah	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
IV.4	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	Normalisasi saluran drainase dan aliran sungai	Drainase Kawasan IKK Sarilamak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Kabupaten – Balai Jr. Talang Maua Nagari Talang Maua Kec. Mungka							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Batas Kota – Padang Panjang Jr. Padang Panjang Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu di Kecamatan Luak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Bundo Kandung Nagari Mauro Palti di Kecamatan Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Jr. Suka Karya Nagari Lubuk Alai di Kecamatan Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Kabupaten Jor. Koto Baru Nagari Mungka Kec. Mungka							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Kabupaten Kapalo Koto Nagari Andaleh Kec. Luak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Kabupaten Padang Kandih Kec, Guguak Ruas Puskesmas di							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Kecamatan								
			Drainase Jalan kabupaten Subaladung Sei. Kamuyang Kec. Luak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Kapalo Koto – Simalanggang Kec. Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Kapoan – Date, Jr. Koto Sarikat di Kecamatan Guguk							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Koto Tuo Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Pakan Sabtu – Padang Mangatas Nagari Mungo di Kecamatan Luak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Pasar Durian Tinggi ke Trans Nagari Durian Tinggi Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Pinang Balirik Nagari Sei. Kamuyang di Kecamatan Luak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan raya Kubu Gadang Kubang IX Menuju Simpang Subur Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jl. Kabupaten Koto Tangah Simalanggang – Koto Baru di Kecamatan Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jl. Kabupaten Simpang Balai Rupi – Lapangan Bola Nagari Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jl. Tanjung Anau – Batu Nan Pasuak Nagari							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Mungo di Kecamatan Luak								
			Drainase Jln. Koto Tangah Koto Lamo Nagari Koto Lamo di Kecamatan Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jor. Balai Tangah Nagari Lubuak Alai di Kecamatan Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Kampuang Trandam Jr. Sawah Padang Nagari Sariak Laweh di Kecamatan Akabiluru							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Samping Kantor Wali Nagari Bukik Sikumpa di Kecamatan Lareh Sago Halaban							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Lanjutan Drainase Jalan Kabupaten Jr. KPL - Balai Gadang Atas di Kecamatan Luak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Saluran Air Lapangan Bola Kaki Jr. Jambak Nagari Banja Loweh di Kecamatan Bukik Barisan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Saluran Drainase Jalan Pakan Rabaa - Balai Panjang Padang Lowe Jr. Pakan Rabaa Nagari Batu Payuang di Kecamatan Lareh Sago Halaban							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Pembangunan Jaringan Drainase	Drainase Kawasan IKK Sarilamak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Labuah Lintang Nagari Sei. Antuan Kec. Mungka							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jalan Nagari Pakan Sinayan - Padang Blimbing Nag. Bukik Sikumpa di Kecamatan Lareh Sago							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Halaban								
			Drainase Jalan Ompang Gadang – Lubuak Batingkok Kec. Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
			Drainase Jl. Tb. Ijuak – Parit Dalam Koto Tengah Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP

Sumber : RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2041

2.6.2 Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Untuk perwujudan pola ruang kabupaten lima pulu kota hasil telaahan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2041 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.150
Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2024

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaaaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026		
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
I	PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG										
I.1	Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sesuai SK MenLHK							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas PUPR
		Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung	Kawasan Hutan Lindung Sesuai SK MenLHK							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas PUPR
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sesuai SK MenLHK							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas PUPR
I.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai	Seluruh Kecamatan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWS, Dinas PUPR
		Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Seluruh Kecamatan							APBN, APBD	BBWS, Dinas PUPR

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026		
										Provinsi, APBD Kabupaten	
		Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	Seluruh Kecamatan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWS, Dinas PUPR
		Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Seluruh Kecamatan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWS, Dinas PUPR
		Penentuan batas dan pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan jalan tol	kawasan sekitar jalan tol							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPJT KemenPUPR, Dinas PUPR
		Penentuan batas dan pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan rel KA	kawasan sekitar rel KA							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Operator Jalan Tol, Dinas PUPR
		Penentuan batas dan pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan Danau	Waduk Koto Panjang							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		Penentuan batas dan pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan SUTET/SUTT	kawasan sekitar SUTET/SUTT							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR
I.3	Perwujudan Kawasan Konservasi	Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan konservasi	Seluruh Kawasan Konservasi							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Sosialisasi fungsi kawasan konservasi	Seluruh Kawasan Konservasi							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP
I.4	Perwujudan Kawasan Rawan Bencana	Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan rawan bencana	Seluruh Kabupaten							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten
		Sosialisasi fungsi kawasan rawan bencana	Seluruh Kabupaten							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026		
		Penyusunan rencana mitigasi bencana daerah	Seluruh Kabupaten							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, Bappedalitbang
II PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA											
II.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	pelestarian Kawasan Hutan Produksi berupa Hutan Produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, dan hutan rakyat	Seluruh kawasan hutan produksi							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi	Seluruh kawasan hutan produksi							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP
II.2	Perwujudan Kawasan Pertanian	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR
		Penetapan Perda LP2B	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengembangan tanaman pertanian sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal.	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Pemantapan dan pelestarian kawasan pertanian dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman pertanian daerah	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026		
		Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pariwisata
		Pengembangan kawasan khusus peternakan	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Peternakan
II.3	Perwujudan Kawasan Perikanan	Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Perikanan
		Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap agar tetap lestari	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Perikanan
	Kawasan Pertambangan dan Energi	Pengembangan pertambangan ramah lingkungan	Kawasan tambang							APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi
		Rehabilitasi kawasan pasca tambang	Kawasan tambang							APBN, APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi
II.4	Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan sarana pengelolaan limbah pada sentra IKM	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
		Pengembangan infrastruktur dasar & sarana pendukung usaha IKM	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
		Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
		Penyusunan Rencana Induk Perindustrian Daerah	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
II.5	Kawasan Pariwisata	Penyusunan Raperda Rencana Induk Pariwisata (RIPDA)	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026		
											Olahraga
		Pelestarian, pemantapan, dan pengembangan Kawasan Pariwisata alam.	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Pemantapan dan Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata Sejarah, Budaya dan Pariwisata buatan.	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Rencana pengembangan UMKM dan industri kreatif di bidang pariwisata;	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Pemantapan dan pengelolaan kelembagaan kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
II.6	Kawasan Permukiman	Penyusunan Dokumen RP3KP	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Fasilitasi pembangunan PSU di Kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten, investor swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta
		Penanganan kawasan kumuh perkotaan	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Fasilitasi pembangunan PSU di Kawasan permukiman perdesaan.	Seluruh Kecamatan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP
		Rencana pengembangan kawasan transmigrasi	Kecamatan Kapur IX							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan
III	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi										
III.1	Kawasan Perkotaan Sarilamak	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Perkotaan Sarilamak							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
III.2	Kawasan Pertanian Lahan Basah Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Akabiluru.	Penyusunan RTRW Kawasan Pertanian	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Akabiluru							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026		
III. 3	Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh	Penyusunan RTR Kawasan Minapolitan	Kawasan Mungo dan Andaleh							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR
III. 4	Kawasan Agropolitan Mungka	Penyusunan RTR Kawasan Agropolitan	Kawasan Agropolitan Mungka							APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR
III. 5	Kawasan Perekonomian dan Wisata Alam	Penyusunan Materplan Kawasan Wisata	Lemba Harau, Pemandian Batang Tabik dan Kapalo Bunda							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
III. 6	Kawasan Strategi Berbatasan Dengan Kota Payakumbuh	Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan	Kawasan Perbatasan Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappedalitbang
III. 7	Kawasan Perkotaan Pangkalan Koto Baru	Penyusunan RDTR Perkotaan	Perkotaan Pangkalan Koto Baru							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
III. 8	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Penyusunan Masteplan Kawasan Cepat Tumbuh	kawasan industri seperti tenun di Kubang dan sentra industri songket di Lareh Sago Halaban							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappedalitbang
III. 9	Kawasan Strategis Poros Barat Timur (Jalan Utama – Perbatasan Prov. Riau)	Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan	Jalan Utama – Perbatasan Prov. Riau							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappedalitbang
IV Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial-Budaya											
IV. 1	Kawasan Wisata Budaya	Penyusunan RTBL Kawasan Wisata Budaya	kawasan tradisional Belubus, dan Museum Arkeologi Belubus							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappedalitbang
IV. 2	Kawasan Bersejarah PDRI	Penyusunan RTBL Kawasan Bersejarah PDRI	Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh dan							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappedalitbang

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pemanfaatan Ruang		Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026		
			Lareh Sago Halaban								
V	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan										
V.1	Kawasan Wisata Alam Lembah Harau	Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata	Kawasan Lembah Harau							APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Bappedalitbang

Sumber : RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2024

2.7 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya.

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib, berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sehingga SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ada 6 Bidang Urusan yaitu : SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta SPM Sosial. Di Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksanaan SPM ini berada pada 8 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Sosial.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penerapan SPM dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2019, penerapan SPM berbeda dengan tahun sebelumnya berdasarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pencapaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.151
Target dan Capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
Bidang Urusan Pendidikan								
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	98%	48.253	80,59%	55.800	54.495	97,66 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	50%	254	14,00%	2.287	2.250	98,38 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	75%	8.179	32,35%	13.101	12.802	97,71 %
Bidang Urusan Kesehatan								
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta	8.358	6.930	82,9	8.268	6.266	75,8 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	7.978	6.471	81,1	7.892	6.162	78,1 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	7.154	6.393	89,4	7.516	5.965	79,4 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	37.294	28.893	77,5	36.944	23.950	64,8 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.145	12.835	97,6	11.365	7.574	66,6 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	242.219	14.386	5,9	276.185	15.298	5,5 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	48.946	33.015	67,5	50.739	28.420	56 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	67.928	17.197	25,3	67.665	8.791	13 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	4.364	2.061	47,2	4.419	1.889	42,7 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (Psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	975	720	73,8	811	741	91,4 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun satu tahun	12.212	5.098	41,7	12.630	2.296	18,2 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	8.320	3.897	46,8	9.531	3.149	33 %
Bidang Urusan Pekerjaan Umum								
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	290.547 jiwa	300.296 jiwa	79,17%	9.304 jiwa	9.001 jiwa	96,74 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.420 jiwa	6.420 jiwa	100%	5.250 jiwa	5.000 jiwa	95,24 %
Bidang Urusan Perumahan Rakyat								
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	a. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani. b. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani.	- -	- -	- -	N.A N.A	2 Unit -	- -
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah	a. Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan. b. Rumah Tangga	-	-	-	N.A	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
	Daerah	Penerima Fasilitas Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah/Bangunan.	-	-	-	N.A	-	-
		c. Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa.	-	-	-	N.A	-	-
		d. Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	-	N.A	-	-
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat								
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	210 Kasus	210 Kasus	100%	3.273 orang	3.273 orang	100 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	77.635 jiwa	77.635 jiwa	100%	7.305	2.045	28,00 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	77.635 jiwa	77.635 jiwa	100%	7.305	2.045	28,00 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	1.242 jiwa	1.242 jiwa	100%	1.403	1.403	100 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	376 Jiwa	376 Jiwa	100 %	312 Jiwa	311 Jiwa	99,99 %
Bidang Urusan Sosial								
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah masyarakat Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	175 Org	88 Org	50,3%	72 Orang	69 Orang	95,83 %
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	30 Org	31 Org	103%	12 Orang	45 Orang	375 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah masyarakat Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.500 Org	3.011 Org	120,4%	2.420 Orang	2.390 Orang	98,76 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah masyarakat /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	-	-	-	-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3.000 Org	2.721 Org	90,7 %	493 Orang	493 Orang	100 %

Sumber Sekretariat Daerah, Laporan SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2020

Gambaran umum terhadap dukungan personil untuk mencapai dalam mencapai SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.152

Dukungan Personil Untuk Mencapai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020

Dukungan Personil Urusan Kesehatan pada BPP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020			
No	Jenis Pelayanan Dasar	2019	2020
Bidang Urusan Pendidikan			
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Pegawai : 122, terdiri atas 21 orang Pejabat Struktural dan 101 orang pejabat fungsional	Jumlah Pegawai : 3.651, terdiri atas 18 orang Pejabat Struktural dan 3.626 orang pejabat fungsional.
2.	Pendidikan Kesetaraan		
3.	Pendidikan Anak Usia Dini		
Bidang Urusan Kesehatan			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dukungan Peersonil terdiri atas Pegawai PNS (1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 300 tenaga bidan di puskesmas/pustu/ poskesri) dan Pegawai Non PNS, terdiri dari 2 Bidan Nusantara Sehat	Dukungan Peersonil terdiri atas Pegawai PNS (1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 429 tenaga bidan di puskesmas/pustu/ poskesri) dan Pegawai Non PNS, terdiri dari 2 Bidan Nusantara Sehat
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
4	Pelayanan kesehatan balita		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dukungan Personil sebanyak 515 orang yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Sanitarian, Petugas Labor dan petugas kesehatan lainnya yang tersebar di 22 Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota	Dukungan Personil sebanyak 861 orang yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Sanitarian, Petugas Labor dan petugas kesehatan lainnya yang tersebar di 22 Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Dukungan personil sebanyak 1 orang tenaga kesehatan di masing- masing puskesmas dan 306 kader	Dukungan personil sebanyak 1 orang tenaga kesehatan di masing- masing puskesmas dan 384 kader
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dukungan personil terdiri atas 1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program lansia di puskesmas	Dukungan personil terdiri atas 1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program lansia di puskesmas
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Dukungan personil terdiri atas 45 orang dokter, 123 orang perawatdan 329 bidan	Dukungan personil terdiri atas 52 orang dokter, 172 orang perawatdan 424 bidan
9	Pelayanan kesehatan penderita DM		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (Psikotik)	Dukungan personil terdiri atas Dokter Umum dan Perawat di 14 Puskesmas	Dukungan personil terdiri atas Dokter Umum dan Perawat di 14 Puskesmas
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB)	Dukungan Personil terdiri atas seksi P2M Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, RS Rujukan, Kader Posvandu/ Kader P2M.	Dukungan Personil terdiri atas seksi P2M Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, RS Rujukan, Kader Posvandu/ Kader P2M.

No	Jenis Pelayanan Dasar	2019	2020
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Kecamatan, BP2KB, BPMN, Dinas Sosial, Baznas , LSM dan lain- lain.	Kecamatan, BP2KB, BPMN, Dinas Sosial, Baznas , LSM dan lain- lain.
Bidang Urusan Pekerjaan Umum			
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dukungan Personil terdiri atas 17 Fasilitator Pamsimas dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR	Dukungan Personil terdiri atas 17 Fasilitator Pamsimas dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Dukungan Personil terdiri atas 13 Fasilitator Sanitasi dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR	Dukungan Personil terdiri atas 13 Fasilitator Sanitasi dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR
Bidang Urusan Perumahan Rakyat			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	-	-
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	-	-
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Dukungan Personil terdiri atas 122 orang Pegawai Satpol PP (45 PNS, 5 PTT dan 74 THL) dan Tim SK 4 yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP	Dukungan Personil terdiri atas 119 orang Pegawai Satpol PP (44 PNS, 5 PTT dan 73 THL) dan Tim SK 4 yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Dukungan Personil terdiri atas 31 orang PNS dan 29 orang PTT/ THL	Dukungan Personil terdiri atas 31 orang PNS dan 30 orang PTT/ THL
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dukungan Personil terdiri atas 37 orang PNS dan 112 orang THL/ PTT	Dukungan Personil terdiri atas 37 orang PNS dan 115 orang THL/ PTT
Bidang Urusan Sosial			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Dukungan Personil terdiri atas Pegawai Dinas Sosial (29 orang PNS dan 27 Orang Non PNS).	Dukungan Personil terdiri atas Pegawai Dinas Sosial (28 orang PNS dan 27 Orang Non PNS), 79 Orang PSM, 13 Orang TKSK, 66 Orang Pendamping PKH dan 25 orang Tagana.
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan		

No	Jenis Pelayanan Dasar	2019	2020
	pasca bencana bagi korban bencana		

Sumber Sekretariat Daerah, Laporan SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2020

Selama Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penerapan dan pencapaian terhadap target SPM namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya dikarenakan mulai awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan, ini juga berimbas dalam hal penanganan Covid-19, dimana diberlakukannya refocussing anggaran pada hampir seluruh program kegiatan termasuk program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM.

2.8 Evaluasi capaian target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

Capaian target Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja pemerintah daerah yang wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, Pemerintah Daerah bisa mengetahui kinerja Kepala Daerah selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya, sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Terhadap hasil evaluasi capaian RPJMD digunakan dokumen dari perubahan terhadap RPJMD tahun 2016-2026 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2018. Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan tahun 2021, ada beberapa target dan capaian yang bernilai NA dan hal ini merupakan indikator baru yang muncul sewaktu perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Jika terdapat di Bab II sub bab 2.1 sampai sub bab 2.4 realisasi terhadap nilai NA pada sub bab 2.8, hal tersebut pada sub bab 2.1 sampai sub bab 2.4 dinilai sebagai kondisi umum daerah secara keseluruhan. Namun untuk melihat capaian kinerja dan evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 dilihat dari IKU hasil perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Data capaian terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.153
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	MSI	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN									
			2015	2016		2017		2018		2019		2020	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Masjid / Musholla/ Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda	M1	7,27	7,27	7,27	7,42	7,42	7,55	6,82	7,7	6,59	7,85	5,84
a.	Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Mesjid/ Mushola/ Surau/ MDA/TPQ		N/A	59,64	59,64	66,15	66,15	62,66	62,66	64,59	64,59	66,47	65,67
2	Menurunnya kasus pelanggaran Perda	M1	50	50	135	55	169	60	164	65	227	70	247
3	Persentase budaya lokal yang Dikembangkan	M1	45	45	45	55	55	65	65,7	75	75	85	75
4	Persentase Koperasi Sehat	M2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	1,71%	33%	28,09%	33%	0
5	Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil	M2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	0	35%	0
6	Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	M2	2,24	1,43	29,04	2,19	28,25	2,19	26,99	2,17	2,05	2,42	Data belum rilis oleh BPS
7	Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB	M2	3,32	2,05	4,0	2,64	3,97	2,64	4,20	2,44	2,05	2,6	Data belum rilis oleh BPS
8	Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	M2	8,11	5,71	3,36	7,61	3,43	7,15	3,53	6,82	4,98	7,19	Data belum rilis oleh BPS
a.	Persentase Kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB		30,97	30,14	30,14	29,61	29,61	28,8	28,8	27,32	27,32	28,5	Data belum rilis oleh BPS
b.	Persentase Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB		3,33	3,36	3,36	3,36	3,36	3,31	3,31	3,47	3,47	4,52	Data belum rilis oleh BPS
9	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	M2	0	NA	NA	18.13% (93 IKM)	4.87% (25 IKM)	20,47% (90 IKM)	8.57% (44 IKM)	22,03%(113 IKM)	23.19% (119 IKM)	22,03% (113 IKM)	45,81% (235 IKM)
10	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	M2	0	NA	NA	14.42% (15IKM)	38.46% (40 IKM)	31.73% (33 IKM)	58.65% (61 IKM)	49.04% (51 IKM)	(62,25% (64 IKM)	74,04% (77 IKM)	33,65% (35 IKM)
11	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara	M2	3,2	25,37	34,78	18,19	53,29	19,24	24,66	20,2	26,87	28,19	26,70
12	Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	M2	14,35	31,7	21,61	45,11	-17,54	30,39	178,17	35,73	35,82	37,08	Data belum rilis oleh BPS
13	Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A	M3	34	34	47	39	52	44	76	79	31	94	107

NO	INDIKATOR	MISI	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN									
			2015	2016		2017		2018		2019		2020	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
14	Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional	M3	10	10	12	9	9	8	6	7	10	6	Tidak ada nilai karena Ujian Nasional ditiadakan karena Pandemi Covid-19
15	Angka Usia Harapan Hidup	M3	68,83	69,61	69,27	69,8	69,41	70	69,47	70,19	69,7	70,39	69,79
16	Indek Pembangunan Gender (IPG)	M3	95,5	95,5	94,64	95,5	95,5	95,5	94,62	95,77	94,33	95,77	94,93
17	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak	M3	0,019	0,069	13,73	0,068	42,70	0,067	4,30	0,05	16	0,03	13,00
18	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan	M3	50%	50%	66.58%	60%	62.33%	70%	71.13%	75%	79.96%	80	83,66
19	Angka Kemiskinan	M3	7,48	7,59	7,59	7,15	7,15	7,12	6,99	7,08	6.97%	7,05	6,86
20	Indeks Reformasi Birokrasi	M4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67	57,14	69	58,78	73	69,87
a.	Nilai Opini BPK	M4		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b.	Nilai Indeks e-Government	M4						2.8	2.47	2.8	3	2,9	3,17
c.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	M4	N/A	50	46.34	52	50.20	60	54.79	67	56,39	70	56,39
d.	Nilai Maturitas SPIP	M4	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3
e.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	M4				80	81,67	83	Nilai tidak keluar di Aplikasi	85	21,5	85	53,72*
21	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	M4	100%	70	77.67	74,12	76.86	75.23	80.11	76.22	82.76	77,41	83,99
22	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju	M5	46	46	46	70	46	70	70	72	72	74	77
23	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	M6	15202,5 Ha	13493 Ha	13493,19 Ha	16346 Ha	16345,37 Ha	18247,21 Ha	14374,81 Ha	18612,1 Ha	11350,65 Ha	18.984,4 Ha	12021,5 Ha
24	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	M6	40,1	41,5	40,52	44,61	44,61	46,69	47,34	48,22	52,135	49,8	52,66
25	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	M6	66,8	73	74,02	75	75	76,35	75,03	77,33	79,17	79,42	79,4
26	Rasio rumah Layak Huni	M6	N/A	N/A	N/A	0,148	0,142	0,150	0,143	0,151	0,150	0,155	0,153
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	M6	N/A	64,00	66,211	64,70	68,169	65,00	69,119	66,50	68,348	68	69,13

Keterangan :

Realisasi = Target

Realisasi < target

Realisasi > Target



Hasil pelaksanaan dan pengendalian evaluasi dari pelaksanaan peruban RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 1 yaitu sebesar 70%. Capaian semua indikator pada tahun 2020 tidak mencapai target. Indikator yang mendukung Misi 1 tersebut yaitu Presentase Masjid/Mushola/Surau/MDA/TPQ yang dibantu oleh Pemda; Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Mesjid/Mushola/Surau/MDA/TPQ; Menurunnya kasus pelanggaran Perda; Persentase budaya lokal yang dikembangkan.
- b. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 2 yaitu sebesar 60%. Capaian untuk indikator yang merupakan data dari BPS belum bisa di dapatkan disebabkan karena data tersebut belum di rilis oleh BPS untuk tahun 2020. Sedangkan capaian untuk indikator presentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil, Presentase pertumbuhan industri kecil menengah dan Presentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara tidak memenuhi target. Indikator yang sudah memenuhi target yaitu Presentase industri kecil menengah (IKM) sehat.
- c. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 3 yaitu sebesar 65,71 % untuk 7 indikator kinerja utama. Dari 7 indikator tersebut terdapat 5 indikator yang capaiannya sudah mencapai target yaitu Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A; Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional; Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; Angka kemiskinan; dan Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan. Sedangkan untuk indikator yang tidak mencapai target terdapat 2 indikator yaitu Angka Usia harapan hidup; dan Indeks pembangunan gender (IPG).
- d. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 4 yaitu sebesar 62,88% dengan jumlah indikator yang mendukung sebanyak 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, capaiannya belum mencapai target disebabkan karena nilai akuntabilitas kinerja masih dibawah target dan nilai indikes profesionalitas ASN yang masih bersifat sementara dengan capaian yang rendah kurang dari target. Sedangkan untuk rata-rata nilai Indeks Kepuasan ASN sudah tercapai melebihi target.
- e. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 5 yaitu sebesar 80% dengan 1 indikator yaitu Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju. Capaian pada akhir tahun 2020 sudah melebihi target.
- f. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 6 yaitu sebesar 76% dengan 5 indikator yaitu Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik; Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik; Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Rasio rumah Layak Huni; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator yang tidak tercapai dari tahun 2017-2020 yaitu Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan rasio rumah layak huni. Sedangkan untuk indikator lainnya sudah tercapai pada tahun 2020.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mentaati asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah, sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dimasa depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

Dalam periode analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2020, terjadi 3 perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah. Perubahan pertama tahun 2017 sehubungan dengan pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota karena pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Pengurangan kewenangan urusan tersebut mengakibatkan pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya pengurangan ini mengakibatkan penurunan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), karena jumlah PNS merupakan salah satu variabel penentuan besaran DAU.

Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 berpengaruh besar terhadap pelaksanaan APBD; tidak hanya penyesuaian jumlah DAU yang diterima daerah tetapi juga kebijakan *refocusing* Belanja Daerah. Perubahan ketiga adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan perubahan antara lain klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dengan demikian, analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020.

Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.178.893,53	1.275.862,31	1.257.168,41	1.336.485,51	1.209.471,40	0,64
A.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68.060,27	119.771,92	73.440,84	85.168,15	77.429,48	3,28
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.060,80	17.667,23	20.369,95	24.181,11	23.556,95	13,77
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.158,01	4.495,40	4.986,25	4.534,57	3.691,64	(2,93)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.117,81	2.422,00	2.425,07	2.675,28	3.226,73	11,10
4	Lain-lain PAD Yang Sah	47.723,64	95.187,28	45.659,56	53.777,19	46.954,16	(0,41)
A.2	DANA PERIMBANGAN	1.010.102,02	992.052,78	997.618,22	1.016.024,13	948.966,94	(1,55)
1	Bagi Hasil Pajak	18.856,79	17.590,34	12.907,39	10.773,96	13.360,70	(8,25)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	808,58	1.187,13	1.576,59	1.897,80	1.800,04	22,15
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	760.431,50	747.892,92	747.073,17	768.836,01	696.866,98	(2,16)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	230.005,15	225.382,40	236.061,07	234.516,36	236.939,22	0,75
A.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.731,24	164.037,61	186.109,35	235.293,23	183.074,97	16,11
1	Pendapatan Hibah	453,83	1.320,30	3.040,02	9.642,27	10.334,00	118,45
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.388,31	43.072,07	44.151,38	51.554,99	45.117,45	2,81
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.280,09	118.245,24	138.917,95	174.095,96	127.623,53	24,41
4	Bantuan Keuangan	6.609,00	1.400,00	-	-	-	
B	BELANJA DAERAH	1.244.704,81	1.258.249,16	1.245.812,18	1.362.116,35	1.217.117,59	(0,56)
B.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	759.564,34	738.449,19	746.697,67	798.401,84	830.554,55	2,26
1	Belanja Pegawai	654.444,29	574.794,09	588.765,86	625.294,97	590.402,06	(2,54)
2	Belanja Hibah	7.876,80	8.182,90	8.365,70	10.369,06	47.055,18	56,34
3	Belanja Bantuan Sosial	1.730,20	3.760,31	6.717,95	3.881,04	3.691,63	20,86
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	873,31	1.922,67	1.733,62	2.560,88	2.715,54	32,79
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	90.166,02	147.605,50	140.966,68	155.636,03	150.578,40	13,68
6	Belanja Tidak Terduga	4.473,72	2.183,72	147,86	659,86	36.111,74	68,56
B.2	BELANJA LANGSUNG	485.140,47	519.799,97	499.114,52	563.714,51	386.563,04	(5,52)
1	Belanja Pegawai	30.147,77	27.074,15	19.811,24	22.827,37	24.118,18	(5,43)
2	Belanja Barang dan Jasa	202.026,19	259.608,39	246.666,67	287.976,62	209.732,77	0,94
3	BELANJA MODAL	252.966,50	233.117,43	232.636,60	252.910,52	152.712,09	(11,85)
	Surplus/Defisit	- 65.811,28	17.613,15	11.356,23	- 25.630,84	- 7.646,19	(41,62)
C	PEMBIAYAAN						
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.710,63	57.899,35	72.512,50	80.874,73	38.843,99	(25,59)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	126.710,63	57.899,35	72.512,50	80.874,73	38.843,99	(25,59)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
	Anggaran Sebelumnya						
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000,00	3.000,00	2.994,00	15.359,00	2.350,00	(5,92)
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000,00	3.000,00	2.994,00	15.359,00	2.350,00	(5,92)
	PEMBIAYAAN NETTO	123.710,63	54.899,35	69.518,50	65.515,73	36.493,99	(26,30)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	57.899,35	72.512,50	80.874,73	39.884,89	28.847,80	(15,98)

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

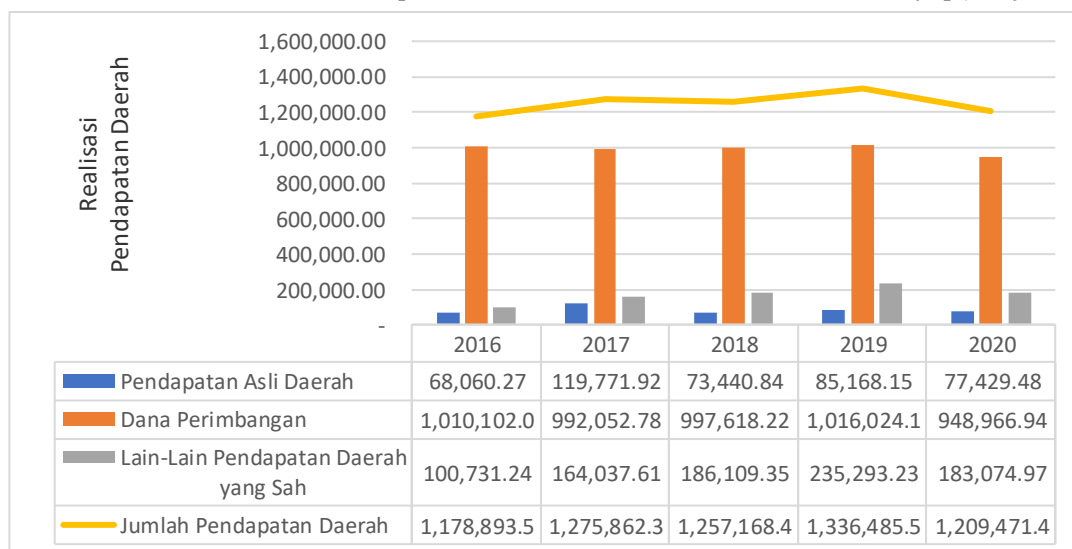
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,64% per tahun, yaitu dari Rp1.178.893,53 juta tahun 2016 menjadi Rp1.209.471,40 juta tahun 2020. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan penurunan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Dana Perimbangan turun dari Rp1.010.102,02 juta tahun 2016 menjadi Rp992.052,78 juta tahun 2017, tapi dalam periode yang sama, PAD naik dari Rp68.060,27 juta menjadi Rp119.771,92 juta, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga naik dari Rp100.731,24 juta menjadi Rp164.037,61 juta.

Berbeda dengan kondisi tahun 2017, Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan Dana Perimbangan dan juga sumber Pendapatan Daerah lainnya. Bahkan, penurunan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah jauh lebih besar, yaitu sebesar 22,19% dari Rp235.293,23 juta tahun 2019 menjadi Rp183.074,97 juta tahun 2020. Sedangkan penurunan Pendapatan Asli Daerah hanya turun 9,09%, yaitu dari Rp85.168,15 juta menjadi Rp77.429,48 juta. Penurunan Dana Perimbangan lebih kecil lagi, yaitu 6,60% dari Rp1.016.024,13 juta menjadi Rp948.966,94 juta. Sekalipun terjadi penurunan yang lebih besar namun laju pertumbuhan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan. Sebaliknya Dana Perimbangan menunjukkan tren penurunan. Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

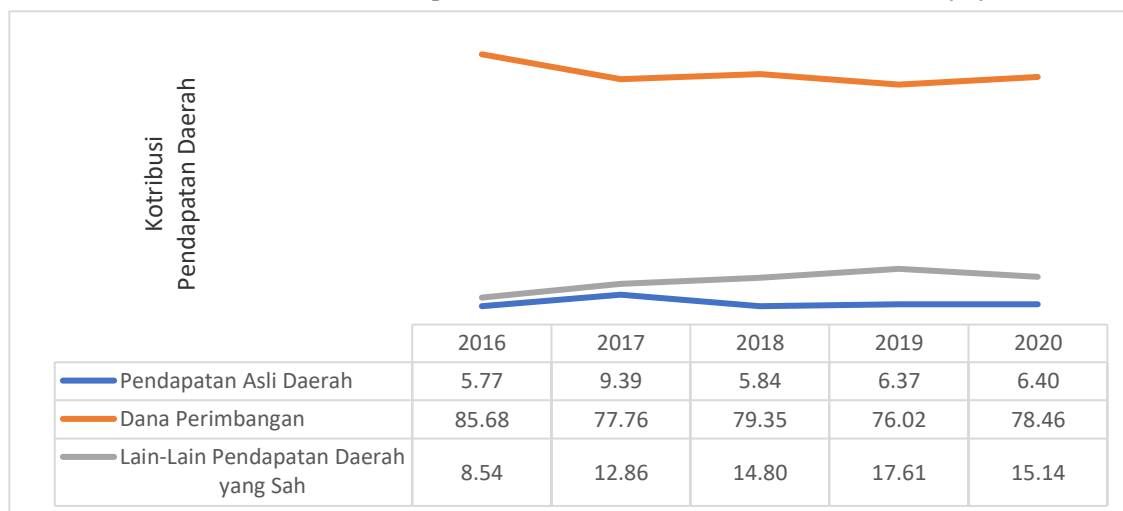
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota mengakibatkan alokasi DAU turun sehingga kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah turun pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 85,68% menjadi 77,76%. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami sedikit peningkatan sehingga menjadi 78,64% tahun 2020.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan laju pertumbuhan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan PAD, dan juga secara konsisten mengalami peningkatan antara tahun 2017-2020. Akibatnya, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 8,54% tahun 2016 menjadi 17,61% tahun 2019, tetapi turun menjadi 15,14% tahun 2020.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah berfluktuasi dengan tren cenderung meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2017 sempat naik. Tetapi kenaikan ini disebabkan kebijakan perlakuan atau pencatatan Dana Bos sebagai bagian dari Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2017, sedangkan tahun-tahun berikutnya Dana Bos ini dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah.
2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Lain-lain PAD yang Sah, dengan jumlah pendapatan cenderung berfluktuasi. Jika tahun 2016 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp47.723,64 juta dan meningkat menjadi Rp95.187,28 juta tahun 2017, tetapi tahun 2018 turun menjadi Rp45.659,56 juta. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan pendapatan Dana Bos dicatat sebagai bagian dari Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Akibat pandemik Covid-19, Lain-lain PAD yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 turun menjadi Rp46.954,16 juta. Dengan demikian, laju pertumbuhan rata-rata per tahun antara tahun 2016-2020 hanya sebesar 0,41%. Lebih dari 90,00%, pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tersebut berasal dari pendapatan RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelola dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

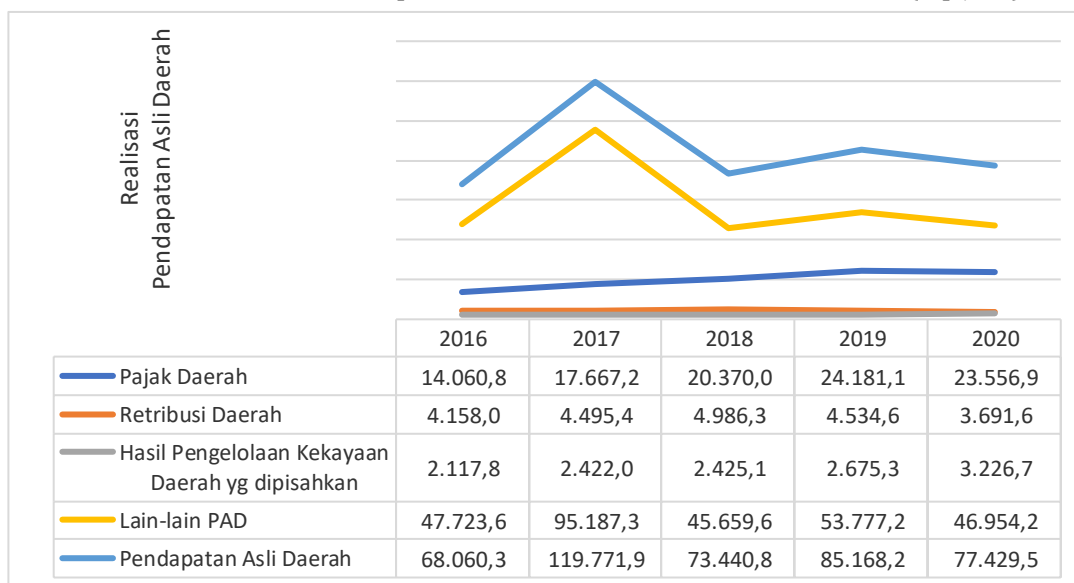
Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah memiliki tren peningkatan, kecuali yang terjadi tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah penerimaan Pajak Daerah Rp14.060,80 juta menjadi Rp24.181,11 tahun 2019, tetapi tahun 2020 turun menjadi Rp23.556,95 juta. Dengan demikian, dalam periode 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata 13,77% per tahun.

Hal yang sama juga terjadi pada Retribusi Daerah; dari tahun 2016-2019 selalu menunjukkan peningkatan tetapi dengan laju pertumbuhan yang jauh lebih rendah. Retribusi Daerah tahun 2016 berjumlah Rp4.158,01 juta dan tahun 2019 menjadi Rp4.534,57 juta. Tapi tahun berikutnya turun menjadi Rp3.691,64 juta. Dengan demikian, dalam periode 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata minus 2,93% per tahun.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif kecil namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp2.117,81 juta menjadi Rp3.226,73 juta tahun 2020. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,10%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal Bank Nagari.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)



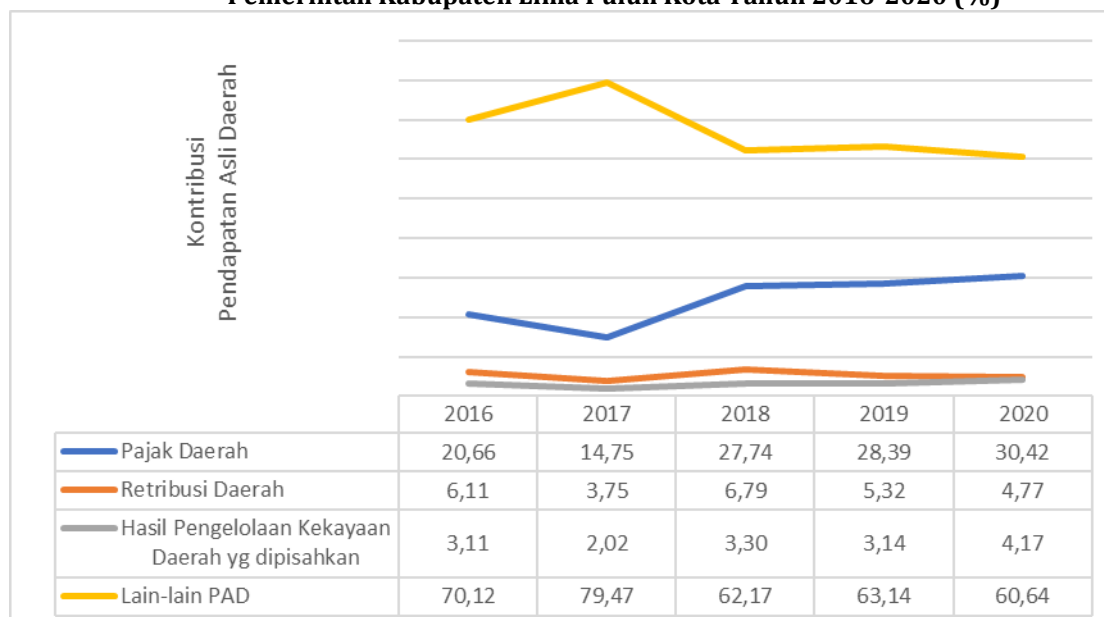
Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Akibat adanya perbedaan pencatatan Dana Bos dan laju pertumbuhan antara sumber PAD, mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan dari kontribusi sumber sumber PAD. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terbesar tetapi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2016 adalah 70,12%, naik menjadi 79,47% tahun 2017, tetapi tahun-tahun berikutnya turun sehingga menjadi 60,64% tahun 2020.

Kontribusi terbesar kedua adalah Pajak Daerah, yang kontribusinya mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 20,66% tahun 2016 menjadi 30,42% tahun 2020. Kontribusi Retribusi Daerah sempat mengalami peningkatan sehingga mencapai 6,79% pada tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga hanya 4,77% tahun 2020. Sedangkan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Bank Nagari.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektifitas penerimaan) PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong kurang efektif, karena tidak setiap tahun dalam periode tahun 2016-2020 di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 84,11%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 96,07%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber PAD tersebut, pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan, efektifitas penerimaan Retribusi Daerah dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya 78,36%. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah fokus kebijakan yang mutlak perlu ditingkatkan. Perkembangan efektifitas penerimaan PAD dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun
PENDAPATAN ASLI DAERAH	93,10	96,07	84,11	87,74	89,34	(1,03)
Pendapatan Pajak Daerah	90,52	89,04	86,68	84,85	77,90	(3,69)
Pendapatan Retribusi Daerah	76,25	95,64	71,91	70,99	77,02	0,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	104,44	92,88	81,99	90,45	96,21	(2,03)
Lain-lain PAD Yang Sah	95,28	97,60	84,67	90,81	97,26	0,52

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Analisis lebih rinci terhadap jenis Pajak Daerah menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah sumber utama dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah, dengan laju pertumbuhan 12,75 per tahun. Jenis Pajak Daerah terbesar kedua adalah Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan, yang menunjukkan laju pertumbuhan lebih tinggi yaitu 32,33% per tahun. BPHTB sebagai jenis Pajak Daerah terbesar ke tiga juga menunjukkan pertumbuhan positif. Tetapi, pendapatan dari PBB P2 yang merupakan sumber pendapatan yang berpotensi besar mendukung PAD daerah, ternyata memiliki pertumbuhan minus 5,21%. Secara logika hal ini tidak mungkin terjadi seandainya wajib pajak patuh untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan beberapa jenis Pajak Daerah lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Perkembangan realisasi Pajak Daerah menurut jenisnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Pajak hotel	3,55	23,43	22,54	31,94	17,18	48,32
2	Pajak restoran	647,59	885,98	912,89	1.190,12	940,78	9,79
3	Pajak Hiburan	7,45	2,11	6,90	21,40	93,50	88,22
4	Pajak Reklame	293,38	248,34	223,69	181,91	177,82	(11,77)
5	Pajak Penerangan Jalan	7.227,12	10.322,11	11.813,60	12.193,23	11.679,47	12,75
6	Pajak Air Tanah	202,97	206,56	208,31	178,26	0,84	(74,65)
7	Pajak sarang walet	-	-	-	-	0,10	
8	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	2.285,34	2.764,13	3.777,90	6.278,96	7.007,37	32,33
9	PBB P2	1.817,31	1.916,71	1.305,47	1.747,15	1.467,46	(5,21)
10	BPHTB	1.576,09	1.278,86	2.098,68	2.358,15	2.172,43	8,35
Jumlah Pajak Daerah		14.060,79	17.648,23	20.369,98	24.181,11	23.556,95	13,77

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Capaian kinerja yang kurang bagus sebagaimana dijelaskan di atas juga terjadi pada Retribusi Daerah. Kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang saat ini juga sudah dimasukkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah, memberikan kontribusi yang masih rendah, dan cenderung mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan Retribusi Daerah mengalami laju pertumbuhan minus 2,04%. Penurunan kinerja ini secara tidak langsung menggambarkan penurunan pelayanan OPD terkait. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan, strategi, dan inovasi khusus untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa datang. Perkembangan Realisasi Retribusi menurut jenisnya dapat di lihat di Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.353,34	1.377,50	1.447,22		-	-
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan	40,91	51,92	51,16	71,63	78,68	16,18
3.	Retribusi Parkir ditepi jalan umum	9,10	9,53	10,29	11,86	11,50	6,82
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	305,99	83,27				-
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	396,09	394,01	494,66	485,02	437,14	3,92
6.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						
7.	Retribusi Alat Pemadam		1,90	7,10	12,15	17,00	
8.	Retribusi Tera Ulang				1,79	0,79	
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	675,25	721,68	683,21	781,48	637,11	-0,24
10.	Retribusi Terminal	373,33	442,87	426,02	426,89	397,92	0,8
11.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	26,30	39,06	26,05	23,93	24,09	-7,02
12.	Retribusi Rekreasi dan Olahraga	655,97	951,87	1.623,63	1.719,85	1.643,38	20,8
13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	27,50	35,66	84,95	112,21	117,99	34,04
14.	Retribusi IMB	199,62	321,90	131,71	887,72	326,06	21,93
15.	Retribusi Izin Gangguan	93,25	63,95				
16.	Retribusi Izin Trayek	1,37	0,27	0,27	0,05	-	
Jumlah Retribusi Daerah		4.158,01	4.495,39	4.986,25	4.534,57	3.691,64	-2,04

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

1. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarnya ditentukan setelah adanya persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas. dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

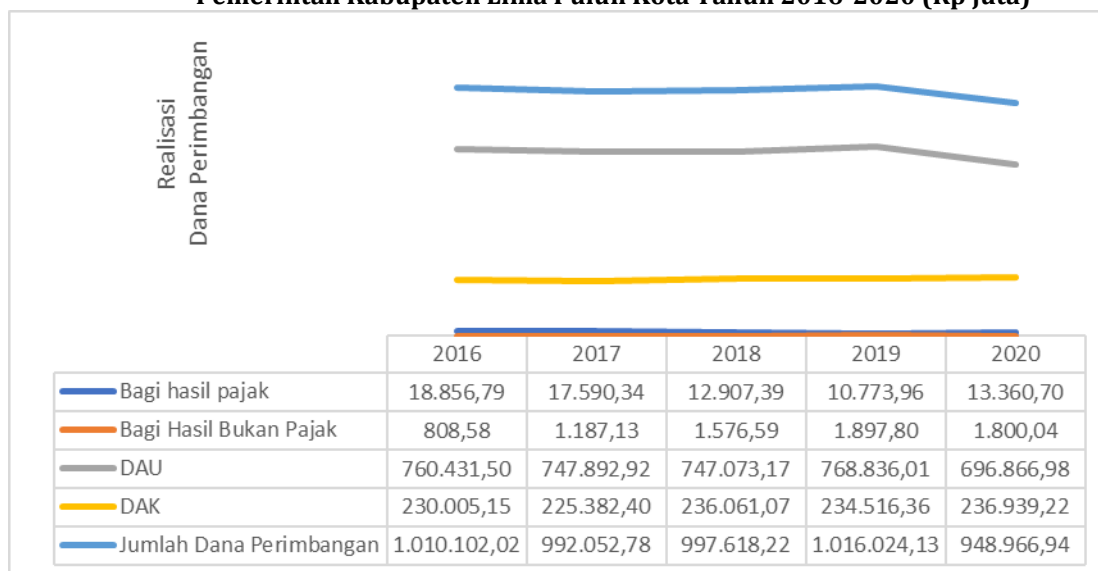
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Dana Perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya karena pengurangan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dari Rp1.010.102,02 juta tahun 2016 menjadi Rp992.052,78 juta tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya berfluktuasi tetapi cenderung turun sehingga tahun 2020 jumlah Dana Perimbangan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Rp948.966,94 juta. Penurunan yang terjadi tahun 2020 adalah karena kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga ada pengurangan Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan Dana Perimbangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 minus 1,55%.

Analisis berdasarkan tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata minus tertinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Dana Bagi Hasil Pajak adalah minus 8,25%, yaitu dari Rp18.856,79 juta tahun 2016 menjadi Rp13.360,70 juta tahun 2020.

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan minus tertinggi kedua, yaitu dari Rp760.431,50 juta tahun 2016 menjadi Rp696.866,98 juta tahun 2020, atau tumbuh minus 2,16% per tahun. Sedangkan pendapatan DAK dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan masih mengalami pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 0,75% dan 522,15%. Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.5.

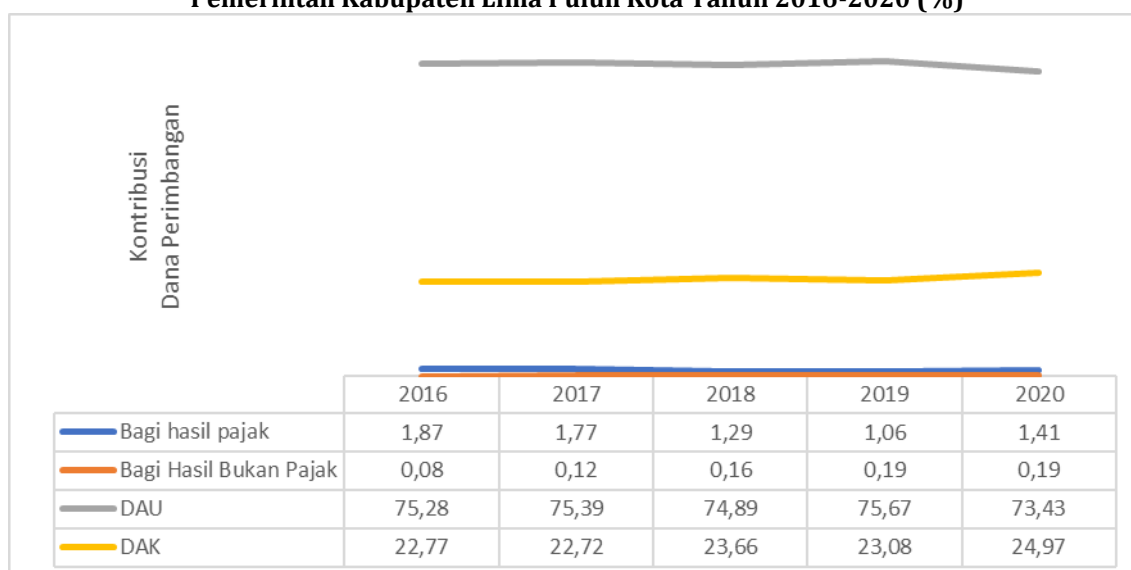
Grafik 3.5
Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Jumlah pendapatan DAU jauh lebih besar dibandingkan sumber penerimaan Dana Perimbangan lainnya tetapi memiliki laju pertumbuhan yang minus, dan DAK memiliki jumlah terbesar kedua tetapi memiliki laju pertumbuhan positif. Akibatnya, kontribusi DAU mengalami penurunan dari 75,28% pada tahun 2016 menjadi 73,43% tahun 2020. Sedangkan Kontribusi DAK naik dari 22,77% pada tahun 2016 menjadi 24,97% tahun 2020. Lebih lanjut perbedaan kontribusi kedua sumber utama Dana Perimbangan yang awalnya lebar tetapi tahun 2020 perbedaannya mengecil. Dengan demikian, ada kecenderungan peningkatan Dana Perimbangan melalui sumber dana DAK yang pada masa datang yang dapat diusahakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini juga didukung karena adanya batasan jumlah DAU sebesar 26% dari APBN. Perkembangan kontribusi jenis pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6
Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%, kecuali DBH Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 96,59%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 98,61%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber Dana Perimbangan tersebut, Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan sumber Dana Perimbangan yang memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber Dana Perimbangan lainnya. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun
DANA PERIMBANGAN	96,98	98,61	99,34	96,59	97,18	0,05
Bagi Hasil Pajak	109,33	104,70	92,19	83,09	84,58	(6,22)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	50,70	130,81	22,92	51,22	61,35	4,88
Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00	100,00	100,00	100,00	99,22	(0,20)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	87,70	93,74	99,89	88,04	92,77	1,41

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, selama periode tahun 2016 sampai 2020 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat.

1. Pendapatan hibah, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Lima Puluh Kota.
2. Bagi hasil pajak dari provinsi, alokasi bagi hasil pajak provinsi ditetapkan melalui SK gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera barat, terdapat 5 (lima) jenis bagi hasil pajak provinsi terhadap kab/kota yaitu: pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor

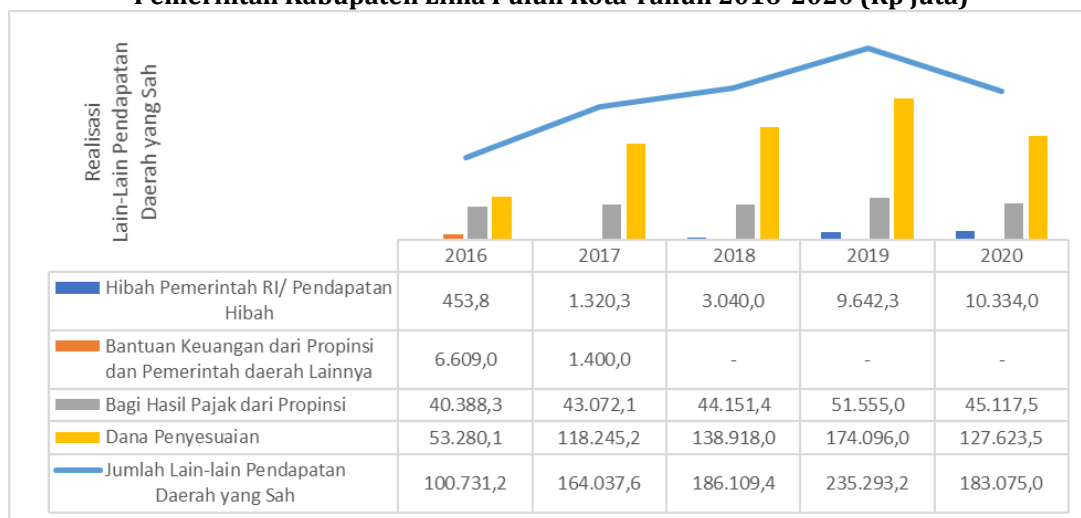
(BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir adalah pajak rokok.

3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai “uang singgah” dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang berasal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran alokasi dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana alokasi khusus (DAK). Sejalan dengan peningkatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut.
4. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, merupakan dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat umum maka kabupaten dapat mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir mengalami tren perkembangan yang positif, kecuali tahun 2020. Sumber utama penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian dan Bagi Hasil Pajak Provinsi. Dari kedua sumber tersebut, Bagi Hasil Pajak Provinsi relatif mengalami perkembangan yang stabil, kecuali tahun 2020. Perkembangan jumlah pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2016 Rp40.388,31 juta dan meningkatkan menjadi Rp51.554,99 juta tahun 2019. Sejalan penurunan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tahun 2020 jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga turun menjadi Rp45.117,45 juta. Secara keseluruhan, pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,81%. Pendapatan Dana Penyesuaian meningkat signifikan dari Rp35.357,32 juta tahun 2016 menjadi Rp174.095,96 juta tahun 2019, dan mengalami penurunan signifikan tahun 2020 menjadi Rp127.623,53 juta. Dengan demikian, dalam tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 24,41%.

Pendapatan Hibah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 3 tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan. Pendapatan Hibah yang diperoleh tahun 2018 berjumlah Rp3.040,02 juta dan meningkat menjadi Rp10.334,00 juta tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.7.

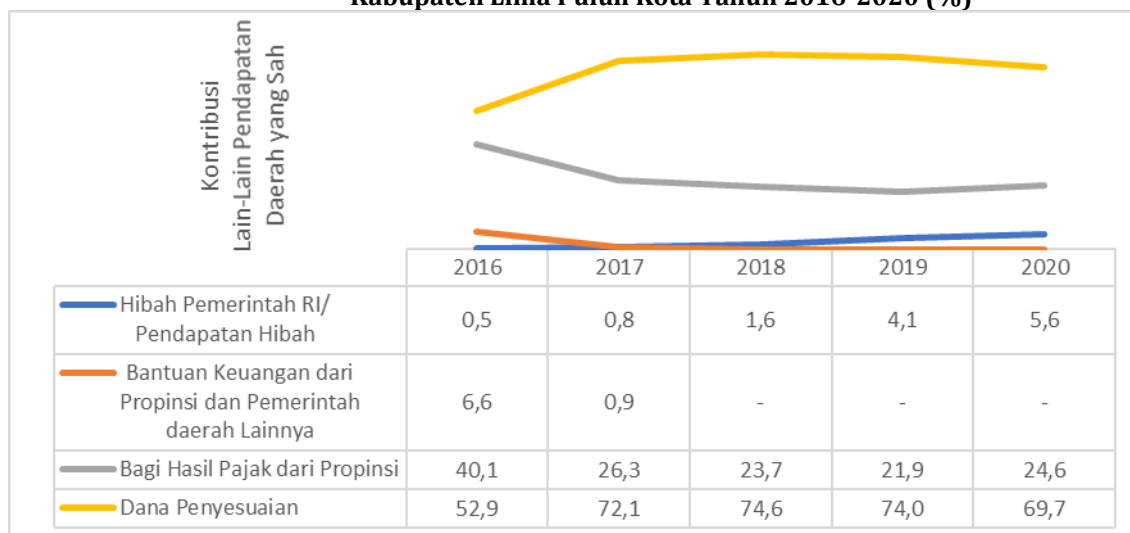
Grafik 3.7
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Perkembangan pendapatan Dana Penyesuaian yang terbesar dengan laju pertumbuhann positif, dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang memiliki laju pertumbuhan negative, mengakibatkan terjadinya perubahan kontribusi kedua sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan sumber lainnya relatif kecil sehingga tidak berpengaruh besar terhadap perubahan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada Grafik 3.8.

Grafik 3.8
Kontribusi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Analisis efektifitas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 92,93%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 103,71%. Kecuali Pendapatan Hibah, sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah lainnya di atas 90,00%. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97,49	103,71	101,66	93,90	92,93	(1,19)
Pendapatan Hibah	102,37	548,63	81,29	42,85	45,10	(18,53)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100,58	112,49	115,31	100,92	96,62	(1,00)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100,00	100,00	98,49	98,36	100,18	0,04
Bantuan Keuangan	69,94	100,00				

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bahu hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan. Pertumbuhan rata-rata per tahun lain-lain pendapatan daerah yang sah minus 1,19%.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan 0,40% dalam kurun waktu tahun 2016-2020, yaitu dari Rp1.103.770,43 juta tahun 2016 menjadi Rp1.121.707,91 juta tahun 2020. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah mengalami peningkatan dari Rp7.062,83 juta tahun 2016 menjadi Rp10.334,00 juta tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Daerah dan kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.178.893,53	1.275.862,31	1.257.168,41	1.336.485,51	1.209.471,40	0,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.060,27	119.771,92	73.440,84	85.168,15	77.429,48	3,28
Pendapatan Pajak Daerah	14.060,80	17.667,23	20.369,95	24.181,11	23.556,95	13,77
Pendapatan Retribusi Daerah	4.158,01	4.495,40	4.986,25	4.534,57	3.691,64	(2,93)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.117,81	2.422,00	2.425,07	2.675,28	3.226,73	11,10
Lain-lain PAD Yang Sah	47.723,64	95.187,28	45.659,56	53.777,19	46.954,16	(0,41)
PENDAPATAN TRANSFER	1.103.770,43	1.153.370,09	1.180.687,55	1.241.675,09	1.121.707,91	0,40
PENDAPATAN TRANSFER PUSAT: DANA PERIMBANGAN	1.010.102,02	992.052,78	997.618,22	1.016.024,13	948.966,94	(1,55)
Bagi Hasil Pajak	18.856,79	17.590,34	12.907,39	10.773,96	13.360,70	(8,25)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	808,58	1.187,13	1.576,59	1.897,80	1.800,04	22,15
Dana Alokasi Umum (DAU)	760.431,50	747.892,92	747.073,17	768.836,01	696.866,98	(2,16)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	230.005,15	225.382,40	236.061,07	234.516,36	236.939,22	0,75
PENDAPATAN TRANSFER PUSAT LAINNYA						
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.280,09	118.245,24	138.917,95	174.095,96	127.623,53	24,41
PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI						
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.388,31	43.072,07	44.151,38	51.554,99	45.117,45	2,81
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.062,83	2.720,30	3.040,02	9.642,27	10.334,00	9,98
Pendapatan Hibah	453,83	1.320,30	3.040,02	9.642,27	10.334,00	118,45
Bantuan Keuangan	6.609,00	1.400,00	-	-	-	

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Tabel 3.8
Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
A.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
1	Pendapatan Pajak Daerah	20,66	14,75	27,74	28,39	30,42	10,16
2	Pendapatan Retribusi Daerah	6,11	3,75	6,79	5,32	4,77	(6,01)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,11	2,02	3,30	3,14	4,17	7,58
4	Lain-lain PAD Yang Sah	70,12	79,47	62,17	63,14	60,64	(3,57)
B	PENDAPATAN TRANSFER	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
B.1.1	PENDAPATAN TRANSFER PUSAT: DANA PERIMBANGAN	91,51	86,01	84,49	81,83	84,60	(1,94)
1	Bagi Hasil Pajak	1,71	1,53	1,09	0,87	1,19	(8,62)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,07	0,10	0,13	0,15	0,16	21,66
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	68,89	64,84	63,27	61,92	62,13	(2,55)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	20,84	19,54	19,99	18,89	21,12	0,34
B.1.2	PENDAPATAN TRANSFER PUSAT LAINNYA						
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4,83	10,25	11,77	14,02	11,38	23,91
B.1.3	PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI						
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3,66	3,73	3,74	4,15	4,02	2,39
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
1	Pendapatan Hibah	6,43	48,54	100,00	100,00	100,00	98,62
2	Bantuan Keuangan	93,57	51,46	-	-	-	

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan besar dalam keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah masih besarnya ketergantungan daerah atas pendanaan dari pemerintah pusat. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) rata-rata lima tahun terakhir hanya sebesar 6,77%. Artinya kontribusi rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan rendah masih sangat rendah. Jika dilihat rasio kemandirian daerah dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Dana Perimbangan, juga tergambar struktur pendanaan di kabupaten Lima Puluh Kota dimana rasio kemandirian daerah rata-rata selama lima tahun terakhir baru sebesar 8,54%. Situasi ini mengharuskan daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi yang strategis yaitu berada pada jalan lintas yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan ditunjang pula oleh banyaknya aset wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari data BPS terlihat jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun ke tahun. Namun, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat wisata, retribusi parkir relatif kecil dan tidak menunjukkan penambahan yang signifikan.

Permasalahan lain dalam pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Lima Puluh Kota adalah belum optimal dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Langkah ini baru dimulai pada tahun 2019 dengan dilakukannya kerjasama dengan Bank Nagari untuk pembayaran PBB secara online. Metode pembayaran secara online ini seharusnya juga berlaku untuk pembayaran pajak lainnya.

Sebagaimana disinggung di atas, kurangnya kesadaran wajib pajak masih merupakan kendala dalam pemungutan pendapatan daerah. Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan. Selama ini terhadap wajib pajak yang tidak taat belum dilakukan tindakan tegas. Jika penghitungan pajak terutang secara self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, dianggap tidak wajar, pemerintah daerah belum melakukan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan lapangan kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dilakukan berdasarkan klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung lebih fokus untuk pengeluaran/operasional rutin pemerintah daerah, dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Sedangkan Belanja Langsung

berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

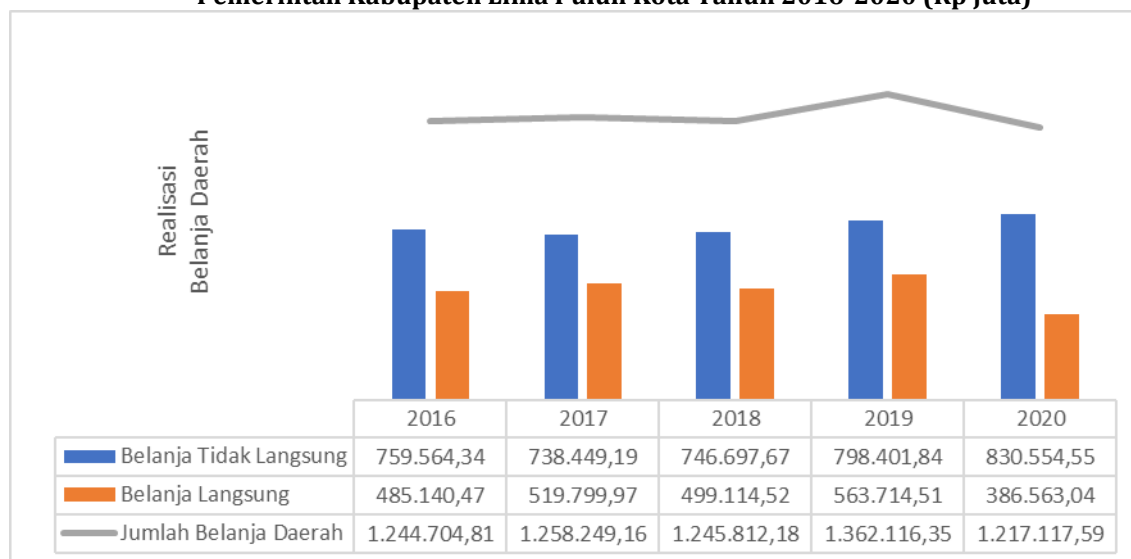
Jumlah Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dari Rp1.244.704,81 juta tahun 2016 menjadi Rp1.362.116,35 juta tahun 2019, tetapi sedikit turun menjadi Rp1.217.117,59 juta pada tahun 2020. Hal ini berarti terjadi laju pertumbuhan rata-rata per tahun dalam periode tersebut sebesar minus 0,56%. Penurunan ini karena dampak pandemi Covid-19.

Belanja Tidak Langsung setiap tahun selalu menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan jumlah pegawai, kenaikan golongan, kenaikan gaji, dan masa kerja dari pegawai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah Tidak Belanja Langsung mengalami peningkatan dari Rp759.564,34 juta tahun 2016 menjadi Rp830.554,55 juta tahun 2020. Dengan demikian, dalam periode tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,26%.

Belanja Langsung mengalami perkembangan berfluktuasi, tahun 2016 berjumlah Rp485.140,47 juta dan meningkat menjadi Rp519.799,97 juta tahun 2017, tetapi turun menjadi Rp499.114,52 juta tahun 2018. Walaupun pada tahun 2019 mengalami peningkatan, namun Belanja Langsung ini kembali turun menjadi Rp386.563,04 juta tahun 2020. Fenomena naik turun Belanja Langsung seperti ini lebih menunjukkan keterbatasan Sumber Dana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga prioritas utama adalah untuk membiayai kebutuhan Belanja Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama. Penurunan Belanja Langsung tahun 2020 ini secara tidak langsung terjadi karena kebijakan Pemerintah Pusat melakukan pengurangan dana DAU dan *refocusing* anggaran guna membantu mengatasi Pemerintah Pusat dampak pandemi Covid-19. Penurunan tahun 2020 telah mengakibatkan laju pertumbuhan Belanja Langsung dalam waktu 5 tahun terakhir menjadi minus 5,52%.

Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.9.

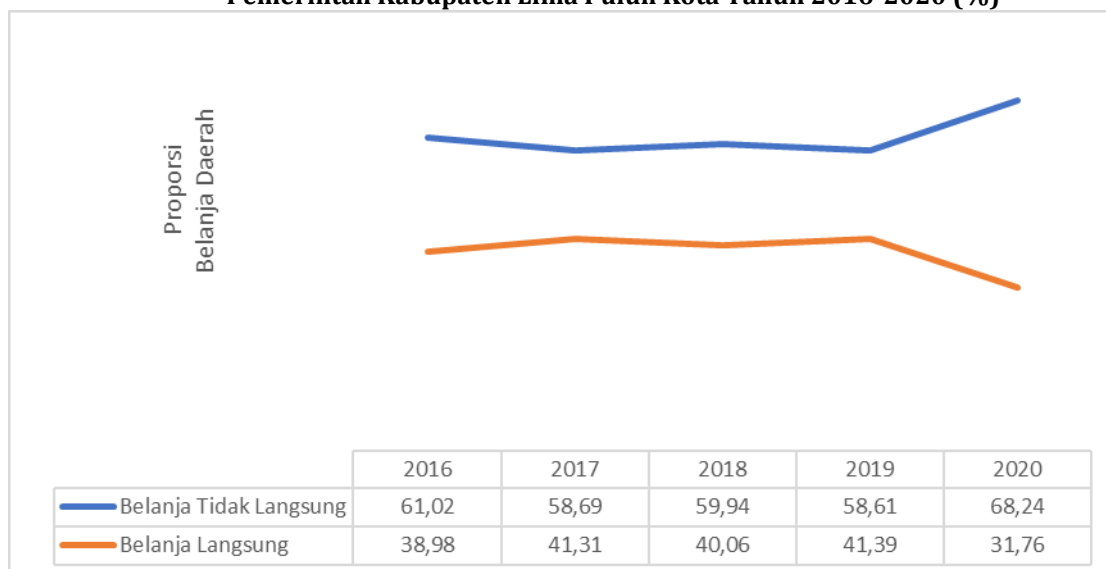
Grafik 3.9
Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Karena keterbatasan dana atau pendapatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan laju pertumbuhan Belanja Tidak Langsung yang lebih besar dibandingkan Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas, maka Proporsi Belanja Tidak Langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari 61,02% tahun 2016 menjadi 68,24% tahun 2020. Sebaliknya proporsi Belanja Langsung turun dari 38,98% tahun 2016 menjadi 31,76% tahun 2020. Proporsi Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.10.

Grafik 3.10
Proporsi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Belanja Tidak Langsung

Analisis lebih rinci dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan dominasi Belanja Pegawai; rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 68,45% Belanja Tidak Langsung tersebut merupakan Belanja Pegawai. Kecuali tahun 2017, jumlah Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren peningkatan. Penurunan Belanja Tidak Langsung tahun 2017 tersebut disebabkan penurunan jumlah pegawai akibat pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan.

Akibat penurunan jumlah pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan Belanja Pegawai Tidak Langsung mengalami penurunan dari Rp654.444,29 juta tahun 2016 menjadi Rp574.794,09 juta. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi Rp625.294,97 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp590.402,06 juta tahun 2020. Dengan demikian, terdapat tren peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dengan laju pertumbuhan rata-rata minus 2,54% per tahun.

Belanja Tidak Langsung terbesar kedua adalah Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun 13,68%, yaitu dari Rp90.166,02 juta menjadi Rp155.636,03 juta tahun 2019, dan turun menjadi Rp150.578,40 juta tahun 2020. Belanja Hibah juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, khususnya 3 tahun terakhir. Jumlah Belanja Hibah tahun 2016 berjumlah Rp7.876,80 juta, dan meningkat menjadi Rp10.369,06 juta tahun 2019, dan kembali mengalami peningkatan yang lebih besar tahun 2020 menjadi Rp47.055,18 juta. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Belanja Tidak Terduga relatif kecil, dan tidak banyak berubah sampai tahun 2019. Namun, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kebijakan khusus untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan tahun 2020. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 berjumlah Rp4.473,72 juta, dan tahun-tahun berikutnya tidak banyak perubahan. Tetapi tahun 2020, Belanja Tidak Terduga naik drastis menjadi Rp36.111,74 juta. Hal ini menunjukkan tekad Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi dan proporsi Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.11 dan Grafik 3.12.

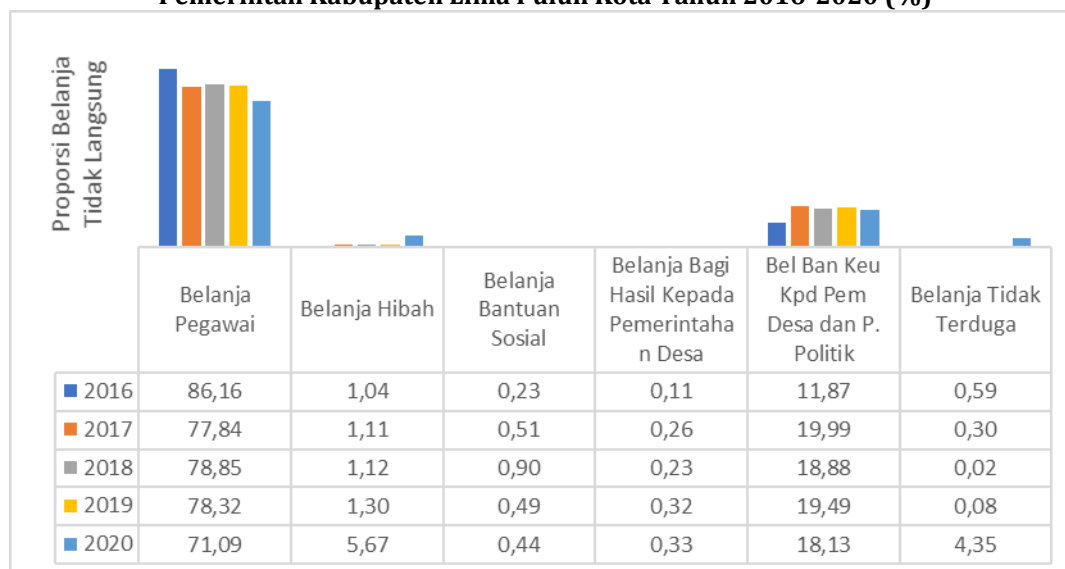
Gambar 3.11
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Sekalipun jumlah Belanja Pegawai memiliki tren yang meningkat sebagaimana dijelaskan di atas, namun dari segi proporsinya terhadap total Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren sedikit penurunan. Demikian juga dengan Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol juga dari segi jumlah menunjukkan tren peningkatan, tetapi dari segi proporsi menunjukkan tren sedikit penurunan. Hal disebabkan tren peningkatan jumlah Belanja Hibah yang lebih tinggi mengakibatkan proporsinya pun menunjukkan tren yang lebih tinggi pula. Grafik 3.12 menunjukkan perkembangan proporsi Belanja Tidak Langsung.

Grafik 3.12
Proporsi Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas pengeluaran diantara jenis Belanja Tidak Langsung. Namun setiap tahunnya rata-rata di atas 90%. Kecuali Belanja Tidak Terduga, semua jenis belanja yang membentuk Belanja Tidak Langsung memiliki tingkat efektifitas pengeluaran di atas 90%. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)

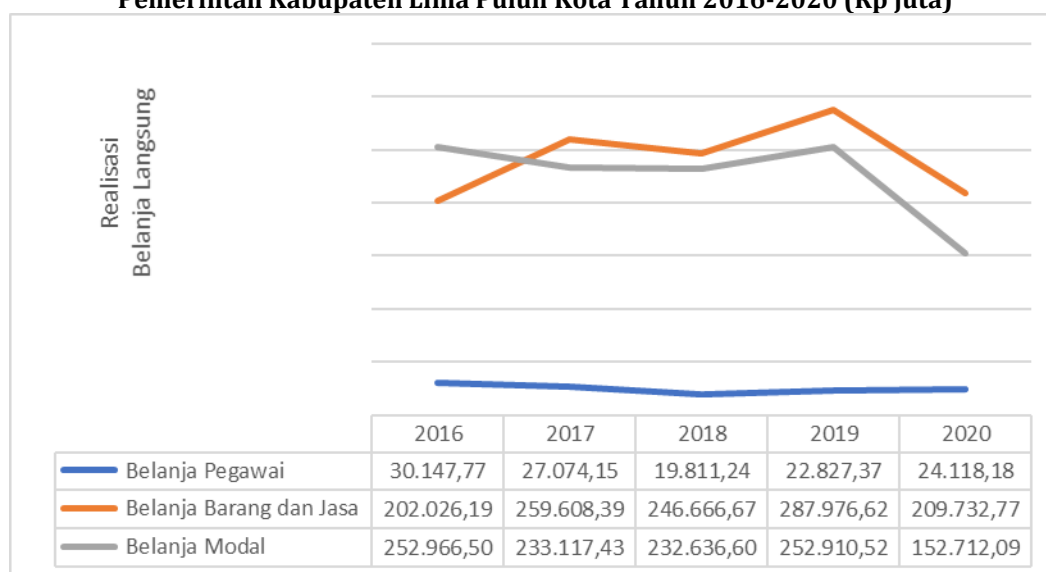
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	95,21	94,66	95,42	97,02	96,49	0,33
Belanja Pegawai	95,34	94,06	95,39	96,81	96,07	0,19
Belanja Hibah	84,65	91,83	91,21	97,76	98,91	3,97
Belanja Bantuan Sosial	86,86	81,88	98,03	72,84	91,57	1,33
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	28,53	77,50	57,92	68,49	76,91	28,13
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	99,51	99,76	98,58	99,57	99,67	0,04
Belanja Tidak Terduga	69,90	43,67	4,48	65,99	90,24	6,59

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Belanja Langsung

Sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) tentang *refocussing* anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, maka Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Namun demikian, karena hanya untuk kebutuhan mengikat maka Belanja Barang dan Jasa tetap menunjukkan peningkatan, dari tahun 2016 adalah Rp202.026,19 juta dan meningkat menjadi Rp209.732,77 juta tahun 2020. Sebaliknya, Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren penurunan. Belanja Modal tahun 2016 berjumlah Rp252.966,50 juta dan tahun 2017 dan turun menjadi Rp152.712,09 juta tahun 2020. Di samping disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, penurunan tahun 2020 khususnya disebabkan *refocussing* anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.13.

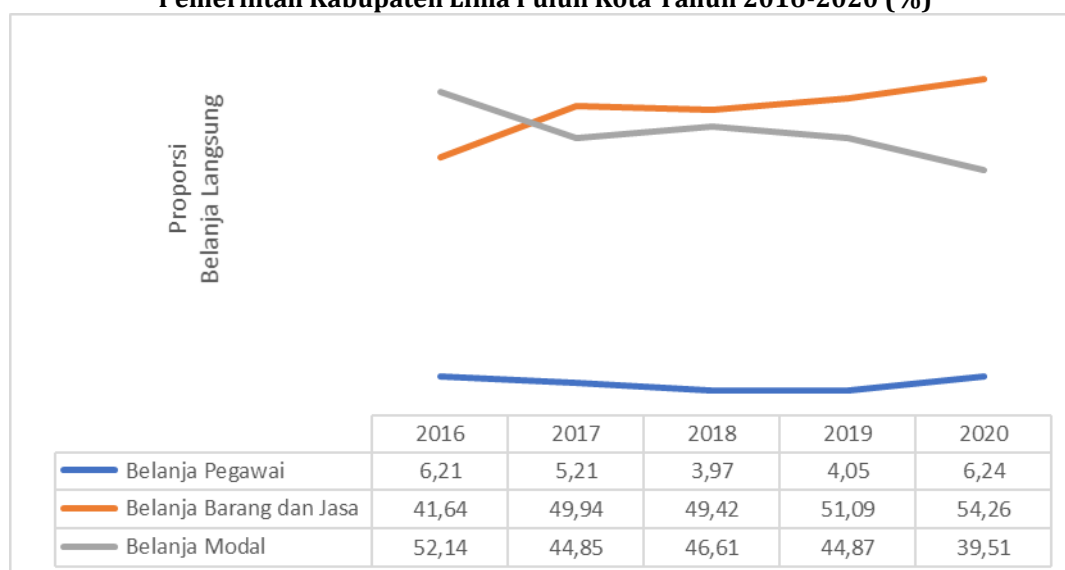
Grafik 3.13
Realisasi Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Tren peningkatan dan penurunan jumlah Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan adakalanya proporsi Belanja Barang dan Jasa yang lebih besar dibandingkan Belanja Modal. Atau Sebaliknya, Belanja Modal lebih besar dibandingkan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017. Tetapi secara keseluruhan, proporsi Belanja Barang dan Jasa jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal. Perkembangan proporsi jenis Belanja Langsung tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.14.

Grafik 3.14
Proporsi Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Langsung menunjukkan capaian yang cukup baik, karena semua jenis Belanja Langsung dan selama 5 tahun periode yang dianalisis tingkat capaiannya mendekati 90%. Capaian efektifitas pengeluaran Belanja Langsung seperti ini membutuhkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat dibelanjakan secara lebih efektif atau di atas 90,00%. Penghematan belanja tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan saja, tetapi sudah dimulai dari penyusunan perencanaan, antara lain dengan menggunakan Analisis Standar Belanja sebagai dasar dalam menentukan jumlah belanja suatu kegiatan.

Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
BELANJA LANGSUNG	88,57	92,05	88,87	87,79	88,48	(0,03)
Belanja Pegawai	91,66	97,89	86,28	87,13	86,35	(1,48)
Belanja Barang dan Jasa	86,49	90,43	87,53	90,09	90,67	1,19
Belanja Modal	89,95	93,26	90,56	85,36	85,96	(1,13)

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Dengan adanya perubahan peraturan pemerintah dari Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 ke Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, terhadap realisasi belanja Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 masih berdasarkan PP no. 58 tahun 2005 dan penerapan PP No. 12 tahun 2019 untuk realisasi tahun 2021.

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2016-2020 sesuai PP No. 58 tahun 2005 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Daerah Sesuai PP No. 58 Tahun 2005
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
Belanja Daerah	1.244.704,81	1.258.249,16	1.245.812,18	1.362.116,35	1.217.117,59	(0,56)
Belanja Tidak Langsung	759.564,34	738.449,19	746.697,67	838.970,31	830.554,55	2,26

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
Belanja Pegawai	654.444,29	574.794,09	588.765,86	630.882,95	590.402,06	(2,54)
Belanja Bunga	-	-	-	-		
Belanja Hibah	7.876,80	8.182,90	8.365,70	33.749,62	47.055,18	56,34
Belanja Bantuan Sosial	1.730,20	3.760,31	6.717,95	15.480,98	3.691,62	20,86
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	873,31	1.922,67	1.733,628	2.560,88	2.715,54	32,79
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	90.166,02	147.605,50	140.966,68	155.636,03	150.578,39	13,68
Belanja Tidak Terduga	4.473,721	2.183,72	147,86	659,86	36.111,74	68,56
Belanja Langsung	485.140,47	519.799,97	499.114,52	563.714,51	386.563,04	(5,52)
Belanja Pegawai	30.147,77	27.074,15	19.811,24	22.827,37	24.118,18	(5,43)
Belanja Barang dan Jasa	202.026,19	259.608,39	246.666,67	281.976,62	209.732,77	0,94
Belanja Modal	252.966,50	233.177,43	232.636,60	252.910,52	152.712,09	(11,85)

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2016-2020

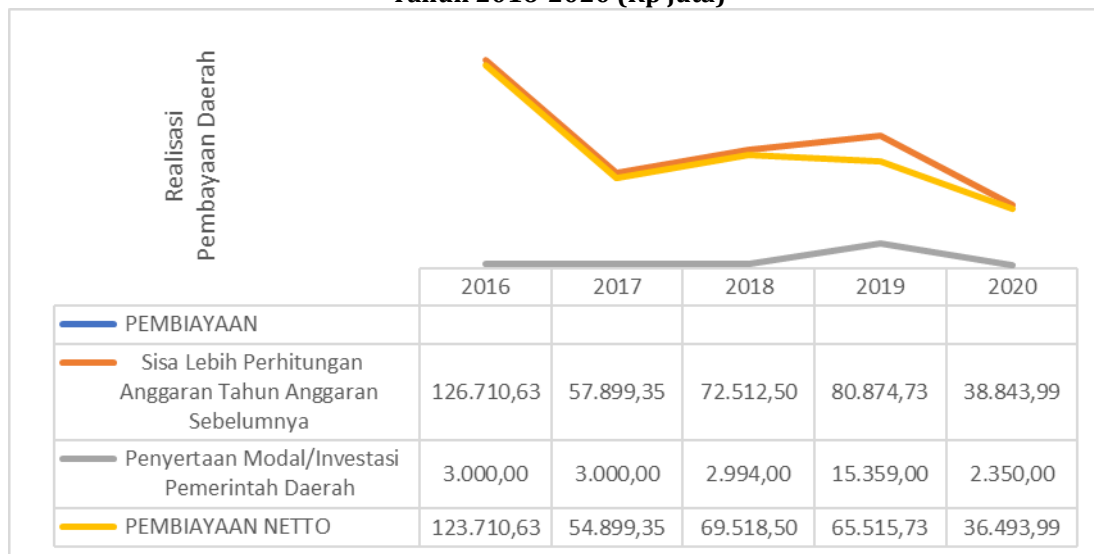
Rata-rata pertumbuhan per tahun belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0.56%. hal ini disebabkan secara rata-rata per tahun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,56% namun pada belanja tidak langsung mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2,26%.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp 123.710,63 juta tahun 2016 menjadi Rp 36.493,99 juta tahun 2020.

Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan terjadi setiap tahun untuk Penyertaan Modal pada BUMD. Dengan demikian, penurunan pembiayaan netto tersebut menggambarkan pelaksanaan APBD yang lebih efektif sehingga SiLPA tahun 2020 menjadi kecil. Perkembangan realisasi pembiayaan ini dapat dilihat pada Grafik 3.15.

Grafik 3.15
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

3.1.2. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

Salah satu analisis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menilai Kesehatan Fiskal Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993). Analisis fiskal ini menggunakan beberapa indikator rasio untuk menilai kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur utang.

Analisis kesehatan fiskal daerah ini dilakukan berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3 terbitan, tahun 2015-2016, tahun 2017-2018, dan tahun 2019-2020. Data keuangan tersebut tidak semuanya realisasi tetapi juga anggaran. Data anggaran keuangan terdiri tahun 2016, 2018, dan 2020. Sedangkan data realisasi terdiri dari tahun 2017 dan tahun 2019. Namun dengan keterbatasan seperti itu, maka dalam analisis lebih ditekankan data tahun 2017 dan tahun 2019.

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran riil dari pendapatan daerah, sehingga diharapkan analisis rasio ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang. Rasio ini dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk, atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator Pendapatan Daerah Per Kapita} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Analisis data penduduk dan pendapatan daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk kabupaten se-Sumatera Barat, dan laju pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata per tahun di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat.

Laju pertumbuhan seperti itu mengakibatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membiayai pelayanan kepada penduduknya sedikit di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2017 adalah Rp3,39 juta dan naik menjadi Rp3,49 juta tahun 2019. Sedangkan data tahun 2020, diperkirakan (anggaran) bisa naik menjadi Rp3,60 juta. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat, kemampuan membiayai pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Perkembangan kemampuan membiayai pelayanan penduduk menurut kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut
Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	10,52	10,35	10,73	10,99	11,13	1,42
2	Pesisir Selatan	3,34	3,31	3,20	3,66	3,54	1,46
3	Solok	3,31	3,10	3,07	3,36	3,15	(1,26)
4	Sijunjung	4,13	4,24	3,89	4,20	3,62	(3,23)
5	Tanah Datar	3,69	3,88	3,63	3,85	3,59	(0,68)
6	Padang Pariaman	3,24	3,38	3,51	3,63	3,44	1,51
7	Agam	2,97	2,84	2,91	3,08	2,89	(0,64)
8	Lima Puluh Kota	3,34	3,39	3,38	3,49	3,60	1,87
9	Pasaman	3,73	3,62	3,46	3,68	3,56	(1,17)
10	Solok Selatan	5,06	4,81	4,64	5,34	5,03	(0,16)
11	Dharmasraya	4,01	4,03	3,71	4,12	4,51	2,97
12	Pasaman Barat	2,66	2,51	2,73	2,72	2,97	2,75
	Rata-rata	4,17	4,12	4,07	4,34	4,25	0,51

*Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD*

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini menekankan *money follows program*.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Sumber Dana dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah 9,39% dan turun menjadi 6,37% tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat, rasionya sedikit di bawah capai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, masing-masing adalah 11,11% dan 7,54%. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus membuat kebijakan dan upaya-upaya peningkatan PAD harus menjadi fokus OPD terkait, agar kemandirian Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bisa ditingkatkan; mendekati capaian kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat. Perkembangan rasio kemandirian kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	5,75	7,46	8,23	3,96	5,16	(2,66)
2	Pesisir Selatan	5,51	11,69	8,48	7,93	8,75	12,28
3	Solok	4,12	9,90	6,29	5,95	6,11	10,34
4	Sijunjung	6,73	11,06	8,06	8,41	6,90	0,63
5	Tanah Datar	9,03	12,87	12,07	9,69	12,35	8,17
6	Padang Pariaman	5,33	10,18	8,12	6,73	7,40	8,54
7	Agam	6,74	11,73	7,47	8,18	8,18	4,96

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
8	Lima Puluh Kota	5,78	9,39	6,60	6,37	7,29	5,95
9	Pasaman	6,41	14,29	10,23	9,51	8,99	8,81
10	Solok Selatan	4,76	9,50	3,05	7,43	7,74	12,90
11	Dharmasraya	7,48	10,43	8,93	7,74	10,16	7,98
12	Pasaman Barat	6,99	14,83	8,64	8,61	11,15	12,38
	Rata-rata	6,22	11,11	8,02	7,54	8,35	7,64

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kota se Sumatera Barat
Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD

3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah.

Ruang fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan daerah selain yang sudah memiliki *earmark* (DAK, hibah, dana penyesuaian dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan untuk membiayai belanja diskresi (belanja selain belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Rasio Ruang Fiskal Daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator Ruang Fiskal Daerah} = \frac{\text{Ruang Fiskal Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Pengurangan kewenangan kabupaten akibat implementasi UU 23 tahun 2014 tidak berpengaruh signifikan dari dana *earmark* yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. DAK Fisik yang dihasilkan sedikit meningkat dari Rp83.649,69 juta tahun 2016 menjadi Rp85.260,46 juta tahun 2017. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah dana *earmark* juga menunjukkan peningkatan, sehingga tahun menjadi Rp90.281,28 juta.

Namun demikian, peningkatan dana *earmark* tersebut juga diikuti dengan peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung yang jauh lebih besar. Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung tahun 2016 Rp juta menjadi Rp574.794,09 juta tahun 2017, dan tahun-tahun berikutnya meningkat signifikan sehingga tahun 2020 menjadi Rp590.402,06 juta.

Akibat peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung yang lebih besar daripada peningkatan dana *earmark* mengakibatkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lainnya menjadi turun. Akibatnya terjadinya penurunan Ruang Fiskal Daerah dari 40,30% tahun 2017 dan menjadi menjadi 32,05% tahun 2020.

Dengan ruang fiskal yang terbatas seperti dijelaskan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Daerah	1.178.893,53	1.275.862,31	1.257.168,41	1.336.485,51	1.209.471,40
B1	Dana Alokasi Khusus Fisik	83.649,69	85.260,46	86.902,25	88.575,66	90.281,28
B2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.280,09	118.245,24	138.917,95	174.095,96	127.623,53
B3	Pendapatan Hibah	453,83	1.320,30	3.040,02	9.642,27	10.334,00
B4	Belanja Pegawai	545.071,70	556.825,92	568.833,61	581.100,24	593.631,39
B	Selisih	496.438,21	514.210,39	459.474,58	483.071,39	387.601,20
C	Ruang Fiskal Daerah (%)	42,11	40,30	36,55	36,14	32,05

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

4. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan daerah

dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indikator Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}} = \frac{\text{Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}$$

Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio ini bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota relatif kecil, tetapi sedikit di bawah capaian rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah 0,16% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,18%. Sedangkan rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 adalah 0,21% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,22%.

Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditingkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif.

Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB menurut kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB
Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	0,37	0,33	0,36	0,39	0,45	5,31
2	Pesisir Selatan	0,18	0,18	0,28	0,21	0,29	13,46
3	Solok	0,20	0,17	0,21	0,20	0,22	1,93
4	Sijunjung	0,20	0,23	0,20	0,20	0,14	(8,14)
5	Tanah Datar	0,19	0,20	0,23	0,22	0,30	12,59
6	Padang Pariaman	0,31	0,39	0,39	0,32	0,31	(0,07)
7	Agam	0,19	0,19	0,20	0,19	0,23	5,18
8	Lima Puluh Kota	0,18	0,16	0,21	0,18	0,24	7,52
9	Pasaman	0,13	0,19	0,16	0,18	0,17	6,69
10	Solok Selatan	0,20	0,18	0,28	0,19	0,24	4,37
11	Dharmasraya	0,30	0,21	0,25	0,21	0,33	2,17
12	Pasaman Barat	0,22	0,18	0,21	0,16	0,26	4,94
	Rata-rata	0,22	0,22	0,25	0,22	0,27	4,57

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD

5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kemampuan Mendanai Belanja Daerah}}{\text{Belanja Daerah}} = \frac{\text{Penerimaan Daerah}}{\text{Pengeluaran Daerah}}$$

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun kecenderungannya menunjukkan sedikit penurunan. Jika tahun 2017 rasio

kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 105,75% dan turun menjadi 102,90% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, yang mengalami penurunan dari 107,14 % tahun 2017 menjadi 104,64% tahun 2019.

Perkembangan rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%)

No	Kabupaten	2017	2019
1	Kepulauan Mentawai	101,33	103,02
2	Pesisir Selatan	105,85	100,99
3	Solok	103,40	103,36
4	Sijunjung	114,55	109,10
5	Tanah Datar	116,88	105,05
6	Padang Pariaman	101,88	103,91
7	Agam	104,22	104,38
8	Lima Puluh Kota	105,75	102,90
9	Pasaman	107,74	109,38
10	Solok Selatan	102,39	107,69
11	Dharmasraya	103,37	100,37
12	Pasaman Barat	118,38	105,57
	Rata-Rata	107,14	104,64

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD

6. Belanja Modal

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja modal daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Data tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rasio Belanja Modal tahun 2017 adalah 18,53% dan turun menjadi 18,57% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, di mana terjadi penurunan dari 22,32% tahun 2017 menjadi 19,70% tahun 2019.

Perkembangan rasio Belanja Modal menurut kabupaten di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	30,88	31,01	32,69	30,15	24,18	(5,94)
2	Pesisir Selatan	20,54	17,04	18,31	19,18	22,92	2,78
3	Solok	17,58	17,39	16,21	15,61	11,69	(9,70)
4	Sijunjung	25,43	21,18	21,55	20,41	12,38	(16,47)
5	Tanah Datar	15,38	16,24	13,89	15,02	12,62	(4,82)
6	Padang Pariaman	20,31	25,95	20,60	18,22	17,82	(3,21)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
7	Agam	14,08	19,33	15,81	18,63	14,53	0,79
8	Lima Puluh Kota	20,24	18,53	19,11	18,57	19,03	(1,53)
9	Pasaman	25,32	18,51	13,83	12,44	16,21	(10,54)
10	Solok Selatan	31,00	28,04	29,34	24,25	24,71	(5,51)
11	Dharmasraya	29,64	28,91	26,00	22,07	23,26	(5,88)
12	Pasaman Barat	26,04	25,76	29,18	21,87	22,64	(3,45)
	Rata-rata	23,04	22,32	21,38	19,70	18,50	(5,34)

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD

7. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Dalam konteks manajemen kinerja, Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang berarti tidak berhubungan dengan target kinerja tertentu. Semakin kecil rasio belanja pegawai tidak langsung ini, maka akan semakin besar proporsi Belanja Daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung guna meningkatkan kinerja daerah. Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung} = \frac{\text{Belanja Pegawai Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Pengurangan pegawai akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya penurunan Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk di Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Analisis data tahun 2017 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan kabupaten di Sumatera Barat adalah 40,01% dari Belanja Daerah dan naik menjadi 41,19% tahun 2019. Sedangkan proporsi belanja ini lebih tinggi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu 45,68% tahun 2017 dan meningkat menjadi 46,32% tahun 2019.

Tabel 3.18 berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 3.18
Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	23,07	22,58	22,74	25,71	28,30	5,24
2	Pesisir Selatan	51,40	42,43	44,39	40,55	38,84	(6,76)
3	Solok	54,65	45,66	49,51	48,15	49,60	(2,39)
4	Sijunjung	41,63	38,00	42,25	38,07	41,78	0,09
5	Tanah Datar	54,76	46,16	44,82	44,08	44,07	(5,28)
6	Padang Pariaman	56,47	43,04	43,62	46,30	44,46	(5,80)
7	Agam	56,71	45,31	48,24	45,04	46,00	(5,10)
8	Lima Puluh Kota	54,13	45,68	46,30	46,32	44,54	(4,76)
9	Pasaman	44,07	41,73	46,98	44,91	44,73	0,37
10	Solok Selatan	37,47	33,68	38,69	37,90	37,07	(0,26)
11	Dharmasraya	41,53	33,81	38,57	37,02	38,78	(1,70)
12	Pasaman Barat	46,65	42,07	36,77	40,25	38,71	(4,55)
	Rata-rata	46,88	40,01	41,91	41,19	41,41	(3,05)

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD

8. Kemampuan Pembayaran Pokok Utang dan Bunga Daerah

Indikator kemampuan pembayaran pokok utang dan bunga daerah menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi jaminan pengembalian utang dari suatu Pemerintah Daerah. Indikator kemampuan pembayaran pokok utang dan bunga daerah dihitung berdasarkan formula berikut:

Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga	=	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Total Pendapatan Daerah

Karena adanya peraturan dan pembatasan yang ketat dari Pemerintah Pusat, maka sampai saat ini tidak banyak daerah yang telah melakukan Pinjaman (Utang) Daerah. Kabupaten di Sumatera Barat yang saat ini memiliki pinjaman sehingga menimbulkan belanja bunga dan angsuran pokok pinjaman hanya Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sampai saat ini tidak memiliki Utang (kecuali utang belanja) sehingga tidak menimbulkan Belanja Bunga.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Secara keseluruhan Total Aset atau Total Kewajiban dan Ekuitas Dana mengalami peningkatan dari Rp1.482.209 juta tahun 2016 menjadi Rp1.743.570 juta tahun 2020, sehingga pertumbuhan rata-rata per tahun 4,14%. Analisis kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020 terlihat bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 72,17%, 5,28%, dan 0,87% sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan antara tahun 2016-2020.

Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2016 nilai aset hanya sebesar Rp1.482.209 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp1.743.570 juta tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,28%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar.

Dari 5 kelompok aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, pertumbuhan jumlah Investasi Jangka Panjang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Investasi Jangka Panjang 26, adalah 26,11%, yaitu dari Rp19.870 juta tahun 2016 dan menjadi Rp50.252 juta tahun 2020. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah Aktiva Tetap dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,56%, yaitu dari Rp1.249.813 juta tahun 2016 dan menjadi Rp1.611.713 juta tahun 2020. Sedangkan Aset Lancar dan Aset Lainnya mengalami pertumbuhan minus.

Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah aset harus sama dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan rata-rata per tahun jumlah ekuitas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah kewajiban, yaitu 4,16% berbanding minus 9,45%.

Tabel 3.19 berikut menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel 3.19
Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
A	ASET						
a.	ASET LANCAR	79.875	103.235	105.021	69.989	68.021	(3,94)
1	Kas	59,916	72,556	80.882	39,915	28.878	
2	Piutang	7,946	7,611	9,698	18,686	55,918	
3	Persediaan	12,013	23,067	14,438	11,387	12.103	
b.	Investasi Jangka Panjang	19.870	22,328	35,665	48,05	50.252	26,11
1	Investasi Non Permanen Lainnya	760	760	760	760	760	
2	Penyisihan Investasi Non Permanen lainnya	(259)	(290)	(311)	(311)	(442)	
3	Penyertaan Modal	19,87	21,858	35,216	47,602	49.934	

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
	Pemerintah Daerah						
c.	ASET TETAP	1.249.813	1.362.337	1.461,99	1.595.265	1.611.713	6,56
1	Tanah	117,763	116,498	116,518	116,865	115.939	
2	Peralatan dan Mesin	276,274	316,383	345,209	384,956	435.956	
3	Gedung dan Bangunan	666,852	706,115	739,379	771,612	809.911	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,095,429	1,229,389	1,378,070	1,547.785	1.611.519	
5	Aset Tetap Lainnya	65,085	78,511	91,411	100,23	103.123	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	7,449	12,169	18,955	19,535	14.724	
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(979,042)	(1,096,729)	(1,227,552)	(1,345,719)	(1.479.461)	
c.	ASET LAINNYA	132.650	12.406	11.433	11.607	13.583	(43,43)
	JUMLAH ASET DAERAH	1.482.209	1.500.307	1.614.113	1.724.913	1.743.570	4,14
B	KEWAJIBAN	2.478	3.095	3.081	5.616	1.666	(9,45)
a.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.478	3.095	3.081	5.616	1.666	(9,45)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	16	43	7	34,004	30	
2	Dana Titipan pada Fihak Ketiga						
3	Pendapatan diterima dimuka	292	641	45	56	80	
4						4	
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	2,169	2,41	3,027	5,526	1.550	
C	EKUITAS DANA	1.479.731	1.497.211	1.611.031	1.719.296	1.741.904	4,16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.482.209	1.500.307	1.614.113	1.724.913	1.743.570	4,14

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konseptual ada 4 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas.

1. Rasio likuiditas

Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi utangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (utang jangka pendek dan utang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total utang dengan total aset, dan atau total utang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

3. Rasio Profitabilitas

Analisis rasio profitabilitas bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka perhitungan dan analisis rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan.

Karena rasio profitabilitas tidak relevan dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas saja.

Baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan penurunan. Penurunan ini bukan berarti adanya penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan. Tetapi, dengan pemberlakuan basis akrual dari tahun 2016, maka pada setiap akhir tahun harus diakui utang belanja yang akan dilunasi pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2019 jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun 2016.

Rasio lancar mengalami peningkatan dari 3.223,37% tahun 2016 menjadi 4.082,89% tahun 2020. Sedangkan rasio quick naik dari 3.222,88% tahun 2016 menjadi 3.356,42% tahun 2020. Hal yang sama ditunjukkan oleh rasio kas; naik dari 2,42% tahun 2016 menjadi 1.733,37% tahun 2020. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kemampuan untuk melunasi utang lancar puluhan kali lipat. Peningkatan kemampuan melunasi utang tersebut terutama disebabkan penurunan jumlah utang yang sangat signifikan tahun 2020 sehingga jumlah utang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang baik dari fungsi pemerintah sebagai penggerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikut.

Kondisi jumlah utang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total utang terhadap ekuitas dan atau total aset kurang dari 1%. Artinya, utang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya kurang dari 1% dari jumlah aset atau ekuitas. Dengan demikian, ke 5 (lima) rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat baik dalam melunasi seluruh utangnya. Tabel 3.20 berikut menyajikan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.20
Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio lancar	3.223,37	3.335,54	3.408,67	1.246,24	4.082,89
2	Rasio cepat	3.222,88	3.334,80	3.408,20	1.246,04	3.356,42
3	Rasio Kas	2,42	2,34	2.625,19	0,71	1.733,37
	RASIO SOLVABILITAS					
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,17	0,21	0,19	0,33	0,10
4	Rasio hutang terhadap modal	0,17	0,21	0,19	0,33	0,10

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum telah dicapai hasil perbaikan tata kelola yang ditunjukkan dengan opini dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencakup: Proporsi Penggunaan Anggaran, dan Analisis Pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Proporsi belanja dapat menunjukkan perbandingan besaran anggaran operasional serta belanja program dan kegiatan. Semakin tinggi anggaran operasional maka semakin kecil anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan atau sebaliknya. Analisis ini bertujuan untuk melihat mengevaluasi kinerja belanja dan efektifitas dari penggunaan anggaran untuk pembangunan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi perubahan proporsi yang lebih besar antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung. Namun tahun 2020, proporsi Belanja Tidak Langsung jauh lebih besar dibandingkan Belanja Langsung, yaitu 68,24% berbanding 31,76%.

Analisis lebih rinci menunjukkan bahwa Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Pegawai Langsung merupakan komponen paling besar dengan rata-rata dalam 5 tahun terakhir 47,99% dari total belanja daerah, dan kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa yang didalamnya termasuk belanja barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan dengan rata-rata 19,01% dari belanja daerah. Sedangkan rata-rata belanja daerah yang digunakan untuk belanja hibah dan bantuan sosial hanya sebesar 1,32% dan 0,31%. Tabel 3.21 menyajikan Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah.

Tabel 3.21
Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	61,02	58,69	59,94	58,61	68,24	2,83
Belanja Pegawai	52,58	45,68	47,26	45,91	48,51	(1,99)
Belanja Hibah	0,63	0,65	0,67	0,76	3,87	57,22
Belanja Bantuan Sosial	0,14	0,30	0,54	0,28	0,30	21,54
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,07	0,15	0,14	0,19	0,22	33,54
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	7,24	11,73	11,32	11,43	12,37	14,32
Belanja Tidak Terduga	0,36	0,17	0,01	0,05	2,97	69,50
BELANJA LANGSUNG	38,98	41,31	40,06	41,39	31,76	(4,99)
Belanja Pegawai	2,42	2,15	1,59	1,68	1,98	(4,89)
Belanja Barang dan Jasa	16,23	20,63	19,80	21,14	17,23	1,51
Belanja Modal	20,32	18,53	18,67	18,57	12,55	(11,36)

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

Untuk dapat melihat besaran anggaran belanja daerah yang sudah dibelanjakan untuk pemenuhan belanja program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja daerah maka perlu diketahui pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam menjalankan tupoksinya dan belanja wajib mengikat serta prioritas utama:

A. Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja daerah untuk aparatur, termasuk belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kebijakan belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur juga menunjukkan kebijakan yang relatif baik dengan rata-rata 56,88% dan cenderung mengalami peningkatan yaitu dari Rp695.207 juta (55,12% dari belanja daerah) tahun 2017 menjadi Rp701.877 juta (57,56% dari belanja daerah) tahun 2020. Dapat dilihat Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur pada Tabel 3.22 dan Tabel 3.23.

Tabel 3.22
Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
Belanja Tidak Langsung	654.237	574.794	588.766	625.295	590.399	(2,53)
Belanja Gaji dan Tunjangan	621.805	545.201	546.516	568.968	533.565	(3,75)
Belanja Tambahan Penghasilan	28.686	26.425	38.290	50.433	52.474	16,30
Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDh/WKdh	3.026	3.040	3.100	4.977	3.129	0,84
Belanja Pemungutan Pajak DAN Retribusi Daerah	721	128	861	916	1.231	14,31
Belanja Langsung	128.994	120.413	91.903	124.907	111.478	(3,58)
Belanja Honorarium PNS	16.885	13.906	9.962	11.341	11.123	(9,91)
Belanja Uang Lembur	5.998	5.910	3.299	5.588	1.288	(31,93)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	189	320	127	67		(100,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK PNS	6.813	11.794	9.380	23.798	2.835	(19,68)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.312	3.960	3.307	6.919	12.078	38,19

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	2.335	1.522	1.033	1.227	1.079	(17,55)
Jumlah Belanja Aparatur	783.231	695.207	680.669	750.202	701.877	(2,70)

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

Tabel 3.23
Perbandingan Belanja Pemenuhan Aparatur Terhadap Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)

Tahun	Belanja Aparatur	Pengeluaran Daerah (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
2016	783.231	1.247.705	62,77
2017	695.207	1.261.249	55,12
2018	680.669	1.248.806	54,51
2019	750.202	1.377.475	54,46
2020	701.877	1.219.468	57,56

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

B. Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Perhitungan Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta *earmark* dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja ini terdiri dari:

- 1) Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahunnya oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bunga atau belanja sejenisnya
- 2) Belanja periodik dan prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dan prioritas daerah seperti operasional kantor, operasional pelayanan kesehatan, pendidikan dll

Hasil pengolahan data Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta *earmark* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja ini dari Rp824.738,79 juta tahun 2016 menjadi Rp828.016,39 juta tahun 2020, atau mengalami peningkatan rata-rata 0,10%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari Belanja Pegawai terutama kenaikan gaji ASN dan belanja tambahan penghasilan ASN seiring perubahan perhitungan dari Tunjangan Daerah menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai yang perhitungannya mengarah ke berbasis kinerja. Selain itu dari sisi belanja barang dan jasa peningkatan terjadi pada belanja yang diperuntukan operasional kantor dan pelayanan masyarakat terutama pada pos belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, premi asuransi (jamkesda). Sedangkan untuk belanja transfer keuangan disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan anggaran dana desa setiap tahunnya serta kebijakan pemerintah untuk menganggarkan kewajiban pemerintah daerah untuk desa/nigari sebesar 10% dari dana transfer Dana Alkasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Realisasi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta *earmark* Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir rata-rata 64,92% dari Belanja Daerah. Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta *earmark* yang harus dianggarkan setiap tahunnya. Semakin besar Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta *earmark* ini maka semakin kecil kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan. Dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Realisasi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama,
serta Earmark Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	621.804,68	545.200,93	546.515,84	568.968,47	533.565,61	2,16
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.025,83	3.039,70	3.099,60	4.976,90	3.129,63	0,85
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	2.510,98	1.477,13	3.123,94	2.664,24	2.579,13	0,67

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	873,31	1.922,67	1.733,62	2.560,88	2.715,54	32,79
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	90.166,02	147.605,50	140.966,68	155.636,03	150.578,40	13,68
Belanja Premi Asuransi	3.311,66	3.959,62	3.307,21	6.919,01	12.078,00	38,19
Belanja BLUD	-	-	34.091,22	39.257,54	41.300,73	10,07
Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik	103.046,30	77.505,22	75.096,77	82.797,03	82.069,35	(5,53)
Jumlah	824.738,79	780.710,77	807.934,87	863.780,09	828.016,39	(0,10)

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill

Analisis ini bertujuan untuk melihat gambaran masa lalu tentang kebijakan untuk menutup defisit rill anggaran pemerintah daerah. Pada Tabel 3.22 dan Tabel 3.23, bahwa dari realisasi anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode tahun 2016-2020, defisit anggaran hanya terjadi tahun 2016 dan 2017 dengan defisit anggaran sebesar 35.369,60 juta dan Rp28.776,79 namun defisit ini bisa tertutupi oleh SILPA Anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 realisasi antara pendapatan dengan belanja daerah sudah surplus, hal ini disebabkan karena terdapatnya kegiatan yang optimal terealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja maupun kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Surplus anggaran ini akan menjadi SILPA anggaran tahun berkenaan dan bisa digunakan untuk penutup defisit penganggaran tahun berikutnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah cukup baik terutama tahun 2018-2020 dimana realisasi pendapatan sudah dapat menutupi realisasi belanja daerah, dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Defisit Rill Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.178.893,53	1.275.862,31	1.257.168,41	1.336.485,51	1.209.471,40
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.244.704,81	1.258.249,16	1.245.812,18	1.362.116,35	1.217.117,59
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000,00	3.000,00	2.994,00	15.359,00	2.350,00
	DEFISIT RILL	(68.811,28)	14.613,15	8.362,23	(40.989,84)	(9.996,19)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	126.710,63	57.899,35	72.512,50	80.874,73	38.843,99
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah	-		-	-	-
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	126.710,63	57.899,35	72.512,50	80.874,73	38.843,99
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	57.899,35	72.512,50	80.874,73	39.884,89	28.847,80

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

Analisis ini dilakukan untuk memberikan komposisi pembentuk sisa lebih perhitungan anggaran. Pada Tabel 3.25 dapat dilihat bahwa komposisi utama pembentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan periode tahun 2016-2020. Penyebab utamanya SILPA adalah karena terdapatnya kegiatan yang tidak terealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja dan pembiayaan daerah serta kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun berkenaan dengan besaran belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka besaran SILPA tahun berkenaan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikatakan cukup baik, dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
1	Jumlah SiLPA	57.899,35	72.512,50	80.874,73	39.884,89	28.847,80
2	Pelampauan penerimaan PAD	(5.041,95)	(4.902,89)	(13.875,22)	(11.898,71)	(9.236,55)
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	(31.424,45)	(13.971,66)	(6.648,41)	(35.848,80)	(27.532,97)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(2.596,09)	5.862,00	3.032,01	(15.287,98)	(13.928,74)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	96.961,84	85.525,04	98.366,35	102.920,38	79.546,06
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					
7	Kegiatan lanjutan					

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran lainnya. Ketersediaan dana dan pemaksimalan penggunaan dan yang tersedia berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta kebijakan pengelolaan aset daerah. Kebijakan-kebijakan keuangan sendiri diambil berdasarkan kondisi perekonomian dan keuangan daerah sebelum dan pada saat kebijakan tersebut diambil sebagai dasar untuk memproyeksikan kondisi di masa depan.

3.3.1. Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah Tahun 2020

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian nasional dan daerah. Pandemi yang mewabah sejak bulan Februari 2020 ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi 2,07% secara year to year, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 sebesar -2,07%. Hal ini menyebabkan secara ekonomi dan keuangan negara mengalami tekanan yang luar biasa.

Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan New Normal sangat berpengaruh terhadap kegiatan dan ekonomi masyarakat. Meskipun tidak berkontraksi sebesar perekonomian nasional, perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengalami penurunan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,16%. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Berikut disajikan Tabel 3.27 tentang Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020.

Tabel 3.27
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2020 (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,95	3,30	2,92	2,20	0,22
B Pertambangan dan Penggalian	5,59	3,09	3,07	3,16	(2,14)
C Industri Pengolahan	5,77	0,74	2,01	0,08	(2,00)
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,01	6,15	6,15	3,65	(6,77)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,78	8,47	4,79	4,06	3,62
F Konstruksi	6,91	9,24	7,28	7,85	(5,37)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	6,73	7,26	7,43	(0,42)
H Transportasi dan Pergudangan	9,00	9,82	9,17	9,30	(9,46)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,77	9,61	7,43	6,41	(10,69)
J Informasi dan Komunikasi	9,83	10,88	9,11	9,42	7,74

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,51	2,21	0,33	2,73	0,41
L Real Estat	5,11	4,20	4,64	5,19	0,05
M, N Jasa Perusahaan	4,66	5,49	5,78	6,57	(5,69)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,22	5,36	6,92	6,73	(0,83)
P Jasa Pendidikan	9,03	8,59	7,99	8,38	4,70
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,87	8,46	8,60	8,82	6,98
R, S, T, U Jasa lainnya	8,13	9,35	9,24	9,94	(13,29)
Produk Domestik Regional Bruto	5,32	5,33	5,23	5,06	(1,16)

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2020 sebagian besar sektor perekonomian mengalami pertumbuhan negatif. Tercatat ada tujuh lapangan usaha yang tetap tumbuh di tengah pandemi yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estat, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, meskipun pertumbuhannya tidak sebesar pada saat sebelum pandemi tahun 2016-2019. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar -1,16%.

Kontraksi yang cukup besar terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan -10,69%. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan dan pelarangan berkumpul dan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang serta penutupan objek wisata memberikan pengaruh besar pada sektor ini. Akibatnya, untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 920/921/BK-LK/2020 Tentang Penghentian Sementara Pemungutan Pajak Hotel, Restoran/Rumah Makan, Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Pasar.

Penurunan ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi, berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Penutupan objek-objek wisata di masa PSBB, yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati sebagaimana dijelaskan di atas, membuat penurunan yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Di sisi lain, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat pemerintah daerah harus melakukan refocusing belanja daerah untuk penanganan Covid-19. Penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut ini.

Tabel 3.28
Penurunan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp juta)

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2015	1.146.800,24	1.136.714,77		
2016	1.217.956,02	1.178.893,53	6,20	3,71
2017	1.288.874,85	1.275.862,31	5,82	8,23
2018	1.274.660,03	1.257.168,41	- 1,10	- 1,47
2019	1.399.521,00	1.336.485,51	9,80	6,31
	Rata-rata 2015-2019		5,18	4,19
2020	1.260.169,66	1.209.471,40	(9,96)	(9,50)
	Rata-rata 2015-2020		2,15	1,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3.28 menjelaskan penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020. Penurunan ekonomi nasional dan refocusing anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 membuat pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah. Di daerah pun sama, dana yang ada juga harus direfocusing untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, Kabupaten Lima Puluh Kota yang ketergantungan atas dana pusat

masih sangat besar, mengalami penurunan pendapatan sebesar 9,96% untuk penganggaran, dan 9,50% untuk realisasi dibandingkan tahun 2019.

Penurunan pendapatan daerah ini bukan hanya disebabkan karena berkurangnya dana transfer ke daerah, namun juga disebabkan oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan PAD ini antara lain disebabkan oleh penurunan ekonomi masyarakat karena pembatasan-pembatasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Penurunan Pendapatan Asli daerah ini dapat dilihat pada tabel 3.29.

Tabel 3.29
Penurunan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp juta)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	73.102,22	68.060,27	14,34	8,15
2017	124.674,81	119.771,92	70,55	75,98
2018	87.316,06	73.442,65	-29,96	-38,68
2019	97.066,64	85.168,15	11,17	15,97
Rata-rata Tahun 2016-2019			17,25	17,75
2020	86.666,04	77.429,48	-10,72	-9,09
Rata-rata 2016-2020			11,08	10,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tabel di atas dapat dilihat penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 mencapai 10,72% untuk penganggaran dan untuk realisasi menurun sebesar 9,09%. Penurunan ini membuat rata-rata pertumbuhan realisasi PAD tahun 2016-2020 menjadi sebesar 10,47%, sementara pertumbuhan realisasi PAD tahun 2016-2019 adalah sebesar 17,75%.

Untuk penanganan Covid-19 pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 telah mengalokasikan pada belanja tidak terduga yang diperuntukan bagi penanganan dan penanggulangan dampak pandemic Covid-19 termasuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pengaman jaringan social (social safety net). Pemberian bantuan langsung ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat, mengingat Konsumsi memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto dari sisi pengeluaran.

3.3.2. Strategi dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Mengatasi rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah dengan pendanaan pusat, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah
2. Meminimalisir kebocoran retribusi daerah
3. Penyesuaian dasar pengenaan pajak
4. Peningkatan basis data perpajakan
5. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah
6. Melakukan efisiensi pemungutan
7. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan
8. Meningkatkan pengawasan

Kebijakan

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
2. Menerapkan uang elektronik
3. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

3.3.3. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah bertujuan agar ketersediaan dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi belanja barang dan jasa dan meningkatkan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Ibukota Kabupaten Sarilamak
4. Peningkatan fasilitas penunjang di sektor pariwisata, peternakan dan perikanan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
6. Peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Alokasi anggaran untuk mendukung sarana dan prasarana pendukung pendapatan daerah.

3.3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SILPA
2. Meningkatkan pemanfaatan pengeluaran pembiayaan untuk investasi non permanen
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD

3.3.5. Kebijakan Penganggaran

1. Mematuhi jadwal penyusunan dan pembahasan RAPBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD
2. Pemenuhan Mandatory Spending
3. Peningkatan ASB
4. Memastikan terdapatnya kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di OPD teknis.
5. Penganggaran belanja mempedomani IKU Kepala Daerah dan IKU daerah
6. Penganggaran yang tepat dan efisien pada kelembagaan sesuai dengan perundang-undangan.

3.3.6. Kebijakan Barang Milik Daerah

Kebijakan Barang Milik Daerah bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah baik untuk operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah maupun untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan pengelolaan barang milik daerah meliputi :

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Sewa
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang muka tunai.
- 2) Pinjam pakai
Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
- 3) Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah. Dengan metode ini pemerintah daerah memperoleh kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah.
- 4) Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG)
Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau

- sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- b. Pengamanan
Pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan pengamanan atas barang milik daerah. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan secara fisik, administrasi maupun legalitas hukum.
 - c. Penatausahaan
Peningkatan kualitas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi :
 - ✓ Pengadaan barang milik daerah
 - ✓ Pencatatan barang milik daerah
 - ✓ Pelaporan barang milik daerah
 - d. Pemindahtanganan
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa penjualan barang milik daerah, tukar menukar barang milik daerah, hibah dan penyertaan modal
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

3.3.7. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional

Untuk mewujudkan pembangunan daerah, maka diperlukan peningkatan pendapatan daerah yang cukup besar. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Peningkatan ini sangat diperlukan akan tetapi harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, kinerja tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kondisi perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dilihat dari kinerja beberapa tahun belakangan dapat dilihat bahwa belanja transfer (nasional dan provinsi) sangat mempengaruhi naik turunnya pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan derajat fiskal daerah yang memang masih rendah, oleh sebab itu pertumbuhan pendapatan asli daerah harus menjadi prioritas untuk digali dan ditingkatkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat asas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit. Ini mengakibatkan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah) akan mengikuti besaran penerimaan daerah baik berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Dalam memproyeksikan pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sampai tahun 2026 digunakan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 telah melalui analisis oleh eksekutif, sehingga dapat dijadikan tolok ukur atau standar dalam menentukan metode statistik yang sebaiknya dipakai dan atau tahun dasar yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan.

Secara umum, berbagai metode statistik dapat digunakan dalam memproyeksikan pendapatan. Metode mana yang lebih tepat dan akan dipilih, tergantung kepada trend dan atau konjungtur data-data keuangan masa lalu yang akan digunakan sebagai dasar proyeksi. Setelah dilakukan proses *trial and error* maka alternatif yang paling baik adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2017- 2019 yang terbebas dari pengaruh penurunan kewenangan dan bebas dari pengaruh kebijakan pengurangan DAU dan *refocusing* anggaran.

Sebagai akibat dampak dari wabah Covid-19, maka tahun 2021 secara bertahap Dunia mulai menunjukkan pemulihan ekonomi, termasuk Indonesia. Dampak terhadap Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan realisasi pendapatan dan belanja tidak akan mengalami perubahan dari APBD tahun 2021. Selanjutnya, tahun 2022 diperkirakan kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih sehingga capaian kinerja pendapatan dan belanja 5 tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam memproyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Rp1.320.968 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1.534.296 juta pada tahun 2026. Hasil proyeksi pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel 3.32. Sedangkan pada tabel 3.33 dapat dilihat proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, yang mengalami peningkatan dari Rp 1.354.715 juta tahun 2021 menjadi Rp 1.579.791 juta pada tahun 2026.

Tabel 3.30
Proyeksi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	PENDAPATAN	1.320.968	1.358.564	1.395.954	1.440.104	1.486.255	1.534.296
1	Pendapatan Asli Daerah	102.717	115.947	119.071	139.311	153.800	169.450
	Pajak Daerah	34.859	37.727	38.859	47.600	55.948	60.660
	Retribusi Daerah	7.990	14.466	16.788	19.649	23.176	27.522
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.477	3.600	3.744	3.894	4.050	4.211
	Lain-lain PAD	56.391	60.154	59.780	68.168	70.626	77.057
2	Pendapatan Transfer	1.146.556	1.167.911	1.202.949	1.226.958	1.251.548	1.276.579
	a. Transfer Pemerintah Pusat	1.088.725	1.108.635	1.141.894	1.164.732	1.188.026	1.211.787
	1. Dana Perimbangan	976.561	996.470	1.026.365	1.046.892	1.067.830	1.089.186
	a) Dana Transfer Umum	723.949	743.859	766.175	781.498	797.128	813.071
	DBH	14.560	14.924	15.372	15.680	15.993	16.313
	DAU	709.389	728.935	750.803	765.819	781.135	796.758
	b. - Dana Transfer Khusus	252.611	252.611	260.190	265.394	270.701	276.116
	- DID	30.442	30.443	31.355	31.982	32.622	33.274
	- DanaDesa	81.722	81.722	84.174	85.858	87.575	89.326
	c. Transfer Antar Daerah	57.830	59.276	61.054	62.225	63.521	64.791
	Pendapatan Bagi Hasil	57.830	59.276	61.054	62.225	63.521	64.791
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.695	74.704	73.835	73.835	80.907	88.268
	Hibah	22.114	22.114	24.264	24.264	31.337	38.697
	Bantuan Operasional Sekolah	49.571	52.590	49.571	49.571	49.571	49.571
	Pendapatan atas pengembalian hibah	10					

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3.31
Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	BELANJA	1.354.714	1.374.980	1.437.588	1.482.987	1.530.425	1.579.791
1	Belanja Operasi	1.012.648	1.011.550	1.041.897	1.074.497	1.107.681	1.142.809
	a. Belanja Pegawai	692.140	706.550	727.747	752.802	778.259	805.473
	b. Belanja Barang dan Jasa	272.806	245.000	252.350	258.659	265.125	271.753
	c. Belanja Bunga						
	d. Belanja Hibah	38.935	50.000	51.500	52.530	53.581	54.652
	e. Belanja Bantuan Sosial	8.767	10.000	10.300	10.506	10.716	10.930
2	Belanja Modal	172.217	194.120	220.843	227.728	235.457	243.880
3	Belanja Tidak Terduga	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
4	Belanja Transfer	165.809	165.810	171.348	177.262	183.287	189.103
	a. Belanja Bagi Hasil	4.100	4.101	4.788	5.705	6.584	7.098
	b. Belanja Bantuan Keuangan	161.709	161.709	166.560	171.557	176.703	182.005
	PEMBIAYAAN	33.747	18.366	44.634	45.883	47.170	48.495
	Penerimaan pembiayaan	35.697	16.416	41.634	42.883	44.170	45.495
	Pengeluaran pembiayaan	1.950	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.3.8 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam periode tahun 2021– 2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Langkah pertama adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta *earmark*. Sama halnya proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, untuk memproyeksikan Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, serta *Earmark* juga digunakan asumsi-asumsi sebagaimana disampaikan sebelumnya. Hasil proyeksi Belanja Wajib, Mengikat, serta *Earmark* dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat,
Serta *Earmark* Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Gaji dan Tunjangan	545.071,70	556.825,92	568.833,61	581.100,24	593.631,39	593.631,39
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.156,14	3.182,86	3.209,81	3.237,00	3.264,41	3.264,41
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	2.596,46	2.613,90	2.631,46	2.649,13	2.666,93	2.666,93
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.797,54	2.882,01	2.969,04	3.058,69	3.151,05	3.151,05
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	155.627,29	160.845,48	166.238,64	171.812,62	177.573,51	177.573,51
Belanja Premi Asuransi	12.539,30	13.018,22	13.515,43	14.031,63	14.567,55	14.567,55
Belanja BLUD	42.375,49	43.478,23	44.609,66	45.770,53	46.961,61	46.961,61
Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik	83.649,69	85.260,46	86.902,25	88.575,66	90.281,28	90.281,28
Jumlah	847.813,61	868.107,08	888.909,89	910.235,50	932.097,72	932.097,72

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan demikian, Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dari hasil proyeksi Pendapatan Daerah dan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, serta *Earmark*. Hasil perhitungan untuk memperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3.33 berikut.

Tabel 3.33
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021– 2026 (Rp juta)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Kapasitas Riil keuangan Daerah	1.320.968,00	1.358.564,00	1.395.954,00	1.440.104,00	1.486.255,00	1.534.296,00
	Dikurangi:						
II	Rencana alokasi pengeluaran I						
2.a	Belanja wajib dan mengikat dan <i>Earmark</i>	847.813,61	868.107,08	888.909,89	910.235,50	932.097,72	932.097,72
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I (I-II)	473.154,39	490.456,92	507.044,11	529.868,50	554.157,28	602.198,28
	Dikurangi:						
III	Rencana alokasi						

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pengeluaran II (Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintahan)						
3.a	Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintahan	421.951,39	426.956,92	441.744,11	462.281,50	485.860,28	532.616,28
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I dan II (I-II-III)	51.202,00	63.500,00	65.300,00	67.587,00	68.297,00	69.582,00
	Dikurangi:						
IV	Rencana alokasi pengeluaran III						
4.	Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintahan	51.202	63.500	65.300	67.587	68.297	69.582
4.a	Belanja Hibah	38.935	50.000	51.500	53.581	53.581	54.652
4.b	Belanja Bantuan Sosial	8.767	10.000	10.300	10.506	10.716	10.930
4.c	Belanja Tidak Terduga	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	Surplus Anggaran Riil Berimbang (I-II-II-IV)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021– 2026 dapat digambarkan bahwa rencana keuangan terdiri rencana alokasi pengeluaran I, rencana alokasi pengeluaran II dan rencana alokasi pengeluaran III. Untuk rencana alokasi pengeluaran I diperuntukan untuk alokasi belanja wajib dan mengikat dan *Earmark* yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah. Untuk rencana alokasi pengeluaran II diperuntukan untuk alokasi pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta fungsi pelayanan pemerintahan. Sedangkan rencana alokasi pengeluaran III diperuntukan untuk belanja program dan kegiatan diluar visi dan misi kepala daerah serta fungsi pelayanan pemerintahan yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Gambaran umum kondisi daerah pada Bab 2 memberikan informasi berbagai aspek pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Namun demikian Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan. Untuk itu dibutuhkan identifikasi permasalahan pembangunan sebagai dasar untuk mengatasinya melalui arah kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan untuk masa lima tahun ke depan. Pada gambaran umum kondisi daerah terdapat sejumlah permasalahan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memerlukan perhatian karena mempengaruhi arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang. Adapun permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah IPM Propinsi Sumatera Barat dan berada di peringkat 13 dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016-2020) secara rata-rata IPM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 68,84 persen melambat dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Propinsi Sumatera Barat sebesar 0,14 persen per-tahun (tabel 2.49 dan tabel 2.50). Tingkat kemiskinan (tabel 2.43, tabel 2.44 dan tabel 2.45) juga mempengaruhi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Melambatnya pertumbuhan IPM ini disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (tabel 2.52) disebabkan oleh:
 - Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan (tabel 2.71).
 - Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun keatas dari dana DAK (bab 3.1).
 - Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah.
 - Kurangnya minat usia diatas usia sekolah untuk menyelesaikan Pendidikan dasar.
2. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (tabel 2.53) disebabkan oleh:
 - Masih belum tertanganinya biaya penunjang pendidikan anak usia pendidikan dasar.
 - Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah/kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
3. Usia Harapan Hidup yang cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun (tabel 2.51)
 - Masih banyaknya kasus kematian ibu (grafik 2.28).
 - Masih banyaknya kasus kematian bayi/balita (grafik 2.26, tabel 2.74, grafik 2.27).
 - Tingginya angka prevalensi stunting (tabel 2.73, grafik 2.25).
 - Masih banyak terdapat penyakit.

b. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun penerapan ini masih cukup rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat masih adanya penyakit masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas (tabel 2.56), kekerasan terhadap perempuan dan anak (tabel 2.92) serta kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam membayar zakat juga belum optimal (tabel 2.132). Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun (tabel 2.133).
2. Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya (Tabel 2.55, tabel 2.107, tabel 2.132, tabel 2.133, tabel 2.134).
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz.
4. Belum optimalnya pengumpulan zakat (tabel 2.132).

c. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami trend melambat, dan pada tahun 2020 jatuh menjadi -1,16 % (tabel 2.13). Jika dilihat kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri pengolahan sebagai potensi yang dimiliki. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,66 % per tahun dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26% per tahun (tabel 2.35, tabel 2.36).

Yang menjadi permasalahan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan (tabel 2.16, tabel 2.17, tabel 2.18, tabel 2.19, tabel 2.20, tabel 2.21, tabel 2.23, grafik 2.11, grafik 2.12, tabel 2.27 dan tabel 2.28), masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota (tabel 2.32) dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) (tabel 2.31).

1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan.
Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh :
 - Lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing (tabel 2.10).
 - Ketersediaan Air pada Jaringan Irigasi yang belum mencukupi untuk mengalir luas areal pertanian dan perikanan (tabel 2.116, tabel 2.117, grafik 2.34)
 - Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi.
 - Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi (tabel 2.115).
 - Masih kurangnya benih dan induk ikan unggul (tabel 2.27, tabel 2.28),
 - Belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan.
 - Belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan.
 - Masih kurangnya alsintan, peternakan dan perikanan dan rendahnya SDM pengelola alsintan (tabel 2.118).
2. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
Terhadap rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh:
 - Pembangunan kawasan wisata Geopark Harau belum optimal.
 - Pembenahan dan pembukaan objek wisata baru antara lain Nagari Wisata belum optimal (tabel 2.33, tabel 2.34).
 - Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada objek pariwisata belum optimal.
 - Kerjasama dan kemitraan dalam investasi pariwisata belum optimal.
 - Belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
 - Masih rendahnya upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata.
 - Kapasitas SDM pariwisata masih rendah.
3. Rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah:
 - Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi (tabel 2.127).
 - Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha.
 - Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan.
4. Rendahnya PAD terhadap APBD
 - Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD (tabel 2.137).
 - Masih belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD.
 - Belum adanya OPD yang melaksanakan fungsi penanggung jawab.

d. Belum optimalnya pengelolaan potensi Nagari dalam pembangunan daerah

Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan

pemerintahan dengan memanfaatkan potensi nagari. Potensi Nagari adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki nagari sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kelangsungan dan perkembangan nagari. Walaupun Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum memiliki banyak potensi, namun belum tergalai secara komprehensif dimasing-masing nagari. Disamping itu potensi nagari juga belum dikelola secara optimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh:

1. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif (uraian subbab 2.3.2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Halaman II-81 sampai II-83), disamping itu penentuan batas nagari belum optimal dilakukan.
2. Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi di masing-masing nagari umumnya masih berada pada nilai sedang (tabel 2.93).

e. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dimulai sejak tahun 2018, dimana sampai tahun 2020 belum menunjukkan hasil yang optimal (tabel 2.131). Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja (tabel 2.129)
2. Rendahnya indeks inovasi daerah (grafik 2.38, tabel 2.139)
3. Belum optimalnya maturitas sistem pengendalian internal (SPIP) (tabel 2.141)
4. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat (tabel 2.130)

f. Cakupan pelayanan infrastruktur daerah belum memadai

Kondisi infrastruktur di suatu daerah mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan infrastruktur Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemandapan jalan kabupaten masih rendah.

Perkembangan pembangunan jalan yang berstatus jalan kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahun. Tingkat kemandapan jalan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 baru mencapai 54,79% (grafik 2.33). Capaian ini masih jauh dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemandapan jalan ini belum merata pada semua wilayah. Kemandapan jalan yang cukup baik terdapat di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak, tapi belum memadai untuk mendukung seluruh aktivitas angkutan barang/orang sebagai layaknya sebuah ibu kota kabupaten sekaligus pusat pemerintahan. Sementara itu, akses di wilayah perbatasan dan pinggiran, terutama yang akses menghubungkan langsung dengan daerah kabupaten/kota tetangga masih sangat terbatas dengan tingkat kemandapan jalan yang rendah. Demikian juga halnya dengan tingkat kemandapan jalan akses menuju kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hal yang menjadi kendala selama ini adalah:

- Belum tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah pembangunan jalan kabupaten.
- Belum tertibnya administrasi penyelenggaraan pembangunan jalan.
- Penanganan jalan masih mengutamakan aspek pemerataan.
- Belum tegaknya aturan tonase kendaraan sesuai design perencanaan jalan.
- Masih terbatasnya alokasi anggaran.

2. Cakupan layanan air minum dan sanitasi belum optimal

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa cakupan akses air minum dan sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah masing-masing 79,40% dan 76,45% (grafik 2.30 dan grafik 2.31). Cakupan akses ini masih jauh dari target *universal access* yang menetapkan 100% untuk air minum dan sanitasi. Cakupan akses air minum yang masih rendah disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada.
- Sistem jaringan air minum yang ada belum mampu melayani pendistribusian air bersih ke seluruh masyarakat.

Sementara untuk Cakupan akses sanitasi yang masih rendah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
- Tingginya persentase saluran pembuangan air limbah masyarakat yang tidak sesuai standar.
- Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di tingkat masyarakat.

Disamping itu, masih rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana program/ kegiatan juga menjadi faktor lambatnya pemenuhan layanan akses air minum dan sanitasi.

3. Kinerja irigasi pertanian belum optimal

Sampai tahun 2020 sistem jaringan irigasi pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu melayani semua daerah irigasi yang ada. Capaian layanan baru berada pada angka 74,63% (grafik 2.34). Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Kualitas sistem dan jaringan irigasi masih rendah.
- Kuantitas dan kualitas sumber air baku belum memadai.
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas lapangan Operasi Pemeliharaan (OP) Irigasi, terutama Juru dan Pengamat.
- Tidak aktifnya sebagian besar P3A dan rendahnya peran serta petani dalam pengelolaan irigasi.
- Pengaturan distribusi pemakaian air yang belum optimal.

4. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal

Kinerja penyediaan rumah dan permukiman layak huni diukur melalui indikator rasio rumah layak huni dan tingkat penanganan kawasan kumuh. Sampai tahun 2020, tingkat rasio rumah layak huni adalah 0,153 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat (tabel 2.77). Hal ini disebabkan oleh:

- Rendahnya progress penanganan rumah tidak layak huni.
- Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan rumah yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sedangkan tingkat penanganan kawasan kumuh sampai tahun 2020 baru mencapai 0,21% (grafik 2.35). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai.
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai.
- Sistem proteksi kebakaran belum memadai.
- Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman masih rendah.
- Belum optimalnya penyediaan air minum dan sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai

Pembangunan Prasarana dan Sarana merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantara sasaran yang ditetapkan pada tahap IV (RPJMD ke-4) ini adalah telah berfungsinya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak sesuai target yang direncanakan. Sedangkan Pada RPJMD ke-3 (2016 – 2020) sasaran pembangunan adalah pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan pada lokasi kawasan perkantoran dan terbangunnya Masjid Raya/ Islamic Centre di IKK Sarilamak.

Sampai tahun 2020, belum seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan kabupaten berada di IKK Sarilamak. Saat ini, baru mencapai 78% kantor pelayanan pemerintahan yang sudah berada pada wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 22% masih berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan, *Islamic Centre*, pasar, dan terminal belum bisa direalisasikan, kondisi ini disebabkan oleh :

- Tidak sesuai pamanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- Terbatasnya ketersediaan lahan; dan
- Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah dilihat dari nilai IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah target dan capaian Provinsi

Sumatera Barat dan Nasional. Pencapaian IKLH Kabupaten Lima Kota tahun 2020 adalah 69,13 (tabel 2.93). Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah :

- Indeks kualitas air masih rendah (tabel 2.93).
- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sesuai dengan ketentuan.
- Penanganan terhadap bahaya kebakaran belum optimal.
- Kinerja pengurangan timbulan dan penanganan sampah masih rendah (tabel 2.94).

Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Di lain pihak, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota terlihat yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan luas tutupan lahan saat ini, termasuk RTH, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, belum mampu mengimbangi pencemaran udara yang ditimbulkan. Hal ini akan berdampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi (0,93) mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sampai tahun 2020, penambahan volume sampah belum dapat diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan maupun penanganan, sehingga sampah masih menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah. Belum adanya peraturan daerah serta master plan pengelolaan sampah, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan cakupan layanan pengelolaan sampah belum dapat menjangkau seluruh kecamatan. Layanan setiap hari baru bisa dilaksanakan pada nagari-nagari yang termasuk dalam kawasan IKK Sarilamak, walaupun belum maksimal. Sedangkan layanan terhadap nagari yang lain di Kecamatan Harau serta di nagari-nagari yang menjadi pusat kecamatan baru dapat diupayakan 1 kali dalam seminggu sesuai kemampuan.

b. Masih rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Tingkat ketaatan terhadap tata ruang akan memiliki kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampai tahun 2020, tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 60%, yang dapat diartikan bahwa baru 60% dari pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini yang sesuai dengan peruntukan yang sudah direncanakan dalam RTRW.

Dari fakta dan realita yang ada, tingkat ketaatan terendah terjadi pada kawasan IKK Sarilamak. Hal ini disebabkan oleh :

- Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai acuan dalam aktivitas pembangunan.
- Belum terpenuhinya norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang yang dibutuhkan.
- Belum optimalnya penataan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan.
- Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Rendahnya Kapasitas Manajemen Pengurangan Risiko Bencana

Kejadian bencana secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Makin tinggi kuantitas kejadian bencana maka makin besar dampaknya terhadap penurunan kondisi lingkungan hidup. Pada sisi lain, upaya pengurangan resiko bencana akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian kinerja upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan di bandingkan tahun 2019, serta masih berada dibawah target ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- Kapasitas kelembagaan daerah dalam penanganan bencana belum optimal.
- Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana masih rendah.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah

Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan IPM untuk menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah 69,47 masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Rendahnya IPM ini disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup. Disamping itu juga masih tingginya angka prevalensi stunting. Dengan meningkatkan IPM ini kedepannya, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafaiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

3. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan dengan menyusun profil nagari dan penetapan batas nagari serta meningkatkan status Nagari Mandiri

Status nagari, profil nagari dan batas nagari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh nagari guna meningkatkan status nagari. Hal ini belum optimal dan disebabkan oleh belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif serta belum optimalnya penentuan batas nagari. Disamping itu juga indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang.

Dengan meningkatkan dan menata hal ini kedepannya akan dapat tergali secara komprehensif dimasing-masing potensi-potensi yang ada di nagari.

4. Optimalisasi pelayanan publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. Namun hal ini belum optimal dan disebabkan oleh masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja daerah, indeks inovasi daerah dan belum optimalnya maturitas sistem pengendalian internal (SPIP) indeks kepuasan masyarakat.

Melalui penekanan dan peningkatan hal pokok penyebab tersebut kedepannya akan dapat optimal pelayanan publik di daerah.

5. Optimalisasi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16 %, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik dan akan pulih sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

6. Kapasitas layanan infrastruktur daerah

Upaya mengejar ketertinggalan kabupaten lima puluh kota dalam pembangunan sektor perekonomian dan sumber daya manusia mutlak harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang baik. Untuk itu, pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam periode RPJMD 5 tahun yang akan datang. Beberapa isu pembangunan yang perlu menjadi fokus dalam mengoptimalkan layanan infrastruktur adalah :

- a. Peningkatan akses dan kemandirian jalan kabupaten.
- b. Peningkatan akses air minum dan sanitasi masyarakat.

- c. Penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
- d. Pemenuhan kebutuhan terhadap bangunan strategis pemerintahan.
- e. Peningkatan kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, penanganan isu pembangunan tersebut akan terkait dengan penataan ruang wilayah. Oleh sebab itu, rencana penanganan isu pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan rencana tata ruang, sehingga akan terwujud pembangunan yang serasi, efektif dan efisien. Kedepannya, dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Pembangunan IKK Sarilamak.

Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah minangkabau “ABS-SBK”, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan perkantoran.

Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan sesuai amanat RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dapat diwujudkan. Beberapa isu penting yang perlu memperoleh perhatian 5 tahun yang akan datang adalah :

- a. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK yang berupa percepatan pemenuhan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), baik RTRW, RDTR, RTBL, dan peraturan pendukung lainnya.
- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan lebih tegas dan sistematis.
- c. Pemindahan objek-objek vital Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke IKK Sarilamak.
- d. Penyediaan lahan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur IKK.

Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan pada Sub bab 4.2, maka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada periode jangka menengah yang akan datang adalah:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan focus utama pada peningkatan indeks kualitas air;
- b. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan timbulan sampah; dan
- c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan.

Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan, dan berdampak pada kehidupan biota air, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalan pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH.

Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penanganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampah sampai dengan Ibukota Kecamatan.

Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hijau, perwujudan kualitas dan

kualitas RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau. Pada saat ini juga Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki pendataan RTH di luar IKK Sarilamak.

Dengan semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya, bisa melakukannya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau.

9. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengurangan Resiko Bencana.

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya “Menengah-Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis bencana, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana harus dapat diimplementasikan di daerah. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan resiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan resiko bencana akan mampu nantinya menurunkan resiko bencana daerah.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

1. Pemulihan pandemi Covid-19.
2. Percepatan penanganan stunting.
3. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama.
4. Infrastruktur Pelayanan Dasar.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
8. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

4.2.3. Isu Strategis Propinsi

1. Pembangunan Manusia
2. Pembangunan Kebudayaan
3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda
4. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

4.2.4. Isu Strategis KLHS

1. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik yaitu :
 - a. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3
 - b. Tingginya Intensitas Bencana Alam
 - c. Menurunnya kualitas air dan rendahnya kapasitas penyediaan air bersih
 - d. Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan
 - e. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
2. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan
 - b. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah
 - c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.
 - d. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industri
 - e. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertikal
 - f. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan
 - g. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energi baru dan terbarukan.
3. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tingkat Capaian TPB yaitu :

Tabel 4.1
Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tingkat Capaian TPB

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian
			SB
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	24	11
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	1
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	4
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	5
TPB 5	Kesetaraan gender	14	4
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8
TPB 7	Menjamin akses energi	2	
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	4
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	11	
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	13	5
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	3
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	6
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	4
Total		220	66
Persentase		100%	30%

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pengertian visi ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyajian dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya yaitu RPJMN tahun 2020-2024, RTRW Daerah 2012-2032, RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah:

MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. **Madani** adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

5.2. MISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan yang utuh dengan perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yaitu RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, RPJMD Provinsi

Sumbar 2021-2026, dan RPJM Nasional 2020-2024. Tabel keselarasan visi misi dokumen dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025
Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

RPJPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2005-2025	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI	
1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: <i>"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"</i>	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
4. Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Tabel 5.2
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026
dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021 - 2026	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Sumatera Barat madani yang	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani,

unggul dan berkelanjutan	Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI	
1. Misi 1 : Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
6. Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Tabel 5.3
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024 Dan RPJMD 2021 – 2026

RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI	
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
5. Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD tahun 2021-2026 pada tabel berikut:

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat
 - 1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, dengan sasaran :
 - 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya

MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DITINGKAT LOKAL DAN REGIONAL

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan
 - 1.3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah

MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan :

1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatkan status nagari

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA

Tujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik

MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK”

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis
 - 1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan
 - 1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat
 - 1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada
 - 1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan sasaran :
 - 2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - 2.2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah
 - 2.3. Menurunnya resiko bencana daerah

Tabel 5.4

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI: Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

N O	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47	69,85	70,23	70,61	70,98	71,36	71,74	71,74
		Sasaran : 1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52	8,52
			Harapan lama sekolah	13,29	13,48	13,76	13,35	14,13	14,32	14,50	14,50
		1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	69,79	69,86	69,93	70,00	70,07	70,14	70,20	70,20
			Angka prevalensi stunting	8,29	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	2,29	2,29
		2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	Indeks ABS-SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3
		Sasaran : 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3
2.	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86	4,86
			PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	28,84	29,67	30,49	31,32	32,14	32,97	33,80	33,80
			PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	40,53	42,36	44,19	46,02	47,85	49,68	51,51	51,51

N O	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	regional	Sasaran : 1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	33,74	40,49	47,24	53,98	60,73	67,48	67,48
		1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	26,81	27,64	28,47	29,31	30,14	30,97	31,80	31,80
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,61	3,67	3,72	3,78	3,83	3,89	3,94	3,94
		1.3. Meningkatnya pengembangan industri Kecil dan Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,36	6,49	6,62	6,75	6,88	7,01	7,14	7,14
		1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	7,78	8,53	8,53	9,67	10,35	11,04	11,04
3.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Tujuan : 1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
		Sasaran : 1.1. Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Tujuan : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)	75,00 (B)
		Sasaran : 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23 (B)	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
			Indeks inovasi daerah	197	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1.700
		1.2. Meningkatnya kualitas		83,99	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96	95,96

N O	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								
5.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Sasaran : 1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis 1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan 1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Infrastruktur Persentase gedung strategis yang terbangun Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Indeks Kelancaran Lalu Lintas Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio rumah layak huni	71,40	73,93	75,88	77,88	79,75	81,78	83,82	83,82
				71,74	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83	97,83
				54,79	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
				0,58	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
				79,40	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
				76,45	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85
				74,63	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52	81,52
				0,153	0,157	0,160	0,163	0,166	0,169	0,173	0,173

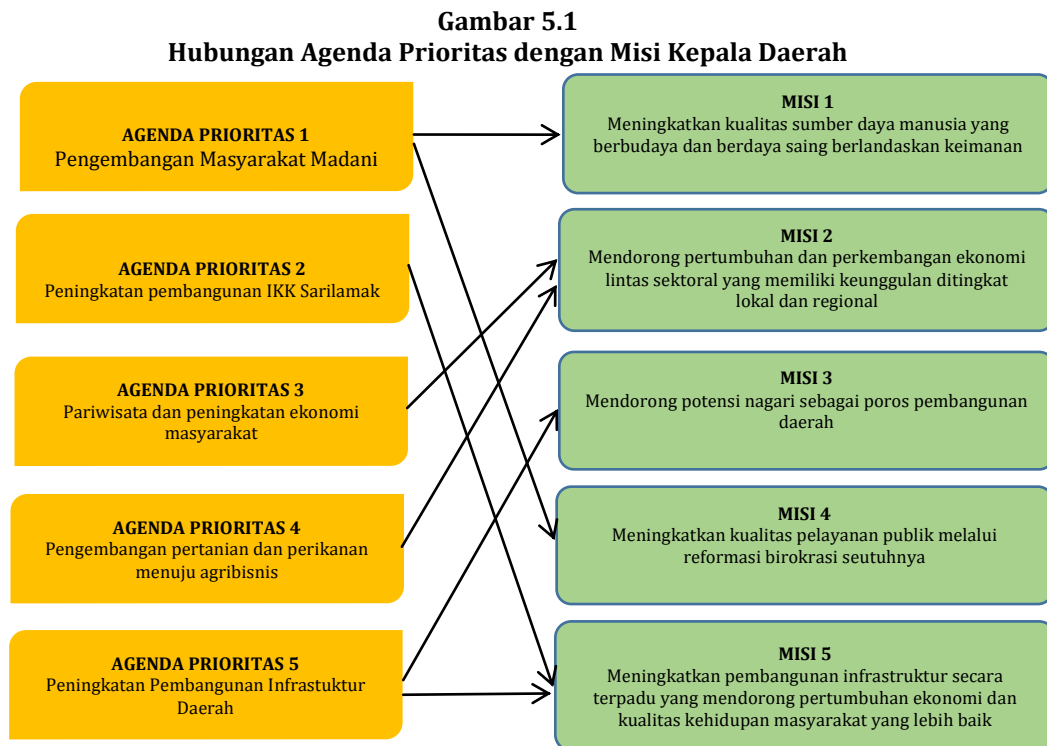
N O	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09
		Sasaran : 2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09
		2.2 Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	65	70	75	80	85	90	90
		2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	85-79	79-73	73-67	67-61	61-55	55-49	55-49

5.4 Agenda Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan Daerah

Agenda prioritas dan program unggulan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021–2026. Agenda prioritas dan program unggulan daerah ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota. Agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2021–2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Keterhubungan antara agenda prioritas pembangunan dengan misi kepala daerah dapat tergambar pada gambar dibawah ini :



Sedangkan program unggulan daerah yang dituangkan kedalam lima misi kepala daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
Dengan program unggulan sebagai berikut :
 - a) Peletakan pondasi Pembangunan Islamic Center
 - b) Penyediaan beasiswa untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu
 - c) Pembangunan Rintisan Rumah Sakit Daerah
 - d) Penguatan peran pemangku adat dan lembaga agama
3. **Misi 2** : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
Dengan program unggulan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan tanaman jagung seluas 20.000 Ha
 - b) Pengembangan Geopark Harau dan 50 objek wisata
 - c) Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru
3. **Misi 3** : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
Dengan program unggulan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah nagari.
 - b) Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari

4. **Misi 4 :** Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
Dengan program unggulan sebagai berikut :
 - a) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
 - b) Penguatan kelembagaan demokrasi
 - c) Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
5. **Misi 5 :** Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”
Dengan program unggulan sebagai berikut :
 - a) Penataan dan pembangunan kawasan IKK Sarilamak
 - b) Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol
 - c) Pembangunan RTH, Fasum dan Fasos.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6.1 Strategi

Hubungan strategi, arah kebijakan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH		
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan tata Kelola Pendidikan 2. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi pendidikan kesetaraan
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Menurunkan angka kematian ibu 2. Menurunkan angka kematian bayi/balita 3. Menurunkan prevalensi penyakit 4. Meningkatkan sarana dan parasaana Kesehatan 5. Menurunkan angka prevalensi stunting
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya	1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman keagamaan 2. Meningkatkan fasilitasi dan pengelolaan mesjid/surau/TPQ 3. Meningkatkan peran dan pengeloaan keuangan sosial mesjid/surau dan lembaga keagamaan 4. Meningkatkan penghayatan dan penerapan adat dan budaya 5. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya
Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional		
Tujuan	Sasaran	Strategi

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik Pariwisata di objek utama pariwisata daerah dan di objek Nagari Wisata. 2. Meningkatkan upaya pemasaran pariwisata daerah dalam negeri dan luar negeri bekerja sama dengan pihak Asita dan Perhotelan. 3. Meningkatkan upaya pengembangan ekonomi kreatif terutama untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata. 4. Meningkatkan upaya pengembangan SDM Pariwisata Daerah. 5. Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi wisata baru.
	2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 4. Meningkatkan upaya-upaya penyuluhan pertanian 5. Meningkatkan upaya pengendalian Kesehatan hewan 6. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan tangkap 7. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan budidaya 8. Melaksanakan upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri 2. Mengoptimalkan pengembangan industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pangan, industri pengolahan non pangan dan industri aneka kerajinan
	4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatkan tata kelola PAD

Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	1. Meningkatnya status nagari	1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan 2. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari 3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari 4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik

Misi 5 : meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Tujuan	Sasaran	Strategi

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1. Percepatan pembangunan gedung strategis 2. Penataan dan pembangunan Kawasan IKK Sarilamak
	2. Meningkatnya Kualitas Jalan	1. Pembangunan Jalan yang berkualitas secara merata dengan memperhatikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi : management keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.
	5. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1. Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman. 2. Percepatan pembangunan sanitasi perumahan dan pemukiman.
	6. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.
	5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan permukiman yang layak dan aman
2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatkan upaya pengurangan volume timbunan sampah 3. Optimalisasi perwujudan RTH sesuai peraturan perundang undangan
	2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	1. Mewujudkan kesesuaian rancana tata ruang dan pemanfaatan ruang
	3. Menurunnya resiko bencana daerah	Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan risiko bencana

6.2 Arah Kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan tahunan untuk masing-masing sasaran selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan		X	X	X	X	X
2	Pengembangan kurikulum kesetaraan dan kurikulum muatan lokal		X	X	X	X	X
3	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan		X	X	X	X	X
4	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan		X	X	X	X	X

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	kependidikan						
3	Pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan		X	X	X	X	X
4	Penerimaan Tenaga PPPK Guru Agama, SD dan SMP		X	X	X	X	X
5	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis IT untuk mendukung Wajib Belajar Sembilan Tahun		X	X	X	X	X
6	Peningkatan Kualitas Pendidikan PAUD		X	X	X	X	X
7	Pengadaan speaker Murotal		X	X	X	X	X
8	Mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang siaga bencana		X	X	X	X	X
9	Meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar		X	X	X	X	X
10	Memperluas jangkauan dan akses PKBM		X	X	X	X	X
11	Menekan angka putus sekolah (drop out)		X	X	X	X	X
12	Memperluas jangkauan dan akses PAUD		X	X	X	X	X
13	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan		X	X	X	X	X
14	Meningkatkan Kompetensi guru		X	X	X	X	X
15	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung proses belajar tingkat Pendidikan dasar		X	X	X	X	X
16	Mengembangkan sistem pendidikan layanan khusus		X	X	X	X	X
17	Peningkatan kapasitas guru agama tingkat Pendidikan dasar		X	X	X	X	X
18	Mendorong tumbuh kembangnya PKBM di masing-masing nagari		X	X	X	X	X
19	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan pendidikan		X				
20	Pemberian beasiswa untuk tingkat Pendidikan dasar berupa bantuan perlengkapan sekolah dan pemberian makanan tambahan		X	X	X	X	X
21	Pemberian beasiswa berupa bantuan biaya Pendidikan untuk tingkat Pendidikan menengah/kejuruan dan		X	X	X	X	X

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Pendidikan tinggi						
22	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		X	X	X	X	X
23	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		X	X	X	X	X
24	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		X	X	X	X	X
25	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		X	X	X	X	X
26	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular		X	X	X	X	X
27	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular		X	X	X	X	X
28	Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan		X	X	X	X	X
29	Peningkatan kapasitas sumber Daya manusia kesehatan		X	X	X	X	X
30	Peningkatan pemenuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman		X	X	X	X	X
31	peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		X	X	X	X	X
32	Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting		X	X	X	X	X
33	Pembangunan rintisan rumah sakit daerah		X	X	X		
34	Pemenuhan sarana dan prasana kesehatan		X	X	X	X	X
35	Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap sampai usia 23 bulan		X	X	X	X	X
36	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kampanye gizi seimbang		X	X	X	X	X
37	Meningkatkan partisipasi publik dalam penyediaan bahan makanan gizi seimbang		X	X	X	X	X
38	Meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak		X	X	X	X	X
39	Meningkatkan pola asuh keluarga		X	X	X	X	X
40	Meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan		X	X	X	X	X

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	dan penanggulangan stunting						
41	Meningkatkan sanitasi lingkungan		X	X	X	X	X
42	Membudayakan asupan Gizi seimbang untuk ibu dan bayi		X	X	X	X	X
43	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas dan kreatifitas anak		X	X	X	X	X
44	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menanggulangi masalah malnutrizi		X	X	X	X	X
45	Meningkatkan pola hidup sehat pada remaja putri dan ibu hamil		X	X	X	X	X
46	Meningkatkan apresiasi publik terhadap ibu menyusui		X	X	X	X	X
47	Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi		X	X	X	X	X
48	Meningkatkan akses persalinan		X	X	X	X	X
49	Meningkatkan sistem informasi imunisasi		X	X	X	X	X
50	Meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam upaya deteksi dini hipertensi		X	X	X	X	X
51	Meningkatkan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		X	X	X	X	X
52	Meningkatkan sistem informasi pengelolaan obat dan vaksin berbasis data kependudukan		X	X	X	X	X
53	Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan		X	X	X	X	X
54	Peningkatan pendidikan penghafal Al-Quran		X	X	X	X	X
55	Peningkatan pendidikan TPQ, MDA, TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid		X	X	X	X	X
56	Peningkatan kelembagaan masjid/ surau /TPQ		X	X	X	X	X
57	Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan		X	X	X	X	X
58	Peningkatan optimalisasi perantau dan anak nagari dalam partisipasi kegiatan		X	X	X	X	X

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	keagamaan, lembaga budaya, pelestarian adat.						
59	Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama		X	X	X	X	X
60	Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK		X	X	X	X	X
61	Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat		X	X	X	X	X
62	Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda		X	X	X	X	X
63	Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat		X	X	X	X	X
64	Peletakan pondasi pembangunan Islamic Center				X		

Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Penetapan kebijakan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata		X	X	-		-
2	Perencanaan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata		X	X	-		-
3	Melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sapras di lokasi utama wisata dan di Nagari Wisata		X	X	X	X	X
4	Pengembangan kawasan wisata Geopark Harau.		X	X	X		
5	Mengelola investasi pariwisata		X	X	X	X	X
6	Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		X	X	X	X	X
7	Melakukan pemasaran pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri untuk mempromosikan destinasi utama wisata dan nagari Wisata		X	X	X	X	X
8	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif		X	X	X	X	X
9	Meningkatkan kapaisitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreaif		X	X	X	X	X
10	Mengawasi penggunaan sarana pertanian		X	X	X	X	X
11	Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi		X	X	X	X	X
12	Mengelola Sumber Daya Genetik		X	X	X	X	X

Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Tumbuhan dan Mikro Organisme						
13	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian		X	X	X	X	X
14	Membuka 20.000 Ha lahan terlantar untuk peningkatan produksi jagung dan hortikultura		X	X	X	X	X
15	Mendorong investasi dalam pengolahan pasca panen		X	X	X	-	-
16	Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		X	X	X	X	X
17	Penanganan dampak perubahan iklim pertanian		X	X	X	-	-
18	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan Teknologi Tepat Guna		X	X	X	X	X
19	Hilirisasi gambir dan jeruk		-	X	X	X	X
20	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian		X	X	X	-	-
21	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani		X	X	X	-	-
22	Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan		X	X	X	X	X
23	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis		X	X	-	X	X
24	Meningkatkan kualitas pemberian pakan		X	X	X	X	X
25	Meningkatkan populasi sapi dari 45.000 menjadi 100.000 ekor.		X	X	X	X	X
26	Meningkatkan populasi kambing menjadi 1 juta ekor.		X	X	X	X	X
27	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap		X	X	-	X	-
28	Pengembangan kapasitas usaha perikanan tangkap		X	X	X	X	X
29	Pemberdayaan pembudidaya ikan		X	X	X	X	X
30	Pengelolaan pembudidaya ikan		X	X	X	X	X
31	Membuka 1.000 ha kawasan pembesaran ikan.		X	X	X	X	X
32	Menghasilkan 20 juta bibit ikan per bulan.		X	X	X	X	X
33	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		X	X	-	-	-
34	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan untuk usaha pengolahan.		X	X	X	X	X
35	Penyusunan rencana pembangunan industri		X	X	X	-	-
36	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		X	X	-	-	-
37	Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku IKM		X	X	X	X	X
38	Memfasilitasi akses permodalan		X	X	X	X	X
39	Pemanfaatan penggunaan teknologi		X	X	X	X	X
40	Membentuk lembaga pengelola		X	-	-	-	-

Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	pendapatan						
41	Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah		X	X	X	X	X
42	Membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan daerah		X	X	X	X	X
43	Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi-destinasi wisata baru		X	X	X	X	X
44	Memberikan bantuan peralatan dan mesin-mesin produksi bagi usaha mikro dan kecil, pertanian dan peternakan		X	X	X	X	X
45	Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi		X	X	X	X	X
46	Memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk usaha mikro dan kecil		X	X	X	X	X
47	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan produk usaha mikro dan kecil untuk masuk ke pasar nasional dan internasional		X	X	X	X	X
48	Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru		X	X	X	X	X

Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfaatan alokasi dana desa, BUMNag		X	X	X	-	-
2	Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari		X	X	X	X	X
3	Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan		X	X	X	X	X
4	Meningkatkan alokasi dana nagari sesuai dengan ketentuan yang ada		X	X	X	X	X
5	Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik		X	X	X	X	X
7	Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan nagari		X	X	X	-	-
8	Memberikan reward kepada nagari berprestasi		X	X	X	X	X

Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
9	Meningkatkan tata wilayah desa/ nagari		X	X	X	-	-
10	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nagari		X	X	X	-	-
11	Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar nagari		X	X	X	X	X
12	Pemenuhan indikator indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan						
13	Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari		X	X	X	X	X
	Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa		X	X	X	X	X
14	Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari		X	X	X	X	X

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		X	X	X	X	X
2	Peningkatan penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah		X	X	X	X	X
3	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		X	X	X	X	X
4	Peningkatan inovasi daerah		X	X	X	X	X
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah		X	X	X	X	X
7	Meningkatkan penataan dan kualitas kepegawaian daerah		X	X	X	X	X
8	Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan pelaporan AKIP		X	X	X	X	X
9	Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas.		X	X	X	X	X
10	Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja		X	X	X	X	X

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
11	Penguatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah		X	X	X	X	X
12	Peningkatan advokasi hukum dalam menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah		X	X	X	X	X
13	Peningkatan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama pada tingkat lokal, nasional dan internasional		X	X	X	X	X
14	Mengembangkan inklusivitas layanan sosial terhadap penyandang disabilitas rumah tangga miskin		X	X	X	X	X
15	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pendamping korban bencana Sosial		X	X	X	X	X
16	Penataan Organisasi Perangkat Daerah		X	X			
17	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan		X	X	X	X	X
18	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat		X	X	X	X	X
19	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik		X	X	X	X	X

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Melaksanakan koordinasi konsolidasi lahan		X	X	X	-	-
2	Penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan gedung kantor		X	X	-	-	-
3	Pembangunan gedung kantor perangkat daerah		X	X	X	X	X
4	Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IKK		X	X	-	-	-
5	Penyediaan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan		X	X	X	X	X
6	Pembukaan akses jalan di		X	X	X	X	X

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	daerah pinggiran dan terisolir						
7	Peningkatan akses jalan pada pusat pertumbuhan ekonomi		X	X	X	X	X
8	Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol		X	X	X	X	X
9	Memperkuat koordinasi antar unit kerja para pemangku kepentingan.		X	X	X	X	X
10	Penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan.		X	X	X	X	X
11	Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan air minum.		X	X	X	X	X
12	Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum.		X	X	X	X	X
13	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPAM.		X	X	X	X	X
14	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan.		X	X	X	X	X
15	Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasarana air minum.		X	X	X	X	X
16	Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan sanitasi.		X	X	X	X	X
17	Meningkatkan kapasitas penyelenggara sanitasi.		X	X	X	X	X
18	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPAM.		X	X	X	X	X
19	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan.		X	X	X	X	X
20	Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasarana sanitasi.		X	X	-	-	-
21	Menyusunan Perencanaan infrastruktur pengairan dengan protocol berkelanjutan		X	X	X	X	X
22	Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu.		X	X	X	X	X
23	Peningkatan dan pemulihan kondisi jaringan irigasi.		X	-	X	-	X

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
24	Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi.		X	X	X	X	X
25	Peningkatan efektifitas air irigasi.		X	X	X	X	X
26	Meningkatkan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.		X	X	X	X	X
27	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif		X	X	X	X	X
28	Menyediakan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.		X	X	X	X	X
29	Meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau, terpadu dan sesuai tata ruang dengan layanan prasaran sarana dan utilitas permukiman.		X	X	X	X	X
30	Melaksanakan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.		X	X	X	X	X
31	Penyusunan dokumen rinci tata ruang		X	X	X	X	X
32	Penerapan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang		X	X	X	X	X
33	Meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dan upaya penegakkan hukum lingkungan secara konsisten		X	X	X	X	X
34	Meningkatkan pemulihan media lingkungan tercemar		X	X	X	X	X
35	Memperketat implementasi kebijakan pengelolalan sumber daya alam dan lingkungan hidup.		X	X	X	X	X
36	Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan		X	X	X	X	X
37	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pengangkutan dan pengelohan sampah.		X	X	X	X	X
38	Mengurangi sampah semaksimal mungkin dari sumbernya.		X	X	X	X	X
39	Meningkatkan koordinasi pengelolaan sampah lintas sektoral		X	X	X	X	X
40	Menyediakan data dan		X	X	X	X	X

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	informasi yang valid terkait penyediaan RTH.						
41	Mendorong percepatan penyelesaian dokumen penataan ruang		X	X	X	X	X
42	Melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap terutama di kota Sarilamak		X	X	X	X	X
43	Mengoptimalkan pelayanan informasi rawan bencana.		X	X	X	X	X
44	Mengoptimalkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.		X	X	X	X	X
45	Menguatkan kapasitas lembaga dan mengoptimalkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha.		X	X	X	X	X
46	Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		X	X	X	X	X
47	Meningkatkan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana.		X	X	X	X	X
48	Meningkatkan sistem management resiko dan mitigasi bencan non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman.		X	X	-	-	-
49	Menyediakan sarana dari akses untuk kemudahan penanggulangan bencana.		X	X	X	X	X
50	Meningkatkan system mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana.		X	X	X	X	X
51	Meningkatkan upaya mitigasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana.		X	X	X	X	X
52	Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah daerah		X	X	X	X	X
53	Membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan antar kabupaten dan antar propinsi, serta jalan-jalan untuk membuka keterisoliran dan membangun pusat-pusat		X	X	X	X	X

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	pertumbuhan ekonomi baru (jalan ke destinasi wisata, jalan ke sentra-sentra produksi unggulan dan lain sebagainya)						
54	Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana		X	X	X	X	X
55	Peningkatan jaringan dan kualitas air minum		X	X	X	X	X
56	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X
57	Mengembangkan pemetaan rumah tangga yang belum terjangkau akses sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X
58	Meningkatkan jangkauan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X
59	Meningkatkan pengelolaan terhadap sumber air baku yang ada		X	X	X	X	X
60	Mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber air baku		X	X	X	X	X
61	Mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal		X	X	X	X	X
62	Meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		X	X	X	X	X
63	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam siaga bencana		X	X	X	X	X
64	Mengembangkan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan		X	X	X	X	X
65	Mengembangkan kebijakan pengurangan resiko bencana		X	X	X	X	X
66	Meningkatkan sarana dan prasana tanggap darurat bencana bagi korban bencana		X	X	X	X	X
67	Optimalisasi infrastruktur siaga bencana		X	X	X	X	X
68	Mengembangkan pola pencegahan bencana yang sistematis dan terencana		X	X	X	X	X
69	Meningkatkan kajian kelayakan infrastruktur publik		X	X	X	X	X
70	Meningkatkan perencanaan		X	X	X	X	X

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
No	Arah Kebijakan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	bebasis daya dukung dan daya tampung (kerawanan bencana)						

6.3 Program Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien berupa program pembangunan daerah yang terstruktur. Sebagaimana yang diketahui, program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi program prioritas yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
2. Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
3. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
4. Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.
5. Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dirumuskan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif (Juta rupiah)

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				Misi 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan																
1	1			Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia																
1	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat																
1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar	80	85	36.124,73	90	37.208,47	95	38.324,72	95	39.474,46	100	40.658,70	100	40.658,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	75	75	446,08	83	459,46	91	473,25	98	487,44	100	502,07	100	502,07	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2		Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat																
1	1	2	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	10	20	37.478,28	30	38.602,63	40	39.760,71	50	39.760,71	60	40.953,53	60	40.953,53	DINAS KESEHATAN	
1	1	2	2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	60	65	743,82	67	766,13	69	789,12	71	812,79	73	832,18	73	832,18	DINAS KESEHATAN	
1	2			Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah																
1	2	1		Sasaran 1 : Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya																
1	2	1	1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan	56	62	600	67	618	73	636,54	79	655,54	86	675,31	86	675,31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	2	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksanananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	100	9.567,27	100	9.854,29	100	10.149,92	100	10.454,41	100	10.768,05	100	10.768,05	SETDA (BAGIAN KESRA)	
1	2	1	3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat	50	55	700	60	721	65	742,63	70	764,91	75	787,86	75	787,86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI	
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional																

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2	1				Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat															
2	1	1			Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota															
2	1	1	1	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10	15	4.100	20	4.223	25	4.349,69	30	4.480,18	35	4.614,59	35	4.614,59	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	1	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	10	12	2.300	15	2.369	17	2.440,07	20	2.513,27	25	2.588,67	25	2.588,67	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	1	3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	29,73	33,78	1.200	37,83	1.236	43,24	1.273,08	45,95	1.311,27	50,00	1.350,61	50	1.350,61	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	2			Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan															
2	1	2	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	48	50	15.000	55	15.450	60	15.913,5	62	16.390,91	65	16.882,63	65	16.882,63	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
					Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	2	4	2.700	6	2.781	8	2.864,43	10	2.950,36	12	3.038,87	12	3.038,87	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2	1	2	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	68	70	6.433,22	72	6.626,22	75	6.825,00	78	7.029,75	80	7.240,65	80	7.240,65	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
					Persentase Penyediaan Prasarana perternakan Yang Berkualitas	2	4	350	6	360,5	8	371,32	10	382,45	12	393,93	12	393,93	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2	1	2	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	80	80	563,33	80	580,23	82	597,64	85	615,57	90	634,03	90	634,03	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
2	1	2	4	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kelas	3	4	1.326,85	6	1.366,66	8%	1.407,66	10%	1.449,88	12%	1.493,38	12%	1.493,38	DINAS TANAMAN	

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
					kelompok tani													PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
					Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan	2	4	350	6	360,50	8	371,32	10	382,45	12	393,93	12	393,93	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2	1	2	5	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	2	4	650	6	669,50	8	689,59	10	710,27	12	731,58	12	731,58	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
2	1	2	6	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5% / tahun	5% / tahun	1.137,83	5% / tahun	1.171,96	5% / tahun	1.207,12	5% / tahun	1.243,34	5% / tahun	1.280,64	25%	1.280,64	DINAS PERIKANAN	
2	1	2	7	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya	6% / tahun	6% / tahun	12.000	6% / tahun	12.360	6% / tahun	12.730,80	6% / tahun	13.112,72	6% / tahun	13.506,11	30%	13.506,11	DINAS PERIKANAN	
2	1	2	8	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tingkat Konsumsi makan lkan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	737,74	41 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5 % /tahu n	759,87	42 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun	782,67	43 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun	806,15	44 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun	830,33	44 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun	830,33	DINAS PERIKANAN	
2	1	3		Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																
2	1	3	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	3,65	5,50	5.400	7,42	5.562	10,02	5.728,86	13,32	5.900,73	16,68	6.077,75	16,68	6.077,75	DINAS PERINDUSTRIA N TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	1	3	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	26,61	36,18	118,74	52,14	122,30	68,09	125,97	84,05	129,75	100	133,64	100	133,64	DINAS PERINDUSTRIA N TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	1	3	3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5	15	1.329,96	20	1.369,86	25	1.410,95	30	1.453,28	35	1.496,88	35	1.496,88	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	IndikatorKinerja (Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Out come</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2	1	3	4	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5	15	759,98	20	782,78	25	806,26	30	830,43	35	855,36	35	855,36	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	4		Sasaran 4 : Meningkatnya pendapatan asli daerah															
2	1	4	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	6,5	8,53	1.948,40	8,53	2.006,85	9,67	2.067,06	10,35	2.129,07	11,04	2.192,94	11,04	2.192,94	BADAN KEUANGAN
3				Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah															
3	1			Tujuan : Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan															
3	1	1		Sasaran : Meningkatnya status nagari															
3	1	1	1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	100	100	3.000	100	3.090	100	3.182,7	100	3.278,18	100	3.376,53	100	3.376,53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
4				Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya															
4	1			Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik															
4	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															
				Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik															
4	1	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	70	73	2.288,49	75	2.357,14	78	3.427,86	80	3.427,86	85	2.575,72	85	2.575,72	BAPELITBANG
4	1	1	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	90	91	1.208,37	92	1.244,62	93	1.281,96	94	1.320,42	95	1.360,03	95	1.360,03	BADAN KEUANGAN
4	1	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB	81	82	1.000	83	1.030	84	1.060,90	85	1.092,73	86	1.125,51	86	1.125,51	INSPEKTORAT
4	1	1	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	55	65	900	75	927	85	954,81	95	983,45	105	1.012,96	105	1.012,96	BAPELITBANG
4	1	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	100		100		100		100		100		100		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik															
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur															
5	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis															
				Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Jalan															

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	30	300	25	309	25	318,27	20	327,82	-	-	100	327,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	68	71	30.820	75	31.744	77	32.696,94	80	33.677,85	85	34.688,18	85	34.688,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	55,81	57,05	154.690	58,65	159.330,7	59,95	164.110,6	61,43	169.033,9	62,78	174.104,9	62,78	174.104,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,53	500	0,52	515	0,51	530,45	0,50	546,36	0,50	562,75	0,50	562,75	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2		Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat																
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	81,62	83,12	9.000	84,72	9.270	86,42	9.548,1	88,22	9.834,54	90,12	10.129,58	90,12	10.129,58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	1	2	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	78,45	80,05	10.750	81,65	11.072,5	83,35	11.404,68	85,05	11.746,82	86,85	12.099,22	86,85	12.099,22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	1	3		Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada																
5	1	3	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	77,52	78,32	52.950	79,12	54.538,5	79,92	56.174,66	80,72	57.859,89	81,52	59.595,69	81,52	59.595,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	1	4		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat																
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	62,5	65,00	7.600,81	67,5	7.828,83	70,00	8.063,70	72,5	8.305,61	75	8.554,78	75	8.554,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
5	1	4	2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	25,60	31,20	3.207,90	36,80	3.304,14	42,40	3.403,26	48	3.505,36	53,60	3.610,52	53,60	3.610,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
5	2	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah PenanggungJawab		
							2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
5	2	1	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	55,89	8.604,06	55,99	8.862,18	56,09	8.128,05	56,19	9.401,89	56,29	9.683,95	56,29	9.683,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	18	21	52,32	24	500	27	515	30	530,45	35	546,36	35	546,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	3	Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah.	22	26	3.800	27	3.914	28	4.031,42	30	4.152,36	30	4.276,93	30	4.276,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
					Persentase penanganan sampah		20		35		50		60,00		70		70		
5	2	1	4	Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	Persentase kawasan kehati yang terkelola	4,87	5,07	2.286,78	5,09	2.355,38	5,11	2.426,04	5,13	2.498,83	5,15	2.573,79	5,15	2.573,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	2		Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah															
5	2	2	1	Program Penyelenggaraaan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	1.190	75	1.225,7	80	1.262,47	85	1.300,35	90	1.339,36	90	1.339,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	2	3		Sasaran 3 : Menurunnya resiko bencana daerah															
5	2	3	1	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	85-79	79-73	10.690,28	73-67	11.010,99	67-61	11.341,32	61-55	11.681,56	55-49	12.032,00	55-49	12.032,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH

6.4 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

6.4.1 Kawasan Agrowisata

Sektor pariwisata memiliki peluang yang cukup menjanjikan sebagai faktor pendorong pertumbuhan pembangunan lainnya seperti sektor pertanian, perkebunan dan perindustrian. Pada saat ini sektor yang belum digarap secara maksimal adalah dengan menggabungkan unsur hasil pertanian sebagai potensi sektor pertanian dengan unsur keindahan alam pertanian sebagai potensi sektor pariwisata atau yang lebih dikenal dengan istilah Agrowisata. Perpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat perdesaan dan potensi pertanian di suatu kawasan apabila dikelola secara baik maka dapat menjadi suatu daya tarik wisata. Ada 2 kawasan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki komoditi unggulan sebagai penghasil jeruk yaitu kawasan Gunung Omeh seluas 1.012,98 Ha dan kawasan Gunung Sago seluas 98,95 Ha yang layak dikembangkan sebagai kawasan agrowisata. Aktivitas penduduk dalam pertanian seperti memetik jeruk dan mengelola perkebunan serta nilai-nilai budaya dan adat yang ditawarkan akan menjadi pengalaman rekreasi bagi wisatawan. Dengan melibatkan peran serta dari masyarakat perdesaan dan pelaku pariwisata dalam perencanaan pengembangan suatu kawasan maka diharapkan konsep kawasan agrowisata dapat memberikan manfaat bagi petani, masyarakat dan para pelaku pariwisata.

6.4.2 Kawasan Agropolitan

Kawasan yang juga layak untuk dikembangkan adalah kawasan agropolitan dimana kabupaten Lima Puluh Kota yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dapat dikembangkan dengan suatu sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, dan menjadi penarik kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Konsep dari kawasan agropolitan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan suatu wilayah melalui optimalisasi potensi sumber daya yang ada seperti tumbuhan dan hewan dengan melibatkan unsur pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Kabupaten Lima puluh Kota memiliki kawasan pertanian yang merupakan penghasil komoditas pertanian dengan komoditi utama adalah padi yang berada di kawasan Situjuh yaitu di Kec. Situjuh Limo nagari, Kec. Akabiluru dan Kec. Guguak dan kawasan Luhak seluas 4.993,44 Ha serta kawasan Luhak di Kec. Harau, Kec. Lareh Sago Halaban dan Kec. Luhak seluas 7.533,23 Ha. Untuk data panen, produksi dan provitas padi menurut kecamatan di Kab. Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.12.

Sedangkan kawasan agropolitan peternakan yang akan dikembangkan di wilayah Kab Lima Puluh Kota adalah kawasan yang berada di Kec. Mungka yang merupakan penghasil ternak ayam terbesar tidak hanya di Kab. Lima Puluh Kota tapi juga di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah produksi komoditi ayam buras sebanyak 69.077 kg.

Agropolitan selayaknya menjadi sarana dalam pembangunan suatu kawasan sehingga pengembangan kawasan andalan dan pengelolaan agropolitan dapat menampung dan mempromosikan hasil komoditas pertanian di kawasan tersebut.

6.4.3 Kawasan minapolitan

Kawasan minapolitan adalah merupakan konsep dari pengembangan kawasan agropolitan yang dibentuk karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya potensi perikanan, lahan dan dukungan dari masyarakat.

Kawasan yang memiliki potensi perikanan dengan luas rata-rata lahan potensial yang bisa dikembangkan yaitu sebesar 10-15 Ha adalah Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak, Nagari Solok Bio-bio Kec. Harau, Nagari Bukit Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban dan Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka. Jenis usaha budidaya perikanan yang dikembangkan adalah pembenihan dan pembesaran ikan gurame, ikan nila dan ikan mas

6.4.4 Kawasan agroindustri

Kawasan agroindustri adalah suatu kegiatan yang mengelola hasil pertanian (komoditi unggulan) yang menghasilkan suatu produk/hasil yang memberikan nilai tambah bagi produk pertanian tersebut. Berdasarkan data potensi kawasan pertanian, dimana untuk komoditi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Jeruk di Kawasan Gunung Omeh dan Gunung Sago, Untuk meningkatkan kesejahteraan petani baik dalam bentuk pendapatan dan memperluas lapangan kerja maka direncanakan di dua (2) kawasan tersebut menjadi kawasan agroindustri. Keberadaan sektor agroindustri diharapkan menjadikan, petani tidak hanya mampu menjual bahan baku berupa jeruk tetapi menjadikan jeruk tersebut menjadi produk olahan yang dapat diterima konsumen. Jadi kawasan agroindustri dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta dapat memacu tumbuhnya industri lain yang memerlukan bahan baku dari sektor pertanian. Potensi tersebut dapat ditingkatkan apabila terjadi permintaan kegiatan yang membutuhkan bahan baku terutama hasil pertanian

6.5 Sinkronisasi Agenda Prioritas Daerah Dengan Agenda Prioritas Nasional

Agenda Prioritas daerah adalah program utama pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

dijabarkan ke dalam lima agenda prioritas pembangunan, yaitu :

Agenda Prioritas 1 : Pengembangan Masyarakat Madani

Nilai-nilai serta norma-norma adat mulai memudar dalam memberikan pedoman bagi generasi muda untuk merajut kehidupan sosial dan masa depannya. Kondisi ini diperburuk dengan turunnya fungsi Limbago Adat sebagai pilar terdepan dalam menjaga dan menyelesaikan masalah masalah sosial. Sehingga banyak masalah masalah langsung masuk ke ranah hukum pidana tanpa adanya upaya-upaya awal yang bisa menyelesaikan masalah tersebut di tingkat masyarakat.

Penurunan fungsi Limbago Adat inilah menjadi titik tolak yang harus kembali dikuatkan. Jika limbago adat berjalan sesuai dengan fungsinya maka diharapkan degradasi moral yang kini melanda generasi muda kita dapat di tekan dan dengan sendirinya kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak pun akan menurun.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. SDM yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Revolusi mental, pembangunan kebudayaan dan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Agenda Prioritas 2 : Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak

Berbicara tentang pentingnya membangun pusat pertumbuhan baru yang berada di Nagari Sarilamak, maka kita perlu berbicara tentang pentingnya menyelesaikan produk hukum yang akan memayungi pengaturan tata ruang tadi sebagai titik awal dari pembangunan IKK Sarilamak. Disamping itu untuk tahapan eksekusi kita perlu menyelesaikan masalah konsolidasi tanah perkotaan yang berada di Nagari Sarilamak tadi. Jika kedua hal ini bisa diselesaikan (aturan kawasan dan konsolidasi tanah perkotaan) maka dalam waktu yang tidak terlalu lama IKK Sarilamak akan bisa dilihat secara nyata.

Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Agenda Prioritas 3 : Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat

Untuk sektor pariwisata, pengembangan di arahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata antara lain melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui banding dan promosi pemasaran objek wisata.

Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Agenda Prioritas 4 : Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju agribisnis

Untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih di arahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi.

Salah satu untuk pengembangan pertanian adalah membuka lahan terlantar. Membuka lahan terlantar untuk dijadikan lahan produktif seperti di tanami jagung dan hortikultura. Hal ini sejalan dengan menjaga suplai pakan ayam untuk industri/perternakan ayam, dan bisa menggerakkan ekonomi di Nagari-nagari, dan membuka lapangan kerja baru.

Hal ini memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Agenda Prioritas 5 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Jalan merupakan faktor yang sangat mendasar dalam pengembangan pembangunan suatu daerah. Jalan menjadi urat nadi utama dalam mendukung mobilitas orang dan barang. Jalan juga menjadi faktor penentu tinggi rendahnya tingkat harga yang harus di bayar oleh konsumen dan tingkat biaya produksi yang di dikeluarkan produsen. Sehingga pemerintah daerah berkewajiban menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan.

Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

6.6 Penyelarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

Untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara provinsi dan daerah, maka dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Untuk itu dalam penyusunan agenda prioritas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 5 (lima) prioritas, yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Prioritas pada Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat selaras dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pengembangan Masyarakat Madani. Kemudian untuk prioritas pada Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, selaras dengan Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak. Selanjutnya prioritas Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis selaras dengan agenda prioritas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agribisnis.

Prioritas Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur selaras dengan agenda prioritas Lima Puluh Kota yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastruktur. Prioritas Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi selaras dengan Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian prioritas Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana selaras dengan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Sedangkan prioritas terakhir Provinsi Sumbar Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal selaras dengan prioritas Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Keselarasan berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan agenda prioritas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 6.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan
Agenda Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat (Rankhir RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026)	Agenda Prioritas Daerah Kab. Lima Puluh Kota (Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026)
1.	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan	Pengembangan Masyarakat Madani
2.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Pengembangan Masyarakat Madani
3.	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat	Pengembangan Masyarakat Madani
4.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak
5.	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agribisnis
6.	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
7.	Pengembangan kemaritiman dan kelautan	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
8.	Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
9.	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
10.	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat

6.7 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap IV (2005-2025)

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis".

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 6 (enam) misi RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan **tata kehidupan masyarakat yang berbudaya** berdasarkan filsafah: *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*;
2. Mewujudkan **tata pemerintahan daerah yang baik** (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan **sumberdaya manusia berkualitas dan profesional** melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.
4. Mewujudkan pengembangan sentra **Agribisnis Terpadu** untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi **tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan** yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global;
5. Mewujudkan **prasarana dan sarana** pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan **sumberdaya alam berkelanjutan**.

Untuk memudahkan penyusunan target perencanaan, diperlukan beberapa indikator kinerja pembangunan secara umum. Dalam hal ini terdapat 5 indikator kinerja utama pencapaian visi dan misi RPJP Lima Puluh Kota sebagai berikut:

- (a) Indek Pembangunan Manusia (IPM) minimum 78,5;
- (b) Pendapatan perkapita sekitar US 5.445 dengan Indek Gini Ratio paling tinggi 0,25;
- (c) Tingkat pengangguran 5,0 %;
- (d) Persentase penduduk miskin 7,5 %;
- (e) Tingkat pembayaran zakat 50% dari jumlah wajib zakat.

Tabel 6.5

Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025	RPJM Ke-4 (2021-2025)
A	Pembangunan Budaya	
	1. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Dilandasi ABS-SBK	1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang beradat dan berbudaya.
	2. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia	2. Terwujudnya masyarakat berbudi luhur dan berakhlak mulia.
		3. Terwujudnya masrakat yang bermoral dan mengikuti norma adat dan budaya.
	4. Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah secara Profesional	4. Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional
	5. Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan terjaga	5. Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multikultur.
B	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	
	1. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Demokratis	1. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis
	2. Terbangunnya Sinergitas antara Pelaku Pembangunan Daerah	2. Terwujudnya sinergitas antara pelaku pembangunan daerah
	3. Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Partisipatif dan Terpadu	3. Terwujudnya tata pemerintahan yang beretika, partisipatif dan terpadu
	4. Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Profesional	4. Terciptanya aparatur pemerintahan yang Bersih dan Profesional serta memiliki kompetensi
	5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.
C	Pembangunan Sosial dan Sumber Daya	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025	RPJM Ke-4 (2021-2025)
	Manusia	
	1. Terwujudnya Pemerataan Kualitas Pendidikan	1. Telah terlaksananya pemerataan kualitas pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan
	2. Terwujudnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional	2. Pendidikan keterampilan yang ada sudah terakreditasi secara nasional dengan baik
		3. Telah mampu menghasilkan tenaga yang siap bekerja dimana saja
	3. Terlaksananya dan Berkembangnya Mutu Pendidikan dengan Sistem Berasrama	4. Telah berjalannya dengan baik sekolah yang berstandar internasional
	4. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Lebih Merata	5. Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat
		6. Terdapatnya tenaga medis dan paramedis yang profesional
		7. Berkembangnya RS Khusus Orthopedi sebagai rujukan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.
	5. Terwujudnya Penerapan IPTEKS Tepat Guna dan Terpadu	8. Terwujudnya penerapan IPTEK yang tinggi dan tepat guna
D	Pembangunan Ekonomi	
	1. Terwujudnya Sentra Produksi Padi, Jagung dan Tanaman Pangan Lainnya	1. Terwujudnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan modern guna peningkatan pendapatan petani
	2. Terlaksananya Pengembangan Usaha Agribisnis, Perkebunan dan Peternakan Secara Efisien dan Berdaya Saing Tinggi	2. Terwujudnya usaha agribisnis maju dalam bidang perkebunan dan peternakan terpadu dan mempunyai daya saing tinggi.
	3. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya yang Menarik	3. Terwujudnya Kabupaten Limapuluh Kota sebagai salah satu daerah tujuan wisata dalam Propinsi Sumatera Barat.
	4. Terwujudnya Praktek Ekonomi yang Beretika dan Berkeadilan	4. Terwujudnya kegiatan ekonomi yang seimbang antara syariah dan Konvensional yang beretika dan berkeadilan.
	5. Berkembangnya Usaha Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Jasa	5. Terwujudnya pengembangan usaha perdagangan dan jasa secara efisien dan berdaya saing tinggi.
		6. Terbangunnya pasar satelit yang representatif di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
E	Pembangunan Prasarana dan Sarana	
	1. Terbangunnya Jaringan Jalan dan Jembatan ke Seluruh Wilayah	1. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas dan melayani seluruh pelosok wilayah
		2. Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan yang cukup pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.
		3. Tersedianya fasilitas pelengkap jalan.
	2. Tersedianya Sarana Transpor tasi dan Telekomunikasi yang Cukup dan Tersebar Luas	4. Tersedianya fasilitas telekomunikasi yang cukup dan berkualitas untuk seluruh pelosok wilayah.
		5. Lanjutan pembangunan sarana dan fasilitas transportasi ke seluruh wilayah.
	3. Terbangunnya sistem Irigasi yang cukup dan terpadu	6. Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi secara bertahap
		7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi dan drainase
	4. Tersedianya perumahan dan lingkungan yang layak huni	8. Lanjutan pembangunan Perumnas dan Rumah Dinas
		9. Peningkatan penerapan ketentuan perizinan bagi seluruh bangunan yang ada

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025	RPJM Ke-4 (2021-2025)
	5. Tersedianya fasilitas Tenaga Listrik dan Air Minum Yang Cukup	10. Tersedianya tenaga listrik dan air minum yang cukup dan tersebar keseluruh pelosok wilayah
	6. Terwujudnya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak	11. Pembangunan Lanjutan dan penyempurnaan kawasan pemerintahan dengan target fungsi Kota Sarilamak telah berjalan sesuai target yang direncanakan.
F	Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
	1. Terwujudnya Tata Ruang yang Serasi, Efektif dan Efisien	1. Terwujudnya pembangunan yang serasi, efektif dan efisien serta berwawasan Tata-ruang.
	2. Terpeliharanya Kawasan Lindung dan konservasi Alam	2. Terpeliharanya Kawasan hutan lindung dan konservasi Alam
	3. Terbudayakannya Perilaku Masyarakat Sadar Lingkungan	3. Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan.
	4. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	4. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Dari tabel diatas arah dan pentahapan pembangunan Kabupaten Lima Puluh kota akan dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan kewenangan daerah dan perangkat daerah.

6.8 Penelaahan Terhadap RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lepas dari perhatian pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota tetangga antara lain Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini guna adanya keselarasan pembangunan dengan kabupaten/kota tetangga. Beberapa kabupaten yang periode RPJMD nya sama dengan Kabupaten Lima Puluh Kota juga sedang menyusun RPJMD yang baru, sehingga di rancangan teknokratik ini yang ditampilkan adalah visi misi dari RPJMD yang sedang berlaku saat ini. Visi dan misi kabupaten/kota tetangga tersebut antara lain :

1. RPJMD Kota Payakumbuh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan Visi “Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”. Visi ini dicapai dengan beberapa misi yaitu: 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif; 2) Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama 3) Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan; 4) Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih; 5) Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. RPJMD Kabupaten Agam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2021-2026 dengan visi “Mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera, menuju Agam mandiri, berprestasi yang Madani”, dengan misi yaitu: 1.) Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, auntabel dan melayani, 2.) Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata, 3.) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana, 4.) Membangun masyarakat yang mandiri, berdayaa saing, berkualitas dan berkarakter, 5.) Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

3. RPJMD Kabupaten Tanah Datar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara’,

Syara' Basandi Kitabullah", dengan misi yaitu: 1.) Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya, 2.) Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM, 3.) Meningkatkan sumbardaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4.) Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam, 5.) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, 6.) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. RPJMD Kabupaten Sijunjung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan Visi "Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani", dengan Misi yaitu : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsive berbasis reformasi birokrasi, Misi 2) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata, Misi 3) Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), Misi 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

5. RPJMD Kabupaten Pasaman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2021-2026 dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermatahat", dengan 6 (enam) misi yaitu 1.) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan peran Lembaga adat, 2.) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, 3.) Mewujudkan kualitas dan kuantitas layanan dasar, 4.) Meningkatkan kapasitas infrastruktur, 5.) Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal, 6.) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

6. RPJMD Kabupaten Kampar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dengan Visi Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020, dengan Misi 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global; 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berwawasan kedepan; 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional; 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan; 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama.

7. RPJMD Kabupaten Rokan Hulu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu dengan visi "Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya",

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan Visi Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya, dengan Misi 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat; 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan; 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan; 5) Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan sejalan dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan tujuh kabupaten/kota tetanggayaitu pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

6.9. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINTAS PEMERINTAH DAERAH

Kerjasama Antar Daerah merupakan hal yang krusial dilakukan karena setiap kabupaten/kota memiliki keterbatasan dalam aspek yang berbeda satu sama lain. Karakteristik *smart city* yang berdaya tahan (*resilient*), efisien, berkelanjutan (*sustainable*), ramah lingkungan, dan layak huni belum dapat dipenuhi jika hanya mengandalkan sumber daya lokal yang ada di suatu daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kekayaan alam, wilayah yang luas dan potensi untuk dikembangkan yang belum terkelola dengan baik. Pengembangan dan pengelolaan potensi tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri tapi membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah yang berada disekitarnya. Ada beberapa daerah yang berpeluang untuk melakukan kerjasama tersebut yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar atau yang lebih dikenal dengan BUKAPALIPATAR. BUKAPALIPATAR bersepakat melakukan Kerjasama yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kesepakatan Kerjasama ini tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Walikota BUKAPALIPATAR pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor 120-15.1/GSB.2017, Nomor 10 TAHUN 2017, Nomor 139/21/BLK/VII/2017, Nomor 2/SPJ/BTD/2017, Nomor180/12/HUK-E/2017, Nomor5/MOU/2017, Nomor180/3/HUKUM&HAM/PP/2017.

Adapun tujuan diadakan kesepakatan Bersama ini adalah untuk Menyusun konsep perencanaan, pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR. Sedangkan objek kesepakatan ini adalah rencana pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR. Sedangkan ruang lingkup kesepakatan Bersama ini adalah konsep perencanaan dalam aspek ekonomis, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Beberapa potensi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang layak untuk diajukan dan ditindaklanjuti dalam suatu kerjasama antar daerah yaitu : potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Perlu adanya kerjasama dalam paket perjalanan wisata dan pertukaran informasi pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Potensi industri berupa kain songket Halaban yang memerlukan ruang untuk mempromosikan keunggulannya berupa penyediaan rumah pajang di kawasan pariwisata yang padat wisatawan. Potensi lainnya yang tak kalah penting adalah potensi peternakan sapi potong, produksi ayam pedaging dan petelur. Sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi perikanan budidaya darat yaitu dalam hal pembenihan dan pembesaran jenis ikan gurame, ikan nila dan ikan mas akan membutuhkan adanya kerjasama budidaya dan penerapan teknologi untuk dikembangkan.

Isu lainnya terkait infrastruktur jalan yang membutuhkan adanya kerjasama adalah kerjasama pembangunan pada ruas jalan penghubung antar daerah dikawasan untuk efisiensi jarak tempuh dan waktu serta kelancaran akses transportasi. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan Bukapalipatar perlu dilakukan Kerjasama antar kabupaten/kota dalam kawasan BUKAPALIPATAR, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, optimalisasi sinkronisasi kebijakan dan pembangunan daerah serta peningkatan daya daya saing daerah.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tercermin pada tabel 7.1, tabel 7.2 dan tabel 7.3 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2026 (dalam Rp. Juta)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA	1.354.714	1.374.980	1.437.588	1.482.987	1.530.425	1.579.791
1	Belanja Operasi	1.012.648	1.011.550	1.041.897	1.074.497	1.107.681	1.142.809
	a. Belanja Pegawai	692.140	706.550	727.747	752.802	778.259	805.473
	b. Belanja Barang dan Jasa	272.806	245.000	252.350	258.659	265.125	271.753
	c. Belanja Bunga						
	d. Belanja Hibah	38.935	50.000	51.500	52.530	53.581	54.652
	e. Belanja Bantuan Sosial	8.767	10.000	10.300	10.506	10.716	10.930
2	Belanja Modal	172.217	194.120	220.843	227.728	235.457	243.880
3	Belanja Tidak Terduga	3.500	3.500	3.500	3500	4000	4000
4	Belanja Transfer	166.349	165.810	171.348	177.262	183.287	189.103
	a. Belanja Bagi Hasil	4.100	4.101	4.788	5.705	6.584	7.098
	b. Belanja Bantuan Keuangan	161.709	161.709	166.560	171.557	176.703	182.005
	PEMBIAYAAN	33.747	18.366	41.634	45.883	47.170	48.495
	Penerimaan pembiayaan	35.697	16.416	41.634	42.883	44.170	45.495
	Pengeluaran pembiayaan	1.950	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

Tabel 7.2
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Gaji dan Tunjangan	545.071,70	556.825,92	568.833,61	581.100,24	593.631,39	593.631,39
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.156,14	3.182,86	3.209,81	3.237,00	3.264,41	3.264,41
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	2.596,46	2.613,90	2.631,46	2.649,13	2.666,93	2.666,93
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.797,54	2.882,01	2.969,04	3.058,69	3.151,05	3.151,05
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	155.627,29	160.845,48	166.238,64	171.812,62	177.573,51	177.573,51
Belanja Premi Asuransi	12.539,30	13.018,22	13.515,43	14.031,63	14.567,55	14.567,55
Belanja BLUD	42.375,49	43.478,23	44.609,66	45.770,53	46.961,61	46.961,61
Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik	83.649,69	85.260,46	86.902,25	88.575,66	90.281,28	90.281,28
Jumlah	847.813,61	868.107,08	888.909,89	910.235,50	932.097,72	932.097,72

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

Tabel 7.3
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026 (Rp juta)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Kapasitas Riil keuangan Daerah	1.320.968,00	1.358.564,00	1.395.954,00	1.440.104,00	1.486.255,00	1.534.296,00
	Dikurangi:						
II	Rencana alokasi pengeluaran I						
2.a	Belanja wajib dan mengikat dan Earmark	847.813,61	868.107,08	888.909,89	910.235,50	932.097,72	932.097,72
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I (I-II)	473.154,39	490.456,92	507.044,11	529.868,50	554.157,28	602.198,28
	Dikurangi:						
III	Rencana alokasi pengeluaran II (Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintahan)						
3.a	Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintahan	421.951,39	426.956,92	441.744,11	462.281,50	485.860,28	532.616,28
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I dan II (I-II-III)	51.202,00	63.500,00	65.300,00	67.587,00	68.297,00	69.582,00
	Dikurangi:						
IV	Rencana alokasi pengeluaran III						
4.	Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintahan	51.202	63.500	65.300	67.587	68.297	69.582
4.a	Belanja Hibah	38.935	50.000	51.500	53.581	53.581	54.652
4.b	Belanja Bantuan Sosial	8.767	10.000	10.300	10.506	10.716	10.930
4.c	Belanja Tidak Terduga	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	Surplus Anggaran Riil Berimbang (I-II-IV)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

Kerangka pendanaan sebagaimana disajikan pada Tabel diatas dialokasikan untuk menerapkan kebijakan umum pembangunan dngan menganut prinsip *“money follow program”*. Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
2. Pemindahan objek objek vital pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh Ke IKK Sarilamak.
3. Penataan produk-produk hukum daerah yang memayungi percepatan pembangunan daerah.
4. Menjalin komunikasi yang intensif antar pemerintahan baik ke atas dan ke bawah untuk meningkatkan sumber sumber keuangan untuk pembangunan.

5. Melakukan penataan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga tidak membebani keuangan daerah.
6. Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.
7. Mendorong investasi dalam pengolahan pasca panen sehingga harga-harga komoditas inti daerah menjadi lebih bernilai.
8. Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan.
9. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan teknologi tepat guna khususnya di sektor pertanian dan peternakan.
10. Meningkatkan peran serta niniak mamak dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah sako pusako dan sangsako serta pemanfaatan tanah ulayat.
11. Mendorong limbago adat nagari untuk menyusun tambo adat masing masing.
12. Peningkatan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah.
13. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
14. Penarapan adat dan budaya pada kehidupan masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.
15. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan peningkatan pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.

7.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.4 dibawah ini :

TABEL 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
(dalam Jutaan Rupiah)

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
x	x	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	100	780.243,27	100	877.213,36	100	831.619,50	100	873.660,47	100	867.405,72	100	860.870,85	100	6.464.602,00	SELURUH PERANGKAT DAERAH
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																	
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan dasar	80	80	74.105,34	85	72.249,45	90	88.480,27	95	94.294,32	95	93.822,50	100	93.658,30	100	146.414,02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum	100	100	97,44	100	44,76	100	63,78	100	66,52	100	66,04	100	84,27	100	422,82	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	60	75	457,54	75	446,08	83	1.502,52	91	1.626,50	98	1.618,36	100	1.615,53	100	2.525,53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pngendalian perizinan pendidikan	100	100	146,16	100	67,15	100	93,03	100	94,67	100	91,99	100	115,16	100	608,15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	6	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase pengembangan Bahasa dan sastra	70	75	194,88	80	101,73	85	159,47	90	179,09	95	188,69	100	252,81	100	1.076,67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2		Urusan Pemerintahan																	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			Bidang Kesehatan																		
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	42631,61	20	74956,56	30	66399,67	40	51568,00	50	50587,32	60	48507,78	60	376.529,74	DINAS KESEHATAN. RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
				Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	7.084,69	66	16.203,70	67	21.765,01	68	19.481,76	69	26.215,30	70	20.626,52	70	32.245,00	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan	45	50	198,02	50	75,69	60	171,69	70	23,03	80	21,23	90	29,77	90	519,43	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang mempunyai izin	100	100	632,46	100	53,72	100	74,42	100	82,38	100	78,31	100	97,19	100	1.018,47	DINAS KESEHATAN	
				Persentase IRT-P yang mempunyai izin	65	67		68		70		75		78		80		80			
1	2	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	58	60	615,84	65	743,82	67	539,25	69	737,96	71	733,78	73	732,43	73	4,777	DINAS KESEHATAN	
				Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target	81,72	81,72	754,84	82	948,73	82	848,87	83	874,34	84	859,95	84	799,60	84	1.250	RSUD DR.ACHMAD DARWIS	
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan																		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			Umum Dan Penataan Ruang																	
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	74,63	77,52	35.532	78,32	52.950	79,12	54.538	79,92	56.174	80,72	57.859	81,52	59.595	81,52	59.595	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	79,40	81,62	7.000	83,12	9.000	84,72	9.270	86,42	9.548	88,22	9.834	90,12	10.129	90,12	10.129	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	50		-	55	1.927,63	60	5.501,60	65	3.888,87	70	4.127,61	75	5.505,65	75	20.951,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	76,45	78,45	9.333	80,05	10.750	81,65	11.072	83,35	11.404	85,05	11.746	86,85	12.099	86,85	12.099	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	40	42	6.368,52	44	3.479,27	46	5.262,40	48	5.833,30	50	6.273,96	52	8.595,54	52	35.813,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	0	0	-	10	1.159,76	20	1.855,13	30	2.123,53	40	2.259,57	50	3.061,81	50	10.459,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	65	68	3.145	71	30.820	75	31.744	77	32.696	80	33.677	85	34.688	85	34.688	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase Bangunan dan Lingkungan	50	50	-	55	1.098,72	60	1.610,61	65	1.770,46	70	1.835,01	75	2.376,41	75	8.691,22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
				Lingkungannya	yang telah ditata (%)															PENATAAN RUANG	
1	3	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	54,79	55,81	150	57,05	154,690	58,65	159,379	59,95	164,069	61,43	169.033	62,78	174.104	62,78	174.104	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	0	95	792,17	100	777,24	100	1.342,55	100	160,67	100	1.338,45	100	1.844,33	100	6.255,41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12		Program Penyelenggaraaan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	60	65	999	70	1.190	75	1.260	80	1.330	85	1.400	90	1.470	90	7.649	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	4			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman																	
1	4	2		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	0	0	467,70	29,30	352,81	30,60	506,94	31,90	536,80	33,20	494,87	34,50	648,30	34,50	3.007,43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1	4	3		Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	60	62,5	5.698,39	65,00	7.600,81	67,5	6.871,55	70,00	5.487,24	72,5	6.728,48	75	4.954,75	75	46.859,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1	4	4		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase areal kawasan kumuh	0,21	0,21	7.912,98	0,20	3.635,19	0,18	5.223,33	0,16	5.530,96	0,14	5.608,86	0,13	7.347,82	0,13	35.259,14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
1	4	5	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20	25,60	8.189,88	31,20	3.047,42	36,80	2.794,22	42,40	3.024,78	48	2.736,04	53,60	2.731,25	53,60	27.174,66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan sertifikasi Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	N.A	-	-	-	-	25	50,35	50	54,17	75	60,23	100	86,29	100	251,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																		
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	60	62	2.552,87	67	1.636,60	72	2.458,48	77	2.721,60	82	2.885,39	87	3.951,78	87	16.206,72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	3	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	119,2	85-79	1.510,32	79-73	10.690,28	73-67	3.886,32	67-61	4.274,96	61-55	4.702,45	55-49	5.172,70	55-49	30.237,05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	65	70	7.224,02	75	3.661,57	85	5.662,66	100	5.999,61	100	7.176,37	100	7.887,11	100	37.611,35	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
				Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	60	60		70		85		100		100		100		100		
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																	
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95	95	1.539,51	95	767,07	95	1.123,18	95	1.238,81	95	1.259,04	95	1.641,58	95	7.569,18	DINAS SOSIAL
1	6	3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25	25	73,08	25	30,52	25	39,87	25	38,38	25	35,38	25	42,14	25	259,37	DINAS SOSIAL
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85	85	2.461,27	85	1.526,40	85	1.816,33	85	1.987,42	85	2.024,18	85	2.609,00	85	12.424,60	DINAS SOSIAL
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	85	1.145,87	85	662,49	85	898,33	85	903,14	85	867,97	85	1.061,80	85	5.539,60	DINAS SOSIAL
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100	100	265,03	100	535,12	100	250,37	100	244,59	100	252,37	100	303,94	100	1.851,41	DINAS SOSIAL
1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95	95	152,98	95	69,18	95	95,68	95	97,22	95	94,35	95	117,98	95	627,38	DINAS SOSIAL
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
2	7		Urusan Pemerintahan																	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
				Bidang Tenaga Kerja																	
2	7	2		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	5	10	0	20	46,80	40	15,95	60	17,91	80	18,87	100	25,28	100	124,81	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	5	10	469,06	20	264,50	40	635,21	60	667,76	80	724,10	100	929,78	100	3.690,42	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	12,57	26,61	95,22	36,18	118,74	52,14	122,73	68,09	134,81	84,05	160,71	100	137,53	100	993,73	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5		Program Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Lima Puluh Kota	100	100	47,80	100	30,52	100	69,10	100	54,24	100	93,40	100	150,56	100	445,62	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	8			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
2	8	2		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan gender (IPG)	94,93	95,77	627,50	95,80	529,65	95,85	761,05	95,90	805,86	95,95	297,75	96	1.070,23	96	4.092,04	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
																				ANAK	
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100	100	111,08	100	192,98	100	276,94	100	293,20	100	297,66	100	389,89	100	1.561,75	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	0	30	0	40	0	50	67,13	60	72,23	70	80,98	80	117,07	80	337,40	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Informasi Layak Anak	100%	100%	68,21	100%	143,24	100%	205,71	100%	217,98	100 %	220,77	100%	289,33	100%	1.145,25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	45,80	Nindy a	292,99	Nindy a	420,99	Utama	445,68	Utam a	452,38	KLA	592,13	KLA	2.249,98	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan	100	100	176,36	100	163,18	100	234,95	100	248,69	100	251,90	100	330,34	100	1.405,41	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
				terpadu																PERLINDUNGAN ANAK
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																	
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Daerah	Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	16,45	1,3	662,33	3,8	1.584,94	1,3	469,89	1,3	459,64	1,3	468,46	1,3	614,78	26,75	4.260,04	DINAS PANGAN
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	50,11	59,13	960,33	68,98	374,28	78,01	631,64	92,47	640,83	95,18	706,47	100	1.012,57	100	4.326,12	DINAS PANGAN
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	21,52	16,46	198,30	12,66	92,95	8,86%	151,04	6,33	154,31	3,80	161,95	0	222,20	0	980,75	DINAS PANGAN
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	88	90	116,26	90	54,94	92	126,87	95	160,87	97	201,44	100	313,54	100	973,92	DINAS PANGAN
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
2	10	2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi	-	100	-	100	81,38	100	138,20	100	153,51	100	169,82	100	224,72	100	767,64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	103		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pesentase Fasilitas Pengadaan Tanah	0	0	-	100	406,93	100	531,56	100	511,69	100	471,72	100	561,80	100	2.483,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	104		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitas penyelesaian sengketa tanah garapan	100	100	144,94	100	101,73	100	148,84	100	163,74	100	169,82	100	219,11	100	948,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	105		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	NA	-	0	30	300	25	309	25	318,27	20	327,82	-	-	100	950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN Program Penataan bangunan gedungRUANG
2	106		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	0	0	-	20	423,21	20	552,82	20	532,16	20	490,60	20	584,27	100	2.583,06	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	107		Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitas penetapan Tanah Ulayat	0	0	-	20	150,56	20	196,68	20	189,33	20	174,54	20	207,86	100	918,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	108		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola	0	0	-	20	183,12	20	239,20	20	230,26	20	212,28	20	252,81	100	1.117,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	109		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi	0	30	103,28	40	146,50	50	201,99	60	204,68	70	202,84	80	263,48	80	1.122,77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	110	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima	0	20	70,21	20	155,47	20	213,71	20	205,73	0	-	20	185,39	100	830,51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
					Puluh Kota															RUANG	
2	1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																	
2	1	1	2	Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup	15	21	47,21	50	132,82	57	190,85	71	202,09	86	186,31	100	244,07	100	1.003,35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	1	3	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	55,79	8.189,88	55,89	3.047,42	55,89	2.794,22	56,09	3.024,78	56,19	2.736,04	56,29	2.731,25	56,29	27.174,66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	1	4	Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	Persentase kawasan kehati yang dikelola	4,87	4,87	509,97	5,07	2.286,78	5,09	2.096,78	5,11	2.269,79	5,13	2.053,12	5,15	2.049,53	5,15	14.607,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	1	5	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	12,00	15	31,40	18	52,32	21	47,97	24	51,93	27	46,97	30	46,90	30	354,48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	1	6	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan. izin	75	78,5	66,07	82	87,16	85,5	125,25	89	132,62	92,5	122,26	96	160,17	96	693,53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
				Pengelolaan Lingkunga Hidup (PPLH).	PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)																
2	1	7		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi	0	0	-	12	20,75	29	29,82	47	31,58	71	29,11	100	38,13	100	149,39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	8		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	7	17	72,52	33	149,43	50	214,71	67	227,35	83	209,60	100	274,58	100	1.148,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	9		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6,33	12,66	70,93	18,99	31,13	25,32	81,33	31,65	86,12	37,97	87,33	44,3	104,00	44,3	460,83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	10		Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti	100	100	18,56	100	20,75	100	29,82	100	31,58	100	29,11	100	38,13	100	167,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	1	11		Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah.	17,17	22	2.565,04	26	2.841,10	27	4.736,43	28	5.127,26	30	4.637,82	30	4.629,71	30	32.001,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
																				PERMUKIMAN
				Persentase penanganan sampah	11,66	20		35		50		60,00		70		70		70		
2	1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																	
2	1	2	2	Program pendaftaran penduduk	90	90	791,02	92	508,67	93	770,75	94	741,95	96	542,49	98	814,61	98	4.169,49	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	1	2	3	Program Pencatatan Sipil	90	90	430,90	91	193,29	92	271,10	93	274,78	95	262,28	96	349,44	96	1.781,78	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	2	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90	90	442,19	92	239,78	94	366,85	95	409,65	96	429,73	98	576,33	98	2.464,52	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	2	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	27,32	100	46,60	100	51,10	100	51,24	100	47,24	100	67,41	100	290,92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																	
2	1	3	2	Program penataan desa	2,5	2,5	69,18	2,5	59,41	5	159,47	7,5	153,51	10	141,51	12,5	179,78	12,5	762,86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
2	1	3	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	50	0,2	22,41	54,43	158,30	56,96	257,80	82,27	278,87	88,66	285,39	100	379,21	100	1.381,98	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
					dalam Kerjasama Antar Nagari															DESA/NAGARI	
2	13	4	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan	100	100	450	100	5.806,26	100	1.812,72	100	1.819,37	100	1.601,24	100	483,32	100	11.972,91	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI	
2	13	5	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyeenggaraan pemerintahan	50	50	450,00	55	3.000	60	3.090	65	3.182,7	70	3.278,18	75	3.376,53	75	3.376,53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI	
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				-		-		-		-		-		-				
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,41	1,27	18,51	1,25	82,61	1,2	119,07	1,1	125,88	0,95	102,36	0,95	167,42	0,95	615,85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,14	73,18	2.519,74	73,5	3.030,42	74,3	4.336,43	74,6	4.590,40	74,8	5.065,87	75,0	6.616,33	75,0	26.159,20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	1	4	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Total Fertility Rate (TFR)	2,48	2,37	718,12	2,24	336,94	2,22	440,13	2,2	466,16	2,18	472,67	2,16	619,11	2,16	3.053,12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																	
2	1	5	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,58	0,53	5.698,15	0,53	70.983,93	0,52	19.976,99	0,51	22.827,17	0,50	17.644,63	0,50	12198,08	0,50	179.195	DINAS PERHUBUNGAN
					Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	3,29	3,13		2,97		2,82		2,68		2,55		2,42		2,42		
2	1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																	
2	1	6	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	15	20	3.496,14	22	2.024,13	35	2.392,10	55	2.696,42	75	2.556,22	85	3.345,00	85	16.510,02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	6	3	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	75	83	3.464,83	85	2.023,32	87	2.392,09	89	2.696,42	90	2.556,08	92	3.345,00	92	16.477,74	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	7		Urusan Pemerintahan																	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah																	
2	17	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang telah diawasi	10	15	144,21	10	32,56	10	46,77	10	49,53	10	50,23	10	65,80	65	389,10	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase peningkatan KSP/USP yang sehat	5	0	0	10	48,83	10	70,17	10	74,19	10	75,01	10	98,31	50	366,51	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40	5	93,25	10	48,83	10	70,17	10	74,19	15	75,33	15	98,65	65	460,43	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan skala usahanya	5	20	109,32	15	36,62	10	52,62	15	55,72	20	56,51	20	73,99	100	384,79	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5	5	344,70	15	1329,96	20	1219,46	25	1320,08	30	1313,19	35	1310,70	35	8.900	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5	5	874,41	15	759,98	20	696,83	25	754,33	30	750,00	35	749,07	35	5.781,00	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
2	18	2	Program Pengembangan	Persentase peningkatan	5	5	572,10	10	191,26	15	277,74	10	294,10	10	298,23	10	390,70	60	2.024,13	DINAS PENANANMAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Penanaman Modal																MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	5	5	61,96	5	48,83	10	70,17	10	74,30	10	75,34	20	98,71	60	429,31	DINAS PENANANMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	Program pelayanan penanaman modal	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	5	10	123,27	20	75,28	20	108,17	20	114,54	20	116,15	10	152,17	100	689,58	DINAS PENANANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	10%	10%	361,99	20%	153,82	20%	221,02	20%	234,04	20%	237,33	10%	310,92	100%	1.519,12	DINAS PENANANMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	5	10	21.500	10	87,49	15	125,71	10	133,15	10	135,01	10	176,85	60	22.158,21	DINAS PENANANMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga																	
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda	100	100	1.196,34	100	599,56	100	939,80	100	1.085,64	100	1.201,01	100	1.688,31	100	6.710,66	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Persentase fasilitasi pengembangan Olahraga	100	100	4.254,42	100	2.132,18	100	3.342,19	100	3.860,77	100	4.271,07	100	6.103,92	100	23.964,55	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
				Keolahragaan	prestasi																
2	19	4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase fasilitasi pengembangan Pramuka	100	100	526,16	100	263,69	100	413,34	100	477,46	100	528,21	100	629,05	100	2.837,91	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																	
2	20	2		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	75%	78%	216,98	81%	181,09	83%	304,58	85%	320,99	87%	326,92	89%	429,97	89%	1.780,52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																	
2	21	2		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	20	25	187,54	29,86	135,73	35,83	193,49	41,88	203,65	47,48	204,25	49,93	266,86	49,93	1.191,53	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																	
2	22	2		Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan	50	56	1.225,35	62	1.194,66	67	794,84	73	860,43	79	856,12	86	854,63	86	1.336,02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	3		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	55	66	454,39	77	189,77	80	61.067,80	83	64,67	86	65,58	89	85,90	89	61.928,10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	4		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	40	45	82,82	50	34,59	60	69,71	70	73,81	80	74,85	90	98,06	90	433,82	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	40	45	124,92	50	52,17	60	133,25	70	141,10	80	143,08	90	187,44	90	781,95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	6		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman	40	50	24,36	60	10,17	70	14,62	80	15,48	90	15,6	90	15,6	90	64,63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23			Urusan Pemerintahan																	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
			Bidang Perpustakaan																	
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	1,44	7,49	411,05	7,49	371,66	7,49	752,25	7,49	800,45	7,49	888,08	7,49	1.154,65	46,40	4.378,15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan	NA	100	19,75	100	61,04	100	217,94	100	230,26	100	221,71	100	286,52	100	1.037,22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	27,87	39,34	269,71	53,28	231,50	67,21	330,79	78,69	352,05	90,16	336,34	100	417,86	100	1.938,25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Pesentase OPD/ Nagari dan Instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	NA	100	153,06	100	139,98	100	247,24	100	278,18	100	299,87	100	418,37	100	1.536,69	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Regulasi Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten	NA	NA	-	100	14,24	100	20,73	100	23,03	100	22,64	100	29,21	100	109,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			Urusan Pemerintahan Pilihan																	
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan																	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
3	25	3	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5%	5% / tahun	442,63	5% / tahun	1.137,83	5% / tahun	1.043,29	5% / tahun	1.129,38	5% / tahun	1.116,68	5% / tahun	1.121,76	25%	7.312,40	DINAS PERIKANAN
3	25	4	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya	5%	6% / tahun	3.457,22	6% / tahun	4.470,77	6% / tahun	4.099,31	6% / tahun	4.437,56	6% / tahun	4.415,35	6% / tahun	4.407,63	30%	28.731,84	DINAS PERIKANAN
3	25	5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan	5%	-		5% / tahun	55,86	5% / tahun	78,93	5% / tahun	82,05	5% / tahun	81,55	5% / tahun	104,59	25%	402,98	DINAS PERIKANAN
3	25	6	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tingkat Konsumsi makan lkan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	717,71	40 KG/ Kapita/ Tahun , dan 5 % /tahun	737,74	41 KG/ Kapita / Tahun , dan 5 % /tahun	680,40	42 KG/ Kapita / Tahun , dan 5% / tahun	732,26	43 KG/ Kapita a/ Tahun n, dan 5% / tahun	728,60	44 KG/ Kapita / Tahun , dan 5% / tahun	727,32	44 KG/ Kapita a/ Tahun , dan 5% / tahun	4.471,19	DINAS PERIKANAN
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	
3	26	2	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10	10	2,221,274	15	2,665,529	20	3,198,635	25	3,838,362	30	4,606,034	35	5,527,241	35	5,527,241	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	3	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	10	10	2,033,210	12	2,439,852	15	2,927,822	17	3,513,386	20	4,216,064	25	4,216,064	25	5,059,280	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak	Persentase pelaku wisata ekonomi kreatif sektor pariwisata yang produktif	58,84	62,23	1,089,388	68,28	559,98	75,06	1.053,04	82,81	1.236,08	91,77	1.511,75	100	2.380,71	100	7.830,96	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			Kekayaan Intelektual																	
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	29,73	29,73	1.061,47	33,78	1.241,86	37,83	1.242,20	43,24	1.466,95	45,95	1.592,30	50,00	1.734,02	50	2.710,74	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
3	27	2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	45	48%	842,18	50	15.056,89	55	21.634,86	60	22.909,02	62	23.231,60	65	30.434,41	65	114.108,95	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	99,74	2	1.024,09	4	364,61	6	499,66	8	553,14	10	586,43	12	803,16	12	3.831,10	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	65	68	5.276,15	70	6.433,22	72	5.488,37	75	5.088,64	78	3.706,27	80	3.305,23	80	30.657	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				Persentase Penyediaan Prasarana pertenakan Yang Berkualitas	100	2	154,45	4	94,71	6	83,15	8	94,10	10	97,88	12	102,15	12	782,52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan	100	2	266,90	4	1.481,95	6	1.322,40	8	1.496,59	10	1.556,78	12	1.624,70	12	10.172,83	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
				masyarakat Veteriner																
3	27	5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	80	80	27,19	80	563,33	80	437,90	82	430,94	85	402,49	90	358,22	90	2.829,00	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	0	0	-	100	121,06	100	159,15	100	154,28	100	143,31	100	174,89	100	752,68	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	99,76%	2%	58,57	4%	76,15	6%	116,41	8%	128,87	10%	136,63	12%	187,12	12%	703,76	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	Program penyuluhan pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani	3	3	158,47	4	1.326,85	6	1.156,90	8	1.309,29	10	1.361,95	12	1.421,37	12	8.854,67	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan	100	2	1.071,21	4	4.820,17	6	2.378,74	8	2.081,43	10	2.178,09	12	2.002,20	12	12.017,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	
3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin	4%	5%	55,34	10%	48,83	10%	70,17	10%	74,19	10%	75,01	10%	98,31	55%	421,85	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Persentase peningkatan pasar nagari	33%	11%	1.166,33	11%	488,32	11%	70,17	11%	742,98	11%	753,35	11%	986,52	66%	4.207,67	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			Perdagangan	yang di revitalisasi																KECIL DAN MENENGAH	
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	60	5	76,10	15	142,43	20	204,65	20	216,70	20	219,73	20	287,86	20	1.147,47	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten	10	10		20	162,77	40	233,89	60	247,66	80	250,96	100	328,99	100	1.224,27	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3	30	6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100	100	256,07	100	284,85	100	409,30	100	433,40	100	439,18	100	575,28	100	2.398,08	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3	30	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam Negeri	100	100	667,54	100	101,73	100	146,18	100	154,79	100	156,97	100	205,62	100	1.432,82	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																		
3	31	2	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	1,83	3,65	1.551,88	5,50	3.468,26	7,42	3.299,04	10,02	3.250,34	13,32	3.279,89	16,68	2.966,84	16,68	22.871,89	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3	31	3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan	100	100	31,75	100	22,38	100	34,55	100	35,82	100	33,02	100	50,56	100	208,08	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
					IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)														TRANSMIGRASI		
3	31	4		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	100	100	259,81	100	280,78	100	372,09	100	383,77	100	358,51	100	455,06	100	2.110,02	DINAS DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																	
3	32	4		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap Kemandirian	60	60	-	60	63,08	70	82,39	80	89,54	90	82,55	100	101,12	100	418,68	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4	1			Sekretariat Daerah																	
4	1	1		Program Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	95	100	28.137,06	100	13.562,23	100	20.145,43	100	22.232,05	100	14.200,86	100	21.426,50	100	119.704,14	SEKRETARIAT DAERAH
4		1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	100	8.252,96	100	8.217,27	100	7.003,19	100	7.053,18	100	6.537,79	100	6.086,57	100	9.515,00	SEKRETARIATD AERAH
4	1	3		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi kegiatan bidang	100	100	1.233,56	100	540,81	100	742,05	100	749,63	100	725,98	100	907,87	100	4.899,90	SEKRETARIAT DAERAH

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
					Perekonomian																
4	2			Sekretariat DPRD																	
4	2	1		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	19.164,03	100	10.943,62	100	15.558,64	100	17.236,90	100	19.974,32	100	27.550,13	100	110.427,64	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100	100	17.117,84	100	11.758,30	100	16.180,56	100	16.110,66	100	15.770,29	100	18.260,20	100	95.197,85	SEKRETARIAT DPRD
5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
5	1			Perencanaan																	
5	1	2		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	NA	70	1.265,71	73	2.288,49	75	2.357,14	78	3.427,86	80	3.427,86	85	2.575,72	85	2.575,72	BAPELITBANG
5	1	3		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan lingkup bidang koordinasi perencanaan	NA	70	2.018,91	73	1.973,62	75	2.639,17	78	2.830,18	80	2.900,65	85	3.804,51	85	16.167,04	BAPELITBANG
5	2			Keuangan																	
5	2	2		Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	168.672,28	WTP	70.900,58	WTP	95.391,95	WTP	94.582,40	WTP	89.810,62	WTP	110.168,49	WTP	629.526,33	BADAN KEUANGAN
5	2	3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	88	90	1.110,79	91	1.208,37	92	1.037,33	93	1.051,24	94	979,79	95	916,02	95	1.432,00	BADAN KEUANGAN
5	2	4		Program pengelolaan	Persentase PAD terhadap	6,40	6,5	1.325,15	8,53	1.948,40	8,53	1.672,40	9,67	1.695,69	10,35	1.579,64	11,04	1.476,38	11,04	2.308,00	BADAN KEUANGAN

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
				pendapatan daerah	pendapatan																
5	3			Kepegawaian																	
5	3	2		Program kepegawaian daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	1.53	1.65	1.1341,73	1.68	4.968,64	1.70	7.710,21	1.75	7.931,24	1.80	8.090,11	1.85	10.983,19	1.85	51.025,12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4			Pendidikan Dan Pelatihan																	
5	4	2		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	20	20		20		20		20		20		20		100		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4			Penelitian Dan Pengembangan																	
5	5	2		Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	45	55	291,34	65	900	75	927	85	954,81	95	983,45	105	1.012,96	105	1.012,96	BAPELITBANG
6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
6	1			Inspektorat Daerah																	
6	1	2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB	80	81	1.880,55	82	2.199,62	83	2.221,49	84	2.533,60	85	2.635,50	86	2.750,48	86	4.299,76	INSPEKTORAT
6	1	3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	594,06	Level 3	332,20	Level 3	499,03	Level 3	552,44	Level 3	585,67	Level 4	802,14	Level 4	3.365,54	INSPEKTORAT
7				Unsur Kewilayahan																	
7	1			Kecamatan																	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	63,12	72	36,28	74	102,06	76	98,25	78	90,57	80	107,87	80	498,15	KECAMATAN LUAK	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	10,54	72	11,32	74	17,01	76	17,91	78	17,45	80	20,79	80	95,02	KECAMATAN LUAK	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	14,50	72	14,78	74	18,61	76	22,52	78	23,58	80	28,09	80	122,08	KECAMATAN LUAK	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	23,22	72	24,05	74	47,84	76	42,47	78	44,81	80	53,37	80	235,76	KECAMATAN LUAK	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	131,71	72	34,97	74	79,20	76	66,62	78	93,02	80	110,78	80	516,31	KECAMATAN LUAK	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70		72	21,77	74	24,98	76	24,05	78	22,17	80	26,41	80	119,39	KECAMATAN SULIKI	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	51,76	72	25,84	74	39,87	76	40,93	78	38,68	80	51,12	80	248,20	KECAMATAN SULIKI	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	13,02	72	6,10	74	9,04	76	9,21	78	9,15	80	11,23	80	57,75	KECAMATAN SULIKI	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	38,09	72	22,58	74	31,36	76	30,45	78	30,66	80	39,33	80	192,48	KECAMATAN SULIKI	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	28,28	72	65,92	74	29,76	76	28,66	78	32,36	80	39,33	80	224,31	KECAMATAN SULIKI	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	47,13	72	7,64	74	9,98	76	9,61	78	8,85	80	10,55	80	93,75	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	45,88	72	27,21	74	38,91	76	37,61	78	34,67	80	41,30	80	225,58	KECAMATAN GUNUANG OMEH	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	4,90	72	4,45	74	5,82	76	5,60	78	7,92	80	9,43	80	38,13	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	5,51	72	4,57	74	5,97	76	5,75	78	5,30	80	6,31	80	33,40	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	101,33	72	45,57	74	32,95	76	31,72	78	29,25	80	34,82	80	275,65	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	55,31	72	23,87	74	31,18	76	30,01	78	27,67	80	32,95	80	201,00	KECAMATAN MUNGKA	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	66,78	72	27,21	74	38,91	76	37,61	78	34,67	80	41,30	80	246,48	KECAMATAN MUNGKA	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	15,87	72	6,83	74	8,93	76	8,59	78	7,92	80	9,43	80	57,57	KECAMATAN MUNGKA	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
7	1	5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	7,51	72	4,57	74	5,97	76	5,75	78	5,30	80	6,31	80	35,40	KECAMATAN MUNGKA
7	1	6		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	162,26	72	61,79	74	32,95	76	31,72	78	29,25	80	34,82	80	352,79	KECAMATAN MUNGKA
7	1			Kecamatan																	
7	1	2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	9,28	72	5,49	74	24,98	76	24,05	78	22,17	80	26,41	80	112,39	KECAMATAN AKABILURU
7	1	3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	28,51	72	46,80	74	26,58	76	58,85	78	23,58	80	64,60	80	248,92	KECAMATAN AKABILURU
7	1	4		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	9,48	72	6,10	74	10,63	76	10,24	78	9,44	80	11,23	80	57,12	KECAMATAN AKABILURU
7	1	5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi	70	70	12,14	72	7,93	74	13,29	76	12,79	78	11,79	80	14,04	80	71,99	KECAMATAN AKABILURU KECAMATAN AKABILURU

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
					Forkompinca																
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	66,26	72	118,82	74	37,21	76	35,82	78	33,02	80	39,33	80	330,46	KECAMATAN AKABILURU	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	55,31	72	23,87	74	31,18	76	30,01	78	27,67	80	32,95	80	201,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	66,78	72	27,20	74	38,91	76	37,61	78	34,67	80	41,30	80	246,47	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	15,87	72	6,83	74	8,93	76	8,59	78	7,92	80	9,43	80	57,57	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	7,51	72	4,57	74	5,97	76	5,75	78	5,30	80	6,31	80	35,40	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi	70	70	162,26	72	61,79	74	32,95	76	31,72	78	29,25	80	34,82	80	352,79	KECAMATAN BUKIK BARISAN	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			Desa	dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari																
7	1		Kecamatan																	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	44,12	72	17,11	74	23,00	76	32,72	78	22,17	80	29,04	80	168,17	KECAMATAN GUGUAK
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	97,21	72	20,99	74	30,15	76	65,66	78	23,58	80	30,90	80	268,49	KECAMATAN GUGUAK
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	19,65	72	6,01	74	8,63	76	9,14	78	4,72	80	6,18	80	54,33	KECAMATAN GUGUAK
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	5,71	72	8,04	74	11,55	76	12,23	78	4,72	80	6,18	80	48,44	KECAMATAN GUGUAK
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	138,98	72	48,85	74	62,03	76	66,83	78	58,78	80	75,74	80	451,20	KECAMATAN GUGUAK
7	1		Kecamatan																	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	30,49	72	16,18	74	23,25	76	33,00	78	22,17	80	29,04	80	154,13	KECAMATAN HARAU
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	43,93	72	20,99	74	30,15	76	65,66	78	23,58	80	30,90	80	215,21	KECAMATAN HARAU
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	22,68	72	12,86	74	18,47	76	19,55	78	9,44	80	12,36	80	95,36	KECAMATAN HARAU
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	30,60	72	15,90	74	22,85	76	24,20	78	11,79	80	15,45	80	120,79	KECAMATAN HARAU KECAMATAN HARAU
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	77,08	72	40,96	74	78,34	76	82,95	78	28,30	80	37,08	80	344,71	KECAMATAN HARAU
7	1		Kecamatan																	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan belayanan	70	70	91,83	72	53,56	74	76,96	76	74,07	78	68,29	80	81,33	80	446,05	KECAMATAN KAPUR IX

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
					publik																
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	25,91	72	42,04	74	60,41	76	58,15	78	53,61	80	63,84	80	303,95	KECAMATAN KAPUR IX	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	-	72	7,86	74	11,30	76	10,88	78	10,03	80	11,94	80	52,02	KECAMATAN KAPUR IX	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	3,22	72	6,69	74	9,61	76	9,25	78	8,53	80	10,16	80	47,46	KECAMATAN KAPUR IX	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	42,08	72	105,26	74	151,25	76	145,59	78	134,23	80	159,85	80	738,27	KECAMATAN KAPUR IX	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	65,13	72	27,54	74	48,16	76	46,36	78	42,74	80	50,90	80	280,82	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta	70	70	31,09	72	21,14	74	18,61	76	17,91	78	16,51	80	19,66	80	124,91	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
					Dana Desa																
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	9,40	72	8,14	74	10,63	76	10,24	78	9,44	80	11,23	80	59,08	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	7,70	72	3,20	74	8,51	76	8,19	78	7,55	80	8,98	80	44,13	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	181,43	72	143,41	74	9,04	76	8,70	78	8,02	80	9,55	80	360,14	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	51,14	72	19,73	74	28,36	76	24,79	78	24,19	80	31,69	80	179,90	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	53,81	72	22,55	74	33,47	76	35,43	78	111,82	80	146,49	80	403,58	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	6,42	72	3,26	74	4,68	76	4,95	78	4,72	80	6,18	80	30,21	KECAMATAN PAYAKUMBUH	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	14,61	72	6,71	74	9,64	76	10,21	78	9,41	80	12,33	80	62,91	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	59,23	72	42,24	74	58,23	76	61,66	78	63,08	80	82,64	80	367,08	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	26,56	72	12,72	74	26,11	76	26,16	78	25,06	80	30,98	80	147,59	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	33,90	72	39,47	74	61,13	76	70,10	78	70,29	80	95,51	80	370,40	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70	9,74	72	9,53	74	9,04	76	11,25	78	11,32	80	11,32	80	65,49	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	23,92	72	11,25	74	21,26	76	22,52	78	22,64	80	28,65	80	130,24	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari	70	70	53,48	72	101,64	74	37,21	76	36,33	78	36,33	80	46,63	80	311,61	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
7	1		Kecamatan																		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	70	70	57,69	72	26,50	74	23,25	76	33,00	78	22,17	80	23,42	80	186,04	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	70	70	54,95	72	25,25	74	30,15	76	65,66	78	23,58	80	30,90	80	230,49	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada	70	70		72		74	20,06	76	19,55	78	9,44	80	12,36	80	61,41	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	70	70	4,73	72	2,17	74	22,85	76	24,20	78	11,79	80	15,45	80	81,18	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan	70	70	115,70	72	48,99	74	84,05	76	65,70	78	54,50	80	71,39	80	440,34	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
					Pemerintahan Nagari																
8				Unsur Pemerintahan Umum																	
8	1			Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
8	1	2		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	70	70	421,90	85	451,69	85	649,03	85	687,72	90	634,00	90	830,34	90	3.674,68	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	3		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	70	70	999,71	80	603,07	80	1.032,28	85	1.368,78	85	1.014,21	90	1.193,82	90	6.211,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	4		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70	70	107,18	80	86,27	85	132,89	85	140,72	90	141,51	90	196,63	90	805,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	5		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	70	70	644,06	80	292,18	82	400,79	85	405,26	85	392,47	85	490,45	85	2.625,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	6		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	70	70	727,86	80	431,35	80	599,60	85	606,36	85	586,83	90	733,71	90	3.685,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD				
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
		Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Nasional di Daerah																	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Penetapan indikator kinerja daerah juga memperhatikan capaian target pembangunan yang telah terwujud pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Disamping IKU dalam bab ini juga disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD sebagaimana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan Indikator Tujuan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Misi/Indikator Tujuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,85	70,23	70,61	70,98	71,36	71,74
2	Indeks ABS-SBK	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3
	Misi 2 : Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional						
1	Pertumbuhan ekonomi	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86
2	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	29,67	30,49	31,32	32,14	32,97	33,80
3	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	42,36	44,19	46,02	47,85	49,68	51,51
	Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah						
1	Indeks desa membangun	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya						
1	Indeks reformasi birokrasi	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)
	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan EkonomiDan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”						

No	Misi/Indikator Tujuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,90	75,88	77,78	79,75	81,78	83,82
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan Indikator Sasaran
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Misi/Indikator Sasaran	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan						
1	Rata-rata lama sekolah	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52
2	Harapan lama sekolah	13,48	13,76	13,35	14,13	14,32	14,50
3	Angka harapan hidup	69,86	69,93	70,00	70,07	70,14	70,20
4	Angka Prevalensi stunting	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	2,29
5	Indeks ABS SBK	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3
	Misi 2 : Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional						
1	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	33,74	40,49	47,24	53,98	60,73	67,48
2	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	27,64	28,47	29,31	30,14	30,97	31,80
3	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,67	3,72	3,78	3,83	3,89	3,94
4	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,49	6,62	6,75	6,88	7,01	7,14
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan	7,78	8,53	8,53	9,67	10,35	11,04
	Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah						
1	Indeks desa membangun	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya						
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)
2	Indeks inovasi daerah	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96
	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”						

No	Misi/Indikator Sasaran	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase gedung strategis yang terbangun	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83
2	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	55.81	57.05	58.65	59.95	61.43	62.78
3	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50
4	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85
6	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52
7	Rasio rumah layak huni	0,157	0,160	0,163	0,166	0,169	0,173
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09
9	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	70	75	80	85	90
10	Indeks Risiko Bencana Daerah	85-79	79-73	73-67	67-61	61-55	55-49

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) / Pertumbuhan ekonomi	%	-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86	4,86	BAPELITBANG
2	Angka kemiskinan	%	6,86	7,02	6,90	6,77	6,65	6,52	6,39	6,39	BAPELITBANG
3	Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	26,43	27,17	26,95	26,71	26,44	26,16	25,86	25,86	BAPELITBANG
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta rupiah	28,84	29,67	30,49	31,32	32,14	32,97	33,80	33,80	BAPELITBANG
5	PDRB per kapita (ADHB)	Juta rupiah	40,53	42,36	44,19	46,02	47,85	49,68	51,51	51,51	BAPELITBANG
6	Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah	9.596	9.714	9.760	9.931	10.140	10.364	10.606	10.606	BAPELITBANG
7	Indeks Gini	Indeks	0,222	0,238	0,237	0,234	0,230	0,225	0,220	0,220	BAPELITBANG
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,14	92,98	93,1	93,23	93,35	93,48	93,61	93,61	BAPELITBANG
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,47	69,85	70,23	70,61	70,98	71,36	71,74	71,74	BAPELITBANG
10	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,99	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52	8,52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,29	13,48	13,76	13,35	14,13	14,32	14,50	14,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,79	69,86	69,93	70,00	70,07	70,14	70,20	70,20	DINAS KESEHATAN
13	Persentase balita gizi buruk	%	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	3,1	DINAS KESEHATAN
14	Prevalensi balita gizi kurang	%	7,8	7,68	7,56	7,44	7,32	7,20	7,08	7,08	DINAS KESEHATAN
15	Pravalensi Stunting	%	8,29	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	2,29	2,29	DINAS KESEHATAN
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	4,1	4,0	3,9	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,99	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96	95,96	SEKRETARIAT DAERAH
18	Cakupan desa/nagari siaga aktif	%	60	65	70	75	80	85	90	90	DINAS KESEHATAN
19	Angka partisipasi angkatan kerja	%	53,81	54,30	54,78	55,27	55,75	56,24	56,73	56,73	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
20	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,71	72,81	72,92	73,02	73,13	73,23	73,33	73,33	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
21	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,03	2,82	2,73	2,57	2,44	2,27	2,07	2,07	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
22	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,97	98,83	98,85	98,88	98,90	98,93	98,95	98,95	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	72,4*	73,4	74,4	75,4	76,4	77,4	78,4	78,4	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	78,78*	78,83	78,93	79,03	79,13	79,23	79,33	79,33	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,99	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96	95,96	SEKRETARIAT DAERAH
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	6,40	7,78	8,53	8,53	9,67	10,35	11,04	11,04	BADAN KEUANGAN
27	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BADAN KEUANGAN
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor		81,76	81,82	81,88	81,94	82,00	82,06	82,06	DINAS PANGAN
29	Penguatan cadangan pangan	%		455,94	555,94	655,94	755,94	855,94	1.005,94	1.005,94	DINAS PANGAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Penanganan daerah rawan pangan	jumlah		11	9	7	5	3	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
31	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	3,55	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85	3,91	3,91	DINAS PERIKANAN
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
I	PENDIDIKAN										
1	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga	279	283	287	295	301	315	320	320	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Angka partisipasi kasar (APK)										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	32,22	51,19	51,69	52,19	52,69	53,19	53,69	53,69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
b.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,27	108,04	108,92	109,80	110,68	111,56	112,44	112,44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
c.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	108,05	85,91	87,54	89,17	90,8	92,43	94,06	94,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Angka partisipasi murni (APM)										
a.	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90,95	99,29	99,46	99,63	99,80	99,97	99,97	9,97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
b.	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	82,11	81,68	83,11	84,54	85,97	87,40	88,83	88,83	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Angka partisipasi sekolah (APS)										
a.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,12	99,21	99,30	99,39	99,48	99,57	99,66	99,66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
b.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%s	96,83	97,04	97,25	97,46	97,67	97,88	98,09	98,09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Angka Putus Sekolah :										
a.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
b.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Angka kelulusan (AL) :										
a.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
b.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Angka melanjutkan (AM) :										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	103,69	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Fasilitas Pendidikan:										
a.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Ruang	756	1006	1256	1506	1756	2006	2509	509	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
b.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi	Ruang	382	407	432	457	482	507	642	642	DINAS

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bangunan baik										PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	88,74	88,85	88,95	88,95	89,00	89,05	89,10	89,10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	25,87	25,89	25,89	25,90	25,90	25,91	25,92	25,92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	10,66	10,70	10,75	10,80	10,86	10,90	10,85	10,85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	8,70	8,72	8,75	8,77	8,80	8,82	8,84	8,84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	%	1,75	1,76	1,79	1,80	1,81	1,82	1,84	1,84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	42,75	43,25	43,75	44,25	44,75	45,25	45,75	45,75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	86,91	87,66	88,41	89,16	89,91	90,66	91,41	91,41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	45,92	46,02	46,12	46,22	46,32	46,42	46,52	46,52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,70	2,75	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	KESEHATAN										
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	9,70	9,58	9,57	9,56	9,55	9,54	9,53	9,53	DINAS KESEHATAN
2	Angka Kematian Balita	/ 1000 KH	10,7	10,55	10,54	10,53	10,52	10,51	10,5	10,5	DINAS KESEHATAN
3	Angka Kematian Neonatal	/ 1000 KH	8,78	8,77	8,76	8,75	8,74	8,73	8,72	8,72	DINAS KESEHATAN
4	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KH	97,4	97,4	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	DINAS KESEHATAN
5	Rasio posyandu per satuan balita	1000 penduduk	14,81	15	16	17	18	19	20	20	DINAS KESEHATAN
6	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	30.000 penduduk	8,78	8,78	8,79	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	DINAS KESEHATAN
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1.000 penduduk	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	DINAS KESEHATAN
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	77,2	77,5	77,8	78	78,3	78,5	79	79	DINAS KESEHATAN
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	78,1	78,3	78,6	78,9	79,1	79,3	79,6	79,6	DINAS KESEHATAN
10	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	60	80	80	80	80	80	80	80	DINAS KESEHATAN
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
12	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95	95	95	95	95	95	95	95	DINAS KESEHATAN
13	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	24,39	74	90	90	90	90	90	90	DINAS KESEHATAN
15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	100.000 Penduduk	262	277	290	280	284	284	284	284	DINAS KESEHATAN
16	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	100.000 Penduduk	9,7	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	DINAS KESEHATAN
17	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
18	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	73,8	90	90	90	90	90	90	90	DINAS KESEHATAN
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
20	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
21	Angka kejadian Malaria	1.000	0	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	DINAS

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penduduk									KESEHATAN
22	Tingkat kematian akibat malaria	1.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	1.000 Penduduk	0,08	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	DINAS KESEHATAN
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
25	Cakupan kunjungan bayi	%	76,7	76,8	76,9	77	77,1	77,2	77,3	77,3	DINAS KESEHATAN
26	Cakupan puskesmas	/ 30.000 pddk	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	DINAS KESEHATAN
27	Cakupan puskesmas pembantu	/17.000 pddk	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	DINAS KESEHATAN
28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	76.7	76.8	76.9	77	77.1	77.2	77.3	77.3	DINAS KESEHATAN
29	Cakupan pelayanan nifas	%	75.6	75.8	76	76.2	76.4	76.5	76.6	76.6	DINAS KESEHATAN
30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	57,8	57,4	57,2	57	56,8	56,6	56,4	56,4	DINAS KESEHATAN
31	Cakupan pelayanan anak balita	%	62	62,3	62,6	62,8	63	63,3	63,5	63,5	DINAS KESEHATAN
32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Orang	481	485	485	490	490	495	500	500	DINAS KESEHATAN
33	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
36	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	90	90	90	90	90	90	90	90	DINAS KESEHATAN
37	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,036	0.039	0.038	0.037	0.036	0.035	0.034	0.034	DINAS KESEHATAN
38	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	75,8	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
39	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	78,1	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
40	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	79,4	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
41	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	64,8	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	66,6	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
43	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	5,5	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
44	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	56	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
45	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	42,7	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
46	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	91,4	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
47	Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar	%	13	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
48	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	18,2	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
49	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	33	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
a.	Pekerjaan Umum:										
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	71,40	73,90	75,88	77,78	79,75	81,78	83,82	83,82	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
2	Persentase gedung strategis yang terbangun	%	71,74	76,09	80,43	84,78	89,17	93,48	97,83	97,83	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	57,67	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
4	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											RUAN
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	49,93	67,55	69,05	70,98	72,56	74,35	75,98	75,98	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,45	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	74,63	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52	81,52	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
8	Persentase penduduk berakses air minum	%	79,40	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	79,40	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,15	0,21	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,13	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
b.	Penataan Ruang:										
1	Ketaatan terhadap RTRW	%	60	65	70	75	80	85	90	90	DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN
IV	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN										
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.155	0.157	0.160	0.163	0.166	0.169	0.173	0.173	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											PEMUKIMAN
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	N/A	0,6961	0,6963	0,6974	0,6985	0,6996	0,7008	0,7019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(%)	N/A	27,01	28,45	29,87	31,37	32,94	34,58	36,31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(%)	N/A	70,00	70,07	77,07	84,78	89,01	93,46	98.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	(%)	N/A	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,76	0,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN
6	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	(%)	28,00	28,00	29,30	30,60	31,90	33,20	34,50	34,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN
7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	(%)	27,75	27,75	29,05	30,35	31,65	32,95	34,25	34,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN
8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	500	150	264	264	264	264	264	264	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	%	40	46	52	58	64	70	76	76	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
5	Persentase pelayanan pencegahan dan penyelamatan evakuasi non kebakaran	%	39	46	53	60	67	74	81	81	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
VI	SOSIAL										
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	80	83	85,2	86,8	88,2	89,6	91,3	91,3	DINAS SOSIAL
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	83,66	93	93,5	94,3	95,2	96,2	97,1	97,1	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	85	93,1	93,3	93,6	93,8	94,0	94,3	94,3	DINAS SOSIAL
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	95	98	98	98	98	98	98	98	DINAS SOSIAL
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	95	98	98	98	98	98	98	98	DINAS SOSIAL
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	60	62	63	64	65	66	67	67	DINAS SOSIAL
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	11,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	DINAS SOSIAL
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	daerah kota										
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
I	TENAGA KERJA										
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	12	10	10	10	10	10	10		DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	kasus	12	10	10	10	10	10	10		DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	369	400	400	500	550	600	650		DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	5083	5500	6000	6500	7000	7250	7500		DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	0	180	180	180	180	180	180		DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	70	70	70	70	70	70	70		DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	0	60	60	90	90	90	90		DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
II	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase partisipasi perempuan di	%	68,42	7,8	8,19	8,59	9,01	9,4	9,8	9,8	DINAS

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lembaga pemerintah										PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5,71	7,8	8,57	8,57	14,28	17,14	17,14	17,14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	Rasio KDRT	%	0,001	0,002	0,004	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	88277	42000	45000	99750	99800	100000	102000	102000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ANAK
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,004	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	%	4	4,6	5,06	5,56	6,1	6,7	7,3	7,3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
III	PANGAN										
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/ka/thn	353,53	368,54	380,85	393,15	405,45	417,75	430,06	430,06	DINAS PANGAN
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kg/ka/thn	6,159	6.248	6.337	6.426	6.515	6.604	6.693	6.693	DINAS PANGAN
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	84.09	70	78	80	82	84	86	86	DINAS PANGAN
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	18,37	24,3	35,14	41,14	53,14	74,15	100	100	DINAS PANGAN
IV	LINGKUNGAN HIDUP										
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	DINAS

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ada									LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	ada ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
4	Indeks kualitas Air (IKA)	Indeks	50,00	55,79	55,89	55,99	56,06	56,15	56,24	56,24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,87	89,45	89,55	89,66	89,77	89,88	89,98	89,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
6	Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	61,75	63,23	64,71	66,19	67,67	69,15	70,63	70,63	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	(%)	75	78,5	82	85,5	89	92,5	96	96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD	0	0	0	1	2	2	2	7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0							PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	0	0	12	29	47	71	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	objek	0	0	13	13	17	17	18	79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	objek	0	0	3	6	9	14	19	51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
12	Penetapan hak MHA	MHA	0	0	1	1	1	2	2	7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	(%)	0	23,07	23,07	20,93	23,33	24,05	24,05	26,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	(%)	0	23,07	23,07	20,93	23,33	24,05	24,05	26,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	persen	7	17	33	50	67	83	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											PERMUKIMAN
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	6,33	12,66	18,99	25,32	31,65	37,97	44,30	44,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
18	Timbulan sampah yang ditangani	(%)	11,66	20	35	50	60	70	70	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	(%)	17,17	24	26	27	28	30	30	30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
20	Persentase jumlah sampah yang tertangani	(%)		74,00	73	72	71	70	70	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai operasional TPA	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	>=71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
22	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	(%)	0	0	0	0	2	2	2	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	(%)	98,42	98,50	98,55	98,60	98,65	98,70	98,75	98,75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	Persentaseanak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun)	(%)	91,09	95	95	95	95	95	95	95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	(%)	98,42	98,50	98,55	98,60	98,65	98,70	98,75	98,75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	(%)	43,08	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	Perekaman KTP Elektronik	(%)	98,48	97,5	98,85	99	99,20	99,40	99,50	99,50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	(%)	24,99	30	35	40	45	50	55	55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	Kepemilikan akta kelahiran	Dokumen	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	45000	DINAS KEPENDUDUKAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											DAN PENCATATAN SIPIL
VI	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	80	80	81	82	84	85	86	86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	2,5	2,5	2,5	1,25	1,25	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5	5	5	5	8	10	12	14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
VII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,41	1,27	1,25	1,20	1,1	0,95	0,95	0,95	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,48	2,37	2,24	2,22	2,20	2,18	2,16	2,16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan	%	40	45	50	55	60	65	70	70	DINAS PENGENDALIAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah melalui Kampung KB										PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	Ratio Akseptor KB	%	1 : 4	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1 : 4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	73,14	73,18	73,5	74,3	74,6	74,8	75,0	75,0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15 ² 19 tahun (ASFR 15-19)	angka	23	23	23	23	22	22	22	22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,64%	10,25%	10,1%	9,1%	8,63%	8,25%	7,8%	7,8%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	25,74%	26,13%	26,3%	26,7%	27,1%	27,5%	28,2%	28,2%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	75	75	75	77	80	83	85	85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	75	75	75	77	80	83	85	85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	80	80	80	82	83	84	85	85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	2	2	2	5	6	8	9	9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	70	75	76	76	78	78	79	79	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	60	60	65	65	70	70	70	70	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	rasio	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1	1 : 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	60	60	60	65	65	70	70	70	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											PERLINDUNGAN ANAK
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	60	60	65	65	70	70	70	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	73,14	73,18	73,5	74,3	74,6	74,8	75,0	75,0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
VIII	PERHUBUNGAN										
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	3.273.510	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	Rasio ijin trayek	per 100.000 penduduk	2,92	2,93	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98	2,98	DINAS PERHUBUNGAN
3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	5847	5920	5976	6069	6162	6237	6313	6313	DINAS PERHUBUNGAN
4	Persentase layanan angkutan darat	persen	1,92%	1,95%	1,98%	2,00%	2,20%	2,40%	2,60%	2,60%	DINAS PERHUBUNGAN
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	85%	87%	89%	91%	93%	93%	95%	95%	DINAS PERHUBUNGAN
6	Pemasangan Ramburambu	persen	59%	60%	60%	61%	62%	63%	65%	65%	DINAS PERHUBUNGAN
7	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang	3.273.510	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	kendaraan	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000	DINAS PERHUBUNGAN
IX	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan	kelompok	16	0	16	18	18	20	22	22	DINAS

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan										KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Indek keterbukaan Informasi Publik	Indeks	76	77	78	79	80	81	82	82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks	3,17	2,80	3,00	3,18	3,40	3,50	3,60	3,60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	57	57	70	80	85	90	95	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Persentase koperasi aktif	%	66,43	60,28	63,26	66,20	69,12	72,02	74,89	74,89	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Jumlah koperasi aktif	Unit	129	129	136	143	150	157	164	164	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	UMKM	6,225	7.532,25	753.225	828.547,5	911.402,25	911.402,25	911.402,25	911.402,25	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	0,94	1,94	2,94	3,94	4,94	5,94	6,94	6,94	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	27	27,9	28,3	28,6	29,25	29,35	29,40	29,40	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI	PENANAMAN MODAL										
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2.787	2.926	3.073	3.226	3.388	3.557	3.735	3.735	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	Rupiah	363.751.048.351	381.938.600.769	401.035.530.807	421.087.307.347	442.141.672.715	464.248.756.350	487.461.194.168	487.461.194.168	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	Nilai Realisasi PMDN	Rupiah	344.821.663.410	362.062.746.581	380.165.883.910	399.174.178.105	419.132.887.011	440.089.531.361	462.094.007.929	462.094.007.929	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Nilai realisasi PMA	Rupiah	2.081.609.450	2.185.689.923	2.294.974.419	2.409.723.140	2.530.209.297	2.656.719.761	2.789.555.749	2.789.555.749	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
XII	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	30%	35%	40%	50%	60%	65%	70%	70%	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Persentase wirausaha muda	%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,13%	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	4	5	6	7	8	9	10	10	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	64	88	104	110	114	122	134	134	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	39	43	134	54	142	58	150	150	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
6	Jumlah prestasi olahraga	Orang	22	26	35	42	44	46	50	50	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
XIII	STATISTIK										
1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	100	34	50	55	65	75	80	80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	OPD	100	34	50	55	65	75	80	80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
XIV	PERSANDIAN										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	23,98	29,85	35,83	41,88	47,47	47,60	47,6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
XV	KEBUDAYAAN										
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2	2	4	4	5	5	6	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	95	95	105	105	110	110	115	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	60	68	68	70	70	75	75	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	8	14	14	20	20	25	25	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	61	70	75	80	85	90	95		DINAS

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										95	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
XVI	PERPUSTAKAAN										
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	1.043	2.400	2.436	2.473	2.510	2.548	2.586	2586	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	21.840	22.816	25.416	28.316	31.416	34.716	38.316	38.316	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,075	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	%	0.33	0.80	0.80	0.81	0.82	0.83	0.83	0.83	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	13.142	13.337	13.842	14.407	15.012	15.657	16.362	16.362	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	1	1	1	3	6	8	9	9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	7,31	8,30	9,28	10,25	11,00	12,25	13,25	13,25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
XVII	KEARSIPAN										
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	19.54	24,54	29,54	34,54	39,54	44,54	49,54	49,54	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	50	30	60	60	60	60	60	330	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	34,05	43,00	55,00	60,00	64,00	70,00	75,00	75,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	%	11,67	35,00	40,00	55,00	59,00	64,00	70,00	70,00	DINAS

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat										PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
C. URUSAN PILIHAN											
I	PARIWISATA										
1	Kunjungan wisata	orang	654.951	785.941	943.931	1.133.873	1.362.420	1.637.312	1.858.136	1.858.136	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Lama kunjungan Wisata	hari	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	PAD sektor pariwisata	Rp	1.643.000.000	1.643.380.000	6.000.000.000	12.000.000.000	18.000.000.000	24.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	Tingkat hunian akomodasi	%	67,92	67,92	70,12	73,34	75,06	79,02	83,28	83,28	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
II	PERTANIAN										
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	4,32	4,58	4,78	4,98	5,18	5,38	5,58	5,58	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
III	PERDAGANGAN										
1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	26,3	28	35	45	50	55	60	60	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
IV	PERINDUSTRIAN										
1	Cakupan bina kelompok pengrajin			0,0618	0,0667	0,0731	0,0807	0,0887	0,0986	0,0986	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											TRANSMIGRASI
V	PERIKANAN										
1	Produksi perikanan	Ton	44.507,53	44.744,38	44.981,22	45.218,07	45.454,91	45.691,76	45.928,60	45.928,60	DINAS PERIKANAN
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	38	39	40	41	42	43	44	44	DINAS PERIKANAN
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	77	79	80	83	85	87	90	90	DINAS PERIKANAN
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	3.412,02	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.500	DINAS PERIKANAN
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Ton	Data tangkap: 3.412 Data budidaya: 44.507,53	Data tangkap: 3.500 Data budidaya: 44.744,38	Data tangkap: 3.700 Data budidaya: 44.981,22	Data tangkap: 3.900 Data budidaya: 45.218,07	Data tangkap: 4.100 Data budidaya: 45.454,91	Data tangkap: 4.300 Data budidaya: 45.691,76	Data tangkap: 4.500 Data budidaya: 45.928,60	Data tangkap: 4.500 Data budidaya: 45.928,60	DINAS PERIKANAN
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
I	SEKRETARIAT DEWAN										
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRD
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRD
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPELITBANG
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPELITBANG
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPELITBANG

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang telah ditetapkan dengan PERKADA										
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPELITBANG
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BADAN KEUANGAN
II	KEUANGAN										
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BADAN KEUANGAN
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,69	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	BADAN KEUANGAN
3											
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	35,60	35,7	35,82	35,92	35,98	36,08	36,15	36,15	BADAN KEUANGAN
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	13,10	13,2	13,32	13,46	13,56	13,69	13,79	13,79	BADAN KEUANGAN
6											
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp.	14.763.998.245	14.560.438.245	14.851.647.010	15.148.679.950	15.451.653.549	15.760.686.620	16.075.900.352	16.075.900.352	BADAN KEUANGAN
8	Penetapan APBD	Perda	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN KEUANGAN
III	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang/JP	N/A	3	5	7	10	13	15	15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	12,38	12,50	12,60	12,80	13	13,50	13,75	13,73	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	38	40	45	50	55	60	65	65	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional	Jabatan	164	200	250	300	350	400	500	500	BADAN

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tertentu pada instansi pemerintah										KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40,11	65	68	70	73	75	78	78	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,78	8	15	25	30	40	50	50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8	Merit System	Indeks	NA	Kurang	Kurang	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks	53,95	60	65	70	75	80	85	85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	NA	NA	20	20	20	20	20	100	BAPELITBANG
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	NA	NA	100	100	100	100	100	100	BAPELITBANG
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	20,93	23,26	25,58	27,91	30,23	32,56	34,88	34,88	BAPELITBANG
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkandi daerah.	Persen	NA	17,44	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	BAPELITBANG

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
1	Persentase tindak lanjut temuan										
	Ekstern	Persen	80,19	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	85,00	85,00	INSPEKTORAT
	Intern	Persen	82,09	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00	86,00	INSPEKTORAT
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT

BAB IX

PENUTUP

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran, serta merupakan pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam menyusun dan menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari).

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

1. RPJMD dilaksanakan sesuai urusan dan kewenangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati dalam kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
2. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
3. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.
5. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
6. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
7. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.


BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN I : TARGET INDIKATOR MAKRO RPJMN TAHUN 2020-2024, RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 DAN RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

No	Indikator Pembangunan	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
		TARGET NASIONAL DALAM RPJMN					TARGET PROVINSI DALAM RPJMN					TARGET PROVINSI DALAM RPJMD PROVINSI						TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD PROVINSI						TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD KAB/KOTA								
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10	-1,60	3,44	3,40	4,57	4,60	4,70	4,84														
	Kab. Lima Puluh Kota																		-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86	-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	8,0-8,5			6,0-7,0	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55	6,56	6,40	6,28	6,16	6,03	5,90	5,77														
	Kab. Lima Puluh Kota																		7,17	7,02	6,90	6,77	6,65	6,52	6,39	6,86	7,02	6,9	6,77	6,65	6,52	6,39
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,0	4,8-5,0			3,6-4,3	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40	6,88	6,70	6,60	6,45	6,31	5,94	4,38														
	Kab. Lima Puluh Kota																		3,03	2,82	2,73	2,57	2,44	2,27	2,07	3,03	2,82	2,73	2,57	2,44	2,27	2,07
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26			75,54						72,38	72,56	72,74	73,23	73,60	74,16	74,60														
	Kab. Lima Puluh Kota																		69,47	70,05	70,63	71,18	71,74	72,31	72,77	69,47	69,85	70,23	70,61	70,98	71,36	71,74
5	Rasio Gini	0,375-0,380	0,375-0,379			0,360-0,370						0,301	0,299	0,298	0,296	0,293	0,289	0,284														
	Kab. Lima Puluh Kota																		0,240	0,238	0,237	0,234	0,230	0,225	0,220	0,222	0,238	0,237	0,234	0,23	0,225	0,22
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)					27,3																										
	Kab. Lima Puluh Kota																															

LAMPIRAN II : PENYELARASAN TARGET PROGRAM PRIORITAS RPJMN TAHUN 2020-2024, RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 DAN RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan																									
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13.4	14.5	15.7	17.9	19.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68.8	69.2	70.3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8											
								PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9											
		Peningkatan kuantitas/ketahan n air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4.4	4.7	5.1	5.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	74.63%	77.52%	78.32%	79.12%	79.92%	80.72%	81.52%	
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6										
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5										
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26										
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20										
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3										
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90.4	91.6	92.8	94	95.2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		291.79	292.98	294.15	295.31			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	16.45%	1.30%	3.80%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82.5	83	84	84.5			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	50.11%	59.13%	68.98%	78.01%	92.47%	95.18%	100%	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target							Target								Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)				6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan /Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742												
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39.27	40	40.5	41.6	42.4	44												
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (%)				45	50	55	60		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani	3%	3%	4%	6%	8%	10%	12%		
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%			
			Peningkatan pengelolaan kamaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23.4	24.2	25.1	26	26.9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59											
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7												
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000												
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350												
				Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	780	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengawasan	5%	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)				250	250	300	350	350	350	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3.32	3.33	3.39	3.71	3.78	3.97											
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256,747	262,256	274,280	284,467	295,226	306,934											
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100											
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19											
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93											
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		80	82	84	86	90	92											
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11											
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742											
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39.27	40	40.5	41.6	42.4	44											
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3.6	3.7	3.8	3.9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Koperasi yang telah diawasi	10%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69											
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)		50	50	60	70	80	90	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan skala usahanya	5%	20%	15%	10%	15%	20%	20%	20%	20%
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMK yang terstandarisasi (produk)		45	100	120	125	130	615	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil dan Usaka Mikro yang diberdayakan	5%	5%	15%	20%	25%	30%	35%	35%	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3.7	3.7	3.9	4	4.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)				83	83.5	84	84.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	88%	90%	90%	92%	95%	97%	100%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)				5	5	5	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	45%	48%	50%	55%	60%	62%	65%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1.4	1.45	1.51	1.57	1.62	1.68		Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	99.74%	2%	4%	6%	8%	10%	12%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)				5	5	5	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	65%	68%	70%	72%	75%	78%	80%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100		Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0.63	0.6	0.57	0.54		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	80%	80%	80%	80%	82%	85%	90%
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)		0.93	0.99	1.07	1.09	1.11	1.17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit)		1,400	1,423	1,590	1,739	1,768	1,800									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)		3	3	3	3	3	3									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)		100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)		220,615	222,693	225,081	227,546	230,081	232,762									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3.32	3.33	3.39	3.71	3.78	3.97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya	5%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256,747	262,256	274,280	284,467	295,226	306,934									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)			5	20	40	60	80	100										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)			17	17	17	19	19	19										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)			52	67	72	79	85	93										
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)			6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)			15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742										
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)			39.27	40	40.5	41.6	42.4	44										
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5.5	6.5	7.5	8.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)				20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	1.83%	3.65%	5.50%	7.42%	10.02%	13.32%	16.68%	
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)				72	74	76	78		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)			41,373	43,263	45,363	47,673			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4.8	5	5.2	5.3	5.5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)			4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)			11	19	19	19	19	19										

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)			1	2.5	4	5.5	7	8.5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	10%	10%	12%	15%	17%	20%	25%
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)			1.5	3	4.5	6	7.5	9									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)			3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)			1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88									
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1,689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)			0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku wisata ekonomi kreatif sektor pariwisata yang produktif	58.84%	62.23%	68.28%	75.06%	82.81%	91.77%	100%
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)			196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	29.73%	29.73%	33.78%	37.83%	43.24%	45.95%	50.00%
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)			2	4	6	8	10	12									
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5.6	6.2	6.9	7.8	8.4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	5%	5%	10%	15%	10%	10%	10%
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)			4	4	4	5	5	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	5%	5%	5%	10%	10%	10%	20%
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp triliun))			4.8	5.1	5.6	6.1	6.7	7.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	10%	10%	20%	20%	20%	20%	10%
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)			15	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	5%	10%	10%	15%	10%	10%	10%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)			0	2	1		1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	5%	10%	20%	40%	60%	80%	100%
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	5%	10%	20%	40%	60%	80%	100%	
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)			31.77	35.52	36.01	36.5	36.99	37.97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	12.57	26.61	36.18	52.14	68.09	84.05	100%	
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	5%	10%	20%	40%	60%	80%	100%	
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14.2	14.6	15	15.2	15.7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)				20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	1.83%	3.65%	5.50%	7.42%	10.02%	13.32%	16.68%	
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19.7	20.3	20.9	21.4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)				20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	1.83%	3.65%	5.50%	7.42%	10.02%	13.32%	16.68%	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13.5	14	14.5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)			4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)			11	19	19	19	19	19										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)			1	2.5	4	5.5	7	8.5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	10%	10%	12%	15%	17%	20%	25%	
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)			1.5	3	4.5	6	7.5	9										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)			3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)			1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88										
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)			0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku wisata ekonomi kreatif sektor pariwisata yang produktif	58.84%	62.23%	68.28%	75.06%	82.81%	91.77%	100%	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	29.73%	29.73%	33.78%	37.83%	43.24%	45.95%	50.00%
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2	4	6	8	10	12									
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3.9	4.2	4.8	5.5	6.2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US\$)			1,420.99	1,449.41	1,478.40	1,507.97		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten	10%	10%	20%	40%	60%	80%	100%
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0.3	1	3	7.5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)			5.5	5.8	6.2	6.5		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pasar nagari yang di revitalisasi	33%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)			6	6	6	6		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	60%	5%	15%	20%	20%	20%	20%
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27.5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2.5	4	5.5	7	8.5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	10%	10%	12%	15%	17%	20%	25%
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1.5	3	4.5	6	7.5	9									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88									
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4																		
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23.2	22.2	21.1	20.1	18																		
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA														
				Target							Target								Target														
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)			11		19		19		19		19												
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)			1		2.5		4		5.5		7		8.5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas		10%	10%	12%	15%	17%	20%	25%
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)			1.5		3		4.5		6		7.5		9										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)			3.19		3.21		3.23		3.25		3.27		3.29										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)			1.58		1.64		1.7		1.76		1.82		1.88										
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																															
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiata n unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)					5		5		5		5			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas		45%	48%	50%	55%	60%	62%	65%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)			1.4		1.45		1.51		1.57		1.62		1.68		Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas		99.74%	2%	4%	6%	8%	10%	12%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)					5		5		5		5			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas		65%	68%	70%	72%	75%	78%	80%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)			20		20		20		20		20		100		Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas		100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%
		Distribusi pusat- pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)			73.92		75		77		79		81		82	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		54.79	55.81	57.05	58.65	59.95	61.43	62.78
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0			0																											
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)			42.85		50		50		62.5		62.5		62.5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah inovasi daerah		45	55	65	75	85	95	105
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)			20		30		30		40		40		50										
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)			2		10		10		10		12		12										

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target							Target								Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0		0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan dasar	80	80	85	90	95	95	100
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27									
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57									
								PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69.07	71.07	74.07	77.07	80	83.02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	60	75	75	83	91	98	100
																	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
																	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum	100	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk FBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
																		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan	45	50	50	60	70	80	90	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana	58	60	65	67	69	71	72
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	79.40%	81.62%	83.12%	84.72%	86.42%	88.22%	90.12%
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	76.45	78.45	80.05	81.65	83.35	85.05	86.85
																		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	0	0	29.30	30.60	31.90	33.20	34.50
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)		77	79	81	83	85	87	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan keterriban umum	60	62	67	72	77	82	87
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		75	77	79	81	83	85									
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase keslapiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	119.2	85-79	79-73	73-67	67-61	61-55	55-49
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85	85	85	85	85	85	85
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100									
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100									
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
																		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	85	85	85	85	85	85	
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)				100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																									
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		26.66	40	50	60	70	80	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan pendaftaran penduduk	90	90	92	93	94	96	98	
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97.16	97.75	98	98.25	98.5	99										
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)		91.47	94	95	96	97	98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pengelolaan pencatatan sipil	90	90	91	92	93	95	96	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)		3	6	9	12	15	18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90	90	92	94	95	96	98	
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)		1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1										
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)		3	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)		80	80	85	90	90	90	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.41	1.27	1.25	1.2	1.1	0.95	0.95	
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.14	73.18	73.5	74.3	74.6	74.8	75	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target							Target								Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)			51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2.48	2.37	2.24	2.22	2.2	2.18	2.16		
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7		0			98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95	95	95	95	95	95	95	
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65.2		0			80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687										
																				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85	85	85	85	85	85	85	
										PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkata n Anak (orang)				25	25	25	25	25	25	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	85	85	85	85	85	85
										PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)				100	100	100	100	100										
										PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)				30	35	40	50											
																				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194		183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60		
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70		
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90											
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86											
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96											
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190											
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96											

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
																		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan	45	50	50	60	70	80	90	
																		PROGRAM KESEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Saran Kefarmasian yang mempunyai izin	100	100	100	100	100	100	100	100
																			Persentase IRT/P yang mempunyai izin	65	67	68	70	75	78	80	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target							Target									Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90		92		94		96		98		100								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12.9	12.2	11.6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
																		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum	79.4	81.62	83.12	84.72	86.42	88.22	90.12	
																		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Sanitasi Yang Layak	76.45	78.45	80.05	81.65	83.35	85.05	86.85	
																		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85	85	85	85	85	85	85	
																		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	85	85	85	85	85	85	
																		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat	21.52	16.46	12.66	8.86	6.33	3.8	0	
																		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman	88	90	90	92	95	97	100	
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan Kapasitas kelembagaan masyarakat adat	50	55	60	65	70	75	75	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61.8	62.2	62.5	62.9	63.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.14	73.18	73.5	74.3	74.6	74.8	75
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.6	8.3	8	7.7	7.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.14	73.18	73.5	74.3	74.6	74.8	75
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.14	73.18	73.5	74.3	74.6	74.8	75
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2.48	2.37	2.24	2.22	2.2	2.18	2.16
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24.1	21.1	18.4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA												
				Target							Target								Target												
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2											
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90		92		94		96		98		100									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100									
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6									
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)					8		11		14		17		19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	58	60	65	67	69	71	73

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)				22	24	27	28	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	21.52%	16.46%	12.66%	8.86%	6.33%	3.80%	0
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)				83	83.5	84	84.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	88%	90%	90%	92%	95%	97%	100%
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)		10,800	11,300	11,800	12,300	12,800	13,300	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	50	50	55	60	65	70	75
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)		299	350	400	450	500	544									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah LPM Mandiri (LPM)		0	7	15	25	37	50									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)		2,319	2,400	2,500	2,600	2,700	2,800									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2.48	2.37	2.24	2.22	2.2	2.18	2.16
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)		5	10	20	30	40	50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	15	20	22	35	55	75	85
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun	42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun	44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target									Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92		92		93		94		95		96							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90		92		94		96		98		100							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100							
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6									
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90	92	94	96	98	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6									
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100,000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9.1	9	8.9	8.8	8.7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	58	60	65	67	69	71	73	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima I (SPM) yang tercapai target	81.72	81.72	82	82	83	84	84	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19										
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6									
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)			50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan dasar	80	80	85	90	95	95	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)			31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)			52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57									
																			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum	100	100	100	100	100	100	100
																			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	60	75	75	83	91	98	100
																			PROGRAM PENGENDALIAN PERZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)			50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan dasar	80	80	85	90	95	95	100
																			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum	100	100	100	100	100	100	100
																			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	60	75	75	83	91	98	100
																			PROGRAM PENGENDALIAN PERZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)			31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)			52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57									
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.75	8.85	8.95	9.06	9.16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)			50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan dasar	80	80	85	90	95	95	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)			31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)			52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57									
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	13.41	13.6	13.79	13.97	14.16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)			50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan dasar	80	80	85	90	95	95	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
																	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)	100	100	100	100	100	100	100	
																	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	60	75	75	83	91	98	100	
																	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57									
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)		27	33	39	45	51	57	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69.07	71.07	74.07	77.07	80	83.02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	60	75	75	83	91	98	100
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)		6	21	36	51	66	81	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengendalian perizinan pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.34	68.1	69.87	71.66	73.49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	KLA
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83.5	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	KLA
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83.5	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.2116475	91.2779428	91.2789623	91.3346958	91.3862702	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan gender (IPG)	94.93	95.77	95.8	95.85	95.9	95.95	96

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.2448102	73.5005004	73.7405192	73.9659203	74.1774755	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan gender (IPG)	94.93	95.77	95.8	95.85	95.9	95.95	96
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52.512	53.134	53.756	54.378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan gender (IPG)	94.93	95.77	95.8	95.85	95.9	95.95	96
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		84	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (Indeks)		69.5	70	70.5	71	71.5	72	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	0	30	40	50	60	70	80
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.33	56.5	56.5	58.17	57.67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)		14	15	16	17	18	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda baru (orang)		230	268	348	348	348	1890									
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27.9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95	95	95	95	95	95	95
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pelayanan usaha	25.6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95	95	95	95	95	95	95
																		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85	85	85	85	85	85	85
																		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	85	85	85	85	85	85
																		PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60
																		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
																		PROGRAM PEMERINTAHANN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100	100	100
																		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar	80	80	85	90	95	95	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26									
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000									
			Bidang tanah yang diredistribusi	750000		0		7750000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)		65	70	75	80	85	90	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	0	0	20	20	20	20	20
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6286087		0		56286087	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah	0	0	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftark an dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase fasilitas penetapan Tanah Ulayat	0	0	20	20	20	20	20
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)		50	55	60	70	75	80	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	0	20	20	20	20	0	20
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44.8	46.6	48.4	50.2	52.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan dasar	80	80	85	90	95	95	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57									
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	5%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)				4	8	12	16		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat	70	70	80	82	85	85	85
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)		N/A	3	6	9	12	15		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan Bahasa dan sastra	70	75	80	85	90	95	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)		N/A	6	12	18	24	30										
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)			1.41	1.52	1.62	1.72			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	1.44	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49
																			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	N/A	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42.85	50	50	62.5	62.5	62.5		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah inovasi daerah	45	55	65	75	85	95	105
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50										
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12										
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																									
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92.84	93.44	94	94.63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	0	0	29.30	30.60	31.90	33.20	34.50
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	82.35	83.5	84.8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	0	0	29.30	30.60	31.90	33.20	34.50

No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
			Target							Target								Target									
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55.46	56.85	58.23	59.62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftark an dalam buku tanah (%)			75	80	85	90	95	95	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase fasilitas penetapan Tanah Ulayat	0	0	20	20	20	20	20	20
		Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3.05	3.1	3.3	3.6	4																				
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)			81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	76.45	78.45	80.05	81.65	83.35	85.05	86.85	
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20	25.60	31.20	36.80	42.40	48	53.60	
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5.95	4.46	2.98	1.49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	58	60	65	67	69	71	73	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target	81.72	81.72	82	82	83	84	84	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19										
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganant; 3.70% pengurangan	73.70% penanganant; 5.51% pengurangan	75.28% penanganant; 9.13% pengurangan	77.64% penanganant; 14.57% pengurangan	80% penanganant; 20% pengurangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20	25.60	31.20	36.80	42.40	48	53.60	
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatih an dan penyuluhan lingkungan hidup (%)			75	75	75	75	75	75	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	7	17	33	50	67	83	100	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	0	10	20	30	40	50	60	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96		Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	66	66	66	67	68	69	70	

[illegible]

[illegible]

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																								
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	55.79	55.89	55.89	56.09	56.19	56.29
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	55.79	55.89	55.89	56.09	56.19	56.29
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58.5	59	59.5	60	60.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	55.79	55.89	55.89	56.09	56.19	56.29
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61.6	62.5	63.5	64.5	65.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	55.79	55.89	55.89	56.09	56.19	56.29
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)		19	19	19	19	19	19	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan kehati yang dikelola	4.87	4.87	5.07	5.09	5.11	5.13	5.15
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																		
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0.34	0.59	0.81	1	1.15																		
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4.5	4	3.5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	119.2	85-79	79-73	73-67	67-61	61-55	55-49
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11.8	12.5	12.8	12.8	13.2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45.8	50.7	53.1	57.2	58.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)				5	5	5	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	45%	48%	50%	55%	60%	62%	65%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1.4	1.45	1.51	1.57	1.62	1.68		Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	99.74%	2%	4%	6%	8%	10%	12%

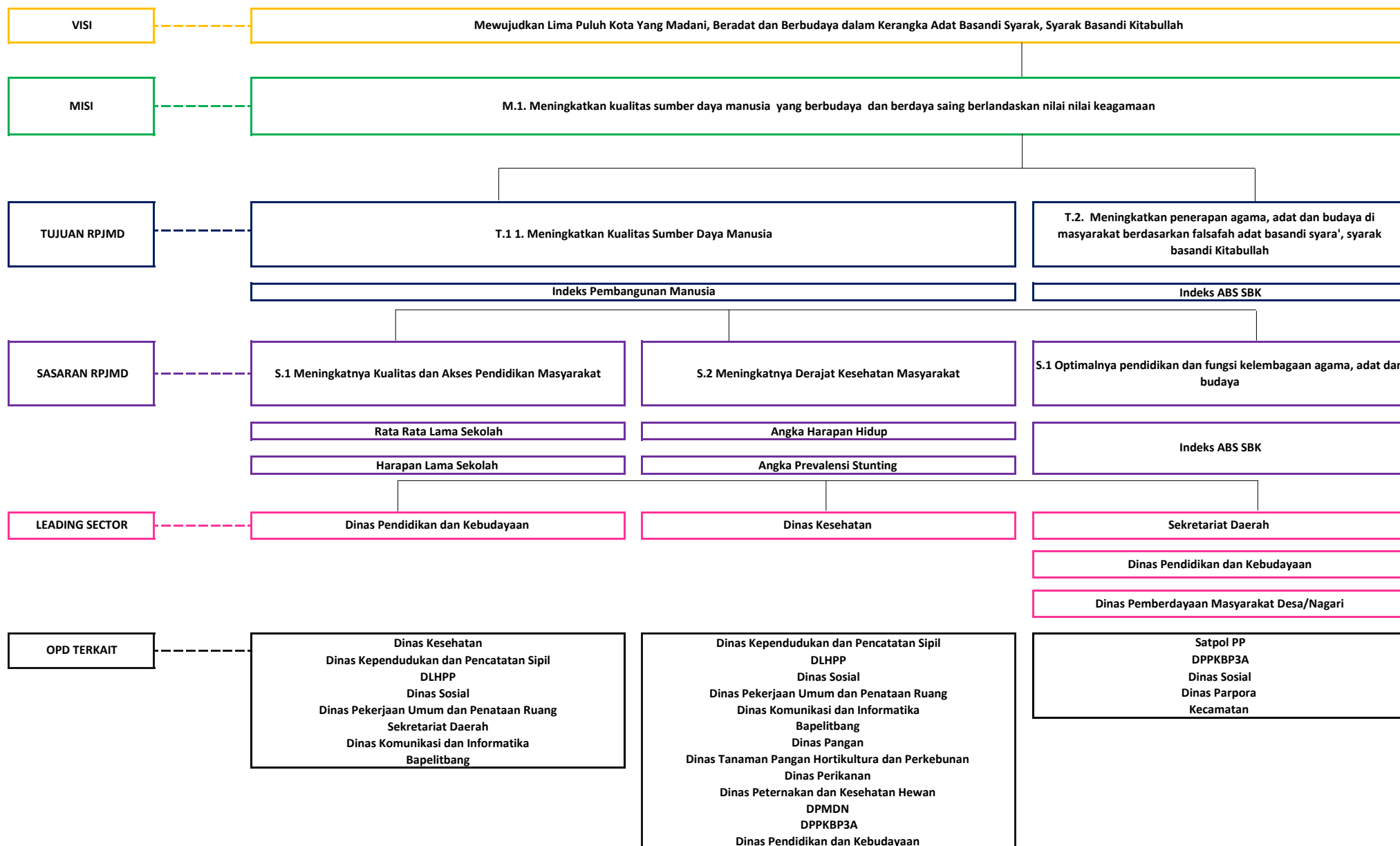
No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)				5	5	5	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	65%	68%	70%	72%	75%	78%	80%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100		Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas	100%	2%	4%	6%	8%	10%	12%
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)		3	1.08	1.28	1.44	1.65	5.48	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	2	4	6	8	10	12
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0.63	0.6	0.57	0.54		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	80%	80%	80%	80%	82%	85%	90%
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)			5	7	8	10		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	0	0	100	100	100	100	100
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)		3	3	3	3	3	15		Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	99.76	2	4	6	8	10	12
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26									
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8.5	9	9.3	9.4	9.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)		2	2	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	50	-	55	60	65	70	75
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	76.45	78.45	80.05	81.65	83.35	85.05	86.85
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km)		1	2	10	15	25	36	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	40	42	44	46	48	50	52
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%)			60	65	70	75		PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase pengurangan sampah.	17.17	22	26	27	28	30	30
																			Persentase penanganan	11.66	20	35	50	60	70	70
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2.3	2.5	2.6	2.9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan pencak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	55.79	55.89	55.89	56.09	56.19	56.29

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.58	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45		Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	3.29	3.13	2.97	2.82	2.68	2.55	2.42
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6.5	6.6	6.8	7	7.3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350									
7		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																								
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75.3	75.35	75.4	75.45	75.5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)		3.26	3.27	3.28	3.29	3.3	3.31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	70	70	80	80	85	85	90
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95.07	95.27	95.47	95.67	95.67																		
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Le mbaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85																		
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)		100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)		8	12	16	18	20	22									
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)		7	8	10	12	14	16									

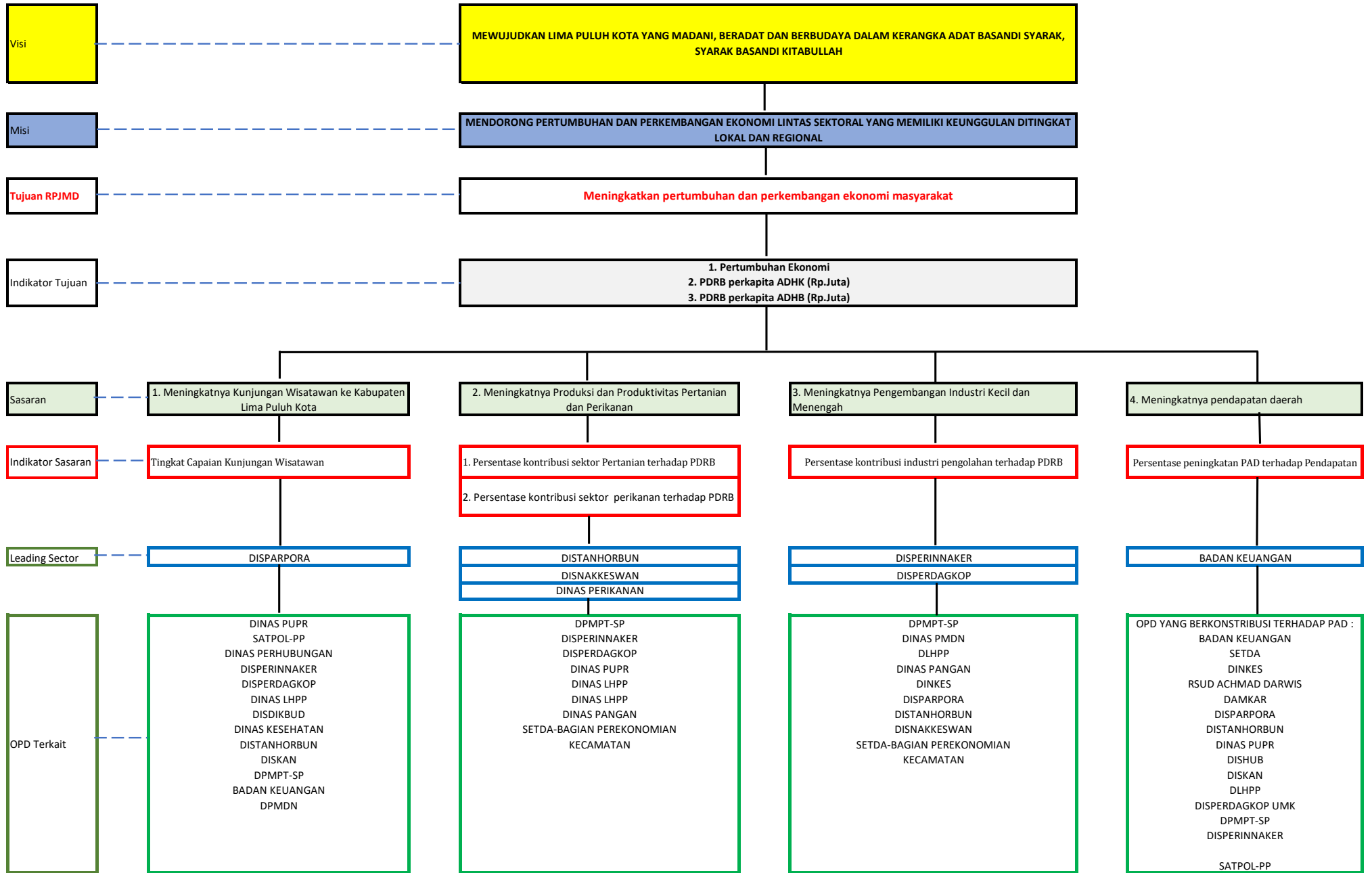
No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target							Target								Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)			5	7	9	11	13	15											
																			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	70	73	78	80	85	85		
																			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100		
																			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	88	90	91	92	93	94	95		
																			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
																			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIB BB	80	81	82	83	84	85	85		
																			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	1.53	1.65	1.68	1.7	1.75	1.8	1.85		
																			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah	45	55	65	75	85	95	105		
									PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)		65	70	75	80	85	90	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4		
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70																					
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0.26	0.25	0.24	0.22	0.2																					
			Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat	70	70	80	82	85	85	85			
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase meningkatnya transtibmas demi terjaganya stabilitas nasional di daerah	70	70	80	80	85	85	90			
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat	70	70	80	82	85	85	85			

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)			3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase meningkatnya trantibmas demi terjaganya stabilitas nasional di daerah	70	70	80	80	85	85	90
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat	70	70	80	82	85	85	85	
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase meningkatnya trantibmas demi terjaganya stabilitas nasional di daerah	70	70	80	80	85	85	90	

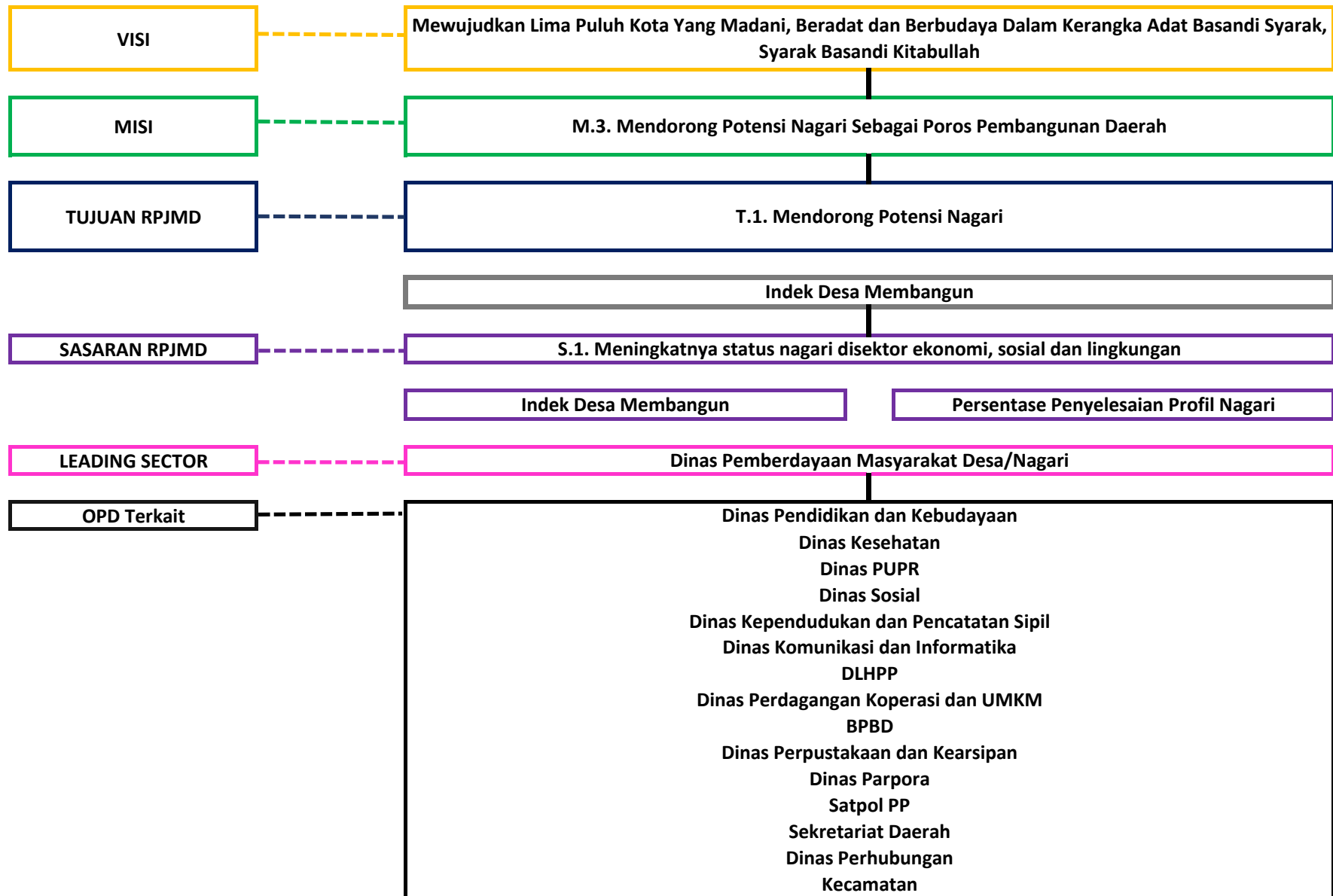
KERANGKA LOGIS MISI I



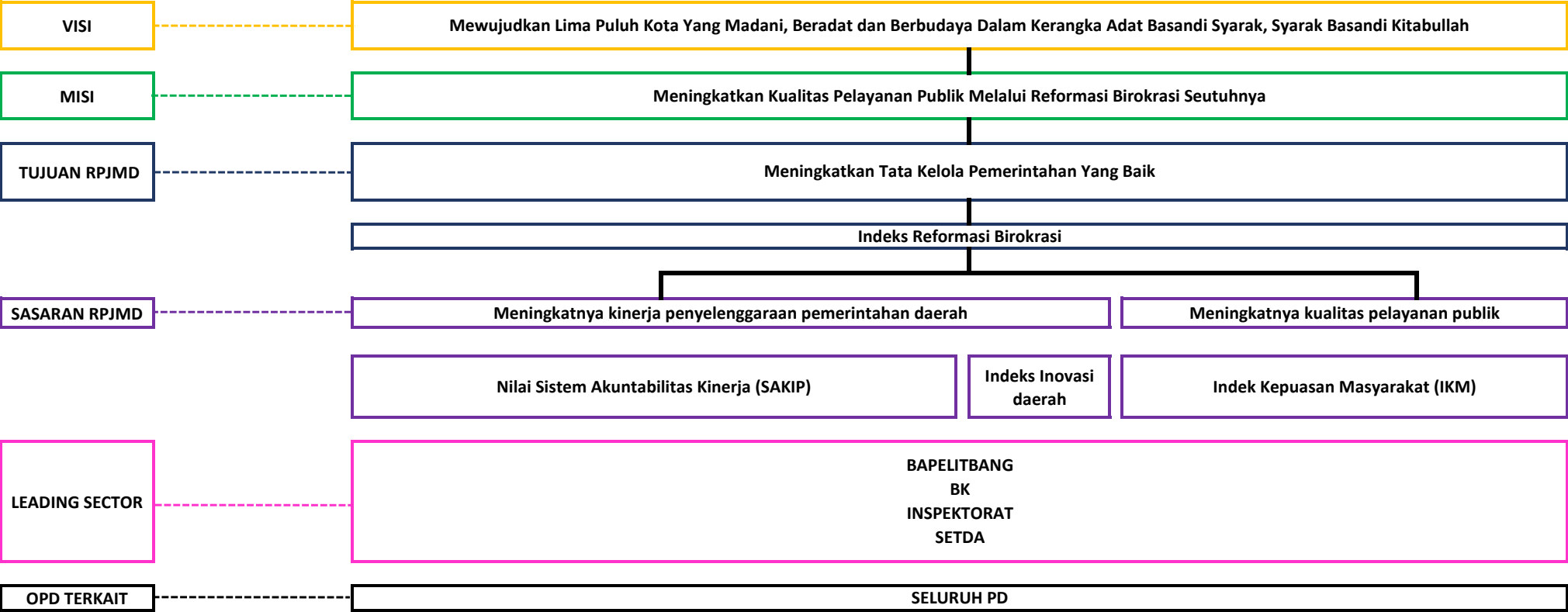
KERANGKA LOGIS MISI 2 RPJMD KAB. LIMA PULUH KOTA



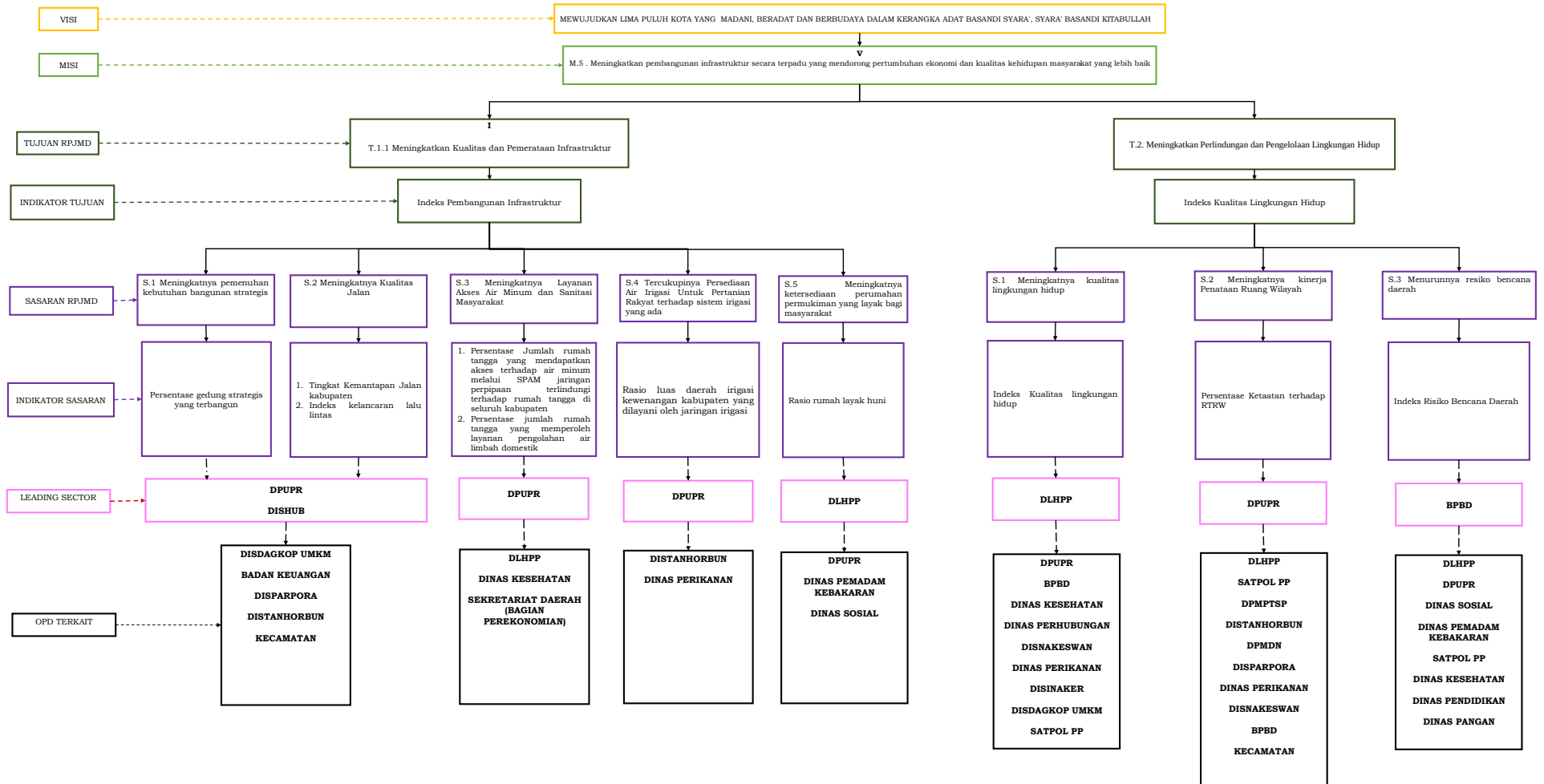
KERANGKA LOGIS MISI 3



KERANGKA LOGIS MISI 4



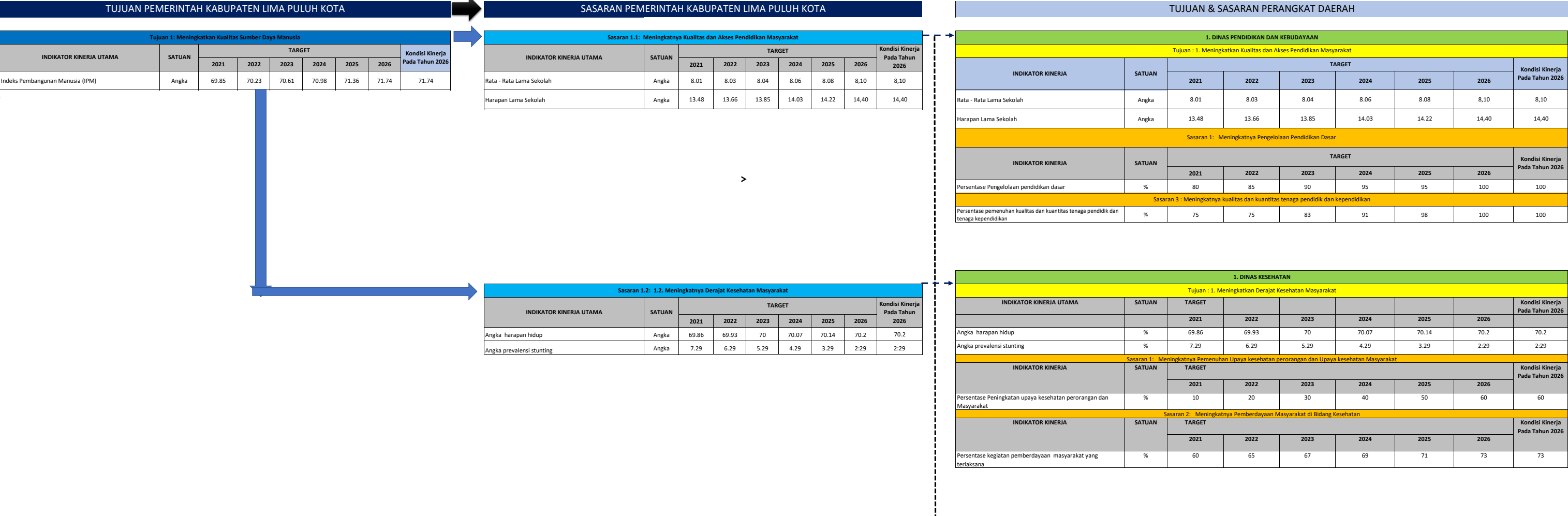
KERANGKA LOGIS MISI V



Cascading Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

Visi : "Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

MISI I : "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan"



Tujuan 2: Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks ABS-SBK	indeks	NA	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3

Sasaran 1.1: Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks ABS SBK	Indeks	NA	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3

1. SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)								
Tujuan : 2. Mengoptimalkan pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks ABS SBK	Indeks	NA	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase terlaksananya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100

2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
Tujuan : 2. Mengoptimalkan pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks ABS SBK	Indeks	NA	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan	%	56	62	67	73	79	86	86
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Dasar								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pengelolaan pendidikan dasar	%	80	85	90	95	95	100	100

3. DPMD/N								
Tujuan : 2. mengoptimalkan pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks ABS SBK	Indeks	NA	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat	%	50	55	60	65	70	75	75

Visi : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"

MISI II : "MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DITINGKAT LOKAL DAN REGIONAL"

TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PERTUMBUHAN EKONOMI		2.39	2.99	4.28	4.62	4.72	4.86	4.86
PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)		29.67	30.49	31.32	32.14	32.97	33.80	33.80
PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)		42.36	44.19	46.02	47.85	49.68	51.51	51.51

SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sasaran 1.1: "MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN KE KABUPATEN LIMA PULUH KOTA"								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan	%	33.74	40.49	47.24	53.98	60.73	67.48	67.48

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA								
Tujuan : 1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Lima Puluh Kota								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan	%	33.74	40.49	47.24	53.98	60.73	67.48	67.48
Sasaran 1 : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	%	10	15	20	25	30	35	35
Sasaran 2 : Peningkatan Pemasaran Pariwisata								
Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	%	10	12	15	17	20	25	25
Sasaran 3 : Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								
Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	%	29.73	33.78	37.83	43.34	45.95	50.00	50.00

Sasaran 1.2: "MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN"								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	27.64	28.47	29.31	30.14	30.97	31.80	31.80
Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	3.67	3.72	3.78	3.83	3.89	3.94	3.94

1. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN								
Tujuan : 1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Pertanian								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	27.64	28.47	29.31	30.14	30.97	31.80	31.80
Sasaran 1 : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan sarana pertanian yang berkualitas	%	48	50	55	60	62	65	65
Sasaran 2 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
Persentase penyediaan prasarana pertanian yang berkualitas	%	68	70	72	75	78	80	80
Sasaran 3 : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang berkualitas	%	80	80	80	82	85	90	90
Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian								
Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	3	4	6	8	10	12	12
Persentase peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan	%	2	4	6	8	10	12	12

2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								
Tujuan : 1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Pertanian (Sektor Peternakan)								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	27.64	28.47	29.31	30.14	30.97	31.80	31.80
Sasaran 1 : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan sarana peternakan yang berkualitas	%	2	4	6	8	10	12	12
Sasaran 2 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
Persentase penyediaan prasarana peternakan yang berkualitas	%	2	4	6	8	10	12	12
Sasaran 3 : Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang berkualitas	%	2	4	6	8	10	12	12

3. DINAS PERIKANAN								
Tujuan : 1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	3.67	3.72	3.78	3.83	3.89	3.94	3.94
Sasaran 1: Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%	5	5	5	5	5	5	25
Sasaran 2 : Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya								
Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	%	6	6	6	6	6	6	30
Sasaran 3 : Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/ tahun	38	40	41	42	43	44	44

Sasaran 1.3: "MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH"								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	%	6.49	6.62	6.75	6.88	7.01	7.14	7.14

1. DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
Tujuan : 1. Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	%	6.49	6.62	6.75	6.88	7.01	7.14	7.14
Sasaran 1: Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	%	3.65	5.50	7.42	10.02	13.32	16.68	16.68
Sasaran 2: Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	26.61	36.18	52.14	68.09	84.05	100.00	100.00

2. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
Tujuan : 1. Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	%	6.49	6.62	6.75	6.88	7.01	7.14	7.14
Sasaran 1: Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	%	5	15	20	25	30	35	35
Sasaran 2: Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah (UMKM)								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	%	5	15	20	25	30	35	35

Sasaran 1.4: "MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH"								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	7.78	8.53	8.53	9.67	10.35	11.04	11.04

1. BADAN KEUANGAN								
Tujuan : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	7.78	8.53	8.53	9.67	10.35	11.04	11.04
Sasaran 1: Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	6.5	8.53	8.53	9.67	10.35	11.04	11.04

Cascading Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

Visi : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"

MISI 3 : "Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah"



Tujuan 1 : Mendorong Potensi Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungn								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Desa membangun	Indeks	0.7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149	0.8149

Sasaran 3.1: Meningkatnya status nagari								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Desa membangun	Indeks	0.7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149	0.8149

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / NAGARI								
Tujuan 1 : Meningkatkan Status Nagari								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks desa membangun	Indeks	0.7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149	0.8149
Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari								
Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100

Cascading Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

Visi : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"

MISI 4 : "Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya"

TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan 1 : "1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik"								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Indeks	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)	75,00 (B)

SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sasaran 4.1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Nilai	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
Indeks inovasi daerah	Indeks	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1700.00
IKM	Indeks	85.98	87.98	89.93	91.97	93.96	95.96	95.96

Sasaran 4.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	85.98	87.98	89.97	91.97	93.96	95.96	95.96

1. INSPEKTORAT								
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Nilai	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
Indeks inovasi daerah	Indeks	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1700.00
IKM	Indeks	85.98	87.98	89.93	91.97	93.96	95.96	95.96
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan								
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB	Nilai	81	82	83	84	85	86	86

2. BAPELITBANG								
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Nilai	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
Indeks inovasi daerah	Indeks	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1700.00
IKM	Indeks	85.98	87.98	89.93	91.97	93.96	95.96	95.96
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan								
Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	70	73	75	78	80	85	85
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah								
Jumlah Inovasi Daerah	Inovasi	55	65	75	85	95	105	105

3. BADAN KEUANGAN								
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Nilai	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
Indeks inovasi daerah	Indeks	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1700.00
IKM	Indeks	85.98	87.98	89.93	91.97	93.96	95.96	95.96
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah								
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks	90	91	92	93	94	95	95

4. SEKRETARIAT DAERAH								
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Nilai	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
Indeks inovasi daerah	Indeks	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1700.00
IKM	Indeks	85.98	87.98	89.93	91.97	93.96	95.96	95.96
Sasaran 1: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kinerja dan Pelayanan PD								
Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100

CASCADING PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH

MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK

TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	73.9	75,88	77.78	79,75	81,78	83,82	83,82

Sasaran 1.1: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase gedung strategis yang terbangun	%	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83	97,83

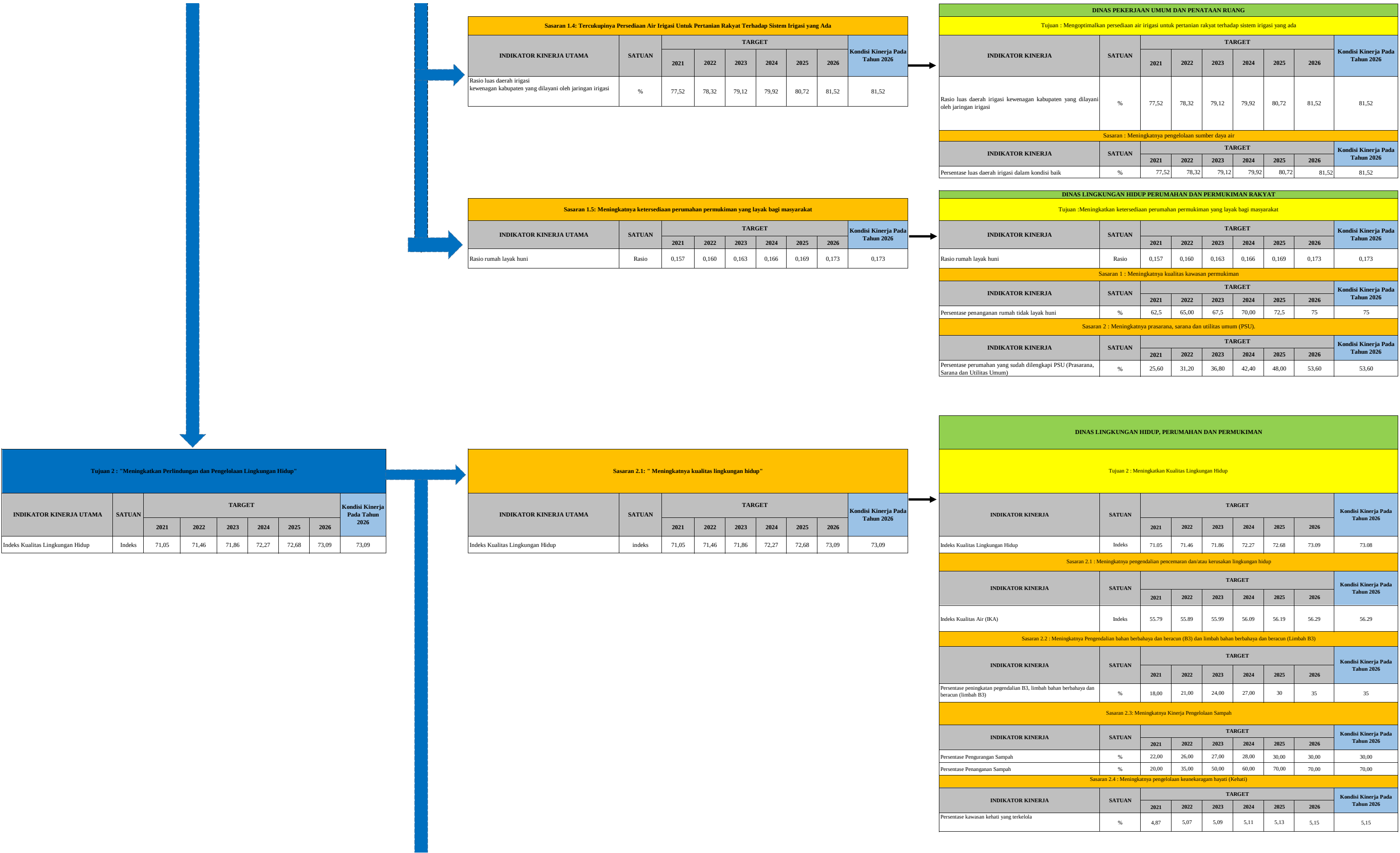
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis								
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas jalan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase gedung strategis yang terbangun	%	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83	97,83
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	-	30	25	25	20	-	100
Sasaran 2 : Meningkatnya penataan bangunan gedung pemerintah								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Bangunan Gedung yang layak	%	68	71	75	77	80	85	85
Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan kabupaten								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78

Sasaran 1.2: Meningkatnya Kualitas Jalan								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50

DINAS PERHUBUNGAN								
Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis								
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas jalan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase gedung strategis yang terbangun	%	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83	97,83
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks kelancaran lalu lintas	%	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50

Sasaran 1.3: Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat								
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Tujuan : Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85
Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	%	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	%	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85







**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERKANTORAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
Jln. Drs. Aziz Haily, MA - Sarilamak
Kode Pos 26271